

**TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)**

**PENGARUH KEBUDAYAAN SUKU MARIND
TERHADAP PEMBENTUKAN RUANG PUBLIK
DI KOTA MERAUKE**



Disusun Oleh :

**SAMUEL
NIM 97.24.064**

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2006**

WALLA WALLA
(25-1110)

WALLA WALLA WALLA WALLA WALLA WALLA
WALLA WALLA WALLA WALLA WALLA WALLA
WALLA WALLA WALLA WALLA WALLA WALLA

WALLA WALLA

WALLA WALLA
WALLA WALLA WALLA

WALLA WALLA WALLA WALLA WALLA WALLA
WALLA WALLA WALLA WALLA WALLA WALLA
WALLA WALLA WALLA WALLA WALLA WALLA
WALLA WALLA WALLA WALLA WALLA WALLA
WALLA WALLA WALLA WALLA WALLA WALLA

LEMBAR PENGESAHAN

**TUGAS AKHIR
(SRIPSI)**

**PENGARUH KEBUDAYAAN SUKU MARIND
TERHADAP PEMBENTUKAN RUANG PUBLIK
DI KOTA MERAUKE**

Disusun Oleh :

Nama : SAMUEL

NIM. : 97.24.064

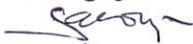
**Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jenjang Strata Satu (S1)**

Di

**Jurusan Teknik Planologi
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang**

**Dinyatakan Lulus Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelas Sarjana Teknik
Pada Hari :**

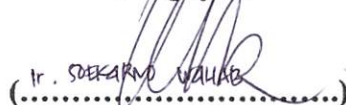
Penguji I



(Dr. Ir. IBNU SASONKE, MT.)
.....

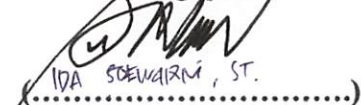
Anggota Penguji :

Penguji II



(Ir. SOEKARNO WAHAB)
.....

Penguji III



(IDA SOEWANDANI, ST.)
.....

Pembimbing I



(Ir. Hutomo Moestadjab)

Menyetujui,

Pembimbing II



(Endratno B. Santosa, ST)

Mengetahui,

**Dekan
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang**



(Ir. Agustina N. Hidayati, MTP)

**Ketua Jurusan
Teknik Planologi
FTSP-ITN Malang**



(Ir. Agung Witjaksono, MTP)

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)

PENGARAH KEBUDAYAAN SIKU MARINDI
TERHADAP PEMBENTUKAN RUANG PUBLIK
DI KOTA MERAUKE

Dissusun Oleh :
Nama : SAMUEL
NIM : 97.21.001

Dipersembahkan Dibawah Tim Penguji Ujian Skripsi
Jenjang Sarjana (S1)
Di
Jurusan Teknik Planologi
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang

Dinyatakan Lulus Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Pada Hari :

Anggota Penguji :

Penguji III

Penguji II

Penguji I

.....

.....

.....

Mengesahkan,

Pembimbing II

Pembimbing I

(Endang R. Santosa, ST)

(A. Hartono Mochamad)

Mengesahkan,

Ketua Jurusan
Teknik Planologi
FTSP-ITN Malang

Dekan
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang

(A. Agung Wiksono, MTP)

(A. Agusiana N. Hibayati, MTP)



Jurusan Teknik Planologi
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang

PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Dalam Sidang Tugas Akhir Tingkat Sarjana Jurusan Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota yang diadakan pada :

Hari :

Tanggal :

Perlu adanya perbaikan tugas akhir untuk :

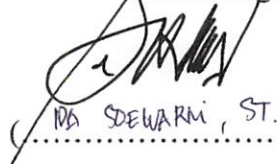
Nama : Samuel

Nim : 97.24.064

Perbaikan tersebut meliputi :

- * PERLU SUDAH FRIG DARI AKTIVITAS YANG ADA PADA PROSY. HARUS DITAMBAHKAN
- * "UNIQUE" DARI PRASYARAT BELUM ADA
- * ANALISA INTERAKSI SOSIAL "MANA"
- * BERTUKAR PERUMAHAN

Dosen Penguji


(Dra DEWARNI, ST.)

**PENGARUH KEBUDAYAAN SUKU MARIND TERHADAP
PEMBENTUKAN RUANG PUBLIK DI KOTA MERAUKE**

**THE INFLUENCE OF MARIND'S CULTURE
TO PUBLIC SPACE SHAPING AT MERAUKE**

Daerah Papua adalah suatu daerah unik yang berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia. Perbedaan ini lebih banyak didasari karena perbedaan rumpun di mana suku-suku di Papua tidak berasal dari rumpun Melayu-Mongoloid seperti mayoritas penduduk Indonesia tetapi berasal dari rumpun Melanesoid. Kekhasan dalam budaya ini juga mempengaruhi pola pembentukan ruang yang ada di Papua.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi pengaruh dari kebudayaan suku Marind terhadap pembentukan ruang publik di kota Merauke. Aspek-aspek yang dikaji adalah berdasarkan pada unsur-unsur budaya lokal yang secara langsung memiliki pengaruh kepada pola pembentukan ruang publik. Terutama sekali unsur-unsur budaya yang khas dan tidak ditemukan di daerah-daerah lain.

Hasil-hasil temuan yang didapatkan diharapkan dapat memperkaya wawasan dan membuka paradigma yang baru tentang suku-suku di Papua yang selama belum banyak terekspos dan diteliti lebih lanjut.

Penelitian yang dilakukan memperoleh antara lain temuan bahwa agama tradisional *Mayo* memegang peranan sentral dalam tatanan kehidupan suku Marind. dalam *Mayo* diajarkan falsafah untuk hidup dengan alam dan menyatu dengannya. Konsep-konsep dalam beberapa agama di dunia, ternyata telah dikenal oleh suku Marind melalui *Mayo* semenjak jaman prasejarah. Hal ini yang menjadikan penelitian akan suku-suku dari rumpun Melanesoid di Papua sangat menarik.

Kata kunci: pengaruh kebudayaan, pola pembentukan ruang publik,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANG TARUNA
KABUPATEN KARANG TARUNA

THE INFLUENCE OF KARANG TARUNA
TO PUBLIC SPACE SHAPING AT KARANG TARUNA

Di Karang Taruna adalah suatu daerah unik yang berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia. Perbedaan ini lebih banyak disebabkan karena perbedaan lingkungan di mana suku-suku di Karang Taruna berasal dari berbagai etnis seperti masyarakat berbagai Indonesia tetapi berasal dari berbagai etnis. Kelas-kelas dalam budaya ini juga mempengaruhi pola pembentukan ruang yang ada di Karang Taruna. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengidentifikasi pengaruh dari kebudayaan suku Karang Taruna terhadap pembentukan ruang publik di Karang Taruna. Aspek-aspek yang dikaji adalah berdasarkan pada unsur-unsur budaya lokal yang secara langsung memiliki pengaruh pada pembentukan ruang publik. Terutama sekali unsur-unsur budaya yang khas dan tidak ditemukan di daerah-daerah lain.

Hasil-hasil teoritis yang didapatkan diharapkan dapat memperkaya wawasan dan membuka paradigma yang baru tentang suku-suku di Karang Taruna yang selama ini banyak terabaikan dan diabaikan.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Karang Taruna sebagai objek penelitian akan diteliti akan suku-suku dari berbagai etnis yang ada di Karang Taruna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Karang Taruna sebagai objek penelitian akan diteliti akan suku-suku dari berbagai etnis yang ada di Karang Taruna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi partisipatif.

Kata kunci: pengaruh kebudayaan, pola pembentukan ruang publik.

THE INFLUENCE OF MARIND'S CULTURE TO PUBLIC SPACE SHAPING AT MERAUKE

ABSTRACT

Papua is a unique region among other regions in Indonesia. The most difference between Papua and other regions is from their root. Not like another tribes in Indonesia which come from the Malay-Mongoloid race, Papuan tribes are rooted from the Melanesoid race. This peculiar culture also affects the spatial pattern in Papua.

This Research's aim are to collect and to identify the influence of Marind's culture to public space shape in Merauke. The aspects that will be studied in this research is based on local cultural elements which directly have influence to the public space shape.

The result from this research hopefully can enrich our concept and open new paradigm about the tribes in Papua, that we might not see yet.

A finding from research is that *Mayo*, Marind's ancient religion, play an important role in Marind's living. *Mayo* taught about the living with nature and to become one with nature.

Another finding from *Mayo* is that some concepts and story in a few religion in the world have been heard by the Marind long ago, before they went into civilized age. Those unique and many others, are the things that make the research in Papua tribes more interesting and attractive.

Key words: culture effect, public space shape

THE INFLUENCE OF MARIND'S CULTURE TO PUBLIC SPACE SHAPING AT METARUKI

ABSTRACT

Papua is a unique region among other regions in Indonesia. The most difference between Papua and other regions is from their root. Not like another tribes in Indonesia which come from the Malay-Mongoloid race, Papuan tribes are rooted from the Melanesoid race. This peculiar culture also affects the spatial pattern in Papua.

This Research's aim are to collect and to identify the influence of Marind's culture to public space shape in Metaruki. The aspects that will be studied in this research is based on local cultural elements which directly have influence to the public space shape.

The result from this research hopefully can enrich our concept and open new paradigm about the tribes in Papua that we might not see yet. A finding from research is that Marind's ancient religion play an important role in Marind's living. Myto taught about the living with nature and to become one with nature.

Another finding from Myto is that some concepts and story in a few religion in the world have been heard by the Marind long ago, before they went into civilized age. Those unique and many others are the things that make the research in Papua tribes more interesting and attractive.

Key words: culture effect, public space shape

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan tugas Akhir dengan judul **“PENGARUH KEBUDAYAAN SUKU MARIND TERHADAP PEMBENTUKAN RUANG PUBLIK DI KOTA MERAUKE”** Dalam melakukan penelitian ini penulis banyak mendapat pengalaman yaitu besarnya pengaruh kebudayaan terhadap pola ruang yang terjadi di wilayah studi meskipun pola ruang yang terbentuk sangat sederhana namun budaya Marind sudah menunjukkan eksistensinya terhadap pembentukan pola ruang publik tersebut. Pengalaman ini merupakan sangat berarti dalam diri penulis karena apa yang di peroleh di bangku kuliah sudah mulai di aplikasikan pada tataran dunia nyata

Harapan besar dalam benak penulis adalah bahwa semua pihak yang terlibat dalam perencanaan kota dan wilayah agar kembali mempertimbangkan aspek-aspek budaya lokal dalam gerak langkah setiap perencanaan kota maupun pembangunan di kota-kota ini Indonesia, dalam konteks wilayah studi penulis berharap agar pemerintah daerah atau pusat mulai melibatkan masyarakat lokal/adat dalam setiap perencanaan pemabangunan karena masyarakatlah yang menjadi obyek dan subyek perencanaan tersebut. Dengan melihat kondisi dilapangan penulis diharapkan melalui penulisan ini dapat memberikan manfaat maupun masukan untuk perencanaan yang akan datang atapun solusi pemecahan masalah-masalah perencanaan kota yang ada kota Merauke.

Dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Bpk. Prof. Dr. Ir. Abraham Lomi, MSEE, selaku Rektor Institut Teknologi Nasional Malang, Ibu Hj. Ir. Agustina Nurul Hidayati, MTP selaku dekan Fakultas Sipil dan Perencanaan, Bpk. Ir. Agung witjaksono, MTP selaku Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota ITN Malang, Ibu Ida Soewarni, ST selaku Sekretaris Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota ITN

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menjadikan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas Akhir dengan judul "PENGARUH KEBUDAYAAN SUKSES MARKING TERHADAP PERBENTUKAN RUANG SUBURK DI KOTA MERAKKE". Dalam melakukan penelitian ini penulis banyak mendapat pengalaman yaitu besarnya pengaruh kebudayaan terhadap pola ruang yang terjadi di wilayah studi meskipun pola ruang yang terbentuk sangat sederhana namun budaya Marking sudah menunjukkan eksistensinya terhadap pembentukan pola ruang publik tersebut. Pengalaman ini merupakan sangat berarti dalam diri penulis karena apa yang di peroleh di bangkit kuliah sudah mulai di aplikasikan pada tataran dunia nyata.

Harapan besar dalam bentuk penulis adalah bahwa semua pihak yang terlibat dalam perencanaan kota dan wilayah agar kembali memperhatikan aspek-aspek budaya lokal dalam gerak langkah setiap perencanaan kota maupun pembangunan di kota-kota ini Indonesia. dalam konteks wilayah studi penulis berharap agar pemerintah daerah atau pusat mulai melibatkan masyarakat lokal/dasar dalam setiap perencanaan pembangunan karena masyarakat yang menjadi objek dan subjek perencanaan tersebut. Dengan melihat kondisi lapangan penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat maupun masukan untuk perencanaan yang akan datang maupun solusi perencanaan masalah-masalah perencanaan kota yang ada kota Merakke.

Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Bpk. Prof. Dr. Ir. Adharam Imani, MSEE, selaku Rektor Institut Teknologi Nasional Malang, Ibu Hj. Ir. Agustina Nurd Hibiyanti, MTP, selaku Dekan Fakultas Sipil dan Perencanaan, Bpk. Ir. Agung Wipaksono, MTP, selaku Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota ITN Malang, Ibu Ida Soewarni, ST, selaku Sekretaris Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota ITN

Malang, Bpk Ir. Hutomo Moestadjab selaku dosen pembimbing I dan Bpk Endratno Budi Santosa,ST selaku dosen pembimbing II yang sejak dari awal penulisan karya ilmiah ini telah banyak memberikan masukan, kemudahan dan diskusi yang panjang. Juga tak lupa penulis ucapkan limpah terima kasih khusus bagi Pastor Yus Mewengkang dan Bpk. Yulianus Bole Gebze atas wawancaranya yang mendalam serta teman-teman sekalian atas kritik, dan sarannya. Dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam melakukan penulisan ini, penulis menyadari masih memiliki banyak kekurangan baik dalam susbtansi penelitian ini maupun kelengkapan literatur, teori dan hal-hal lain yang berkaitan dengan studi ini. Namun dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap agar karya ilmiah ini sedikit berguna untuk menambah referensi budaya bagi dunia ke-planologi-an maupun rekan-rekan mahasiswa yang tertarik memperkaya pengetahuan tentang kebudayaan di Indonesia. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian sangat kami harapkan guna penyempurnaan laporan ini. Akhir kata semoga skripsi ini berguna bagi semua pembaca.

Malang, September 2006

Penyusun

Malang. Bpk. I. Hutomo Moestabab selaku dosen pembimbing I dan Bpk. Endarto Budi Santosa, ST selaku dosen pembimbing II yang sejak dari awal penulisan karya ilmiah ini telah banyak memberikan masukan, kemudahan dan diskusi yang panjang. Juga tak lupa penulis ucapkan terima kasih khusus bagi Pastor Yus Mewengkang dan Bpk. Yulianus Holo Gede atas wawancaranya yang mendalam serta teman-teman sekalian atas kritik dan sarannya. Dan tentunya pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam melakukan penulisan ini, penulis menyadari masih memiliki banyak kekurangan baik dalam substansi penelitian ini maupun kelengkapan literatur, teori dan hal-hal lain yang berkaitan dengan studi ini. Namun dengan bentuk kerendahan hati, penulis berharap agar karya ilmiah ini sedikit berguna untuk menambah referensi bacaan bagi dunia ke-planetologi-an maupun rekan-rekan mahasiswa yang tertarik memperkaya pengetahuannya tentang kebudayaan di Indonesia. Oleh karena itu sama dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian sangat kami harapkan guna penyelesaian laporan ini. Akhir kata semoga skripsi ini berguna bagi semua pembaca.

Malang, September 2008

Penyusun

DAFTAR ISI

Lembar pengesahan.....	i
Abstraksi	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan dan Sasaran	12
1.3.1. Tujuan	12
1.3.2. Sasaran	12
1.4. Lingkup Studi.....	12
1.4.1. Lingkup Lokasi	12
1.4.2. Lingkup Materi.....	15
1.5. Tinjauan Pustaka	16
1.5.1. Pengertian Pengaruh.....	16
1.5.2. Kebudayaan.....	17
1.5.3. Arti Kebudayaan	18
1.5.4. Unsur-Unsur Kebudayaan.....	19
1.5.5. Wujud Kebudayaan.....	22
1.5.6. Fungsi Kebudayaan.....	23
1.5.7. Adat Istiadat dan Kebiasaan.....	24
1.5.8. Interaksi.....	24
1.5.9. Masyarakat dan Kelompok Etnik.....	26
1.5.10. Ruang Umum	29
1.5.11. Ruang Publik (<i>Public Space</i>)	30
1.5.12. Fungsi Ruang Publik.....	31
1.5.13. Tipologi Ruang Publik.....	33
1.5.14. Kriteria Ruang Publik	41
1.6. Landasan Teori.....	42
1.6.1. Teori Kebudayaan	42
1.6.2. Interaksi Sosial	42
1.6.3. Ruang	44
1.6.4. Ruang Publik.....	45
1.6.5. Teori Pola Pemanfaatan Ruang.....	45
1.6.6. Konsepsi Mengenai Ruang	46
1.7. Variabel Penelitian	47
1.7.1. Seleksi Variabel Penelitian	47
1.7.2. Variabel Penelitian Terpilih.....	52
1.8. Metode Penelitian.....	54
1.8.1. Tahap Persiapan	54
1.8.2. Metode Pengumpulan Data.....	55
1.8.2.1. Survey Primer	55

1.8.2.2. Survey Sekunder	56
1.8.3. Metode Analisa	57
1.8.3.1. Metode Analisa Kualitatif.....	57
1.9. Sistematika Pembahasan	60

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

2.1. Gambaran Umum Provinsi Papua.....	61
2.2. Sejarah Pulau Papua.....	63
2.3. Suku Bangsa di Papua.....	65
2.4. Fase Perkembangan Pemerintahan Di Papua.....	68
2.5. Karakter Wilayah Studi Dalam Perspektif Masa Kini	75
2.5.1. Gambaran Umum Kota Merauke	75
2.5.2. Kondisi Alam Kota Merauke	75
2.5.3. Sejarah Terbentuknya Kota Merauke.....	77
2.5.4. Asal Mula Nama “Merauke”.....	79
2.5.5. Karakteristik Suku Marind.....	80
2.5.5.1. Terminologi <i>Marind-Anim</i>	80
2.5.5.2. Sejarah Suku Marind.....	85
2.5.6. Komposisi Penduduk	88
2.6. Pola Pemanfaatan Ruang.....	89
2.6.1. Model Perkampungan Marind Tradisional	89
2.6.2. Fasilitas Peribadatan.....	91
2.6.3. Fasilitas Kesehatan.....	91
2.6.4. Fasilitas Pendidikan	92
2.6.5. Fasilitas Perdagangan dan Jasa	93
2.6.6. Fasilitas Perkantoran	93
2.7. Nilai-Nilai Kebudayaan Suku Marind	94
2.7.1. Sistem Religi	94
2.7.2. Sistem Kekerabatan.....	97
2.7.3. Sistem Mata Pencaharian	100
2.8. Hukum Adat Istiadat Suku Marind	101
2.8.1. Hukum Tentang Anak	101
2.8.1.1. Standar Kedewasaan	101
A. Falsafah Tentang Kedewasaan.....	101
B. Tanda-Tanda Kedewasaan	102
2.8.1.2. Status Anak	104
A. Anak Kandung	104
B. Anak Angkat	105
C. Alimentasi	106
D. <i>Kisih Onangga</i>	107
2.8.2. Hukum Perkawinan.....	107
2.8.2.1. Falsafah Dalam Perkawinan.....	107
2.8.2.2. Sistem <i>Eksogami</i>	108
2.8.2.3. Perkawinan Adat	109
2.8.2.4. Tradisi-Tradisi Yang Telah Ditinggalkan	109
2.8.2.5. Upacara-Upacara Yang Berhubungan Dengan Perkawinan	110

	A. Inisiasi (Upacara Kedewasaan).....	110
	B. Peresmian Minum <i>Wati</i>	111
	C. Pemberian Tanda <i>Akahev</i>	112
	D. Sulam <i>Man-Ahi</i>	112
	E. <i>Lanik Anggai</i>	113
2.8.2.6.	Perceraian dan Akibat Perceraian.....	114
2.8.3.	Hukum Tentang Warisan.....	115
2.8.3.1.	Golongan Ahli Waris.....	115
2.8.3.2.	Kehilangan Hak Mewaris.....	116
2.8.3.3.	Penggantian Kedudukan Ahli Waris.....	116
2.8.4.	Jual-Beli.....	116
2.8.4.3.	Bentuk Perdagangan Tradisional.....	116
2.8.4.4.	Perilaku Dalam Jual-Beli.....	117
2.8.5.	Hukum Mengenai <i>Makan</i> (Tanah).....	119
2.8.5.1.	Tanah Dalam Filosofi Suku Marind.....	119
2.8.5.2.	Hak-Hak Atas Tanah Adat.....	122
2.8.5.3.	Jual-Beli Tanah.....	123
2.8.5.4.	<i>Kakih-Anem</i>	126

BAB III ANALISA PENGARUH KEBUDAYAAN SUKU MARIND TERHADAP PEMBENTUKAN RUANG PUBLIK DI KOTA MERAUKE

3.1.	Profil Sampel Penelitian.....	131
3.1.1.	Unsur-unsur Kebudayaan Suku Marind Di Kampung Onggaya.....	135
3.1.2.	Pola Perilaku Suku Marind Terhadap Pemakaian Ruang Di Kampung Onggaya.....	143
3.1.3.	Ruang-Ruang Publik Yang Secara Umum Terbentuk Di Kampung Onggaya.....	147
3.1.4.	Ruang-Ruang Publik Yang Terbentuk Secara Kultural Di Kampung Onggaya.....	147
3.2.	Analisa Keterkaitan Antara Budaya Suku Marind Dengan Penggunaan Ruang Publik Di Kampung Onggaya.....	148
3.2.1.	Analisa Pengaruh Sistem Religi Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Di Kampung Onggaya.....	148
1.1.1.1.	Analisa Pembentukan Ruang Publik Skala Mikro.....	149
1.1.1.2.	Analisa Pembentukan Ruang Publik Skala Mezo.....	152
1.1.1.3.	Analisa Pembentukan Ruang Publik Skala Makro.....	154
3.2.2.	Analisa Pengaruh Sistem Keekerabatan Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Di Kampung Onggaya.....	157
1.1.1.1.	Analisa Pembentukan Ruang Publik Skala Mikro.....	157
1.1.1.2.	Analisa Pembentukan Ruang Publik Skala Mezo.....	159
1.1.1.3.	Analisa Pembentukan Ruang Publik Skala Makro.....	160
3.2.3.	Analisa Pengaruh Sistem Mata Pencaharian Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Di Kampung Onggaya.....	162
3.2.4.	Analisa Pengaruh Adat Istiadat Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Di Kampung Onggaya.....	163
1.1.1.1.	Analisa Pembentukan Ruang Publik Skala Mikro.....	163

	2.1.3.0. Analisa Pembentukan Ruang Publik Skala Mezo.....	165
	2.1.3.0. Analisa Pembentukan Ruang Publik Skala Makro	167
3.0.	Analisa Pengaruh Kebudayaan Suku Marind Terhadap Interaksi Sosial Penduduk Di Kampung Onggaya.....	170
	3.3.0. Wujud Kerja Sama	170
	3.3.0. Konflik-Konflik Sosial Yang Timbul	173

BAB IV PENUTUP

4.1.	Kesimpulan	176
	4.1.6. Pengaruh Kebudayaan Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Pada Kampung Onggaya.....	176
	4.1.7. Pengaruh Unsur-Unsur Kebudayaan Suku Marind Terhadap Proses Interaksi Sosial Budaya Di Kampung Onggaya.....	178
4.2.	Rekomendasi	178
	4.2.4. Saran/Masukan Dalam Bentuk Tindakan.....	178
	4.2.5. Saran Dalam Bentuk Studi Lanjutan.....	179

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.7.1a. Proses seleksi unsur-unsur Kebudayaan	48
Tabel 1.7.1b. Unsur-unsur kebudayaan yang terpilih	52
Tabel 1.7.2. Variabel penelitian	53
Tabel 2.5.6a. Tabel jumlah penduduk kota Merauke tahun 2003	88
Tabel 2.5.6b. Tabel jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tahun 2003	88
Tabel 2.6.2. Tabel jumlah fasilitas peribadatan di kota Merauke tahun 2004	91
Tabel 2.6.3. Tabel jumlah fasilitas kesehatan di kota Merauke tahun 2004	92
Tabel 2.6.4. Tabel jumlah fasilitas pendidikan di kota Merauke tahun 2003	92
Tabel 2.6.5. Tabel jumlah fasilitas perdagangan dan jasa (unit) di kota Merauke tahun 2004.....	93
Tabel 2.8.1.1. Fase pertumbuhan manusia dan statusnya menurut jenis kelamin	103
Tabel 3.1. Profil Kampung Onggaya	134
Tabel 3.1.1. Jenis dan waktu kegiatan mata pencaharian suku Marind di kampung Onggaya	132
Tabel 3.2.1.1. Analisa pengaruh sistem religi suku Marind terhadap pembentukan ruang publik kampung dalam skala mikro	151
Tabel 3.2.1.2. Analisa pengaruh sistem religi suku Marind terhadap pembentukan ruang publik kampung dalam skala mezo	153
Tabel 3.2.1.3. Analisa pengaruh sistem religi suku Marind terhadap pembentukan ruang publik kampung dalam skala makro	155
Tabel 3.2.2.1. Analisa pengaruh sistem kekerabatan suku Marind terhadap pembentukan ruang publik kampung dalam skala mikro	158
Tabel 3.2.2.2. Analisa pengaruh sistem kekerabatan suku Marind terhadap pembentukan ruang publik kampung dalam skala mezo	159
Tabel 3.2.2.3. Analisa pengaruh sistem kekerabatan suku Marind terhadap pembentukan ruang publik kampung dalam skala makro	161
Tabel 3.2.4.1. Analisa pengaruh adat-istiadat suku Marind terhadap pembentukan ruang publik kampung dalam skala mikro	163
Tabel 3.2.4.2. Analisa pengaruh adat-istiadat suku Marind terhadap pembentukan ruang publik kampung dalam skala mezo	165
Tabel 3.2.4.3. Analisa pengaruh adat-istiadat suku Marind terhadap pembentukan ruang publik kampung dalam skala makro	167

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction 1

2. Methodology 2

3. Results and Discussion 3

4. Conclusion 4

5. References 5

6. Appendix 6

7. Glossary 7

8. Bibliography 8

9. Index 9

10. List of Figures 10

11. List of Tables 11

12. Summary 12

13. Acknowledgments 13

14. Declaration of Interest 14

15. Author's Contributions 15

16. Correspondence 16

17. Funding 17

18. Conflict of Interest 18

19. Ethics Approval 19

20. Data Availability 20

21. Consent to Publish 21

22. Copyright 22

23. Reprints and Permissions 23

24. Correspondence: [Name], [Address], [City], [Country].
Email: [Email Address].
Tel: [Phone Number].
Fax: [Fax Number].

DAFTAR PETA

Peta 1.4.1. Orientasi wilayah studi.....	14
Peta 2.1. Provinsi Papua.....	62
Peta 2.5.1. Kota Merauke.....	76
Peta 3.1a. Orientasi lokasi sampel penelitian.....	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1a. Laki-laki Marind dewasa	8
Gambar 1.1b. Persebaran suku-suku di kabupaten Merauke	9
Gambar 2.3a. Penduduk pesisir pantai	66
Gambar 2.3b. Penduduk pedalaman yang mendiami dataran rendah	66
Gambar 2.3c. Penduduk pegunungan yang mendiami lembah	67
Gambar 2.5.5.1. Keluarga Marind	82
Gambar 2.6.1a. Pemukiman tradisional Marind di dekat rawa-rawa.....	89
Gambar 2.6.1b. Pemukiman tradisional Marind di pesisir pantai.....	90
Gambar 2.7.2a. Budaya Marind didominasi maskulinitas	98
Gambar 2.7.2b. Struktur marga/ <i>boan</i> suku Marind	99
Gambar 2.8.1. Laki-laki Marind yang telah memasuki fase <i>ewati</i>	104
Gambar 2.8.2.5. Barang-barang antaran di <i>Lanik anggai</i>	113
Gambar 3.1. Denah lokasi sampel penelitian.....	133
Gambar 3.1.1a. Tarian totem babi hutan (<i>dema</i> marga Basik-basik).....	135
Gambar 3.1.1b. <i>Pakas-anem</i> ketika memimpin ritual adat.....	138
Gambar 3.1.1c. Bivak nelayan kampung Onggaya di pinggir laut Arafura.....	142
Gambar 3.1.1d. Bivak-bivak di pinggiran dusun sagu.....	142
Gambar 3.1.2a. Persiapan penutupan upacara inisiasi	145
Gambar 3.1.2b. Pembersihan lokasi penanaman <i>sasi</i>	146
Gambar 3.2. Keterkaitan antara budaya Marind dan ruang	148
Gambar 3.2.1.1. Konsep ruang publik skala mikro oleh sistem religi	152
Gambar 3.2.1.2. Konsep ruang publik skala mezo oleh sistem religi	154
Gambar 3.2.1.3. Konsep ruang publik skala makro oleh sistem religi	156
Gambar 3.2.2.1. Konsep ruang publik skala mikro oleh sistem kekerabatan	158
Gambar 3.2.2.2a. Kuahaman (<i>musyawarah</i> adat)	159
Gambar 3.2.2.2b. Konsep ruang publik skala mezo oleh sistem kekerabatan	160
Gambar 3.2.2.3. Konsep ruang publik skala makro oleh sistem kekerabatan	161
Gambar 3.2.3a. Konsep ruang publik skala mezo oleh sistem mata pencaharian	162
Gambar 3.2.3b. Konsep ruang publik skala makro oleh sistem mata pencaharian.....	163
Gambar 3.2.4.1. Konsep ruang publik skala mikro oleh adat istiadat	164
Gambar 3.2.4.2a. Kegiatan memasak makanan untuk upacara perkawinan.....	166
Gambar 3.2.4.2b. Konsep ruang publik skala mezo oleh adat istiadat	166
Gambar 3.2.4.3a. Pemuda Marind bersiap-siap mengikuti upacara kedewasaan	167
Gambar 3.2.4.3b. Konsep ruang publik skala makro oleh adat istiadat.....	169
Gambar 3.2.4.3c. Lokasi pesta adat penutupan upacara inisiasi.....	169

HAI TANAHKU PAPUA

do = g ^{1/2},

5 | 3 . 2 1 2 | 1 . 7 ' 6 | 4 . 3 2 1 | 2 . . .
Hai ta - nah ku Pa - poe - a, Kau ta - nah la - hir - ku,
2 | 5 . 4 3 . 2 | 6 5 1 2 | 3 5 2 . 3 | 1 . . ||
Ku ka - sih a - kan di - kau se - hing - ga a - djal - ku.

1. Hai tanahku Papoea,
Kau tanah lahirku,
Kukasih akan dikau sehingga adjalku.

2. Kukasih pasir putih
Dipantaimu senang
Dimana Lautan biru
Berkilat dalam trang.

3. Kukasih gunung-gunung
Besar mulialah
Dan awan jang melajang
Keliling puntjaknja.

4. Kukasih dikau tanah
Jang dengan buahmu
Membajar keradjinan
Dan pekerdjaanku.

5. Kukasih bunji ombak
Jang pukul pantaimu
Njanjian jang selalu
Senangkan hatiku.

6. Kukasih hutan-hutan
Selimut tanahku
Kusuka mengembara
Dibawah naungmu.

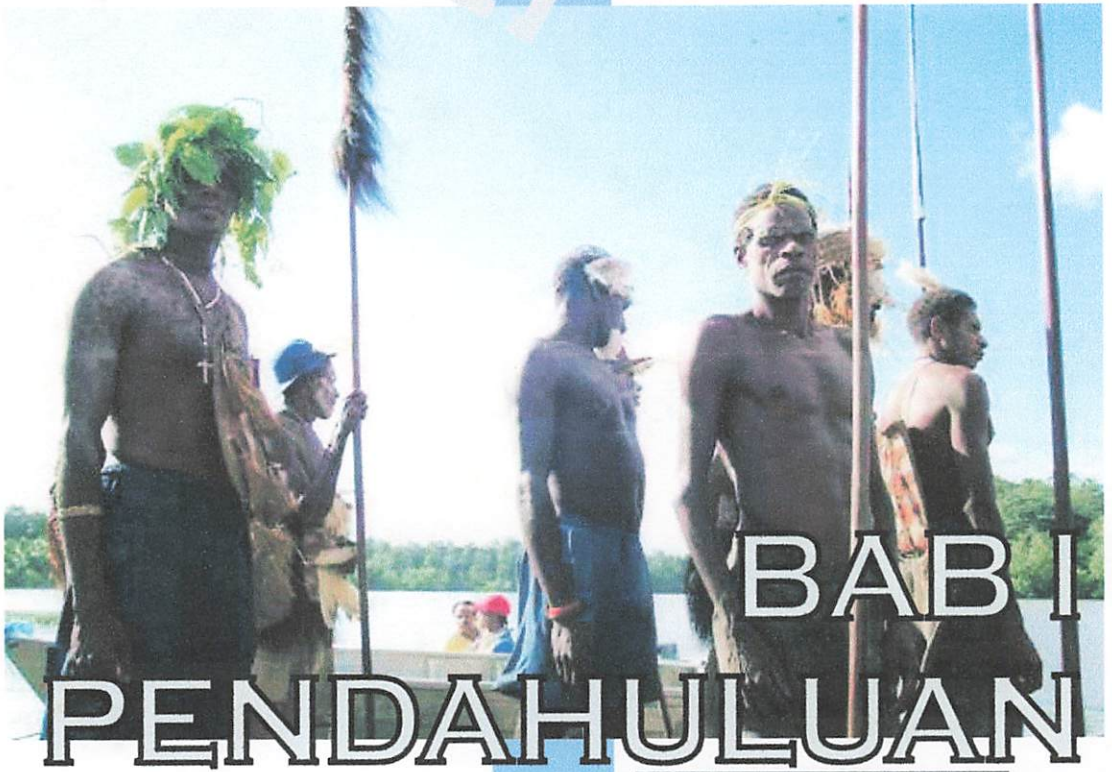
7. Sjukur bagimu, Tuhan,
Kau brikan tanahku
Bri aku radjin djuga
Sampaikan maksudMu.

(Dinjanjikan mula-mula di Hollandia tanggal 1 Desember 1961)

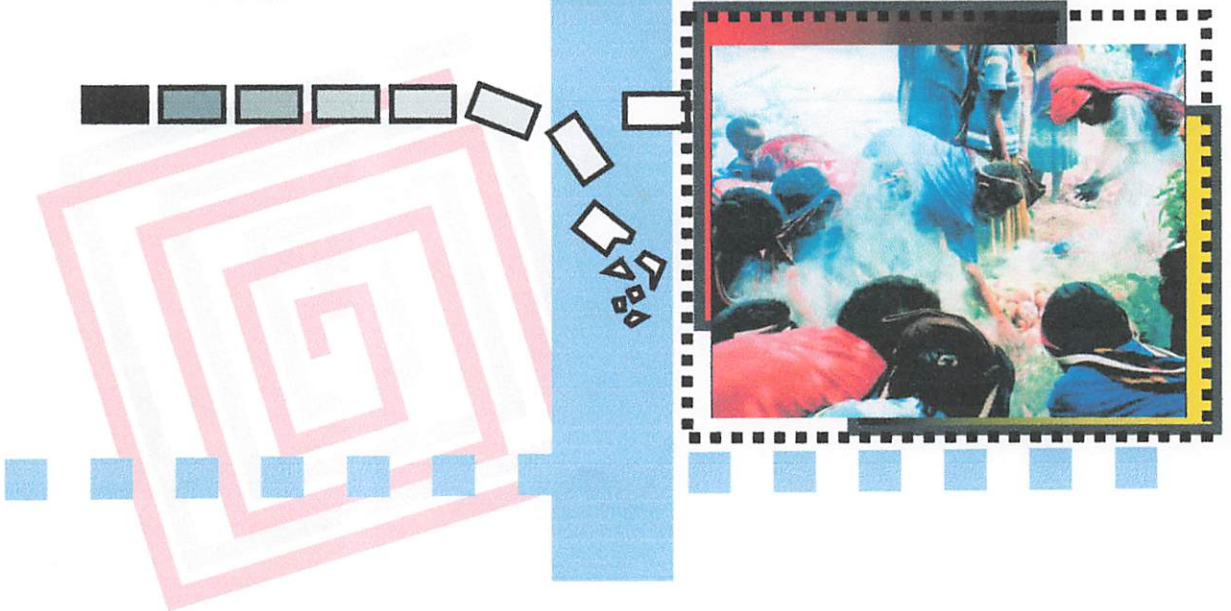
(Dedicated to all my brethren in Papua, both by blood and mostly by soul.....)

DAFTAR ISTILAH

Alawih	: Tuhan
Amamun mirav	: dunia orang hidup
Anem	: manusia (tunggal)
Anim	: manusia (jamak)
Anim-ha	: manusia sejati
Asabisb mirav	: dunia sementara
Boan	: marga
Dema	: roh leluhur
Dusun	: sumber daya
Egog	: pementasan kembali kisah penciptaan
Gaga	: doa
Gewol	: roh jahat
Haindun mirav	: dunia abadi
Heis-anem	: prosesi penyucian dengan cara pembaptisan
Heis mirav	: dunia roh
Igotad	: asrama untuk remaja
Kuahaman	: musyawarah adat
Kunam	: tahap akhir upacara kedewasaan
Kuy	: peperangan
Lanik anggai	: prosesi perkawinan adat
Makan	: tanah
Mirav	: kampung Marind
Mato hale	: budaya menganggap seseorang rendah derajatnya
Mayo	: agama tradisional Marind
Mean-sai	: ruang utama dalam balai adat
Misalaw	: kebiruan langit
Mitawal	: tahap kedua upacara kedewasaan
Nameg-ti	: falsafah tradisional yang berarti persaudaraan
Nawaya	: kekuatan tersembunyi yang ada di dalam tubuh manusia
Otiv	: rumah laki-laki
Pakas-anem	: pemimpin adat
Samb anim	: tahap awal upacara kedewasaan
Sa-ha	: rumah wanita dan anak-anak
Sasi	: tanda pemali/larangan
Sulam man-ahi	: acara peminangan
Totem	: lambang dema yang menaungi suatu marga
Unam	: alam semesta
Wi-anem	: jiwa, inti yang hidup dalam setiap benda mati maupun yang hidup
Yah-a-yah	: prinsip sama rata, sama rasa

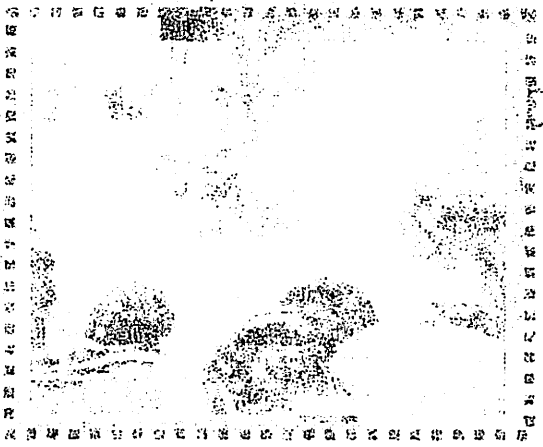


BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN



REVISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk biologis, demi kelangsungan hidupnya memerlukan pemenuhan kebutuhan jasmaniah seperti makan, minum, perlindungan terhadap iklim atau yang lebih dikenal dengan istilah kebutuhan akan pangan, sandang dan papan. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia sebagai individu, memerlukan adanya interaksi dengan individu lainnya. Interaksi sosial manusia dan sesamanya diatur serta dikembangkan oleh aturan-aturan, nilai-nilai/norma-norma tertentu. Aturan-aturan inilah yang menjaga dan mempertahankan kelestarian hidup manusia. Manusia yang hidup secara bermasyarakat baik secara bersamaan maupun berkelompok akan mengungkapkan berbagai aspek kehidupannya. Aspek-aspek ini terdiri dari interaksi sosial budaya, kebutuhan materi, sikap dan reaksi kejiwaan, penelitian terhadap ilmu pengetahuan dan sebagainya.

Interaksi sosial budaya, termasuk di dalamnya interaksi perilaku, terjadi secara alamiah terjadi pada setiap struktur masyarakat di seluruh dunia. Interaksi semacam inilah yang mempertemukan berbagai karakter, adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda satu sama lain, termasuk interaksi lintas suku/suku, yang pada akhirnya akan mempengaruhi dalam berperilaku terhadap lingkungan, baik dalam konteks sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Sebagai makhluk sosial kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan manusia lain tidaklah dapat diabaikan. Manusia membutuhkan manusia lain untuk lebih memanusiakan dirinya dimana nilai manusianya banyak ditentukan oleh manusia lain. Oleh karena itulah maka interaksi merupakan kunci dari semua kehidupan sosial.

Perkembangan suatu kota tak lepas dari adanya interaksi antar masyarakat. Bentuk interaksi antar masyarakat sesederhana apapun juga turut memicu adanya pembentukan suatu pola sederhana pemukiman yang kemudian akan semakin

berkembang sehingga akhirnya dapat menjadi bentuk kompleks dari kota seperti sekarang ini. Laju perkembangan suatu komunitas dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas dari penduduk pendukungnya dan aktivitas yang mereka lakukan, dalam hal ini juga berarti intensitas interaksi yang dilakukan.

Hasil interaksi dapat mengakibatkan timbulnya akomodasi, asimilasi, akulturasi dan pada sisi lain dapat pula mengakibatkan timbulnya persaingan, pertentangan atau konflik. Ke arah mana hasil sebuah interaksi tergantung dari jarak sosial kelompok masyarakat yang terlibat dalam interaksi tersebut. Jarak sosial dapat disebabkan misalnya karena keadaan geografis dan kesukaran transportasi, tersedia tidaknya kesempatan dan sarana untuk interaksi itu sendiri. Dapat juga karena perbedaan dalam tingkat pendidikan, agama, suku dan status sosial ekonomi. Sementara itu faktor jarak sosial subyektif muncul karena faktor perasaan dan pikiran seseorang terhadap orang lain yang hendak diajak berkomunikasi.

Secara garis besar keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan di Indonesia oleh *C. Van Vollenhoven* digolongkan dalam 19 lingkaran hukum adat (*adatrechtskringen*). Berbagai suku bangsa di Indonesia di samping dapat dibedakan berdasarkan mata pencaharian hidupnya, juga dapat diklasifikasikan menurut kompleksitas mereka. Berdasarkan mata pencaharian hidupnya ada 6 klasifikasi, yaitu: masyarakat pemburu dan peramu atau *hunting and food gathering societies*, masyarakat peternak atau *pastoral societies*, masyarakat peladang atau *shifting cultivators societies*, masyarakat nelayan atau *fishing communities*, masyarakat petani pedesaan atau *peasant communities* serta masyarakat perkotaan yang kompleks atau *urban complex societies*. Selanjutnya berdasarkan kompleksitasnya terbagi dalam 3 tipologi yaitu: masyarakat rumpun atau *tribal communities*, komunitas kecil atau *little communities* dan komunitas kompleks atau *complex communities*¹.

¹ Poerwanto Hari, *Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Prespektif Antropologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal 121-122.

Selain itu keanekaragaman kebudayaan di Indonesia,² juga diperkaya oleh kebudayaan dari bangsa-bangsa lain seperti Portugis, Belanda, Cina Daratan, India dan Arab. Di mana alasan mereka datang ke Indonesia antara lain karena penjajahan, hubungan perdagangan, penyebarluasan agama, eksploitasi kekayaan alam. Di kemudian hari, banyak dari mereka yang menetap di Indonesia dan turut menambah kekayaan khasanah budaya di bumi nusantara ini.

Sehubungan dengan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa hampir semua kebudayaan di Indonesia mengalami proses campuran (*asimilasi budaya*). Seperti pada awalnya kerajaan-kerajaan di pulau Jawa banyak dipengaruhi oleh pengaruh dari budaya/agama Hindu maupun Islam. Hal ini bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan yang ada berupa situs-situs, benda-benda sejarah seperti candi, masjid, bangunan kuno dan artefak-artefak yang memiliki nilai sejarah. Mengingat kebudayaan yang terbentuk sangat beranekaragam antara daerah yang satu dengan yang lainnya maka setiap wilayah/daerah akan memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebudayaan dari suatu daerah sebetulnya sangat dipengaruhi oleh sejarahnya. Perbedaan kebudayaan yang paling menonjol dapat dilihat dari sejarah arsitektur masyarakat. "*Arsitektur dalam bentuk purbanya adalah sesuatu yang dibangun oleh manusia dalam usahanya (yang masih sederhana itu) yang berfungsi sebagai suatu perlindungan demi kepentingan badannya atau keselamatannya*³".

Di samping itu masih banyak dijumpai kearifan budaya lokal yang sudah tercipta sejak jaman nenek moyang, yang tidak hanya dijumpai dalam bentuk arsitekturnya tetapi sudah menghasilkan bentuk ruang lingkungan yang rapi dan unik. "*Kekhasan lingkungan binaan hasil; cipta-rasa-karsa dan karya nenek moyang kita, tidak hanya tercermin dari ragam bangunannya, melainkan juga*

² Ibid , hal 123

³ Sumintardja Djauhari, Kompedium Sejarah Arsitektur Jilid I, Penerbit Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah, Jakarta, 1995, Hal 3

pola tata ruangnya. Dalam skala kota misalnya, hampir selalu kita dapatkan pola alun-alun yang dikelilingi keraton atau kabupaten dan penjara⁴”.

Namun dalam tata ruang lingkungan permukiman tradisional di berbagai negara maupun daerah, banyak dijumpai pola-pola spesifik yang memukau, yang berkaitan dengan fenomena sosial-budaya serta agama/kepercayaan masyarakatnya. Sebagai contoh, perkampungan tempat tinggal maupun perkampungan upacara pada masyarakat *Gerurumba* di daratan tinggi Papua Nugini. Perkampungan tempat tinggal terdiri dari 25 sampai 30 rumah-rumah bulat yang diatur secara linier sepanjang jalan, dengan rumah-rumah kaum pria di seberang jalan. Perkampungan upacara diatur mengelilingi suatu tempat terbuka yang pada satu sisinya terdiri dari semacam bangsal panjang yang tidak terbagi-bagi, dengan sejumlah perapian dan juga suatu persil tanah berpagar yang mempunyai arti keagamaan⁵. Seperti halnya beberapa kota di India simbolisme agama Hindu menentukan pola dasar semua kota-kota dan kampung-kampung, bagian-bagian dalam kota, jalan-jalan, lokasi bangunan, ruang terbuka, pintu gerbang dan tangki air dari masyarakat Hindu⁶, sehingga dapat dikatakan bahwa kota-kota tradisional sangat dipengaruhi faktor keagamaan yang dianut oleh penghuninya.

Demikian halnya pola ruang kota di Indonesia yang ada sejak jaman dahulu, yang sangat dipengaruhi oleh pola tradisional. Pada awalnya kota-kota di Pulau Jawa juga dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Budha, namun sejak masuknya ajaran Islam pada masa kerajaan Mataram-Islam maka pola ruang yang terbentuk sedikit mengalami perubahan, hal ini dapat dilihat dari adanya pembagian ruang untuk keraton, tempat tinggal bagi golongan bangsawan serta abdi dalem, masjid, pasar, jaringan jalan dan alun-alun yang berfungsi sebagai ruang publik. Sehingga dalam konteks tradisionalpun ruang publik sudah ada dan direncanakan sebagai tempat beraktivitas bersama. Meskipun ruang tersebut

⁴ Budihardjo Eko, *Arsitektur Pembangunan dan Konservasi*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1997, hal 35

⁵ Catanase Anthony. J, *Pengantar Sejarah Perencanaan Perkotaan*, Penerbit Erlangga Surabaya, 1984, hal 46

⁶ *Ibid*, hal 52

memiliki pola dan faktor pembentuk yang berbeda antar daerah. ruang publik tersebut biasanya tidak hanya berada di ruang/udara terbuka tetapi juga bisa ditemui ditempat yang sedikit tertutup.

Perubahan dan pertumbuhan kota-kota di Indonesia telah menampilkan gambaran mobilitas sosial budaya yang unik dan menarik. Perpindahan penduduk ke kota dari berbagai kawasan budaya suku dan tingkat sosial ekonomi, sedemikian rupa sehingga tidak saja mengakibatkan perubahan-perubahan dalam interaksi sosial masyarakat tetapi juga mengakibatkan terbukanya cakrawala hubungan antara lingkungan alam dan binaan manusia, misalnya kota itu sendiri.

Di sisi lain, keberadaan pribumi asli penghuni awal dari daerah tersebut juga menjadi faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Mereka merupakan individu-individu pertama yang berinteraksi di daerah itu dan yang mengawali timbulnya suatu bentuk pemukiman sederhana yang di kemudian hari terus berkembang hingga menjadi makin maju dan kompleks. Setiap suku memiliki nilai-nilai budaya yang khas. Perbedaan ini akan nyata dalam gagasan-gagasan dan hasil karya yang akhirnya dituangkan melalui interaksi antar individu, antar kelompok dengan alam sekitarnya. Tetapi fakta di lapangan lebih banyak memberikan pilihan yang terbatas bagi mereka. Berasimilasi dengan pengaruh yang hendak masuk ke daerah tersebut merupakan pilihan yang akan diambil, tetapi pada kenyataannya lebih banyak terjadi dominasi luar yang kuat sehingga pihak pribumi lebih banyak berada pada posisi yang lemah. Dengan adanya dominasi luar yang tidak disertai pemahaman akan nilai-nilai/norma-norma awal yang telah diletakkan oleh masyarakat pribumi, maka timbullah konflik-konflik sebagai akibat dari tidak adanya titik temu antara dua sisi yang memiliki perbedaan karakter dan kebudayaan. Interaksi yang tercipta kemudian lebih banyak berada dalam kondisi yang negatif, terutama dari sudut pandang pribumi. Seperti pada kasus suku Indian di Amerika yang akhirnya harus tergusur dari daerah mereka ke sebuah tempat konservasi, sebagai akibat dominasi kaum kulit putih. Kasus yang lebih ekstrem yaitu tergusurnya suku Tasmania di Selandia Baru hingga pada akhirnya punah sama sekali. Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki banyak kemajemukan suku yang tentunya mempunyai adat

istiadat dan kebudayaan masing-masing yang mempengaruhi cara hidup dalam berinteraksi dengan individu lain dan lingkungannya. Pengaruh bangsa-bangsa asing yang sempat menjajah negeri inipun menjadi salah satu variabel yang tidak dapat diabaikan. Seperti yang diuraikan di atas bahwa manusia dan dinamika akan berjalan terus dan aktif, demikian pula terjadi perubahan-perubahan dalam ruang yang bervariasi bentuk dan tingkatnya. Ada yang secara ekstrim berubah total maupun hanya sebagian kecil saja yang berubah. Perilaku masyarakat yang dinamis seturut dengan perkembangan kemajuan pemikiran dan ilmu pengetahuan memberi andil yang besar dalam terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial budaya maupun dalam perkembangan pola ruang.

Penduduk Papua terdiri dari kelompok etnis (kelompok suku) yang mempunyai keunikan tertentu, seperti bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Di Papua terdapat hampir \pm 250 macam bahasa sesuai dengan kelompok suku yang berada di daerah ini. Kebudayaan penduduk asli di daerah-daerah pedalaman Papua kebanyakan masih asli (tradisional) dan sulit untuk dilepaskan dan sangat kuat pengaruhnya. Kebudayaan penduduk asli di daerah pantai sedikit banyak sudah mengalami perubahan (walaupun tidak secara keseluruhan). Oleh karena kemudahan dalam transportasi maupun komunikasi, masyarakat di daerah pantai biasanya lebih cepat menerima pengaruh atau perubahan dari luar dengan sendirinya ikut mempengaruhi kebudayaan penduduk daerah setempat. Beberapa kelompok suku tertentu terutama di daerah-daerah pedalaman (Jayawijaya), Merauke, Yapen Waropen, Paniai dan Kepala Burung), masih tetap mempertahankan kebudayaan aslinya secara utuh dan sulit dipengaruhi kebudayaan luar.

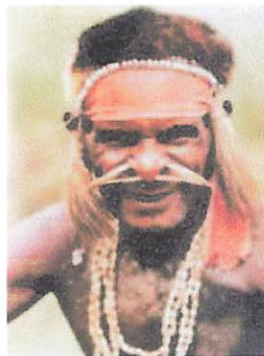
Kebudayaan penduduk asli Papua mempunyai persamaan dengan penduduk asli beberapa negara Pasifik Selatan maupun rumpun Melanesia. Sebagai bagian dari rumpun Melanesia, budaya dari suku-suku di Papua sangat berbeda dengan mayoritas kebudayaan di Indonesia yang berasal dari ras Mongoloid. Kebudayaan yang minoritas dan ditambah dengan pengetahuan yang kurang akan kebudayaan tersebut, membuat suku-suku di Papua dipandang sebagai suku-suku yang inferior. Telanjang, keterbelakangan, ketidakberadaban

dan intelegensi yang rendah adalah predikat terhadap orang Papua yang pada umumnya ada di benak warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Indonesia lainnya. Ketidakberpihakan pada orang Papua juga terlihat pada pemaksaan pembangunan yang kurang memperhatikan akan perbedaan kultur Papua dengan kultur mayoritas yang ada di Indonesia yang berakibat kepada pemaksaan pembangunan yang lebih banyak berbasis pada budaya Melayu yang nota bene berbeda dengan kultur Melanesia. Kekayaan budaya Papua malah lebih banyak diminati oleh peneliti dan pemerhati budaya dari luar. Kurangnya perhatian bangsa membuat sebuah diskriminasi yang halus terhadap orang Papua. Dengan demikian orang Papua semakin termajinakan, tercabut dari akar budaya mereka selama ini dengan berbagai alasan. Mulai dari humanisme hingga kepada pemerataan pembangunan. Terkungkung dalam wacana inferioritas oleh bangsanya sendiri sehingga menimbulkan sikap yang minder, yang salah satu ujungnya bermuara kepada konflik-konflik yang sekarang ada di tanah Papua.

Padahal jika informasi dan wawasan kita ke wilayah bagian timur Indonesia tersebut lebih kaya, kita akan mendapati bahwa begitu banyak hal menarik yang bahkan telah menjadi bagian dari filosofi hidup orang Papua jauh sebelum mereka memasuki jaman sejarah (peradaban) sekalipun. Mereka telah mengenal agama tradisional, yang jika diteliti lebih lanjut, secara garis besar hampir sama dengan ajaran-ajaran yang ada dalam agama-agama samawi yang sekarang ada. Teknologi pemuliaan tanaman yang dikembangkan mereka jauh melampaui teknologi modern yang hendak diperkenalkan kepada mereka, sehingga mereka cenderung menyepelkan PPL (petugas penyuluh lapangan) pertanian yang datang kepada mereka. Sistem drainase untuk kebun dan ladang juga telah mereka kenal jauh sebelum mereka mengenal kontak dengan dunia luar. Strategi perang yang dimiliki mereka mampu untuk mengalahkan pihak Inggris, yang menyangka hanya berhadapan dengan bangsa barbar yang bodoh, namun tidak menyangka bahwa mereka berhadapan dengan suku yang telah memiliki strategi dan formasi penyerangan. Niat pemerintah yang mulia untuk melakukan konservasi alam juga acapkali berbenturan dengan kebiasaan masyarakat. Padahal

sistem konservasi alam telah lama dikenal orang Papua, hanya saja dengan tata cara yang berbeda.

Provinsi Papua, merupakan daerah yang tidak hanya kaya dari segi sumber daya alam, namun juga kekhasan kultural. Adanya arus perpindahan penduduk, dari jaman kolonialisme hingga sekarang, mengakibatkan banyak budaya-budaya baru yang dibawa masuk dan melakukan interaksi di sana. Tetapi pada dasarnya budaya lokal yang ada telah sedemikian beraneka ragam. Kemajemukan klan-klan yang ada turut menambah keragaman sosio-kultural dalam suku lokal. Seiring dengan perkembangan peradaban dan dinamika pembangunan, terjadi perubahan perilaku sosial dan kultural dari suku lokal yang ada.

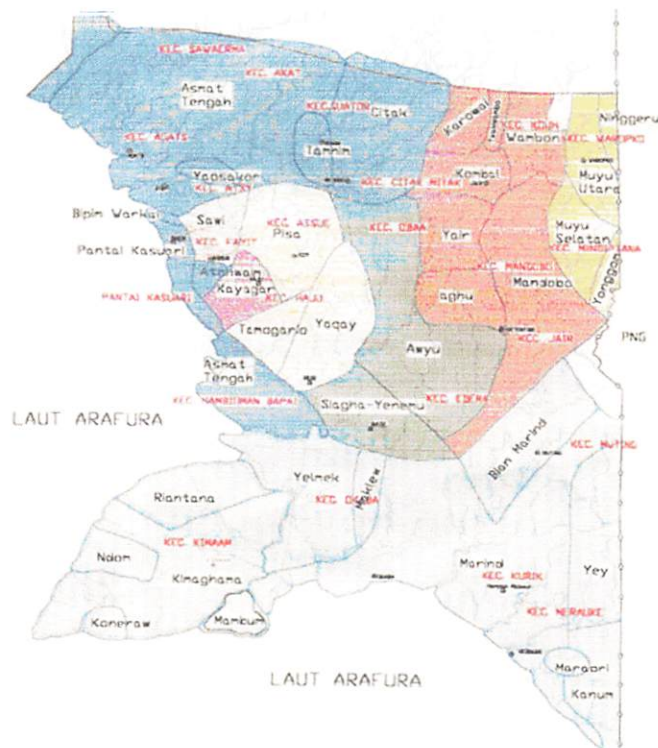


Gambar 1.1b Laki-laki Marind dewasa

Suku Marind yang merupakan penduduk asli distrik Merauke, juga mengalami hal yang sama. Terjadi perubahan pola perilaku sosial dan kultural, baik dalam skala kecil maupun besar, dari era pra kolonialisme hingga sekarang.

Cikal bakal terbentuknya kota Merauke tak lepas dari keberadaan suku Marind yang nota bene merupakan penduduk asli wilayah tersebut. Hingga akhir abad ke-18, pantai selatan dari *Nieuw Guinea* (penamaan pihak Belanda untuk pulau Papua) belum banyak dikenal dan dieksplorasi oleh pihak luar. Walaupun secara administratif masuk dalam wilayah kesultanan Tidore tapi wilayah selatan ini terisolir dari pengaruh dan kontak dengan luar. Seiring dengan adanya ekspansi Inggris di wilayah Australia dan *Oost Nieuw Guinea* (Papua Timur), wilayah pantai selatan ini mulai terekplorasi oleh dunia luar. Penduduk asli dari wilayah pantai selatan ini adalah suku Marind yang mendiami mulai dari pesisir

pantai hingga ke pedalaman. Suku ini terkenal dengan ekspansi mereka yang disertai dengan pengayauan di sepanjang sungai Digul hingga ke wilayah pemerintahan Inggris di Papua Timur.



Gambar 1.1a. Persebaran suku-suku di daerah kabupaten Merauke

Karena merasa terganggu dengan hal tersebut, pemerintah Inggris kemudian mendesak pemerintah kolonial Belanda untuk segera mengakhiri praktek pengayauan oleh suku Marind di wilayah *Zud Nieuw Guinea* dan *Oost Nieuw Guinea* tersebut. Dari sini kemudian terjadi perundingan-perundingan yang berakhir kepada penentuan perbatasan antara wilayah Papua Timur (Papua New Guinea) dan Papua Barat (sekarang merupakan wilayah RI).

Dengan masuknya pengaruh luar, dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda, terjadi perubahan-perubahan dalam pola perilaku dari suku Marind. Tindakan yang represif dari pemerintah Belanda melalui pos militer yang didirikan di pantai selatan Papua, berhasil meredam praktek pengayauan suku Marind. Mereka juga kemudian mulai menjalin hubungan persahabatan dengan pihak pendatang, seperti dengan pihak pemerintah maupun dengan pedagang-pedagang yang mulai masuk ke sana. Salah satu fakta penting adalah bahwa

sebelum masuknya pemerintah kolonial di wilayah selatan, dapat dikatakan bahwa suku Marind masih berada dalam zaman prasejarah. Mereka belum mengenal tulisan dan logam. Mereka yang semula cenderung melakukan ekspansi, mulai berubah menjadi penduduk yang menetap, meskipun masih menjadi peramu dan nelayan. Selain itu, masuknya missionaris dari gereja Katolik Roma juga membawa pengaruh besar dalam pola perilaku suku Marind.

Studi ini mencoba untuk mengkaji perubahan-perubahan pola perilaku yang terjadi pada suku Marind serta bagaimana respon mereka terhadap perkembangan peradaban dan pembangunan. Dari bentuk-bentuk interaksi yang ada seperti kerjasama, persaingan dan konflik/pertentangan diharapkan dengan studi identifikasi ini dapat diketahui bagaimana pola-pola perilaku sosial dan kultural suku Marind dalam interaksi sosial budaya di kota Merauke serta bagaimana pengaruh dari kebudayaan suku Marind terhadap pembentukan ruang publik kota Merauke yang dapat menampung aktivitas masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk di mana secara horizontal berbeda dalam suku, agama, bahasa dan suku bangsa. Selain kemajemukan yang bersifat horizontal, kemajemukan juga bersifat vertikal seperti kemajemukan dalam status sosial ekonomi. Masyarakat yang berbeda suku, agama, ras maupun strata ekonomi dapat saling membantu dan saling menghormati satu sama lain, sehingga terdapat ruang-ruang interaksi antar masyarakat sebagai media pertemuannya. Selain itu aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat seperti perdagangan, pendidikan, kesenian, upacara adat dan lain-lain tentunya membutuhkan ruang, baik yang bersifat umum maupun khusus. Ruang yang bersifat umum disebut ruang yang dapat digunakan bersama oleh individu-individu yang berbeda adat istiadatnya, misalnya pasar. Sedangkan ruang yang bersifat khusus diidentifikasi sebagai ruang pribadi yang hanya digunakan oleh individu-individu yang memiliki persamaan budaya, misalnya saja perkumpulan masyarakat Batak, Kampung Jawa, Kampung Madura, Kampung Bugis dan lain-lain. Semakin kuatnya arus globalisasi di segala bidang maka

pengaruh budaya luar atau budaya barat akan mempengaruhi budaya lokal/ setempat sehingga kekhasan suatu daerah akan ikut luntur. Namun apabila kebudayaan dari luar bisa difilterisasi oleh masyarakat lokal tentu tidak akan berpengaruh dan bahkan apabila terjadi proses asimilasi budaya maka akan menjadi karya, karsa dan cipta budaya yang sangat menarik.

Suku Marind telah mendiami kawasan selatan Provinsi Papua sejak jaman prasejarah, boleh dikatakan bahwa mereka adalah penduduk asli kawasan tersebut. Semenjak dimulainya kontak dengan kaum pendatang, terjadilah perubahan-perubahan karakteristik dan pola perilaku dalam suku ini. Mulai dari pola bermukim hingga kepada pergeseran nilai-nilai dalam adat istiadat. Hal itu dipengaruhi antara lain:

1. Adanya perbedaan bahasa, adat istiadat antar suku lokal dengan pendatang yang mengakibatkan terjadinya asimilasi, akulturasi ataupun dominasi.
2. Minimnya pemahaman pemerintah akan budaya dan adat istiadat, gaya hidup, pola pikir dan cara pergaulan suku lokal sehingga ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengalami konflik dengan masyarakat suku lokal.

Perjalanan sejarah kota Merauke tak lepas dari keberadaan suku Marind. Merekalah yang menjadi alasan utama pemerintah kolonial Belanda mendirikan pos militer di daerah yang nantinya akan menjadi cikal bakal kota Merauke. Dalam perkembangan kota Merauke selanjutnya, peranan suku ini tetap ada walau tidak sedominan dahulu.

Peranan suku Marind, proses interaksi mereka dengan pengaruh dari luar, konflik-konflik yang terjadi maupun perubahan-perubahan pola perilaku sosial budaya yang terjadi pada suku tersebut, pengaruhnya terhadap pembentukan ruang publik kota, adalah merupakan hal-hal yang akan diangkat dalam studi ini. Dari hal-hal tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada dalam studi, yaitu:

- a. Bagaimana pengaruh kebudayaan suku Marind terhadap interaksi sosial budaya di kota Merauke?

- b. Bagaimana pengaruh kebudayaan suku Marind terhadap pembentukan ruang publik kota Merauke yang dapat menampung aktivitas masyarakat?

1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam tujuan yang akan dibahas adalah mengenai apa yang diinginkan dengan adanya studi yang dilakukan ini. Sehingga nantinya dengan adanya acuan dan batasan dari tujuan yang telah ditetapkan, maka akan mempermudah penyusunan laporan ini. Sedangkan sasaran adalah merupakan salah satu unsur dari tujuan yang berfungsi lebih menekankan terhadap apa yang ingin dicapai dan penyusunan laporan yang akan lebih terstruktur.

1.3.1. Tujuan

Kekhasan budaya dari suatu suku adalah merupakan suatu aset bagi kekayaan khasanah budaya bangsa. Adapun tujuan dari studi budaya ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kebudayaan suku Marind terhadap pembentukan ruang publik kota Merauke.

1.3.2. Sasaran

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam studi ini adalah:

- a. Mengidentifikasi pengaruh unsur-unsur kebudayaan dari suku Marind terhadap proses interaksi sosial budaya di kota Merauke.
- b. Mengidentifikasi pengaruh unsur-unsur kebudayaan dari suku Marind dalam pembentukan ruang publik kota Merauke.

1.4. Lingkup Studi

Lingkup studi meliputi dua hal, yaitu lingkup lokasi dan lingkup materi. Lingkup lokasi adalah merupakan penetapan yang jelas mengenai batasan wilayah studi yang dijadikan sebagai wilayah penelitian. Sedangkan lingkup materi adalah gambaran sampai sejauh mana materi atau teori yang akan dipergunakan dalam menganalisa permasalahan yang diangkat agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.4.1. Lingkup Lokasi

Wilayah yang dijadikan sebagai obyek studi adalah wilayah ibu kota distrik Merauke yang secara administratif berbatasan dengan:

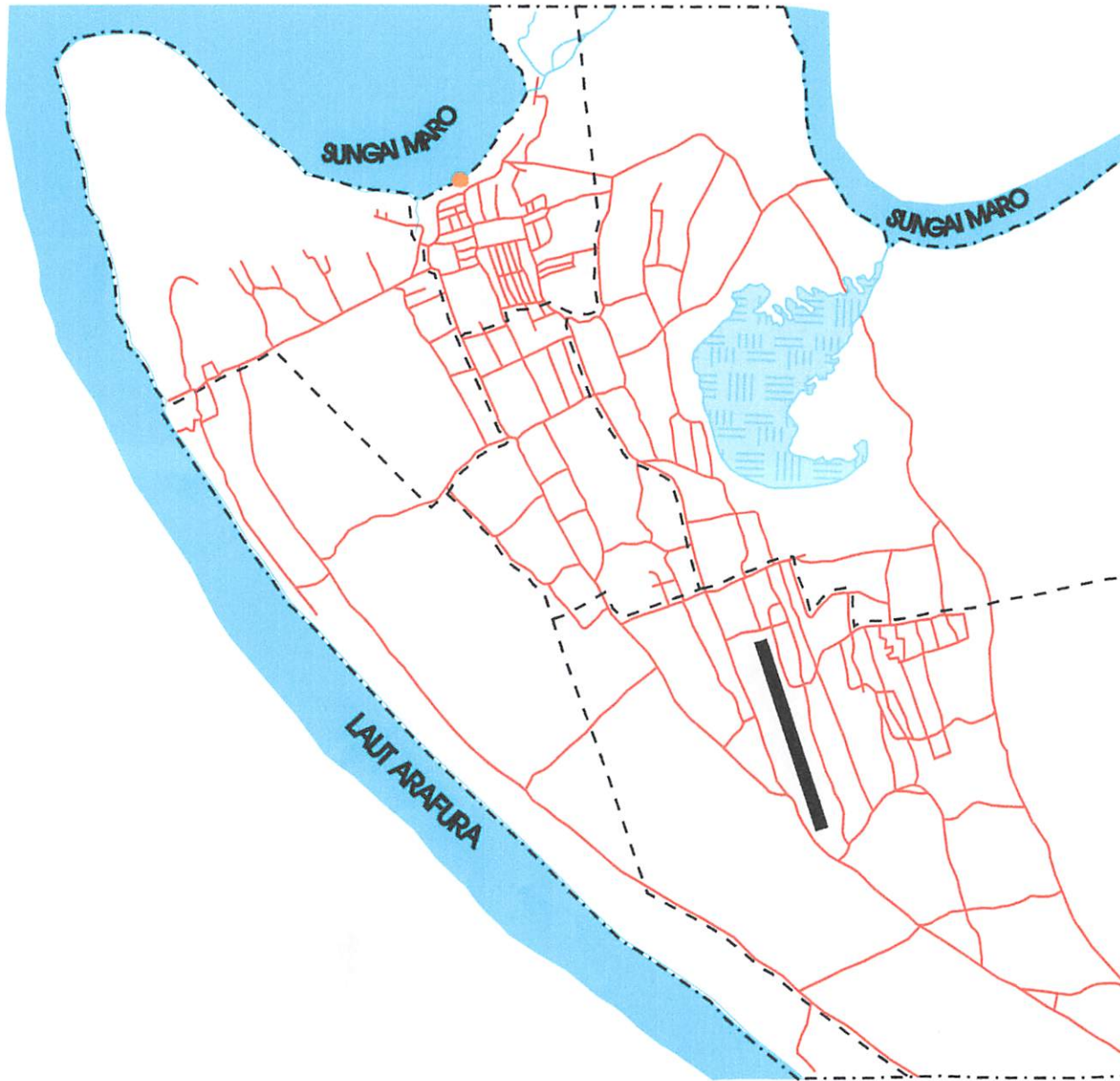
- Sebelah utara : Sungai Maro
- Sebelah selatan : Laut Arafuru
- Sebelah barat : Laut Arafuru dan Sungai Maro
- Sebelah timur : Taman Nasional Wasur

Pemilihan lokasi studi di ibu kota distrik Merauke didasari dengan pertimbangan antara lain bahwa sebagian besar wilayah distrik masih berupa hutan, selain itu distribusi penduduk di luar ibu kota distrik rata-rata tidak terlalu tinggi. Juga karena bentuk kota Merauke yang merupakan kota bentukan kolonial Belanda yang belum terlalu banyak berubah di mana bentuk utama kota masih linier. Kota Merauke merupakan kota pelabuhan yang dihuni oleh beragam etnis yang sangat heterogen budayanya. Banyak terjadi interaksi budaya antar etnis, baik yang bersifat akulturasi, asimilasi maupun dominasi, yang kemudian menciptakan ruang-ruang publik di kota Merauke. Bentuk interaksi yang timbul selain menghasilkan pembauran, juga menghasilkan kantong-kantong konsentrasi masyarakat, seperti misalnya komunitas Bugis-Makassar yang umumnya berprofesi sebagai nelayan dan pedagang, cenderung berkonsentrasi di daerah pelabuhan dan pasar. Etnis Tionghoa, dengan profesi utama juga di bidang perdagangan, lebih cenderung mengumpul di wilayah pusat kota. Sedangkan komunitas suku Marind lebih banyak terkonsentrasi di wilayah pantai barat dan DAS (daerah aliran sungai) sepanjang sungai Maro, dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan peramu. Suku Jawa yang lebih banyak datang melalui program transmigrasi, lebih banyak berprofesi sebagai pedagang, khususnya dalam hal penjualan makanan. Mereka lebih banyak memilih untuk membentuk kluster di wilayah yang dekat dengan pusat kota, dengan pertimbangan bahwa akses ke pusat kota sebagai tempat mereka bekerja akan lebih mudah.

Peta : Orientasi Wilayah Studi

LEGENDA

-  **Batas Kecamatan**
-  **Batas Kelurahan**
-  **Jalan**
-  **Airport**
-  **Sungai/Laut**
-  **Rawa**
-  **Pelabuhan Laut**



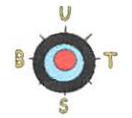
TAMAN NASIONAL WASUR

KOTA MERAUKE

Sumber : RDTRK MERAUKE

SKALA

1 : 40.000



KOTA MELAYUKE

1 : 10 000



ΣΧΟΛΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΠΙΘΕΤΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

11

ΤΑΜΕΝ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΒΑΣΥΡ



Κατασκευασμένο

Καμά

Σημειώσεις

Απόβαση

Παρά

Βάρος Κεμπουαν

Βάρος Κεσαμπαν

LEGENDA

Πηγή : Οργανισμός Διατήρησης

3000

ΚΑΡΤΑ

ΚΑΡΤΑ

ΚΑΡΤΑ

ΚΑΡΤΑ

1.4.2. Lingkup materi

Pada studi ini topik bahasan yang diangkat adalah berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu tentang pengaruh dari kebudayaan suku Marind terhadap proses interaksi sosial budaya dan terhadap pembentukan ruan publik kota Merauke. Beracu pada sasaran yang hendak dicapai maka dilakukan pemilahan materi teori yang akan dijadikan bahan dalam studi ini dengan tetap diselaraskan dengan sasaran yang ingin dicapai. Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka lingkup materi memberikan batasan-batasan yang sesuai, sehingga bahasan studi tidak melenceng jauh dari tujuan dan sasaran semula.

Lingkup materi yang dibahas, terkait dengan studi yang dilakukan adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisa unsur-unsur dalam kebudayaan suku Marind yang berpengaruh kepada interaksi sosial budaya di kota Merauke, antara lain:
 - Nilai-nilai yang bersifat kultur-religi, seperti:
 - Kebiasaan-kebiasaan/adat istiadat masyarakat yang terkait dengan unsur-unsur religius, seperti upacara-upacara keagamaan, baik yang masih bersifat animisme/dinamisme (kepercayaan asli pribumi/agama pribumi) maupun agama/kepercayaan yang dibawa dari luar.
 - Mitos-mitos yang mendasari terjadinya pola perilaku masyarakat seperti legenda/cerita rakyat, munculnya tabu/larangan atau pemberian nilai keramat (*sacred value*) terhadap suatu benda, gagasan dan tindakan serta peraturan-peraturan yang bersifat lokal dan terkadang terkesan sedikit berbeda atau sama sekali berbeda dengan aturan yang bersifat nasional/konvensional yang berlaku.
 - Latar belakang historis yang mendasari terbentuknya suatu pola perilaku masyarakat lokal maupun yang menyebabkan terjadinya kontaminasi terhadap kebudayaan dan perilaku masyarakat lokal, antara lain:

- Asal mula dan sejarah suku bangsa, baik penduduk pribumi maupun etnis pendatang.
 - Perubahan-perubahan perilaku sosial masyarakat yang akibat terjadinya benturan atau perpaduan antar kultur yang berbeda, baik itu akulturasi, asimilasi maupun dominasi antar kultur.
 - Perubahan-perubahan nilai kultur masyarakat yang diakibatkan oleh masuknya peraturan-peraturan pemerintah, mulai dari jaman kolonial Belanda hingga pemerintahan Republik Indonesia.
 - Pergeseran-pergeseran posisi struktural dalam masyarakat, tidak hanya pada masyarakat lokal namun juga pada masyarakat pendatang.
- b. Mengetahui dan menganalisa unsur-unsur dalam kebudayaan suku Marind yang mempengaruhi terbentuknya ruang publik di kota Merauke, yang meliputi:
- Sistem religi
 - Sistem kemasyarakatan
 - Sistem mata pencaharian

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berikut ini membahas mengenai teori-teori yang dipergunakan sebagai landasan utama dalam menyelesaikan studi ini. Di mana teori-teori tersebut adalah tentang kebudayaan, masyarakat dan kelompok etnik, perubahan sosial kebudayaan dan macam-macam konflik, perilaku masyarakat, karakteristik kebudayaan dan keterkaitan semuanya itu dengan ruang.

1.5.1. Pengertian Pengaruh

Kata 'pengaruh' dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda, yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang⁷.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia DEPDIBUD, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 664

Terkait dengan studi yang diambil, maka pengaruh yang dimaksudkan dalam studi adalah daya yang ditimbulkan sebagai akibat dari adanya suku Marind dan kebudayaannya sehingga membentuk ruang publik di kota Merauke.

1.5.2. Kebudayaan

Definisi dari kebudayaan terdiri atas 179 buah definisi yang pernah dirumuskan di atas kertas oleh para ahli. Kebudayaan merupakan keseluruhan total dari apa yang pernah dihasilkan oleh makhluk manusia yang menguasai planet ini sejak zaman ia muncul di muka bumi kira-kira empat juta tahun yang lalu, sampai sekarang (perkiraan mengenai waktu munculnya manusia di muka bumi yang panjang ini, adalah hasil analisa-analisa terbaru dengan Metode Potassium Argon untuk mengukur umur lapisan-lapisan bumi)⁸.

Konsep tentang kebudayaan tidak hanya dirumuskan oleh ahli-ahli Antropologi, tetapi juga ahli Sosiologi, sejarah atau ilmu sosial yang ternama, juga oleh ahli-ahli filsafat dan pengarang-pengarang terkenal. Ahli Antropologi, *A.L. Kroeber* dan *C. Kluckhohn* pernah mengumpulkan 179 definisi itu. Mereka menganalisa dan mengklasifikasikan dalam tipe-tipe tertentu, kemudian disertai dengan komentar dan kritik, mereka terbitkan dalam sebuah buku yang berjudul *Culture, a Critical Review of Concepts and Definitions* (1952)⁹.

Banyak juga ahli yang mengartikan konsep kebudayaan dalam arti yang terbatas yaitu pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang memenuhi hasratnya akan keindahan. Dengan singkat, kebudayaan adalah kesenian. Dalam arti seperti konsep itu memang terlampau sempit. Sebaliknya, banyak orang terutama para ahli ilmu sosial, mengartikan konsep kebudayaan itu dalam arti yang amat luas yaitu seluruh total dari pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya, karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia setelah melalui proses belajar¹⁰.

⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, PT Gramedia Jakarta, 1984, Hal 9-1

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid, Hal 1

1.5.3. Arti Kebudayaan

Kebudayaan dalam bahasa sehari-hari umumnya banyak dipahami oleh orang adalah sebatas tentang adat istiadat, yang mana dalam adat istiadat ini tercakup tentang nilai-nilai historis dan pencirian akan budaya setempat. Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar¹¹. Di mana dalam pengertian ini terlihat sekali akan peranan dari seorang individu itu dalam memberikan ciri akan kebudayaan yang ada pada komunitas masyarakatnya.

Kata “kebudayaan” berasal dari bahasa sanshekerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal¹². Jadi kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Sedangkan definisi kebudayaan menurut Selo Soemarjan dan Solaiman Soemardi, yaitu kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat yang berupa teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material kultur) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk kepentingan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah dan nilai sosial untuk mengatur masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat dan antara lain yang menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan¹³.

Dalam istilah kebudayaan juga dikenal kata “*Culture*”, yang merupakan kata asing yang sama artinya dengan “*kebudayaan*” berasal dari kata latin ‘*colere*’ yang berarti “mengolah, mengerjakan,” terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang arti kultur sebagai ‘*segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan merubah alam*’¹⁴.

¹¹ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Penerbit Rineke Cipta, Jakarta, 1994, Hal 180

¹² *ibid*, Hal 181

¹³ Soemarjan, Selo dan Soemardi Soelaiman, Serangkai Bunga Sosiologi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hal 113

¹⁴ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Penerbit Rineke Cipta, Jakarta, 1994, Hal, 182

E.B. Taylor mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang terjadi dari pola-pola masyarakat yang normatif. Artinya mencakup segala cara-cara atau pola berpikir, merasakan dan bertindak. Banyak ahli yang telah merumuskan unsur-unsur kebudayaan, seperti C. Kluckhohn dalam "*Universal Categories of Culture*" (1953) yang merangkum pendapat-pendapat ahli antropologi, yaitu terdapat tujuh unsur kebudayaan:¹⁵

- a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, sarana transportasi dan sebagainya.
- b. Mata pencaharian dan sistem ekonomi, seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya.
- c. Sistem organisasi sosial kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum dan sistem perkawinan.
- d. Bahasa baik lisan maupun tulisan.
- e. Kesenian, baik seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya.
- f. Sistem pengetahuan.
- g. Sistem religi.

Mengacu pada hal-hal tersebut di atas, hal-hal yang dicermati dalam studi ini adalah yang terkait dengan sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem mata pencaharian dan sistem kesenian.

1.5.4. Unsur – Unsur Kebudayaan

Beberapa pakar telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan, salah satunya adalah Melville J. Herskovits yang mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan yaitu¹⁶ :

- Alat-alat teknologi
- System ekonomi

¹⁵ Ibid, Hal 203

¹⁶ Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, hal 191

- Keluarga
- Kekuasaan politik

Karena demikian luasnya konsep kebudayaan maka Koentjaraningrat memecah-mecah lagi kebudayaan dalam beberapa unsur yang berlaku secara universal, yaitu:

1. Bahasa

Bahasa merupakan sistem perkembangan manusia yang lisan maupun tulisan untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. Bahasa di daerah perbatasan menjadi bahasa campuran, kecuali batas-batas tempat tinggal dua suku bangsa yang terpisah oleh lautan, gunung, sungai yang lebar, atau batas alam lainnya yang menghambat konflik manusia secara intensif. Bahasa dari suku bangsa selalu menunjukkan suatu variasi yang ditentukan oleh perbedaan daerah secara geografi, maupun oleh lapisan serta lingkungan sosial dalam masyarakat suatu suku bangsa berupa perbedaan dialek maupun penggunaan bahasa berdasarkan golongan atau lapisan sosial masyarakat.

2. Sistem Pengetahuan

Pokok-pokok dari sistem pengetahuan dalam suatu kebudayaan merupakan uraian tentang cabang-cabang pengetahuan, oleh karenanya tiap-tiap bangsa-bangsa di dunia memiliki pengetahuan tentang alam sekitarnya, alam flora, alam fauna di daerah tempat tinggalnya, zat-zat, bahan mentah dan benda-benda dalam lingkungan tubuh manusia, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia dalam ruang dan waktu.

3. Sistem Organisasi Sosial Kemasyarakatan

a. Unsur-unsur khusus dalam organisasi sosial.

Kehidupan suatu masyarakat diatur dan diorganisasi oleh adat-istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di lingkungan kehidupan dan bergaul. Kesatuan yang paling dekat adalah kesatuan kekerabatan, yaitu keluarga inti dan kerabat lainnya di luar kerabat, tetapi masih lingkungan komunitas.

b. Sistem kekerabatan dengan adanya industrilisasi tampak fungsi kekerabatan yang dahulunya sangat penting dalam faktor kehidupan, mulai berkurang dan bersamaan dengan itu adat-istiadat yang mengatur hidup kekerabatan sebagai suatu kesatuan mulai mengendor. Bentuk keluarga inti berdasarkan monogami bukan satu-satunya bentuk sistem kekerabatan di dunia, disamping prinsip bilateral, ada prinsip patrilineal (hubungan keturunan melalui kerabat pria), matrilineal (hubungan keturunan melalui kerabat wanita) dan juga prinsip-prinsip kombinasi seperti prinsip keturunan bilateral dan ambilineal.

4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi

Teknologi dalam hal ini berupa cara produksi, memakai dan memelihara segala peralatan hidup dari suku bangsa. Teknologi tradisional, minimal meliputi delapan sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh manusia antara lain alat-alat produksi, senjata, wadah, alat-alat menyalakan api, makanan dan minuman, pakaian, rumah dan alat-alat transportasi.

5. Sistem Mata Pencaharian

Sistem mata pencaharian berkaitan dengan mata pencaharian dan usaha seseorang. Untuk masyarakat pedesaan umumnya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan jasa serta buruh.

6. Sistem Religi

Sistem religi terbagi dalam sistem religi dan ilmu gaib. Sistem religi dalam suatu kebudayaan dapat memelihara emosi diantara pengikut-pengikutnya, dengan demikian emosi keagamaan merupakan unsur penting dalam suatu religi tiga unsur lainnya yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan dan umat yang menganut religi tersebut.

7. Kesenian (seni rupa, suara, gerak, dan sebagainya)

Ada 2 kelompok besar kesenian sebagai ekspresi hasrat manusia akan keindahan yaitu :

a. Seni rupa : kesenian yang dinikmati dengan mata.

- b. Seni suara : kesenian yang dinikmati dengan telinga.

Istilah universal yang dimaksudkan bahwa unsur-unsur tadi bersifat universal, jadi unsur-unsur tadi ada dan bisa didapatkan di dalam semua kebudayaan dari semua bangsa dimanapun di dunia.

1.5.5. Wujud Kebudayaan

Wujud kebudayaan, antara lain:¹⁷

- a. Kebudayaan berbentuk fisik, yaitu segala benda hasil karya manusia yang bersifat kongkrit dan dapat diraba.
- b. Sistem sosial, yaitu menggambarkan wujud tingkah laku manusia (pola tingkah laku).
- c. Sistem budaya, yaitu menggambarkan wujud gagasan dari kebudayaan dan tempatnya adalah di dalam tiap kepala individu warga dari kebudayaan yang bersangkutan, yang dibawanya ke mana dia pergi.
- d. Nilai-nilai budaya, yaitu pusat dari semua unsur yang menentukan sifat dan corak dari pikiran, cara pikir serta tingkah laku manusia.

Menurut J.J. Honigman, Kebudayaan memiliki 3 wujud, yaitu :

- a. Wujud sebagai sistem budaya atau adat-istiadat yaitu kompleks dari ide-ide, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Wujud kebudayaan ini merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak dan tidak dapat diraba atau dirasakan secara tak kasat mata, karena hanya ada dalam pikiran masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan hidup.
- b. Wujud sebagai sistem sosial yaitu kompleks suatu sistem aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan ini kongkrit, biasa diobservasi dan didokumentasi.
- c. Wujud sebagai sistem budaya fisik sebagai benda hasil kebudayaan manusia yang merupakan seluruh total hasil fisik dari aktifitas serta karunia manusia dalam masyarakat sehingga memiliki sifat paling kongkrit dari benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan didokumentasikan.

¹⁷ Anggraeni, Jelita Alit, Laporan Tugas Akhir, Teknik Planologi, ITN Malang, 2001

Sedangkan menurut Koentjaraningrat, wujud kebudayaan itu dijabarkan sebagai berikut:¹⁸

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tingkatan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

1.5.6. Fungsi kebudayaan

Fungsi kebudayaan adalah mendasari, mendukung dan mengisi masyarakat dengan nilai-nilai hidup untuk dapat bertahan, menggerakkan serta membawa masyarakat itu pada taraf yang lebih maju. Hal ini berarti bahwa inti dari fungsi kebudayaan adalah membuat kehidupan seluruhnya menjadi lebih baik, lebih manusiawi, dan berkemanusiaan. Memanusiawikan manusia berarti membudayakan segala sektor kehidupan¹⁹.

Berdasarkan fungsinya, pengertian kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah²⁰ :

- a. Suatu sistem gagasan dan perlambang yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia.
- b. Suatu sistem gagasan dan perlambang yang dapat dipakai oleh semua warga negara Indonesia, untuk saling berkomunikasi, dengan demikian dapat memperkuat solidaritas.

Dalam usaha mengembangkan kebudayaan nasional aspek lain yang harus diperhatikan agar suatu unsur kebudayaan nasional dapat memberi identitas bagi warga negaranya sehingga menyebabkan kebanggaan bangsa, maka mutunya harus tinggi.

¹⁸ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Penerbit Rineke Cipta, Jakarta, 1994, Hal 186-187

¹⁹ Puspwardojo Soerjanto, Strategi Kebudayaan Suatu Pengantar Filosofis, Penerbit PT Gramedia Jakarta 1989, Hal 219.

²⁰ Koentjaraningrat, Presepsi Tentang Kebudayaan Nasional Dalam Presepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan Nasional, Penerbit PT Gramedia Jakarta 1986, Hal 99-138.

1.5.7. Adat Istiadat dan kebiasaan

Adat berasal dari kata '*adah*', yang artinya kebiasaan yaitu sesuatu yang sering berulang. Kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan yang normatif, yang telah berujud aturan tingkah laku, yang berlaku di dalam masyarakat dan dipertahan oleh masyarakat. Lebih jelas dikatakan tentang perbedaan adat dan kebiasaan, bahwa adat dipakai secara turun-temurun sedang kebiasaan mudah berubah dan tidak turun-temurun. Adat adalah adat yang telah ditetapkan oleh Tuhan Maha Pencipta, bagi makluknya. Hal ini untuk menjelaskan bahwa adat ada sebelum ada manusia. Adat istiadat juga disebut sebagai ketetapan leluhur (nenek moyang).²¹

Adat istiadat merupakan wujud dari sistem budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Perbedaan antara adat dan kebudayaan adalah soal lain, dan bersangkutan dengan konsepsi bahwa kebudayaan itu mempunyai tiga wujud, yaitu wujud ideal, wujud kelakuan dan wujud fisik. Adat adalah wujud ideal dari kebudayaan. Secara lengkap wujud itu dapat kita sebut adat tata kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Suatu contoh dari adat seperti misalnya aturan sopan santun untuk memberi uang kepada seseorang yang mengadakan pesta pernikahan. Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat, yaitu tingkat nilai; tingkat norma-norma, tingkat hukum dan tingkat aturan khusus.²²

1.5.8. Interaksi

Interaksi selalu ada dan terjadi dalam setiap kehidupan manusia saat melakukan berbagai macam kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan untuk mencapai tujuan hidup masing-masing. Interaksi yang terjadi dan berlangsung mencakup berbagai macam jenisnya baik itu interaksi fisik, sosial budaya, perekonomian dan lain sebagainya. Interaksi yang berlangsung, terjadi antara individu dengan individu lainnya atau dengan sekelompok orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya, baik itu yang berasal dari satu etnis atau satu suku

²¹ Arya Ronal, Ciri-Ciri Karya Budaya Dibalik Tabir Keagungan Rumah Jawa, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1990, hal 96-97

²² Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalis Dan Pembangunan, Jakarta, PT Gramedia, Hal 10-11

bangsa atau dengan orang yang berlainan etnis/suku bangsa, dalam kaitannya dengan hidup bermasyarakat dan bernegara.

A. Pengertian Interaksi dan Sosial

Menurut *Yoseph S. Roucek* (1963), pengertian interaksi adalah:

“Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, melalui berita yang didengar atau melalui surat kabar.”²³

Selanjutnya perlu diketahui beberapa istilah yang juga mempunyai relevansi, antara lain:

1. *Relationship*: hubungan antara dua gejala, dua komponen, dua individu atau lebih, yang dapat menimbulkan pengaruh.
2. *Interrelation*: hubungan berpengaruh antara dua gejala atau lebih dalam suatu wilayah/kawasan tertentu.
3. *Interaction*: kontak/hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala/masalah baru.
4. *Integration*: bertemunya beberapa unsur yang saling mengisi sehingga dapat dicapai suatu keserasian dan kelengkapan.
5. *Fenomena* (Gejala): adalah merupakan suatu wujud nyata atau peristiwa.kenampakan yang timbul dari suatu rangkaian proses endogen maupun eksogen dalam masyarakat atau dalam alam (muka bumi) yang dapat menjadi petunjuk dari proses kejadian masa lampau atau kejadian yang akan datang.

Kata sosial berasal dari sosiologi, yang diambil dari bahasa Yunani ‘*socius*’ artinya ‘kawan’ dan ‘*logos*’ artinya ‘ilmu pengetahuan’. Jadi sosiologi adalah pengetahuan bagaimana kita hidup bermasyarakat. Sedangkan arti kata sosial menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah ‘berkenaan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, berderma, dan sebagainya)’²⁴

²³ R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Penerbit Ghalia Indonesia, Hal. 62

²⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

B. Interaksi Sosial

Masyarakat sangat berhubungan erat dengan interaksi sosial karena masyarakat adalah sebagai individu yang tidak dapat hidup sendiri melainkan memerlukan individu lainnya untuk saling bertemu atau berinteraksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Masyarakat tumbuh dan berkembang dikarenakan adanya interaksi antara anggotanya. Interaksi sosial dalam masyarakat sebagai pendukung suatu negara atau wilayah dapat berupa kerjasama antara perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara bersama-sama dalam rangka pemuasan kebutuhan hidup. Bentuk yang termasuk di dalamnya adalah asimilasi, yaitu penggabungan dua unsur kebudayaan atau lebih menjadi satu unsur yang berbeda. Selain itu juga adalah akulturasi, yaitu diterimanya suatu unsur kebudayaan dalam suatu masyarakat tanpa merubah kebiasaan masyarakat yang bersangkutan.

Namun interaksi juga dapat berupa persaingan dan pertentangan. Persaingan adalah sebagai proses sosial, di mana perorangan atau kelompok manusia bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. Persaingan selalu timbul dalam suatu masyarakat karena selalu terjadi pelapisan-pelapisan sosial dalam hal kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan. Pertentangan merupakan proses sosial di mana perorangan atau kelompok manusia, di dalam pencapaian tujuannya, dengan jelas menentang pihak lawan dengan ancaman ataupun kekerasan.

Ada pula akomodasi, yaitu suatu bentuk keseimbangan dalam interaksi antara perorangan dan kelompok manusia sehubungan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Tujuan akomodasi adalah untuk mengurangi pertentangan dan mencegah terjadinya pertentangan antara perorangan atau kelompok manusia sebagai akibat dari perbedaan paham. Akomodasi memungkinkan kerjasama kelompok-kelompok sosial sebagai akibat-akibat faktor sosial, psikologis dan kebudayaan hidupnya terpisah.

1.5.9. Masyarakat dan Kelompok Etnik

Pengertian masyarakat menurut MacIver dan Page, adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai

kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Sedangkan menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri dan menganggap sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dikarenakan adanya interaksi antara anggotanya. Interaksi ini sering disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Interaksi sosial dapat terjadi dengan adanya kontak sosial dan komunikasi antar anggota masyarakat.

Menurut Gilin, ada dua proses sosial yang timbul sebagai akibat dari adanya interaksi sosial:²⁵

1. Proses yang asosiatif, yang terbagi dalam bentuk kerja sama yang akomodatif. Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama, ada lima bentuk kerja sama, yaitu:
 - a. Kerukunan, yang mencakup gotong royong dan tolong menolong.
 - b. *Bargaining*, yaitu pelaksanaan perjanjian antara dua organisasi atau lebih mengenai pertukaran barang dan jasa.
 - c. Ko-optasi, yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk menghindari terjadinya kegoncangan stabilitas organisasi.
 - d. Koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama.
 - e. *Joint-venture*, yaitu kerja sama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya pengeboran minyak dan lain sebagainya.

²⁵ Mazidul Khoir, Ahmad, Laporan Tugas Akhir, Teknik Planologi, ITN Malang, 2004

2. Proses interaksi sosial yang disosiatif yang terdiri atas tiga bentuk, yaitu persaingan (*competition*), kontravensi (*contravention*) dan pertentangan (*conflict*)
 - a. Persaingan terdiri atas persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan atau peranan dan persaingan ras.
 - b. Kontravensi merupakan gejala-gejala yang berada di antara persaingan dan pertentangan yang terdiri atas kontravensi antar masyarakat, antagonisme keagamaan, kontravensi intelektual dan oposisi moral.
 - c. Pertentangan terdiri atas pertentangan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan antar kelas-kelas sosial, pertentangan politik dan pertentangan kepentingan.

Hubungan sosial atau interaksi sosial dua orang atau lebih dalam kaitannya dengan hubungan antar suku/etnis lebih cenderung dilihat sebagai perbuatan sosial yang berkaitan dengan identitas suku/etnis. Dalam hal ini ada dua faktor:²⁶

- a. Faktor nilai budaya yang menentukan identitas etnik, kelestarian, kesukubangsaan, perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dan berbagai permasalahan sebagaimana terwujud dalam lingkungan masyarakat majemuk.
- b. Faktor proses-proses sejarah yang memperlihatkan adanya kecenderungan kelompok etnik tertentu untuk mengaktifkan kembali identitas kesukubangsaan untuk kepentingan tertentu, serta pemaksaan untuk kembali menggunakan identitas etnik yang lama, menerima apa adanya atau malah mendasari penerimaan identitas yang baru.

Identitas etnik merupakan sebuah penilaian kemasyarakatan yang dipaksakan begitu saja untuk menjadi bagian dari identitas para penduduk dalam kebudayaan etnik tertentu. Batas-batas etnik itu akan tetap ada, walaupun terjadi proses saling penetrasi dan pengaburan batas kebudayaan antara dua kelompok etnik yang berbeda. Selain itu perbedaan etnik secara kategori tidaklah bergantung pada ada atau tidaknya kontak fisik antar kelompok tersebut.

²⁶ Anggraeni, Jelita Alit, Laporan Tugas Akhir, Teknik Planologi, ITN Malang, 2001

Kelompok etnik adalah merupakan suatu populasi yang secara biologis mampu tumbuh dan bertahan, karena mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan kebersamaan dalam suatu budaya. Kelompok etnik ini membentuk suatu jaringan komunikasi dan interaksi sendiri dan menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari populasi kelompok lain.

Kelompok masyarakat suku yang terbentuk oleh kesamaan kebudayaan mempunyai sistem perilaku yang berbeda setiap individunya. Perilaku merupakan suatu pola wujud tingkah laku yang tumbuh berdasarkan karakter lingkungan pembentuknya. Perilaku ini sangat mempengaruhi setiap individu dari berbagai masyarakat suku terhadap pola ruang dan pola hubungan sosial yang dihasilkan.

Dalam pendekatan fungsionalisme struktural disebutkan bahwa masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling berhubungan. Dengan demikian hubungan tersebut bersifat ganda atau timbal balik. Sekalipun integrasi sosial tidak dapat dicapai sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis dan memiliki nilai konsensus tertentu.

1.5.10. Ruang Umum

Ruang umum adalah tempat atau ruang yang terbentuk karena adanya kebutuhan akan perlunya tempat untuk bertemu ataupun berkomunikasi antara satu sama yang lainnya. Dengan adanya pertemuan bersama-sama antara manusia, maka kemungkinan akan timbulnya bermacam-macam kegiatan pada ruang umum tersebut. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa ruang umum ini pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung suatu kegiatan/aktifitas tertentu dari manusia, baik secara individu ataupun secara berkelompok²⁷.

Dari pengertian ruang yang ada, maka dapat disimpulkan pengertian ruang umum sama halnya seperti ruang publik (*Public Space*) adalah dari pengertian ruang secara fisik (secara administratif) dan ruang non fisik (non administratif) yang sudah diuraikan pada pengertian ruang sebelumnya, yang digunakan secara

²⁷ Hakim Rustam dan Utomo Hardi, *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal 50

bersama-sama oleh manusia yaitu antara individu dengan individu atau antar individu dengan kelompok serta dengan makhluk hidup dan tak hidup lainnya dengan kata lain manusia dengan populasi. Selain itu, konteks tata ruang, pengertian dari ruang bersama adalah suatu wadah atau ruang yang dapat berupa suatu negara, daerah atau suatu wilayah yang digunakan sebagai tempat bermukim atau tempat tinggal untuk melangsungkan berbagai kegiatan agar dapat mencapai tujuan hidup, serta tempat pertemuan individu yang saling berinteraksi satu sama lainnya sebagai suatu proses kehidupan yang berlangsung secara alami dan kodrati.

Menurut sifatnya ruang umum terbagi atas²⁸:

1. Ruang umum tertutup, yaitu ruang umum yang terdapat dalam suatu bangunan
2. Ruang umum terbuka, yaitu ruang umum di luar bangunan. Batasan ruang pola ruang umum adalah:
 - a. Bentuk dasar dari pada ruang terbuka di luar lingkungan
 - b. Dapat digunakan oleh publik atau umum (setiap orang)
 - c. Memberi kesempatan untuk berbagai macam kegiatan

1.5.11. Ruang Publik (*Public Space*)

Ruang publik (*public space*) adalah tempat bagi warga melakukan kontak sosial, pada masyarakat tradisional selalu tersedia dalam berbagai ras. Mulai dari pekarangan komunal, lapangan desa, lapangan di tingkat RT sampai pada alun-alun yang berskala kota, selain itu ruang publik bagi orang mati juga tersedia berupa kuburan umum untuk beberapa generasi.²⁹

Hal yang bisa dipahami disini bahwa ruang publik tidak hanya untuk orang hidup saja namun juga bisa tersedia untuk orang mati, selain itu ruang publik juga berupa lapangan di sekolah, aula, atau gymnasium yang serba guna untuk yudo, karate, pingpong, senam dan ruang pertemuan maupun kebun untuk

²⁸ Ibid.

²⁹ Budirarjo Eko, Tata Ruang Kota, Penerbit Alumni Bandung 1997, hal 29.

latihan bercocok tanam (kacang, jagung, bunga-bunga) bagi murid-murid sekolah.³⁰

Seyogyanya ruang publik ini tidak hanya dibatasi atau terdiri atas ruang yang luas karena jalan atau gang pun, tidak sekedar berfungsi sebagai penyalur alur lalu lintas, melainkan juga dimanfaatkan sebagai wahana kontak sosial, tempat bermain dan ruang kehidupan (*living space*).³¹

Beraneka ragam ruang publik baik yang berskala RT, RW, desa maupun kota, terbuka maupun tertutup itu, merupakan sarana kontak sosial yang harus dipertahankan oleh masyarakat karena memiliki rasa yang sangat kuat.

Banyak di antara konsep-konsep penggunaan ruang terbuka tradisional tinggi yang diterapkan di Amerika Serikat. Tidak banyak kota-kota yang tidak mempunyai semacam alun-alun kota. Usaha-usaha komersial bahkan sudah mulai mengakui manfaat dari lapangan-lapangan semacam itu. *Rockefeller Center* di New York membanggakan sebuah lapangan kota yang luar biasa yang dipergunakan untuk beberapa aktivitas yang berbeda pada waktu-waktu yang berlainan. Pada tahun 1950-an plaza-plaza bermunculan di muka setiap bangunan kantor berlantai banyak yang baru untuk menekankan pentingnya bangunan tersebut dengan hasil yang berbeda-beda³².

Ruang publik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ruang yang dapat dilihat batasan ruangnya secara fisik, seperti batasan batu, kayu, vegetasi dan sebagainya maupun ruang yang tidak dibatasi secara fisik atau hanya dibatasi dari fungsi atau kegiatan yang sedang berlangsung di dalamnya, dan ruang publik tersebut dapat diakses oleh semua orang dan segala usia

1.5.12. Fungsi Ruang Publik

Peranan ruang publik dapat memberikan karakter kotanya, dan pada umumnya memiliki fungsi interaksi sosial bagi masyarakat, kegiatan ekonomi rakyat dan tempat apresiasi budaya. Secara langsung nilai komersial yang

³⁰ Ibid, hal 28

³¹ ibid, hal 30

³² Catanase Anthony. J, Pengantar Sejarah Perencanaan Perkotaan, Penerbit Erlangga Surabaya, 1984, hal 106

ditawarkan tidak begitu menjanjikan bagi investor yang berminat berkiprah menanamkan modalnya, karena pangsa pasar yang sebagian besar terdiri dari masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tidak dapat diandalkan untuk pengembalian modal. Seperti dikatakan diatas bahwa fungsi ruang publik dapat diuraikan sebagai berikut³³:

- a. Sebagai pusat interaksi, pusat interaksi, komunikasi masyarakat baik formal seperti upacara bendera, sholat Ied pada hari idul fitri, dan peringatan lainnya; informal seperti pertemuan individual, kelompok masyarakat dalam acara santai dan reaktif atau demo mahasiswa yang menjadi pemandangan sehari-hari akhir-akhir ini dengan tujuan menyampaikan aspirasi, ide-ide atau protes terhadap keputusan pihak penguasa, instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta lain.
- b. Sebagai ruang terbuka yang menampung koridor-koridor jalan yang kearah ruang publik tersebut dan sebagai ruang pengikat dilihat dari struktur kota, sekaligus sebagai pembagi ruang-ruang fungsi bangunan sekitar serta ruang untuk transit bagi masyarakat yang akan pindah kearah tujuan lain.
- c. Sebagai tempat kegiatan pedagang kaki lima yang menjajakan makanan dan minuman, pakaian, souvenir, dan jasa hiburan seperti tukang sulap, tarian kera dan ular dan sebagainya terutama dimalam hari.
- d. Sebagai paru-paru kota yang semakin padat, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan sebagai tempat olah raga, bermain dan bersama keluarga.

³³ Darmawan Edy, Teori dan Kajian Ruang Publik Kota, Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2003, hal 13-20c

1.5.13. Tipologi Ruang Publik

Menurut *Stephen Car* (1992) tipologi ruang publik dibagi menjadi beberapa tipe dan karakter sebagai berikut sebagai berikut³⁴:

A. Taman Umum (*Public Park*)

1. Taman Nasional (*National Park*)

Skala pelayanan taman ini adalah tingkat nasional, lokasinya berada di pusat kota seperti Jakarta yang berpengaruh terhadap kegiatan nasional. Bentuknya berupa zona ruang terbuka yang memiliki peran sangat penting dengan luasan melebihi taman-taman kota yang lain. Contohnya Taman Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan disini berskala nasional.

2. Taman pusat kota (*Downtown Parks*)

Taman ini berada dikawasan pusat kota, berbentuk lapangan hijau yang dikelilingi pohon-pohon peneduh atau berupa hutan kota dengan pola tradisional atau dapat pula dengan desain pengembangan baru. (contoh : alaun-alaun kota/simpang 5)

Areal hijau kota yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan santai dan berlokasi dikawasan perkantoran, perdagangan atau perumahan kota.

3. Taman Lingkungan (*Neighborhood Park*)

Ruang terbuka yang dikembangkan dilingkungan perumahan untuk kegiatan umum seperti bermain anak-anak, olahraga dan bersantai bagi masyarakat disekitarnya (contoh : Taman kompleks perumahan)

4. Taman Kecil (*mini park*)

Taman kecil yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan, kemungkinan termasuk air mancur yang digunakan untuk mendukung suasana taman tersebut. (contoh : taman-taman di pojok-pojok lingkungan /*setback* bangunan)

³⁴ Ibid, hal 12.

TIPE		KARAKTER
TAMAN- TAMAN UMUM	Taman Nasional	Dikembangkan untuk umum Merupakan zona ruang terbuka kota yang penting perannya. Terletak dekat pusat kota. Memiliki luasan yang lebih dibandingkan
	Taman-taman pusat kota	Lapangan rumput hijau dan pohon-pohon yang terletak dikawasan pusat kota, bisa berbentuk tradisional, taman-taman sejarah atau ruang terbuka pengembangan baru.
	Taman kota	Areal hijau kota yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan santai.
	Taman lingkungan	Ruang terbuka yang dikembangkan dilingkungan perumahan, untuk kegiatan umum, dan merupakan bagian zoning kota atau bagian pengembangan perumahan, termasuk tempat bermain, fasilitas olahraga dsb.
	Taman kecil/taman kantong	Taman kota kecil yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan, termasuk air mancur.

B. Lapangan Dan Plaza (*Squares And Plazas*)

1. Lapangan Pusat Kota (*central square*)

Ruang publik ini sebagai bagian pengembangan sejarah berlokasi dipusat kota yang sering digunakan untuk kegiatan formal seperti upacara-upacara peringatan hari nasional, sebagai *Rendevous points* koridor-koridor jalan dikawasan tersebut. Disamping untuk kegiatan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun apresiasi budaya. (contoh : alun alun purworejo).

2. Plaza Pengikat (*Corporate Plaza*)

Plaza ini merupakan pengikat dari bangunan-bangunan komersil atau perkantoran, berlokasi dipusat kota dan pengelolaannya dilakukan oleh pemilik kantor atau pemimpin kantor tersebut secara mandiri.

TIPE		KARAKTER
Lapangan dan plaza	Lapangan pusat kota (<i>central square</i>)	Merupakan bagian dari pengembangan sejarah pusat kota Sering dipakai kegiatan formal, atau tempat pertemuan jala-jalan utama kota. Dan sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan umum.
	Plaza perkantoran	Plaza yang dikembangkan sebagai bagian dari perkantoran atau bangunan komersial. Berada di pusat kota. Dibangun dan dikelola oleh pemilik kantor atau pemimpin perusahaan secara mandiri.

C. Peringatan (*Memorial*)

Ruang publik yang digunakan untuk memperingati memori kejadian penting bagi umat manusia atau masyarakat ditingkat lokal atau nasional. (contoh: tugu pahlawan Surabaya)

TIPE	KARAKTER
Peringatan (<i>memorial</i>)	Ruang publik yang memiliki memori kejadian penting bagi umat manusia atau masyarakat dilokasi tersebut.

D. Pasar (*Markets*)

- Pasar Hasil Bumi (*Farmers' Markets*)

Ruang terbuka atau ruas jalan yang digunakan untuk pasar hasil pertanian atau pasar loak. Biasanya bersifat temporer atau hari tertentu dan berlokasi diruang yang tersedia, jalan, plaza atau lapangan parkir. (contoh : pasar Tuban didepan Java Mall/Peterongan).

TIPE	KARAKTER
Pasar-pasar petani	Ruang terbuka atau ruas jalan yang digunakan untuk pasar hasil pertanian atau pasar loak. Biasanya bersifat temporer atau hari tertentu dan berlokasi diruang yang tersedia, jalan, atau lapangan parkir.

E. Jalan (Streets)

- Pedestrian Sisi Jalan (*Pedestrian Sidewalk*)

Bagian ruang publik kota yang banyak dilalui orang yang sedang berjalan kaki menyusuri jalan yang satu yang berhubungan dengan jalan yang lain.

- Mal Pedestrian (*Pedestrian Mall*)

Suatu jalan yang ditutup bagi kendaraan bermotor, dan diperuntukan khusus bagi pejalan kaki. Fasilitas tersebut biasanya dilengkapi dengan aksesori kota seperti pagar, tanaman dan berlokasi dijalan utama pusat kota.

Contoh : Harajuku Tokyo Jepang

- Mal Transit (*Transit Mall*)

Pengembangan pencapaian transit untuk kendaraan umum pada penggal jalan tertentu yang telah dikembangkan sebagai pedestrian area.

- Jalur Lambat (*Traffic Restricted Streets*)

Jalan yang digunakan sebagai ruang terbuka dan diolah dengan desain pedestrian agar lalulintas kendaraan terpaksa berjalan lamban, disamping dihiasi dengan tanaman sepanjang jalan tersebut.

- Gang Kecil Kota (*Town Trail*)

Gang-gang kecil ini merupakan bagian jaringan jalan yang menghubungkan ke berbagai elemen kota satu dengan yang lain yang sangat kompak dan *integrated*. Ruang publik ini direncanakan dan dikemas untuk mengenal lingkungan.

TIPE		KARAKTER
Jalan-jalan	Trotoar jalan	Merupakan bagian kota yang dilalui oleh orang-orang pejalan kaki sepanjang pinggiran jalan yang berhubungan dengan jalan-jalan yang lain.
	Mal pedestrian	Suatu jalan yang ditutup untuk lalu lintas kendaraan. Biasanya dilengkapi dengan pagar, tanaman, dan biasanya berlokasi disepanjang jalan Utama dipusat kota.
	Mal Transit	Pengembangan pencapaian transit kendaraan umum pada penggal jalan yang dikembangkan untuk pedestrian.
	Jalan dengan lalu lintas lambat	Jalan yang digunakan sebagai ruang terbuka, untuk menghambat lalu lintas kendaraan, dengan mengembangkan pola pejalan kaki dan tanaman pinggir jalan.
	Gang kecil Kota (<i>Town trail</i>)	Menghubungkan bagian-bagian kota melalui jalan-jalan kecil kota yang terintegrasi. Penggunaan jalan dan ruang terbuka yang direncanakan dan dikemas untuk mengenal lingkungan.

F. Tempat Bermain (*Playgrounds*)

- Tempat bermain (*playground*)

Ruang publik ini berlokasi di lingkungan perumahan, dilengkapi peralatan tradisional seperti papan luncur, bandulan, dan fasilitas tempat duduk untuk dewasa, disamping dilengkapi dengan alat permainan untuk kegiatan petualangan.

- Halaman sekolah (*schoolyard*)

Ruang publik halaman sekolah yang dilengkapi fasilitas untuk pendidikan lingkungan atau ruang untuk melakukan komunikasi

TIPE		KARAKTER
TEMPAT BERMAIN (<i>playgrounds</i>)	Tempat bermain (<i>playground</i>)	Berlokasi di lingkungan perumahan, dilengkapi peralatan tradisional seperti papan luncur, bandulan dan fasilitas tempat duduk untuk dewasa. Kadang kadang dilengkapi dengan alat permainan untuk petualangan
	Halaman sekolah	Berlokasi di halaman sekolah, yang dilengkapi fasilitas untuk pendidikan lingkungan atau ruang berkomunikasi

G. Ruang Komunitas (*Community Open Space*)

1. Taman Masyarakat (*Community Garden*)

Ruang-ruang kosong di lingkungan perumahan yang didesain dan dikembangkan serta dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. Ruang ini dilengkapi dengan fasilitas penataan taman termasuk gardu pemandangan, areal bermain, tempat tempat duduk dan fasilitas estetis lain.

TIPE		KARAKTER
RUANG KOMUNITAS (<i>community open space</i>)	Taman untuk masyarakat (<i>Community garden/park</i>)	Ruang kosong di lingkungan perumahan yang didesain dan

		dikembangkan serta dikelola sendiri oleh masyarakat setempat; termasuk juga fasilitas gardu, pemandangan, areal bermain, taman masyarakat yang sering dikembangkan atau dibangun di atas tanah tanah milik pribadi
--	--	--

2. Jalan Hijau Dan Jalan Taman (*Greenway & Parkways*)

Merupakan jalan pedestrian yang menghubungkan antara tempat rekreasi dan ruang terbuka

TIPE		KARAKTER
<i>GREENWAYS</i> DAN <i>PARKWAYS</i>	Jalan yang menghubungkan antar tempat rekreasi dan ruang terbuka alami	Jalan pedestrian atau jalur sepeda yang menghubungkan tempat rekreasi dan alam terbuka.

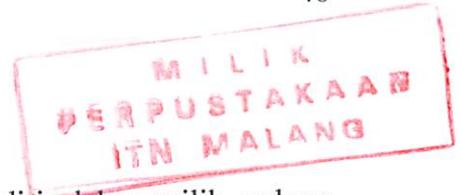
H. Atrium/Pasar di dalam Ruang (*Atrium/Indoor Market Place*)

- Atrium

Atrium merupakan ruang dalam suatu bangunan yang berfungsi sebagai antrium, berperan sebagai pengikat ruang-ruang disekitarnya yang sering digunakan untuk kegiatan komersil dan merupakan pedestrian area. Pengelolaannya ditangani oleh pemilik gedung atau pengembang atau investor.

- Pasar/Pusat perbelanjaan di pusat kota (*Market place/down town shopping center*).

Biasanya memanfaatkan bangunan-bangunan tua yang kemudian di rehabilitas ruang luar atau ruang dalamnya sebagai ruang komersil. Kadang-



kadang dipakai sebagai festival pasar dan dikelola sendiri oleh pemilik gedung tersebut.

TIPE		KARAKTER
ATRIUM/INDOOR MARKET PLACE	Atrium	Ruang dalam milik swasta yang dibangun sebagai atrium; berada di dalam gedung, seperti plaza atau jalan pedestrian yang diperhitungkan sebagai bagian ruang sistim kota; pembangunan dan pengolaannya ditaganni sendiri oleh pihak swasta yang memiliki gedung tersebut sebagai ruang komersil.
	Pasar/ pusat perbelanjaan pusat kota (<i>marketplace/ downtown shopping centre</i>)	Biasanya memanfaatkan bangunan tua yang kemudian direhabilitasi baik ruang luar maupun dalam; kadang kadang dipakai untuk festival pasar dan dkelolah secara komersial oleh pemiliknya.

I. Ruang Dilingkungan Rumah (*Found/Neighborhood Spaces*)

Ruang terbuka yang mudah dicapai dari rumah, seperti sisa kapling disudut jalan atau tanah kosong yang belum dimanfaatkan dapat dipakai sebagai tempat bermain bagi anak anak atau tempat komunikasi orang dewasa atau orang tua.

TIPE		KARAKTER
<i>FOUND/NEIGHBORHOOD SPACES</i>	Ruang terbuka sehari hari	Ruang terbuka yang mudah dicapai seperti sudut jalan, tangga menuju bangunan dsb. Bisa berlokasi ditanah kosong atau tapak bangunan di lingkungan perumahan setempat yang belum mulai

		dimanfaatkan; biasanya dimanfaatkan oleh anak-anak dan dewasa untuk bermain atau berinteraksi satu sama lain.
--	--	---

J. Waterfront

Ruang ini bisa berupa pelabuhan, pantai, bantaran sungai, bantaran danau, atau dermaga. Ruang terbuka ini berada disepanjang rute aliran air di dalam kota yang dikembangkan sebagai taman untuk *waterfront*

TIPE		KARAKTER
WATERFRONTS	Waterfronts, pelabuhan Pantai, <i>riverfronts</i> , Atau dermaga	Ruang terbuka sepanjang rute aliran air di dalam kota; terdapat jalan umum menuju <i>waterfronts areal</i> ; sebagai Pengembangan taman untuk waterfronts

1.5.14. Kriteria Ruang Publik

Ruang publik yang menarik akan selalu dikunjungi oleh masyarakat luas dengan berbagai tingkat kehidupan sosial-ekonomi-etnik, tingkat pendidikan, perbedaan umur dan motivasi atau tingkat kepentingan yang berlainan. Kriteria ruang publik secara esensial ada tiga yakni³⁵ :

1. Dapat memberikan makna atau arti bagi masyarakat setempat secara individual maupun kelompok (*meaningful*).

³⁵ Darmawan Edy, Teori dan Kajian Ruang Publik Kota, Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2003, hal 2

2. Tanggap terhadap semua keinginan pengguna dan dapat mengakomodir kegiatan yang ada pada ruang publik tersebut (*responsive*).
3. Dapat memberikan kehadiran berbagai lapisan masyarakat dengan bebas tanpa ada diskriminasi (*democratic*).

1.6. Landasan Teori

Dalam sub bab ini akan memaparkan teori inti yang diambil dan merupakan acuan pokok untuk perumusan variabel penelitian sebagai dasar pengerjaan analisis. Landasan teori yang di gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Teori Kebudayaan

Kehidupan sosial merupakan salah satu aspek dari kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut *C. Kluchon* dalam bukunya “*Universal Categories of Culture*” (1953) Meliputi : Bahasa, sistem pengetahuan, Organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem realigi dan kesenian.

1.6.2. Interaksi Sosial

Masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dikarenakan adanya interaksi antara anggotanya. Interaksi ini sering disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Interaksi sosial dapat terjadi dengan adanya kontak sosial dan komunikasi antar anggota masyarakat.

Menurut Gilin, ada dua proses sosial yang timbul sebagai akibat dari adanya interaksi sosial:

1. Proses yang asosiatif, yang terbagi dalam bentuk kerja sama yang akomodatif. Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama, ada lima bentuk kerja sama, yaitu:
 - Kerukunan, yang mencakup gotong royong dan tolong menolong.

- *Bargaining*, yaitu pelaksanaan perjanjian antara dua organisasi atau lebih mengenai pertukaran barang dan jasa.
 - Ko-optasi, yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk menghindari terjadinya kegoncangan stabilitas organisasi.
 - Koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama.
 - *Joint-venture*, yaitu kerja sama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya pengeboran minyak dan lain sebagainya.
2. Proses interaksi sosial yang disosiatif yang terdiri atas tiga bentuk, yaitu persaingan (*competition*), kontravensi (*contravention*) dan pertentangan (*conflict*).
- Persaingan terdiri atas persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan atau peranan dan persaingan ras.
 - Kontravensi merupakan gejala-gejala yang berada di antara persaingan dan pertentangan yang terdiri atas kontravensi antar masyarakat, antagonisme keagamaan, kontravensi intelektual dan oposisi moral.
 - Pertentangan terdiri atas pertentangan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan antar kelas-kelas sosial, pertentangan politik dan pertentangan kepentingan.

Hubungan sosial atau interaksi sosial dua orang atau lebih dalam kaitannya dengan hubungan antar suku/etnis lebih cenderung dilihat sebagai perbuatan sosial yang berkaitan dengan identitas suku/etnis. Dalam hal ini ada dua faktor:

3. Faktor nilai budaya yang menentukan identitas etnik, kelestarian, kesukubangsaan, perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dan berbagai permasalahan sebagaimana terwujud dalam lingkungan masyarakat majemuk.
4. Faktor proses-proses sejarah yang memperlihatkan adanya kecenderungan kelompok etnik tertentu untuk mengaktifkan kembali identitas kesukubangsaan untuk kepentingan tertentu, serta pemaksaan untuk

kembali menggunakan identitas etnik yang lama, menerima apa adanya atau malah mendasari penerimaan identitas yang baru.

Identitas etnik merupakan sebuah penilaian kemasyarakatan yang dipaksakan begitu saja untuk menjadi bagian dari identitas para penduduk dalam kebudayaan etnik tertentu. Batas-batas etnik itu akan tetap ada, walaupun terjadi proses saling penetrasi dan pengaburan batas kebudayaan antara dua kelompok etnik yang berbeda. Selain itu perbedaan etnik secara kategori tidaklah bergantung pada ada atau tidaknya kontak fisik antar kelompok tersebut.

Kelompok etnik adalah merupakan suatu populasi yang secara biologis mampu tumbuh dan bertahan, karena mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan kebersamaan dalam suatu budaya. Kelompok etnik ini membentuk suatu jaringan komunikasi dan interaksi sendiri dan menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari populasi kelompok lain.

Kelompok masyarakat suku yang terbentuk oleh kesamaan kebudayaan mempunyai sistem perilaku yang berbeda setiap individunya. Perilaku merupakan suatu pola wujud tingkah laku yang tumbuh berdasarkan karakter lingkungan pembentuknya. Perilaku ini sangat mempengaruhi setiap individu dari berbagai masyarakat suku terhadap pola ruang dan pola hubungan sosial yang dihasilkan.

1.6.3. Ruang

Ruang Menurut Kepmen Kimpraswil nomor 327/KPTS/M/2002 yaitu wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Definisi ruang yaitu suatu wilayah permukaan bumi (daratan) yang memiliki letak geografis berupa letak geografis dan berupa batasan-batasan wilayah dengan skala yang bervariasi, batas tersebut disesuaikan dengan keadaan fisik lingkungan, sosial maupun pemerintahan³⁶.

³⁶ Jayadinata Johara T, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan, Perkotaan dan Wilayah, Penerbit ITB Bandung, 1992 hal 15

1.6.4. Ruang Publik (*Public Space*)

Ruang publik adalah komponen penting dalam pembangunan kota yang berfungsi sebagai wahana interaksi antar warga yang biasanya mengalami kekurangan wahana berkomunikasi. Ruang publik sebagai bagian kehidupan masyarakat untuk memberi nilai tambahan bagi lingkungan, dan estetika kota.³⁷

Berkaitan dengan penelitian ini maka ruang publik yang dimaksud disini adalah pengaruh penggunaan ruang-ruang publik terutama di permukiman tradisional yang setiap orang dengan tujuan pelestarian budaya lokal sekaligus pengembangan sektor pariwisata. Selain itu juga penyediaan ruang publik untuk skala regional kota yang dapat menampung aktifitas sosial masyarakat kota.

1.6.5. Teori Pola Pemanfaatan Ruang

Pola keruangan masyarakat yang dapat dilihat dari kegiatan masyarakat akan membentuk ruang-ruang berdasarkan perilaku masyarakat (Amos Rapoport), yaitu:

1. *Home Range* (ruang kegiatan masyarakat).

Batas-batas umum pergerakan reguler penduduk yang tersedia atas beberapa setting atau lokasi, serta jaringan penghubung antar setting yang diklasifikasikan menjadi *Home range* harian, mingguan serta bulanan.

2. *Core area* (area inti)

Merupakan batas *home range* yang paling sering dipakai, dipahami dapat secara langsung di kontrol.

3. *Territory* (teritori)

Suatu area yang secara spesifik dimiliki dan dipertahankan baik secara fisik maupun non fisik (dengan aturan-aturan maupun norma-norma tertentu). Teori ini biasanya dipertahankan oleh sekelompok penduduk yang mempunyai kepentingan yang sama dan saling bersepakat untuk mengontrol arealnya.

³⁷ Stephen, Leane g. Rivlin, Mark Francis, Andrew M. Stone, Bogor Cisarua, 27-30 Maret 2003 Carr, Public Space, Environment And Behavior Series, University press, Victoria, 1992, hal. 79-84

4. *Jurisdiction* (area terkontrol)

Suatu area yang dikuasai dan dikontrol secara temporer oleh sekelompok penduduk; Oleh karena penguasanya bersifat temporer, dimungkinkan suatu area dikuasai oleh beberapa kelompok yang berbeda.

5. *Personal distance* (ruang personal)

Suatu jarak atau area pada intervensi oleh orang lain akan dirasakan mengganggu oleh seseorang. *Personal distance* biasanya tidak mempunyai penampakan fisik yang jelas serta bersifat fleksibel³⁸.

1.6.6. **Konsepsi Mengenai Ruang**

Untuk mengetahui batasan-batasan ruang publik dan ruang privat, oleh beberapa ahli diusulkan paling tidak ada tiga tipologi untuk membedakan atau mengklasifikasikan batas-batas ruang publik dan privat (Rapoport, 1997) yaitu :

1. Tipologi pertama adalah yang mengusulkan 4 klafisikasi ruang perkotaan yakni: *personal occupancy* (terbatas untuk keluarga), *community occupancy* (terbatas untuk satu grup atau satu kelompok sosial tertentu), *society occupancy* (bebas untuk seluruh masyarakat) serta *free occupancy* (tak ada pembatas).
2. Tipologi kedua, mengusulkan 6 pembagian atau klasifikasi ruang kota yakni: *urban public* (terbuka untuk umum), *urban semi public-public space* (terbatas penggunaannya), *group public* (bebas untuk beberapa kelompok penduduk kota), *group private* (terbatas untuk 1 kelompok saja) *family private* (terbatas untuk satu keluarga) serta *individual private* (hanya untuk individu)
3. Tipologi ketiga, mengusulkan empat klasifikasi, akan tetapi berbeda dengan tipologi pertama yakni: *public territory* (bebas untuk setiap orang), akan tetapi harus mematuhi norma-norma yang berlaku di area tersebut, *home territory*, dikuasai oleh 1 keluarga, *interactional territory* suatu area

³⁸ Setiawan Haryadi, B, *Arsitektur Lingkungan Dan Perilaku*, Penerbit Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan Dirjen Pendidikan Tinggi DEPDIKBUD RI 1995, Hal : 60-62

untuk berkomunikasi antar beberapa kelompok sosial tertentu, *body territory*, yakni *personal space* yang bersifat individual³⁹.

1.7. Variabel Penelitian

1.7.1. Seleksi Variabel Penelitian

Proses seleksi terhadap unsur-unsur budaya dilakukan dengan kajian awal terhadap tujuh unsur-unsur budaya menurut *cultural universe* yang kemudian disesuaikan dengan judul penelitian dan kondisi di wilayah studi. Dari hasil seleksi ini maka disimpulkan ada tiga unsur budaya yang dianggap berpengaruh besar terhadap pembentukan ruang publik pada masyarakat suku Marind. Peran sentral dari agama tradisional *Mayo* dalam kehidupan sehari-hari suku Marind dan posisi penting tanah dalam budaya masyarakat Marind, menjadi dasar pertimbangan dipilihnya tiga unsur tersebut. Unsur kebudayaan *bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi* tidak terlalu berpengaruh besar pada pembentukan ruang publik karena diasumsikan bahwa unsur-unsur kebudayaan di atas tidak menggunakan ruang yang besar dan tidak melibatkan orang yang banyak. Sistem kesenian di masyarakat Marind tidak lepas dari sistem religi mereka. Tidak seperti suku Asmat, suku Marind tidak mengenal budaya pahat/ukir. Yang menonjol dari suku Marind adalah tari-tarian. Setiap konsep tarian adalah merupakan bagian dari ritual keagamaan yang menggambarkan *egog*, yaitu pementasan kembali kisah penciptaan dan kehidupan alam semesta. Tidak ada tarian dalam suku Marind yang berdiri sendiri, terlepas dari sistem religi. Oleh sebab itu dalam studi ini sistem kesenian menjadi bagian dari sistem religi. Lihat tabel 1.7.1a

³⁹ Setiawan Haryadi, B, *Arsitektur Lingkungan Dan Perilaku*, Penerbit Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan Dirjen Pendidikan Tinggi DEPDIBUD RI 1995, Hal : 63-64

Tabel 1.7.1a.
Proses Seleksi Unsur-Unsur Kebudayaan

No.	Unsur-unsur budaya berdasarkan teori kebudayaan	Unsur budaya pada masyarakat setempat	Aktivitas penggunaan	Pertimbangan penelitian	
1	Bahasa merupakan sistem perkembangan manusia yang lisan maupun tulisan untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. Bahasa di daerah perbatasan menjadi bahasa campuran, kecuali batas-batas tempat tinggal dua suku bangsa yang terpisah oleh lautan, gunung, sungai yang lebar, atau batas alam lainnya yang menghambat konflik manusia secara intensif. Bahasa dari suku bangsa selalu menunjukkan suatu variasi yang ditentukan oleh perbedaan daerah secara geografis, maupun oleh lapisan serta lingkungan sosial dalam masyarakat suatu suku bangsa berupa perbedaan dialek maupun penggunaan bahasa berdasarkan golongan atau lapisan sosial masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Wujud bahasa dalam tulisan tidak dikenal oleh suku Marind. • Pewarisan mitos/hikayat dilakukan secara lisan melalui upacara/ritual adat. • Bahasa asli suku Marind hanya lebih banyak digunakan dalam interaksi internal, dalam interaksi dengan pendatang/pihak luar, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. • Bahasa Marind terdiri dari empat dialek berbeda yaitu dialek Marind pantai, Marind-dek, Marind-bop dan Marind-mbian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Marind tidak digunakan dalam interaksi lintas etnis, tetapi ada beberapa frase dan kata yang telah dianggap umum dan sering digunakan bersamaan dengan bahasa Indonesia (mis.: <i>namek</i> untuk memanggil teman laki-laki, air <i>meti</i> untuk menyebut air surut) • Bahasa yang dipakai di kota Merauke adalah bahasa Indonesia, mengingat banyaknya etnis di sana sehingga bahasa daerah masing-masing etnis hanya digunakan dalam lingkup internal etnis tersebut, termasuk bahasa Marind. • Dalam ritual suku Marind, bahasa Marind tetap digunakan, sebagai media untuk mewariskan mitos suku, kisah tentang totem marga dan mengajarkan nilai-nilai dalam <i>Mayo</i>, agama tradisional Marind. 	• Penggunaan bahasa Marind tidak mendominasi secara umum (tidak seperti halnya bahasa Jawa di propinsi Jawa Tengah). Dengan demikian pengaruh bahasa dalam pembentukan ruang masyarakat Marind lebih cenderung terkait dengan sistem religi dan kekerabatan.	x
2	Pokok-pokok dari sistem pengetahuan dalam suatu kebudayaan merupakan uraian tentang cabang-cabang pengetahuan, oleh karenanya	• Sistem pengetahuan suku Marind tidak lepas dari agama tradisional mereka,	• Wujud konservasi dan preservasi alam tradisional telah dikenal oleh suku	• Sistem pengetahuan lebih banyak diaplikasikan masyarakat suku Marind dalam perspektif ajaran agama tradisional	x

«1.1.1 1-бад»

«1.1.1 бад»

2	«1.1.1 бад»	«1.1.1 бад»	«1.1.1 бад»	«1.1.1 бад»
<p>«1.1.1 бад»</p>	<p>«1.1.1 бад»</p>	<p>«1.1.1 бад»</p>	<p>«1.1.1 бад»</p>	<p>«1.1.1 бад»</p>

	<p>tiap-tiap bangsa-bangsa di dunia memiliki pengetahuan tentang alam sekitarnya, alam flora, alam fauna di daerah tempat tinggalnya, zat-zat, bahan mentah dan benda-benda dalam lingkungan tubuh manusia, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia dalam ruang dan waktu.</p>	<p><i>Mayo</i>, yang mengatur banyak hal mulai dari kehidupan manusia hingga bagaimana menjaga keselarasan alam semesta</p>	<p>Marind berupa pemali/tabu dan larangan-larangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiap marga akan mengatur suatu item yang adalah merupakan totem marga tersebut, baik hewan, tumbuhan ataupun gejala alam. Mereka berhak untuk mengatur tata cara upacara adat yang berkaitan dengan totem tersebut. • Sebagai suku yang memiliki agama yang bersifat totemistik, <i>Mayo</i> tetap menjadi peran sentral yang mengatur semua tatanan dalam kehidupan masyarakat Marind, termasuk ilmu pengetahuan. 	<p><i>Mayo</i>.</p>	
3	<p>Sistem kekerabatan dengan adanya industrialisasi tampak fungsi kekerabatan yang dahulunya sangat penting dalam faktor kehidupan, mulai berkurang dan bersamaan dengan itu adat-istiadat yang mengatur hidup kekerabatan sebagai suatu kesatuan mulai mengendor. Bentuk keluarga inti berdasarkan monogami bukan satu-satunya bentuk sistem kekerabatan di dunia, disamping prinsip bilateral, ada prinsip patrilineal (hubungan keturunan melalui kerabat pria), matrilineal (hubungan keturunan melalui kerabat wanita) dan juga prinsip-prinsip kombinasi seperti prinsip keturunan bilateral dan ambilineal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem kekerabatan suku Marind adalah patrilineal, yaitu garis keturunan berasal dari garis darah ayah. • Pembagian marga dibagi dalam dua kelompok besar yang kemudian dipecah lagi menjadi tujuh marga utama. • Tidak ada sistem kasta dalam suku Marind 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran laki-laki sangat sentral, kebanyakan upacara-upacara hanya boleh diikuti oleh kaum laki-laki. • Marga dan tanah selalu erat kaitannya. Keduanya merupakan satu integrasi yang tidak bisa dilepaskan dalam masyarakat Marind. • Sistem perkawinan adalah eksogami, tidak diperkenankan menikah bagi mereka yang berada dalam satu kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep marga dan tanah yang saling tidak terpisahkan dalam masyarakat Marind, sangat berpengaruh besar dalam pola pemakaian ruang. Kecenderungan kampug yang homogen juga disebabkan oleh adanya pengaruh sistem kekerabatan. 	✓

<p>արվճ.</p>	<p>նորոշ • օրացույցով նախ ավելի մտաբեր • պայմանական</p>	<p>նորոշ • արվճ. համար • արվճ. կարգի վճարում • արվճ. արկածում • արվճ. արժեքի վերադարձում • արվճ. արժեքի վերադարձում</p>	<p>իմաստական • արվճ. արժեքի վերադարձում • արվճ. արժեքի վերադարձում • արվճ. արժեքի վերադարձում • արվճ. արժեքի վերադարձում • արվճ. արժեքի վերադարձում</p>
<p>արվճ.</p>	<p>նորոշ • օրացույցով նախ ավելի մտաբեր • պայմանական</p>	<p>նորոշ • արվճ. համար • արվճ. կարգի վճարում • արվճ. արկածում • արվճ. արժեքի վերադարձում • արվճ. արժեքի վերադարձում</p>	<p>իմաստական • արվճ. արժեքի վերադարձում • արվճ. արժեքի վերադարձում • արվճ. արժեքի վերադարձում • արվճ. արժեքի վերադարձում • արվճ. արժեքի վերադարձում</p>
<p>արվճ.</p>	<p>նորոշ • օրացույցով նախ ավելի մտաբեր • պայմանական</p>	<p>նորոշ • արվճ. համար • արվճ. կարգի վճարում • արվճ. արկածում • արվճ. արժեքի վերադարձում • արվճ. արժեքի վերադարձում</p>	<p>իմաստական • արվճ. արժեքի վերադարձում • արվճ. արժեքի վերադարձում • արվճ. արժեքի վերադարձում • արվճ. արժեքի վերադարձում • արվճ. արժեքի վերադարձում</p>

			besar marga.		
4	<p>Teknologi dalam hal ini berupa cara produksi, memakai dan memelihara segala peralatan hidup dari suku bangsa. Teknologi tradisional, minimal meliputi delapan sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh manusia antara lain alat-alat produksi, senjata, wadah, alat-alat menyalakan api, makanan dan minuman, pakaian, rumah dan alat-alat transportasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi tradisional suku Marind telah ada sejak dahulu, di antaranya sistem drainase dan pemuliaan tanaman. • Senjata perang, berupa antara lain tombak, busur-panah, belati dan tameng, berbahan kayu dan bagian tubuh hewan, logam tidak dipergunakan. • Pakaian tradisional Marind berupa penutup kelamin dari alang-alang dan kulit <i>bia</i> (kerang) yang dilengkapi dengan hiasan-hiasan tubuh seperti penutup kepala, penutup dada, kalung dan penusuk hidung dari taring babi hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada beberapa teknologi tradisional yang telah jarang digunakan atau bercampur penggunaannya dengan teknologi modern. seperti alat-alat produksi, rumah, pakaian (hanya digunakan pada saat upacara) dan alat-alat menyalakan api. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran sistem teknologi tradisional dalam pembentukan ruang masyarakat Marind sehubungan dengan materi penulisan berdasarkan survey pengamatan awal tidak terlalu berpengaruh kuat. 	x
5	<p>Sistem mata pencaharian berkaitan dengan mata pencaharian dan usaha seseorang. Untuk masyarakat pedesaan umumnya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan jasa serta buruh.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem mata pencaharian utama suku Marind adalah meramu, berburu dan mencari ikan (nelayan). • Profesi ini tidak tetap, tergantung kepada musim dan keadaan cuaca yang dihadapi. • Tempat mereka meramu berupa <i>dusun-dusun</i> yang ada di tanah ulayat mereka. Selepas musim meramu, berburu dan menangkap ikan, maka 	<ul style="list-style-type: none"> • Mata pencaharian utama suku Marind tetap sebagai peramu, pemburu ataupun nelayan. Di samping itu juga ada yang mengusahakan kebun di sekitar rumahnya sebagai antisipasi jika kondisi alam tidak memungkinkan untuk melakukan tiga aktivitas mata pencaharian di atas. • Aktivitas mata pencaharian dilakukan secara bersama-sama, 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem mata pencaharian masyarakat Marind memungkinkan adanya pergerakan-pergerakan dan pembentukan ruang-ruang publik temporer. 	✓

7	<p>տակն իրականացնող անհատականությանը օգնություն ցուցաբերելու նպատակով հաստատված օրենքի հիման վրա կատարվող գործունեությանը կողմնակցելու նպատակով:</p>	<p>հարկային օգուտը ստանալու նպատակով:</p>	<p>հարկային օգուտը ստանալու նպատակով:</p>	<p>1</p>
7	<p>հարկային օգուտը ստանալու նպատակով կատարվող գործունեությանը կողմնակցելու նպատակով:</p>	<p>հարկային օգուտը ստանալու նպատակով:</p>	<p>հարկային օգուտը ստանալու նպատակով:</p>	<p>2</p>
7	<p>հարկային օգուտը ստանալու նպատակով կատարվող գործունեությանը կողմնակցելու նպատակով:</p>	<p>հարկային օգուտը ստանալու նպատակով:</p>	<p>հարկային օգուտը ստանալու նպատակով:</p>	<p>2</p>

		<p>tanda pemali/<i>sasi</i> akan dipasang sebagai pertanda larangan mengolah/mengeksploitasi tempat tersebut selama kurun waktu tertentu hingga tanda <i>sasi</i> dicabut.</p>	<p>terutama dengan sesama anggota marga yang bertalian darah erat maupun yang berhubungan melalui perkawinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan apa yang dihasilkan oleh mereka, pada dasarnya mereka dapat berswasembada dalam pemenuhan kebutuhan mereka, kecuali untuk item-item tertentu yang tidak dapat mereka cari atau produksi selain harus mendapatkannya dari orang luar. 		
6	<p>Sistem religi terbagi dalam sistem religi dan ilmu gaib. Sistem religi dalam suatu kebudayaan dapat memelihara emosi diantara pengikut-pengikutnya, dengan demikian emosi keagamaan merupakan unsur penting dalam suatu religi tiga unsur lainnya yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan dan umat yang menganut religi tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem religi adalah sistem sentral dalam masyarakat Marind. Agama tradisional, <i>Mayo</i>, mengatur semua aspek yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat Marind. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh sistem religi sangat besar dalam kehidupan suku Marind, apa yang dilakukan oleh suku Marind pada dasarnya semua mengacu kepada ketaatan akan <i>Mayo</i>. Intinya adalah bahwa keseharian suku Marind tidak terlepas dari <i>Mayo</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem religi merupakan bagian penting dari suku Marind dan mengatur semua tatanan kehidupan mereka, termasuk dalam penggunaan ruang-ruang. 	✓
7	<p>Sistem kesenian merupakan wujud ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dituangkan dalam berbagai macam bentuk, seperti tarian, pahat/ukiran ataupun nyanyian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem kesenian suku Marind berupa syair-syar yang berisikan kisah-kisah totem dari tiap-tiap marga dan berupa tari-tarian yang biasanya dilakukan pada ritual-ritual adat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem kesenian dari suku Marind merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem religi, dengan kata lain tidak ada tarian yang dilakukan pada kegiatan yang bukan ritual adat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem kesenian dalam masyarakat Marind merupakan aspek yang sangat terkait dengan sistem religi. Terkait dengan materi penelitian maka sistem kesenian tidak dibahas tersendiri melainkan tercakup dalam sistem religi. 	x

✓ : unsur kebudayaan yang terpilih

x : unsur kebudayaan yang tidak terpilih

Meski empat unsur (bahasa, sistem kesenian, sistem teknologi dan sistem ilmu pengetahuan) tidak terpilih namun bukan berarti keempat unsur itu tidak dimasukkan sama sekali. Keempat unsur lain tetap ada, hanya saja lebih banyak tergabung ke dalam ketiga unsur yang terpilih. Unsur tambahan yang juga akan mengakomodir keempat unsur tadi yaitu unsur adat istiadat, di mana keempat unsur tadi juga tergabung di dalamnya.

Tabel 1.7.1b.
Unsur-Unsur Kebudayaan Yang Terpilih

Unsur-unsur budaya berdasarkan teori kebudayaan	Variabel terpilih berdasarkan kondisi eksisting wilayah studi	Dasar pertimbangan pemilihan unsur budaya
<p>Menurut <i>C Kluckhonn</i> dalam bukunya yang berjudul <i>Universal Categories of Culture</i> (1953) yang kemudian disimpulkan ulang oleh <i>Koentjaraningrat</i> dalam bukunya <i>Pengantar Ilmu Antropologi</i> (1979), terdapat 7 unsur kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia. Ketujuh unsur ini disebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahasa 2. Sistem Pengetahuan 3. Organisasi sosial 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi 5. Sistem mata pencaharian hidup 6. Sistem religi 7. Sistem kesenian 	<p>Unsur-unsur budaya pilihan diambil berdasarkan teori dan diasumsikan akan berpengaruh terhadap pembentukan ruang publik di wilayah studi, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem religi • Organisasi sosial (sistem kekerabatan) • Sistem mata pencaharian hidup • Adat-istiadat 	<p>Berdasarkan pengamatan awal pada wilayah studi unsur budaya seperti bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi tidak berpengaruh besar terhadap pembentukan ruang publik karena diasumsikan bahwa ketiga unsur budaya di atas tidak menggunakan ruang yang besar dan tidak melibatkan orang yang banyak. Namun berbeda dengan sistem religi, sistem mata pencaharian, sistem kesenian dan sistem kekerabatan selalu melibatkan orang banyak yang pada akhirnya membentuk ruang tersendiri. Sistem kesenian luruh ke dalam sistem religi dengan mempertimbangkan bahwa dalam tradisi masyarakat Marind, kesenian tidak lepas dari ritual keagamaan.</p>

1.7.2. Variabel Penelitian Terpilih

Variabel penelitian merupakan acuan pokok untuk perumusan sasaran sebagai dasar pengerjaan analisa. Variabel penelitian memaparkan teori inti yang diambil dan disesuaikan dengan sasaran yang dimaksud serta tinjauan pustakan yang dijabarkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.7.2.

meski empat unsur (bahasa, sistem kesenian, sistem teknologi dan sistem ilmu pengetahuan) tidak terpilih namun bukan berarti keempat unsur itu tidak dimasukkan sama sekali. Keempat unsur lain tetap ada hanya saja lebih banyak terdapat ke dalam ketiga unsur yang terpilih. Unsur tambahan yang juga akan mengkomodifikasi keempat unsur tadi yaitu unsur adat istiadat di mana keempat unsur tadi juga terdapat di dalamnya.

Tabel 1.7.1b
Unsur-Unsur Kebudayaan Yang Terpilih

Unsur-unsur budaya berdasarkan teori kebudayaan	Kelembagaan yang ada di masyarakat	Unsur-unsur budaya berdasarkan variabel terpilih berdasarkan penelitian
<ul style="list-style-type: none"> 1. Bahasa 2. Sistem kepercayaan 3. Organisasi sosial 4. Sistem perilaku hidup dan teknologi 5. Sistem mata pencaharian hidup 6. Sistem religi 7. Sistem kesenian 	<ul style="list-style-type: none"> • Adat-istiadat • Sistem mata pencaharian hidup • Organisasi sosial (kepercayaan) • Sistem religi 	<p>Menurut C. W. Ceram dalam bukunya yang berjudul <i>Unus et Universus</i> (Wageningen, 1953) yang kemudian diartikan ulang oleh Kertajaya (1979) dalam bukunya <i>Kepercayaan dan Antropologi</i> (1979) terdapat 7 unsur kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia. Keempat unsur ini di sebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia, yaitu:</p>
		<p>Unsur-unsur budaya penelitian diambil berdasarkan teori dan diartikan sebagai berikut: bahasa, sistem kepercayaan, adat-istiadat, mata pencaharian, sistem teknologi, sistem religi, kesenian, ilmu pengetahuan, dan sistem ilmu.</p>

1.7.2. Variabel Penelitian Terpilih

Variabel penelitian merupakan acuan pokok untuk perumusan sasaran sebagai dasar pengujian analisis. Variabel penelitian merupakan teori inti yang diambil dan disesuaikan dengan sasaran yang dimaksud serta tinjauan pustaka yang dijabarkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.7.2.

Tabel 1.7.2.
Variabel Penelitian

SASARAN	TEORI PENDUKUNG	KELOMPOK VARIABEL	VARIABEL AMATAN
<p>Mengidentifikasi pengaruh unsur-unsur kebudayaan dari suku Marind terhadap proses interaksi sosial budaya di kota Merauke.</p>	<p>Menurut Gilin, terdapat dua proses sosial akibat adanya interaksi sosial, yaitu proses yang positif (asosiatif) dan proses yang negatif (disosiatif).</p> <p>Hubungan sosial atau interaksi sosial dua orang atau lebih dalam kaitannya dengan hubungan antar suku/etnis lebih cenderung dilihat sebagai perbuatan sosial yang berkaitan dengan identitas suku/etnis. Dalam hal ini ada dua faktor:</p> <p>1. Faktor nilai budaya yang menentukan identitas etnik, kelestarian, kesukubangsaan, perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dan berbagai permasalahan sebagaimana terwujud dalam lingkungan masyarakat majemuk.</p> <p>2. Faktor proses-proses sejarah yang memperlihatkan adanya kecenderungan kelompok etnik tertentu untuk mengaktifkan kembali identitas kesukubangsaan untuk kepentingan</p>	<p>Interaksi perilaku sosial budaya</p> <p>1. Kerjasama (asosiatif)</p> <p>2. Hal-hal yang tidak sesuai (persaingan)</p> <p>3. Konflik sosial (akibat adanya persaingan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat antar suku)</p>	<p>a. Bentuk kegiatan b. Lokasi c. Intensitas kegiatan</p> <p>a. Bentuk kegiatan b. Lokasi c. Intensitas kegiatan</p> <p>a. Bentuk kegiatan b. Lokasi c. Intensitas kegiatan</p>

	tertentu, serta pemaksaan untuk kembali menggunakan identitas etnik yang lama, menerima apa adanya atau malah mendasari penerimaan identitas yang baru.		
Mengidentifikasi pengaruh unsur-unsur kebudayaan dari suku Marind dalam pembentukan ruang publik kota Merauke	Kehidupan sosial merupakan salah satu aspek dari kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut C.Kluckhohn dalam bukunya " <i>Universal Categories of Culture</i> " (1953) meliputi : Bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi dan kesenian.	Kegiatan sosial budaya Masyarakat berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Sistem religi • Sistem kemasyarakatan. • Sistem mata pencaharian. 	<ul style="list-style-type: none"> d. Bentuk kegiatan e. Lokasi f. Intensitas kegiatan a. Bentuk kegiatan b. Lokasi c. Orang-orang yang terlibat a. Struktur pekerjaan b. Jarak/waktu tempuh c. Lokasi Pekerjaan

1.8. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan laporan, dilakukan tiga tahap, yaitu tahap persiapan, yang dilanjutkan dengan tahap kompilasi data dan kemudian tahap analisa.

1.8.1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan pengumpulan data-data ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Pengkajian literatur-literatur yang berkaitan dengan tema, bertujuan untuk merumuskan landasan teori, konsep serta model dari penelitian yang akan dilakukan.

2. Perumusan variabel-variabel yang akan diamati dalam pelaksanaan studi diperoleh dari karakteristik kebudayaan yang berasal dari literatur.

1.8.2. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang ada diperoleh dengan melakukan survey, yaitu survey primer dan survey sekunder.

1.8.2.1. Survey Primer

Survey ini dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan untuk melihat dan mengamati hal-hal yang terjadi di lokasi studi baik mengenai karakteristik lokasi, karakteristik masyarakat dan pemanfaatan ruang. Survey primer ini dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Metode observasi yang dilakukan menggunakan dua pola dasar, yaitu:

- Observasi obyektif, maksudnya untuk mengamati kondisi nyata dari suatu obyek atau perilaku untuk dilihat. Untuk itu dibuat suatu pedoman observasi seperti checklist. Yang diamati adalah obyek atau perilaku tertentu dan menentukan posisi obyek atau perilaku tersebut, seperti baik, sedang atau kurang memuaskan.
- Observasi tidak langsung, yaitu observasi dilakukan oleh peneliti atau subyek lain untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Hasil dari observasi ini adalah akan diketahui keterkaitan antara ruang dengan perilaku manusia yang memanfaatkan atau menghuni ruang tersebut yang berlandaskan nilai-nilai adat istiadat, norma, religi/kepercayaan serta filosofi hidup yang tercermin dalam aktivitas hidup yang dilakukan masyarakat sehari-hari.

2. Wawancara Langsung

Melakukan wawancara secara langsung dengan orang-orang yang dianggap dapat memberikan data, informasi dan masukan-masukan yang penting sehubungan dengan studi yang dilakukan, seperti misalnya tokoh adat, sesepuh, budayawan lokal maupun peneliti lain yang juga melakukan riset di bidang yang terkait dengan studi yang dilakukan.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode *snowball-sampling technique* (teknik sampling bola salju) sebagaimana disarankan Bogdan dan Biklen (1982: 66) dan Miles dan Huberman (1984: 37) diperlukan dalam menentukan *key-persons*, agar pengumpulan data yang dilakukan dalam suatu penelitian lebih terarah dan sesuai fokus penelitian serta mengetahui sumber data dan informasi yang kompeten. Secara singkat cara kerja metode ini adalah sebagai berikut:

“peneliti pertama-tama datang kepada seseorang yang menurut pengetahuannya dapat dipakai sebagai *key-informant*, tetapi setelah berbicara secara cukup, informan tersebut menunjuk sumber lain yang dipandang mengetahui lebih banyak masalahnya, sehingga peneliti menunjukkan sebagai informan baru, demikian seterusnya sehingga data yang diperoleh semakin banyak, lengkap dan mendalam. Proses ini ibarat orang menggelindingkan bola salju yang makin lama akan makin membesar.”

Proses wawancara dimulai dengan mencari dan mendatangi pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi yang akurat mengenai seluk beluk suku Marind, seperti toko-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, budayawan lokal, peneliti yang juga sedang atau telah meneliti suku ini.

1.8.2.1. Survey Sekunder

1. Survey Literatur

Survey ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan kebudayaan dan adat istiadat Marind serta perilaku mereka dalam pemanfaatan ruang disekitarnya, melalui buku-buku literatur yang ada atau hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

2. Survey Instansi

Pengumpulan data sekunder guna melengkapi penelian ini dengan cara melakukan survey ke instansi-instansi terkait seperti BAPEKAB, Dinas Permukiman, Dinas Pariwisata, BPS, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/ desa untuk mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan kondisi wilayah study, antara lain:

- Data administratif (batas wilayah, kedudukan wilayah studi dalam lingkup regional)
- Data kependudukan, karakteristik sosial budaya, (kelompok umur, agama, jenis kelamin, mata pencarian, tingkat pendidikan)

1.8.3. Metode Analisa

1.8.3.1. Metode Analisa Kualitatif

Dalam tahap analisa ini, Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandang bagian sebagai suatu keutuhan. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miler (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Selain itu penggunaan metode analisa kualitatif ini dimaksudkan untuk menganalisa data-data yang bersifat abstrak yang tidak dapat dikuantitatifkan. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa konsep yang mempengaruhi pembentukan ruang publik kota Merauke sebagai akibat pengaruh dari kebudayaan suku Marindan menganalisa kecenderungan ruang publik tersebut yang terbentuk di masyarakat. Metode ini pada hakekatnya juga untuk mengamati kebudayaan yang berkembang di masyarakat beserta interaksinya. Metode ini menggunakan teori tertentu dan hipotesis yang diajukan untuk membenarkan atau menolak suatu teori, yang mana hal ini juga melihat hasil penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Penganalisaan ini mutlak dipergunakan untuk mentransformasikan bentuk kebudayaan terhadap bentuk ruangnya dari aspek sosial budayanya dan juga hasil perbandingan antara hasil analisa literatur dengan analisa hasil survey. Cara penganalisaannya adalah dengan mengidentifikasi kebudayaan dalam ruang berdasarkan variabel hasil perumusan sebelumnya yang ada di wilayah studi, selanjutnya dilakukan perbandingan dengan konsep ruang atau aturan adat-istiadat

masyarakat suku Marind sebelum mengetahui perubahan konsep ruang atau aturan adat istiadat masyarakat suku Marind di wilayah studi.

Metode analisa ini dilakukan dengan cara mengamati atau mengobservasi langsung lokasi studi daerah-daerah konsentrasi pemukiman suku Marind, baik pemukiman tradisional maupun pemukiman modern. Observasi ini dilakukan berkaitan dengan kebudayaan yang berkembang di dalamnya kemudian diformulasikan dengan tujuh unsur kebudayaan, namun karena dalam penelitian ini cuma dibatasi pada tiga unsur kebudayaan saja maka peneliti ini difokuskan pada kaitan penggunaan ruang publik terkait dengan pengaruh unsur-unsur kebudayaan suku Marind yang meliputi sistem religi, sistem kemasyarakatan dan sistem mata pencaharian.

Selain itu faktor adat istiadat dan hukum adat juga dimasukkan dalam analisa ini. Keterkaitan adat dan filosofi-filosofi di dalamnya yang berhubungan dengan ruang, seperti upacara kematian, perkawinan, upacara akil-balik (inisiasi), diobservasi dan kemudian akan *dicross-check* dengan tiga unsur kebudayaan di atas.

Analisa yang dilakukan meliputi:

A. Analisa terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat suku Marind yang tercakup ke dalam tiga unsur kebudayaan, yaitu sistem religi, sistem kemasyarakatan (kekerabatan) dan sistem mata pencaharian.

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan masyarakat suku Marind yang bersifat kultural dalam lingkup tiga unsur kebudayaan (sistem religi, sistem kemasyarakatan/kekerabatan dan sistem mata pencaharian), sehingga dapat dilakukan analisa selanjutnya untuk menemukan keterkaitan antara kegiatan-kegiatan tersebut dengan pembentukan ruang di kota Merauke.

B. Analisa penggunaan ruang yang biasa digunakan sehari-hari oleh masyarakat suku Marind terkait dengan tiga unsur kebudayaan yang diambil sebagai acuan variabel penelitian.

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui karakter dan tipologi bentukan ruang yang terbentuk akibat dari adanya pengaruh kebudayaan suku Marind, dalam

hal ini tiga unsur kebudayaan yaitu sistem religi, sistem kemasyarakatan dan sistem mata pencaharian.

- C. Analisa proses interaksi budaya suku Marind dengan pengaruh-pengaruh luar. Analisa ini mengkaji proses interaksi sosial budaya masyarakat suku Marind dalam ruang kota Merauke. Yang menjadi titik berat dalam analisa ini adalah interaksi sosial budaya masyarakat suku Marind dengan pengaruh dari luar, baik dengan bangsa asing, kaum pendatang domestik maupun dengan pemerintah. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi seiring dengan dinamika perkembangan jaman.

Temuan-temuan yang diharapkan dalam tahap analisa ini adalah:

1. Wujud-wujud kerja sama yang akomodatif/positif yang timbul dalam interaksi sosial budaya masyarakat suku Marind dengan pengaruh dari luar, seperti adanya akulturasi maupun asimilasi sosial budaya.
2. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan sosial budaya suku Marind, mulai dari ketidaksesuaian dan persaingan dengan kaum pendatang domestik hingga kepada ketidaksesuaian dengan pemerintah.
3. Konflik-konflik sosial yang timbul akibat adanya pertentangan-pertentangan sosial budaya dalam masyarakat suku Marind terhadap pengaruh-pengaruh dari luar.

Temuan-temuan di atas kemudian dikaji untuk menemukan keterkaitan dan pengaruhnya terhadap perkembangan kota Merauke.

1.9. Sistematika Pembahasan

Penyusunan tugas akhir yang berjudul: **“PENGARUH KEBUDAYAAN SUKU MARIND TERHADAP PEMBENTUKAN RUANG PUBLIK DI KOTA MERAUKE”** ini akan diuraikan dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang; rumusan masalah; tujuan dan sasaran; lingkup studi yang terdiri dari lingkup lokasi dan lingkup materi; tinjauan teori; landasan teori; metode penelitian yang terdiri dari metode observasi partisipasi, teknik kompilasi data, teknik wawancara, metode analisa serta terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DI WILAYAH STUDI

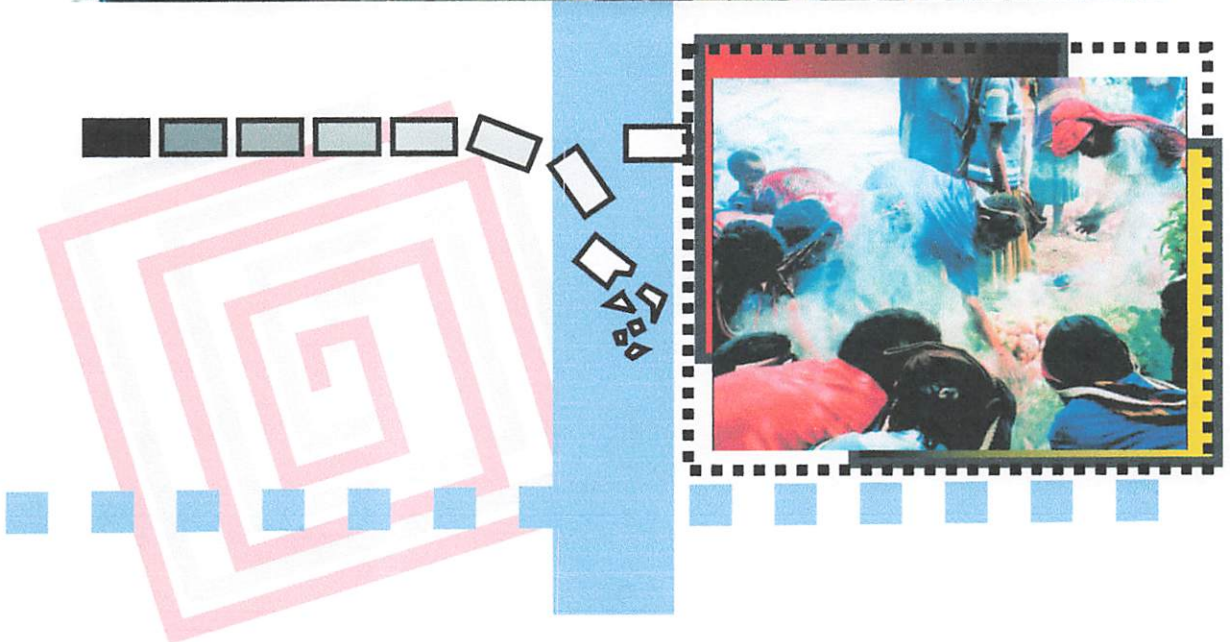
Bab II menguraikan tentang catatan historis dari suku Marind, unsur-unsur kebudayaan pada masyarakat suku Marind di kota Merauke, perwujudan fisik kebudayaan dan terakhir gambaran kota Merauke dalam prespektif masa kini.

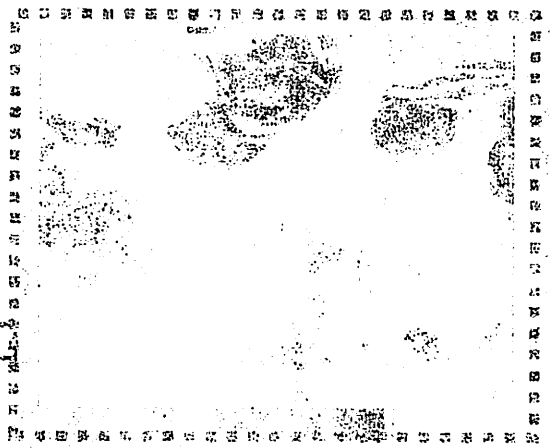
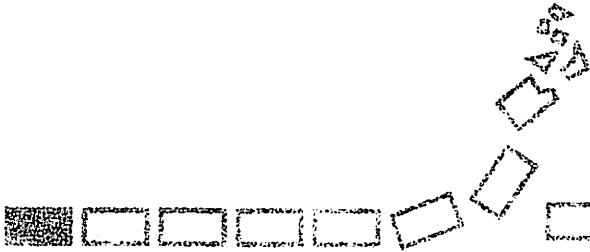
BAB III : ANALISA PENGARUH KEBUDAYAAN SUKU MARIND TERHADAP PEMBENTUKAN RUANG PUBLIK DI KOTA MERAUKE.

Bab III menguraikan tentang analisa terhadap pengaruh unsur-unsur kebudayaan dari suku Marind terhadap proses interaksi sosial budaya di kota Merauke dan analisa pengaruh unsur-unsur kebudayaan Marind terhadap pembentukan ruang publik kota Merauke.

BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab IV menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi.





STUDI HAYATI
MAMPU MAHASISWA
BAB III

UNIVERSITAS ...
...
...

BAB II

KARASTERISTIK WILAYAH STUDI

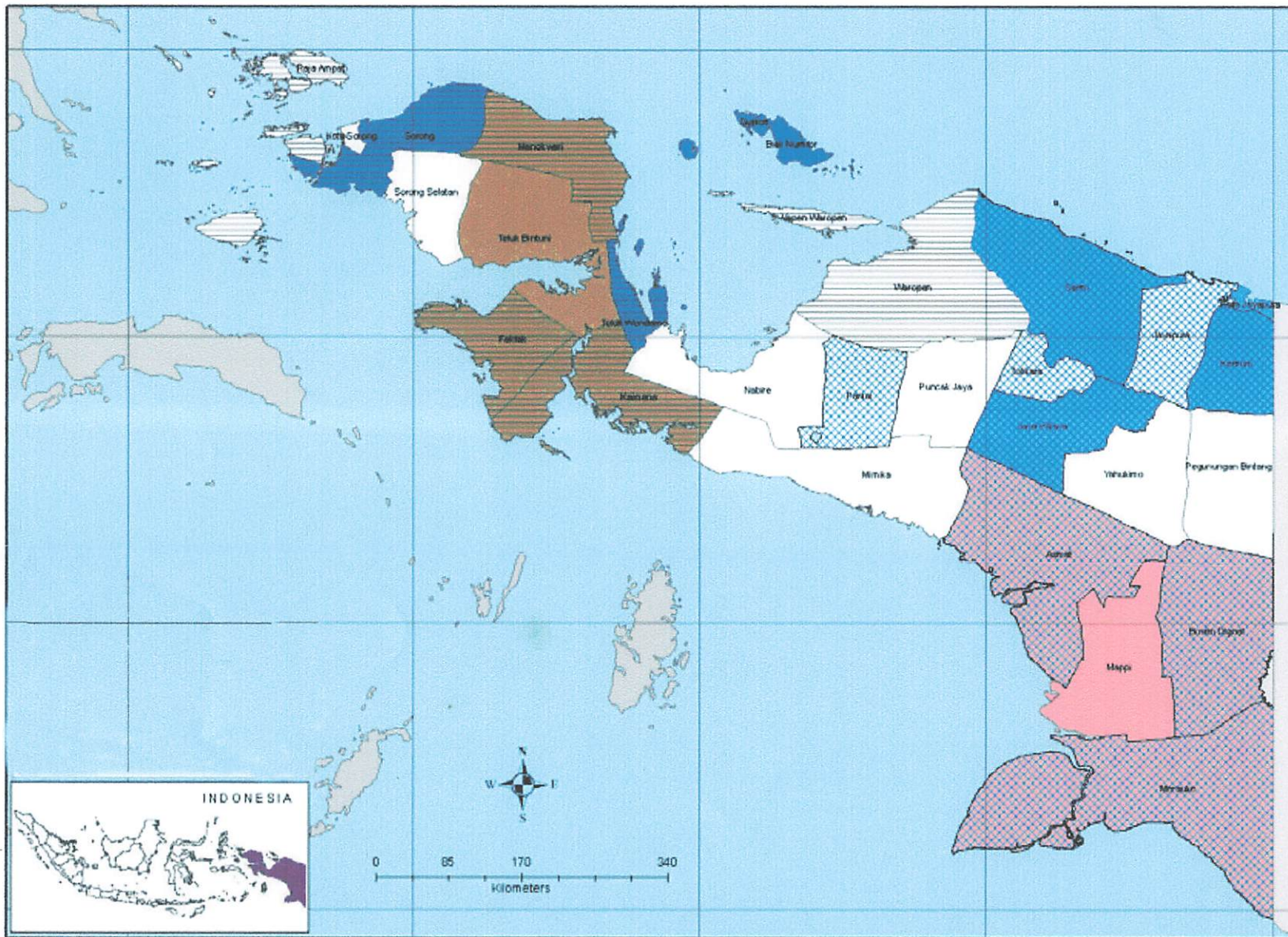
2.1. Gambaran Umum Provinsi Papua

Provinsi Papua terletak di ujung timur Indonesia, berada di Pulau Papua bagian barat dan berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea. Kondisi alamnya sangat beraneka ragam dengan topografi yang bervariasi. Mulai dari pesisir pantai selatan yang dipenuhi rawa hingga ke pegunungan tengah yang bersalju. Provinsi ini juga memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat unik di samping kekayaan hasil buminya yang melimpah, mulai dari tambang hingga hasil hutan.

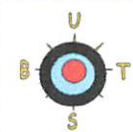
Provinsi Papua merupakan sebuah daerah besar di wilayah Indonesia, dengan luas daratan sebesar 42,2 juta hektar, yang merupakan 22% dari total luas Indonesia. Dalam sensus tahun 2000 yang dilakukan oleh BPS, penduduk Papua berjumlah 2,23 juta, dengan 580 ribu (26%) bermukim di daerah perkotaan, dan 1,65 juta (74%) tinggal di pedesaan. Menurut data BPS tahun 2003, jumlah penduduk meningkat menjadi 2,35 juta, dengan 646 ribu (27,5%) tinggal di daerah perkotaan and 1,7 juta (72.5%) di daerah pedesaan. Menurut sumber yang sama, hanya sepertiga penduduk perkotaan adalah asli Papua, sementara di daerah pedesaan penduduk asli merupakan tiga perempat dari total penduduk.

Papua dikenal sebagai wilayah yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Sedikitnya, menurut data yang dikenal banyak orang, terdapat 250 suku di Papua dan pasti akan terus bertambah seiring dengan makin intensif survey-survey ke wilayah-wilayah yang belum terjamah. Dengan berpedoman pada metode *FoAS (Field of Anthropological Study)*, Papua memiliki lima wilayah budaya atau satuan hak ulayat. Namun berdasarkan satuan wilayah yang menonjol dan otonom, kemudian digolongkan menjadi tujuh wilayah budaya, yaitu:

- a. Saireri (Biak dan sekitarnya)
- b. Doberai (Sorong-Fak Fak, Manokwari, dan sekitarnya)
- c. Bomberai (Timika dan sekitarnya)
- d. Ha-Anim (Jayawijaya dan sekitarnya)



Sumber : UNDP PAPUA



SKALA
1 : 850000

PROVINSI PAPUA

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF FORESTRY
GENERAL DIRECTORATE
OF FORESTRY

1973

ANAK PUNU : 1500000

ALAKS

1000000

0

ANAK PUNU ISNIN VOSTA

- e. Tabi (daerah pinggiran Laut Pasifik)
- f. Lani-Paço (Sentani dan sekitarnya)
- g. Me-Paço (Merauke dan sekitarnya).

Konsep FOAS ini pulalah yang dipakai Belanda untuk membentuk tata pemerintahan di Papua yang kemudian dikenal dengan *afdeling*. Belanda membagi Papua dalam enam *afdeling*, yakni

- a. *Hollandia* beribukota di Jayapura
- b. *Geelvinkbaai* di Biak
- c. *Centraal Nieuw Guinea* di Enarotali
- d. *Zuid Nieuw Guinea* di Merauke
- e. Fak Fak di Fak Fak
- f. *West Nieuw Guinea* di Manokwari.

2.2. Sejarah Pulau Papua

Bangsa Eropa yang pertama menginjakkan kakinya di wilayah Papua pada tahun 1528 adalah orang Spanyol yaitu Alvaro de SAVEDRA, seorang pimpinan Armada Laut Spanyol. Ia memberi nama pulau itu dengan sebutan *Isla del Oro* atau *Island of Gold* yang artinya Pulau Emas. Istilah *Nieuw Guinea* (Belanda) atau *New Guinea* (Inggris) berasal dari bahasa Spanyol, *Nova Guinea*, diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Inigo Ortiz De Retez dan digunakan sejak 1545. Ortiz menyusuri pantai utara dan singgah di Pulau Biak dan Padaido. Karena penduduk pribumi setempat tidak menerima, maka ia kemudian singgah lagi di Sungai Mamberamo dan ketika melihat ciri-ciri manusianya yaitu berkulit warna hitam dan berambut keriting sama seperti manusia yang ia lihat di suatu daerah di Afrika Selatan bernama Guinea, maka ia memberi nama pulau ini *Isla Nova Guinea*/Pulau Guinea Baru. Mulai saat itu Inigo Ortiz de Retez memproklamkan Papua itu sebagai milik Kerajaan Spanyol. Tahun 1663 Spanyol meninggalkan Papua setelah Belanda menghambat perdagangan rempah-rempah Spanyol di wilayah itu.

Pada awal abad ke-16, pelaut Portugis Antonio d'Abrau dan Francesco Serano menyebut Pulau Irian itu dengan nama *Os Papuas*. Sedangkan pelaut

Portugis lain menyebut pulau itu *Ilha de Papo Ia* dan De Jorge de Menetes menamakannya *Papua* yang dalam Bahasa Melayu berarti rambut keriting. Pada saat itulah nama Papua dikenal diseluruh dunia, bahkan penduduk pribumi telah menerima dengan baik nama tersebut, sebab Papua itu mencerminkan identitas mereka sebagai manusia hitam dan rambut keriting. Sejak saat itu nama Papua terus dipertahankan.

Luiz Vaez de Torres, pelaut Spanyol yang tergabung dalam armada Inggris pertama kali melihat Papua dalam perjalanannya tahun 1605-1607. Torres menemukan beberapa pulau termasuk Pulau *Louisiade* di Papua sebelah Timur dan selanjutnya ia bermukim dan menguasai wilayah itu. Perang besar yang berkecamuk di Eropa membawa akibat Papua jatuh ke tangan Inggris tahun 1774, yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, tahun 1775 dengan menggunakan kapal *La Tartare* dengan nahkoda kapten Forrest, Inggris berlayar ke Papua bagian barat dan berlabuh di Manokwari di Teluk Doreri untuk mengambil kembali rempah-rempah yang ditinggalkannya itu. Tahun 1793 merupakan tahun yang penting bagi Inggris untuk menguasai dan menjadikan wilayah itu sebagai koloni baru. Atas perintah Gubernur Inggris di Maluku, Inggris mulai mengadakan penjajakan dan membagi garis pulau sekitar Papua serta mendirikan benteng *Coronation* di Teluk Doreri. Karena adanya tentangan keras dari Kamaludin Syah, Sultan Tidore yang berkuasa atas seluruh wilayah Kesultanan Tidore, tahun 1814 Inggris meninggalkan Papua bagian barat.

Sebutan Papua untuk wilayah dan penduduknya, tercatat dalam jurnal Spanyol untuk pertama kali pada tahun 1521. Sedangkan sebutan Irian digunakan setelah perang dunia ke-2, sebenarnya bersumber dari suatu legenda dari daerah Biak-Numfor yang artinya tanah yang muncul dari laut, juga dapat berarti tanah milik kita. Setelah penyerahan kedaulatan ke Indonesia di tahun 1949, kata Irian oleh Soekarno dijadikan propaganda Trikora yang artinya menjadi berkonotasi politik (IRIAN: Ikut Republik Indonesia Anti Netherland). Sehingga lebih banyak di gunakan oleh separatis atau orang-orang pro Republik Indonesia. Nama Papua digunakan kembali pada masa pemerintahan presiden KH. Abdurrachman Wahid,

hingga sekarang. Secara yuridis nama itu dipakai sejak adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Provinsi Papua yang berada di wilayah salah satu pulau terbesar di dunia, diperkirakan mulai dihuni manusia sejak jaman glasial pertama dan menjadi jembatan bagi kemungkinan terjadinya migrasi manusia dan hewan dari daratan Asia. Di atas peta Pulau Papua tampak sebagai seekor burung raksasa atau ada yang menganggapnya mirip seekor dinosaurus. Empat puluh tujuh persen dari bagian wilayah itu yang berada di bagian barat adalah wilayah Irian sebelah barat, yang masuk dalam wilayah kekuasaan RI dan lima puluh tiga persen sisanya adalah wilayah sebelah timur, yang merupakan teritori negara Papua New Guinea.

Dikenalnya Pulau Papua oleh bangsa-bangsa pendatang seperti Cina, Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda dapat ditelusuri bahwa sejak abad ke-8 para pelaut dan pedagang Sriwijaya mengenalnya dengan nama *Janggi*. Sementara itu, pada abad ke-13 para pelaut dan pedagang Cina memberi nama Pulau Papua tersebut dengan *Tungki*. Masa Kerajaan Majapahit berkuasa pada abad ke-14 dan 15, dinyatakan bahwa Pulau Papua sebagai bagian "*wilayah yang kedelapan*" dari kerajaan tersebut.

2.3. Suku Bangsa di Papua

Penduduk pribumi Papua adalah rumpun bangsa Papua-Melanesoid yang bermukim di daerah Melanesia yakni sekelompok pulau yang berada di sebelah timur laut Australia. Rumpun bangsa Papua-Melanesoid yang hidup di Pulau Papua, penduduknya mempunyai ciri-ciri berkulit hitam, rambutnya hitam keriting, muka bulat, hidungnya tinggi serta lebar sering melengkung dan badannya agak besar. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa penduduk Papua itu adalah Bangsa Proto-Melanesia yang masuk secara bergelombang ke wilayah itu. Yang diikuti pula Bangsa Asia Paleo-Mongoloid dan bangsa-bangsa Negro serta Weddid.

Secara tradisional, tipe pemukiman masyarakat Papua dibagi kedalam 4 kelompok di mana setiap tipe mempunyai corak kehidupan sosial ekonomi dan budaya tersendiri. Klasifikasinya adalah sebagai berikut:

1. Penduduk pesisir pantai

Penduduk ini mata pencaharian utama sebagai nelayan di samping berkebun dan meramu sagu yang disesuaikan dengan lingkungan pemukiman itu. Komunikasi dengan kota dan masyarakat luar sudah tidak asing bagi mereka.



Gambar 2.3a. Penduduk pesisir pantai

2. Penduduk pedalaman yang mendiami dataran rendah

Mereka termasuk peramu sagu, berkebun, menangkap ikan disungai, berburu di hutan di sekeliling lingkungannya. Mereka senang mengembara dalam kelompok kecil. Mereka ada yang mendiami tanah kering dan ada yang mendiami rawa dan payau serta sepanjang aliran sungai. Adat istiadat mereka ketat dan selalu mencurigai pendatang baru.



Gambar 2.3b. Penduduk pedalaman yang mendiami dataran rendah

3. Penduduk pegunungan yang mendiami lembah

Mereka bercocok tanam dan memelihara babi sebagai ternak utama, kadang kala mereka berburu dan memetik hasil dari hutan. Pola pemukimannya tetap secara berkelompok, dengan penampilan yang

ramah bila dibandingkan dengan penduduk tipe kedua. Adat istiadat dijalankan secara ketat dengan "*Pesta Babi*" sebagai simbolnya. Ketat dalam memegang dan menepati janji. Pembalasan dendam merupakan suatu tindakan heroisme dalam mencari keseimbangan sosial melalui "*Perang Suku*" yang dapat diibaratkan sebagai pertandingan atau kompetisi. Sifat curiga terhadap orang asing ada tetapi tidak seketat penduduk tipe kedua.



Gambar 2.3. Penduduk pegunungan yang mendiami lembah

4. Penduduk pegunungan yang mendiami lereng-lereng gunung

Melihat kepada tempat pemukimannya yang tetap di lereng-lereng gunung, memberi kesan bahwa mereka ini menempati tempat yang strategis terhadap jangkauan musuh dimana sedini mungkin selalu mendeteksi setiap makhluk hidup yang mendekati pemukimannya. Adat istiadat mereka sangat ketat, sebagian masih "*kanibal*" hingga kini, dan bunuh diri merupakan tindakan terpuji bila melanggar adat karena akan menghindarkan bencana dari seluruh kelompok masyarakatnya. Perang suku merupakan aktivitas untuk pencari keseimbangan sosial, dan curiga pada orang asing cukup tinggi juga.

Penduduk Papua terdiri dari kelompok etnis (kelompok suku) yang mempunyai keunikan tertentu, seperti bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Di Papua terdapat hampir ± 250 macam bahasa sesuai dengan kelompok suku yang berada di daerah ini. Tiap kelompok suku mengenal sistem strata (kelas) dalam masyarakat (penduduk). Strata penduduk diklasifikasikan berdasarkan faktor-

faktor tertentu seperti keturunan, kekayaan dan sebagainya. Strata ini diwarisi secara turun temurun dengan nama dan struktur yang berbeda dan tiap suku, dan strata ini dapat mempengaruhi kepemimpinan dalam masyarakat atau kepemimpinan seseorang.

Kebudayaan penduduk asli Papua mempunyai persamaan dengan penduduk asli beberapa negara Pasifik Selatan maupun Rumpun, Malanesia. Kebudayaan penduduk asli di daerah-daerah pedalaman Papua kebanyakan masih asli (tradisional) dan sulit untuk dilepaskan dan sangat kuat pengaruhnya. Kebudayaan penduduk asli di daerah pantai sudah mengalami perubahan (walaupun tidak secara keseluruhan). Oleh karena kemudahan dalam transportasi maupun komunikasi, masyarakat di daerah pantai biasanya lebih cepat menerima pengaruh atau perubahan dari luar dengan sendirinya ikut mempengaruhi kebudayaan penduduk daerah setempat.

Beberapa kelompok suku tertentu terutama di daerah-daerah pedalaman (Jayawijaya), Merauke, Yapen Waropen, Paniai dan Kepala Burung, masih tetap mempertahankan kebudayaan aslinya secara utuh dan sulit dipengaruhi kebudayaan luar. Dalam perkembangannya dewasa ini sedikit demi sedikit mengalami perubahan, terutama dengan adanya misi gereja yang beroperasi di daerah-daerah pedalaman yang akan ikut mempengaruhi kebudayaan.

Orang Papua berkulit gelap sampai hitam dan berambut keriting. Hal ini menjadi ciri khas yang mirip dengan orang Negro, tetapi orang Papua memiliki mata orang Eropa dan pada umumnya berbadan berbulu dan janggut/kumis. Bersama masyarakat asli Australia (Aborigin) dan Negritos dari Philippina, masyarakat adat Papua merupakan tipe kelompok Negroid Timur.

2.4. Fase Perkembangan Pemerintahan Di Papua

Kedatangan Bangsa Belanda ke Papua dimulai pada tahun 1606 melalui sebuah ekspedisi "*Duyfken*" yang terdiri dari tiga buah perahu di bawah komandan Wiliam Jansen yang berlayar meninggalkan pantai Utara Jawa singgah di Kepulauan Kai, Aru dan pantai barat daya Papua. Pada saat itu Belanda hanya mengenal nama Papua untuk wilayah yang telah disinggahi tersebut. Namun sekitar tahun 1770, Belanda mengganti Papua dengan *Nieuw Guinea*. Nama

tersebut merupakan hasil terjemahan dan *Nova Guinea* atau *Nueva Guinea* yang diambil dan Bahasa Spanyol. Nama ini dimuat untuk pertama kalinya dalam peta-peta yang dicetak dan diterbitkan oleh *Isaac Tiron*. Pada tahun-tahun ke depan, nama Papua dan *Nieuw Guinea* dipakai bergantian hingga pertengahan abad ke-20.

Usaha Belanda untuk menjadikan Papua sebagai sebuah koloni, baru terwujud setelah Belanda meresmikan berdirinya benteng pertama di daratan Papua pada tanggal 24 Agustus 1828. Segera setelah pendirian benteng pertama yang diberi nama *Fort Du Bus*, hubungan antara pihak Belanda dan penduduk pribumi ditentukan dalam surat-surat perjanjian. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh Raja Namatote, Kasa (Raja Lokajihia), Lutu (Orang Kaya di Lobo, Mewara dan Sendawan). Mereka diangkat sebagai kepala di daerah masing-masing oleh Belanda dengan diberi surat pengangkatan sebagai kepala daerah, berikut tongkat kekuasaan berkepala perak. Selain ketiga kepala daerah ini diangkat pula 28 kepala daerah bawahan. Meskipun daerah Papua sudah sejak tahun 1823 dianggap oleh pemerintah Belanda sebagai bagian dan tanah jajahan Belanda di Kepulauan Nusantara, kekuasaan pemerintah jajahan itu baru sungguh-sungguh terwujud di Papua pada akhir abad ke-19.

Sebelumnya Belanda kurang memperhatikan daerah ini, karena dinilai kurang memiliki potensi ekonomi yang menguntungkan. Tetapi karena timbulnya pemberontakan pasukan Nuku dan Tidore pada tahun 1870 dan minat bangsa-bangsa Eropa lainnya untuk menguasai Papua semakin besar, Belanda menganggapnya sebagai ancaman serius. Pada tahun 1884, Inggris memproklamasikan bagian tenggara Papua sebagai daerah jajahannya. Pada tahun yang sama, Jerman mengklaim timur laut Papua sebagai koloninya. Belanda sendiri tetap mempertahankan wilayah barat Pulau Papua. Daya tarik pulau ini terletak pada kekayaan alamnya dengan berbagai bahan mentah yang sangat dibutuhkan Eropa untuk memacu industri. Konfrontasi yang terjadi antara Belanda, Inggris dan Jerman untuk menguasai Papua masih terus berlanjut. Hal tersebut baru dapat diselesaikan setelah dapat ditentukan sebuah batas wilayah jajahan Belanda atas Papua, melalui sebuah pertemuan antara Pemerintah

Belanda, Inggris dan Jerman di *Gravenhage* pada tanggal 16 Mei 1895. Penetapan batas antara Belanda, Inggris dan Jerman ini disebabkan karena pemerintah Inggris menguasai wilayah bagian Timur Papua dan Jerman menguasai Wilhelmstad (bagian lain dan Timur Papua), sementara bagian Barat Papua dikuasai oleh Belanda. Garis batas wilayah ini oleh Belanda dinyatakan dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1895 No. 220 dan 221.

Tahun 1898 Parlemen Belanda mensyahkan pengeluaran anggaran belanja untuk mendirikan pemerintahan di daerah Papua bagian Barat, supaya dapat dinyatakan bahwa Papua itu sungguh-sungguh merupakan bagian dari kekuasaan Belanda. Selanjutnya Pemerintah Belanda membagi daerah Papua ke dalam dua bagian yang masing-masing dikuasai oleh seorang kontrolir Belanda. Bagian utara dinamakan *Afdeeling Noord Nieuw Guinea*, dan bagian barat dan selatan dinamakan *Afdeeling West en Zuid Nieuw Guinea*. Kedua daerah itu merupakan sub-bagian dan Keresidenan Maluku. Kontrolir penguasa daerah *Noord Nieuw Guinea* ditempatkan di Manokwari, sedangkan kontrolir penguasa daerah *West en Zuid Nieuw Guinea* ditempatkan di Fakfak.

Pada awal abad ke-20 kembali terjadi pemisahan daerah *Zuid Nieuw Guinea* dan daerah *West Nieuw Guinea*. Bahkan tahun 1901 daerah *Zuid Nieuw Guinea* dipisah menjadi satu *afdeeling* tersendiri, dengan seorang asisten residen sebagai penguasa daerah. Pada tanggal 14 Februari 1902 untuk pertama kali bendera Belanda dinaikkan di muara Sungai Maro, di tempat yang sekarang dikenal sebagai Merauke. Dalam tahun 1904 di Teluk Humboldt ditempatkan pula seorang petugas pemerintahan jajahan Belanda. Tempat kedudukan petugas militer yang mendapat kekuasaan untuk memerintah suatu daerah bagian dan *Afdeeling Noord Nieuw Guinea* ini adalah perkampungan yang dinamakan *Hollandia* dan yang sekarang dikenal sebagai Jayapura. *Hollandia* dijadikan ibukota *Onderafdeeling Hollandia*, suatu daerah yang baru menjadi penting pada akhir Perang Dunia II.

Berkali-kali pemerintah Belanda berusaha mengadakan pembagian wilayah Papua, yang memungkinkan pemantapan kekuasaannya melalui pemerintah daerah. Namun usaha pembagian wilayah ke dalam kesatuan-kesatuan

daerah administratif selalu terbentur pada kenyataan yang ada, yang pada akhirnya hanya terwujud di atas kertas saja. Pembagian terakhir dan wilayah administratif Papua sebelum perang terjadi pada tahun 1940. Diputuskan bahwa daerah Papua sebagai bagian dan Karesidenan Maluku terdiri dari tiga *afdeeling* seperti yang telah disebutkan di atas, meliputi sejumlah *onderafdeeling* yang masing-masing dipimpin oleh seorang *controleur* dan di bawahnya terdiri dari satu *Bestuurrresort* di Boven Digul dan empat *Bestuurrresort* di Merauke. Tiga *afdeeling* ini dikepalai oleh tiga *asisten-residen* yang masing-masing berkedudukan di Tual, Fakfak dan Manokwari. Ketiganya berada dibawah residen Maluku yang berkedudukan di Ambon.

Ketika Perang Pasifik pecah, daerah Papua bagian barat dan utara secara cepat dapat dikuasai oleh militer Jepang. Hal ini dimungkinkan karena pada periode sebelumnya banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di daerah ini yang ternyata merupakan jaringan mata-mata Jepang. Selama pendudukan Jepang pada umumnya penduduk Papua berada dalam penderitaan. Di berbagai tempat timbul penlawanan penduduk pribumi yang sering ditindas dengan kejam oleh tentara Jepang. Kekejaman Jepang mendorong rakyat menyambut baik kedatangan pasukan Sekutu di bawah pimpinan Jenderal MacArthur pada tanggal 22 April 1944. Jayapura sendiri berubah menjadi pangkalan angkatan perang Sekutu. Tetapi tidak lama kemudian kesatuan-kesatuan Sekutu meneruskan serangan ke arah Barat dan meninggalkan kesatuan Belanda yang ikut mendarat di Jayapura. Para penguasa Belanda selanjutnya menjadikan Jayapura sebagai ibukota Papua.

Setelah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Bangsa Indonesia tidak pernah berhenti memperjuangkannya kemerdekaan Papua dan terus berupaya agar daerah tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Hal ini telah tercermin dalam keputusan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Pembukaan UUD 1945 bahwa wilayah Papua adalah hak mutlak wilayah Pemerintah Indonesia karena sesuai dengan batas negara yaitu daerah bekas Hindia Belanda dahulu. Kedudukan Papua terus diperdebatkan antara Indonesia dengan Belanda. Namun dengan kegigihan diplomasi, akhirnya disepakati bahwa Papua akan dibicarakan setahun lagi dan penyerahan seluruh

bekas wilayah Hindia Belanda kepada Indonesia akan dilaksanakan pada akhir tahun 1950.

Pada awal tahun 1950, segera setelah pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, pemerintah Belanda memperkuat kedudukannya di Papua dengan mengangkat S.I.J. van Waardenburg menjadi Gubernur *Nederlandsch Nieuw Guinea*, yang dibantu oleh tiga orang residen yang ditempatkan di Jayapura, Manokwari dan Merauke. Di Enarotali, di daerah pedalaman sekitar Danau Paniai, ditempatkan seorang *controleur* yang langsung bertanggungjawab kepada *resident* di Jayapura. Kemudian pada tahun 1952 diadakan perubahan pembagian wilayah pemerintahan ke dalam empat *afdeeling*, yaitu *afdeeling Noord Nieuw Guinea* dengan ibukotanya *Holandia*, *afdeeling Zuid Nieuw Guinea* dengan ibukota Merauke, *afdeeling Centraal Nieuw Guinea* yang ibukotanya belum ditetapkan, *afdeeling West Nieuw Guinea* dengan ibukota Sorong.

Usaha lain yang dilakukan pemerintah Belanda adalah membentuk *Dewan Nieuw Guinea (Nieuw Guinea Raad)* pada tahun 1961. Dalam tahun 1961 juga Gubernur *Nederlandsch Nieuw Guinea* membentuk Komite Nasional Papua yang terdiri dan 80 orang anggota. Tujuan pembentukan komite ini adalah untuk pembentukan Negara Papua. Usaha ini terus ditentang oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Karena Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan NKRI.

Perundingan-perundingan mengenai kedudukan Papua yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda belum menunjukkan hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Berulang kali masalah Papua diajukan oleh wakil-wakil Indonesia ke hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York, tanpa mengakibatkan perubahan sikap di pihak Belanda. Pemerintah Belanda justru melakukan tindakan penguatan diri di daerah Papua, baik dan segi politik, ekonomi maupun militer. Sementara itu Pemerintah Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh kemerdekaan bagi Papua. Hal itu diperkuat dengan penetapan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat. Sejak undang-undang tersebut ditetapkan, selanjutnya nama yang dipakai adalah Irian Barat.

Pada tanggal 19 Desember 1961 pimpinan Republik Indonesia mengubah cara perjuangan pembebasan Irian Barat. Selanjutnya Presiden Soekarno mengumumkan keputusan yang kemudian dikenal dengan Tri Komando Rakyat (TRIKORA). Isinya adalah menggagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat dan mempersiapkan diri untuk mobilisasi umum. Disamping itu, Amerika Serikat mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat. Dengan adanya tuntutan tersebut, Belanda tidak dapat memaksakan kehendak untuk menguasai Irian Barat. Untuk menyelesaikan masalah Irian Barat tersebut akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 dicapai suatu kesepakatan yang dikenal dengan New York Agreement, yang berisi:

1. Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan Belanda, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (*United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA*) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda. Sejak hari itu bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.
2. Pemerintah Sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan, bersamasama dengan alat-alat keamanan putra-putra Irian Barat sendiri dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan.
3. Pasukan-pasukan Indonesia yang sudah ada di Irian Barat, tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah kekuasaan Pemerintah Sementara PBB.
4. Angkatan Perang Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan. Yang belum pulang, ditempatkan di bawah pengawasan PBB, dan tidak boleh dipakai untuk operasi-operasi militer.
5. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.
6. Tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB.
7. Pemulangan anggota-anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963 dan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei

1963 Pemerintah RI secara resmi menerima pemerintahan di Irian Barat dari Pemerintah Sementara PBB.

8. Berdasarkan *New York Agreement* tersebut, prosedur penyerahan kedaulatan atas Irian Barat kepada Indonesia melalui tiga tahap. Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera Perserikatan Bangsa Bangsa dikibarkan di Irian Barat, berdampingan dengan bendera Belanda. Mulai saat itu pemerintah jajahan Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa Bangsa, yang kemudian membentuk pemerintahan sementara yang dinamakan *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA). Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Merah Putih dikibarkan secara resmi di Irian Barat berdampingan dengan bendera Perserikatan Bangsa Bangsa, sedangkan bendera Belanda diturunkan untuk selama-lamanya dari Irian Barat. Pada tanggal 1 Mei 1963 kedaulatan atas Irian Barat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia dan bendera Perserikatan Bangsa Bangsa diturunkan, sejak saat itu UNTEA menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia.

Setelah kesepakatan itu dipatuhi oleh kedua belah pihak, selanjutnya dilaksanakan pula Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang akan diadakan pada tahun 1969, tepatnya mulai tanggal 14 Juli-2 Agustus 1969. Pepera akan dilaksanakan di 8 (delapan) kabupaten, yaitu Merauke, Jayawijaya, Penedi, Fakfak, Sorong, Manokwari, Teluk Cendrawasih dan Jayapura. Hasil dan Pepera menyatakan bahwa rakyat Irian Barat berintegrasi dengan Indonesia.

Pada tahun 1973, nama Irian Barat berubah menjadi Irian Jaya. Perubahan nama tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Provinsi Irian Barat Nomor 1/DPRD/1973. Selanjutnya pada tahun 2001, nama Irian Jaya berubah nama menjadi Papua didasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan dalam Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya menjadi Papua.

2.5. Karakter Wilayah Studi Dalam Perspektif Masa Kini

2.5.1. Gambaran Umum Kota Merauke

Distrik Merauke merupakan salah satu distrik yang terdapat di wilayah kabupaten Merauke. Berada di posisi paling selatan dari Provinsi Papua dan merupakan kota pelabuhan utama di wilayah kabupaten Merauke. Posisi Merauke berada di $0^{\circ} 19' - 10^{\circ} 45' \text{ LS}$ dan $130^{\circ} 45' - 141^{\circ} 48' \text{ BT}$. Secara administratif, wilayah distrik Merauke berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Sungai Maro
Sebelah Selatan	: Laut Arafuru
Sebelah Timur	: Taman Nasional Wasur
Sebelah Barat	: Laut Arafuru dan Sungai Maro

Distrik Merauke terdiri dari 6 Kelurahan (Kelurahan Samkai, Kelurahan Karangindah, Kelurahan Mandala, Kelurahan Maro, Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Rimba Jaya) dengan luas wilayah kota $\pm 4759,79 \text{ Ha}$.

Merauke merupakan kota bentukan pemerintah Belanda, berbentuk linier di mana konsentrasi perkembangan kota memusat pada jalan utama kota. Komposisi penduduk kota sangat multi etnik, tidak hanya suku-suku di Papua saja tetapi juga dari hampir seluruh Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena Merauke adalah kota pelabuhan utama sekaligus sebagai ibu kota kabupaten Merauke. Penduduk asli Merauke adalah suku Marind, yang terkonsentrasi di daerah-daerah pesisir pantai.

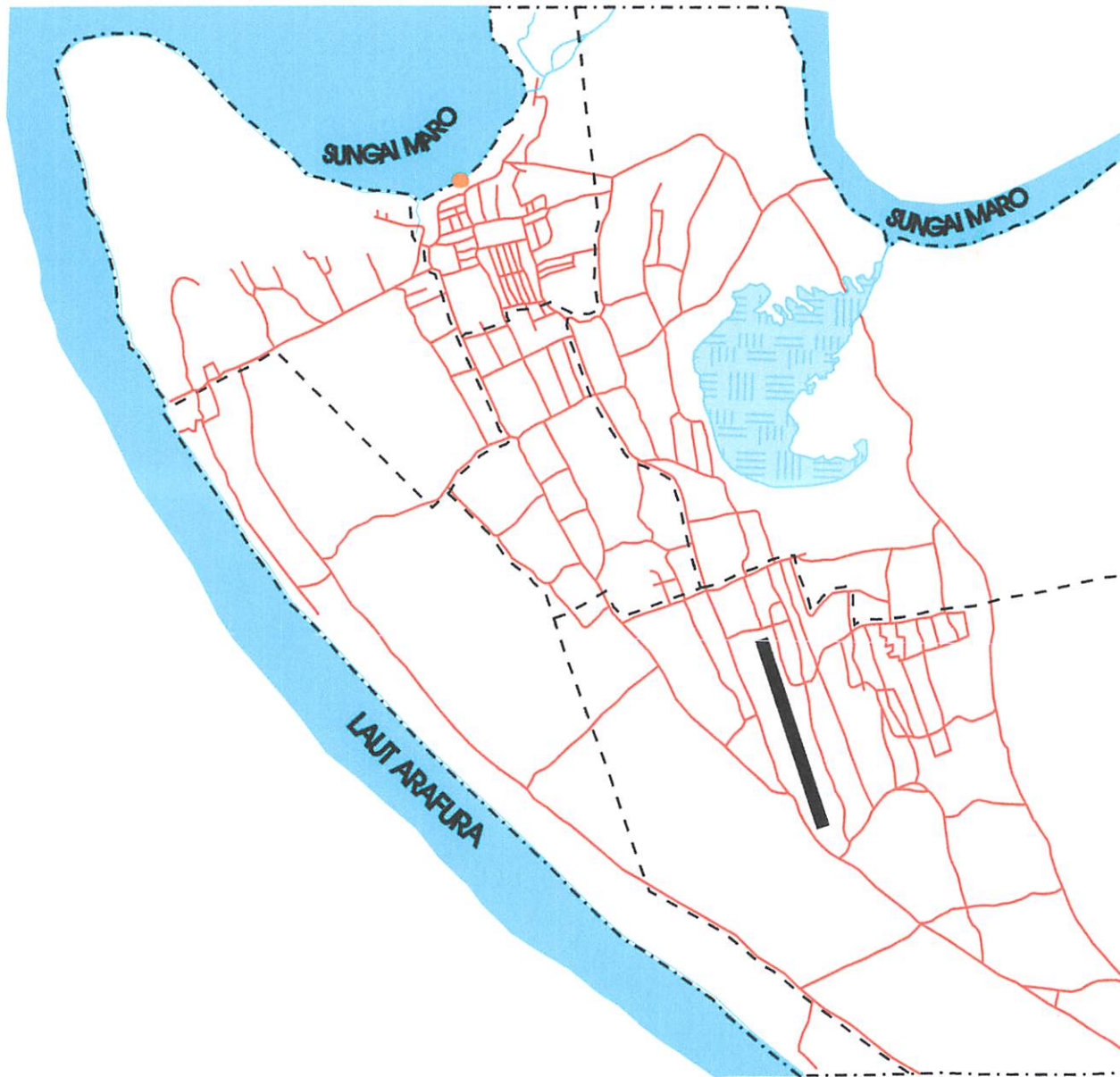
2.5.2. Kondisi Alam Kota Merauke

Kota Merauke jika dilihat dari bentangan alamnya, sebagian besar merupakan daerah dengan kemiringan wilayah 0-3% dan morfologi dataran rendah, terutama di bagian tengah kota yang memiliki ketinggian -3 meter dpl (minus tiga meter di atas permukaan laut). Kawasan-kawasan dengan ketinggian lebih rendah ini yang kemudian membentuk genangan hingga berupa rawa-rawa, baik yang permanen maupun yang temporer (kering di saat kemarau). Kondisi ini yang membuat hanya sekitar 50% wilayah yang bisa dijadikan tempat tinggal yang permanen. Hal ini juga disebabkan kondisi geologis kota Merauke yang merupakan sebagian besar adalah tanah lempung hasil endapan dari erosi pegunungan Tengah. Dengan kondisi tanah seperti itu, bebatuan baik dalam

Peta : Orientasi Wilayah Studi

LEGENDA

-  Batas Kecamatan
-  Batas Kelurahan
-  Jalan
-  Airport
-  Sungai/Laut
-  Rawa
-  Pelabuhan Laut



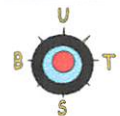
TAMAN NASIONAL WASUR

KOTA MERAUKE

Sumber : RDTRK MERAUKE

SKALA

1 : 40.000



KOTA MESAŦE

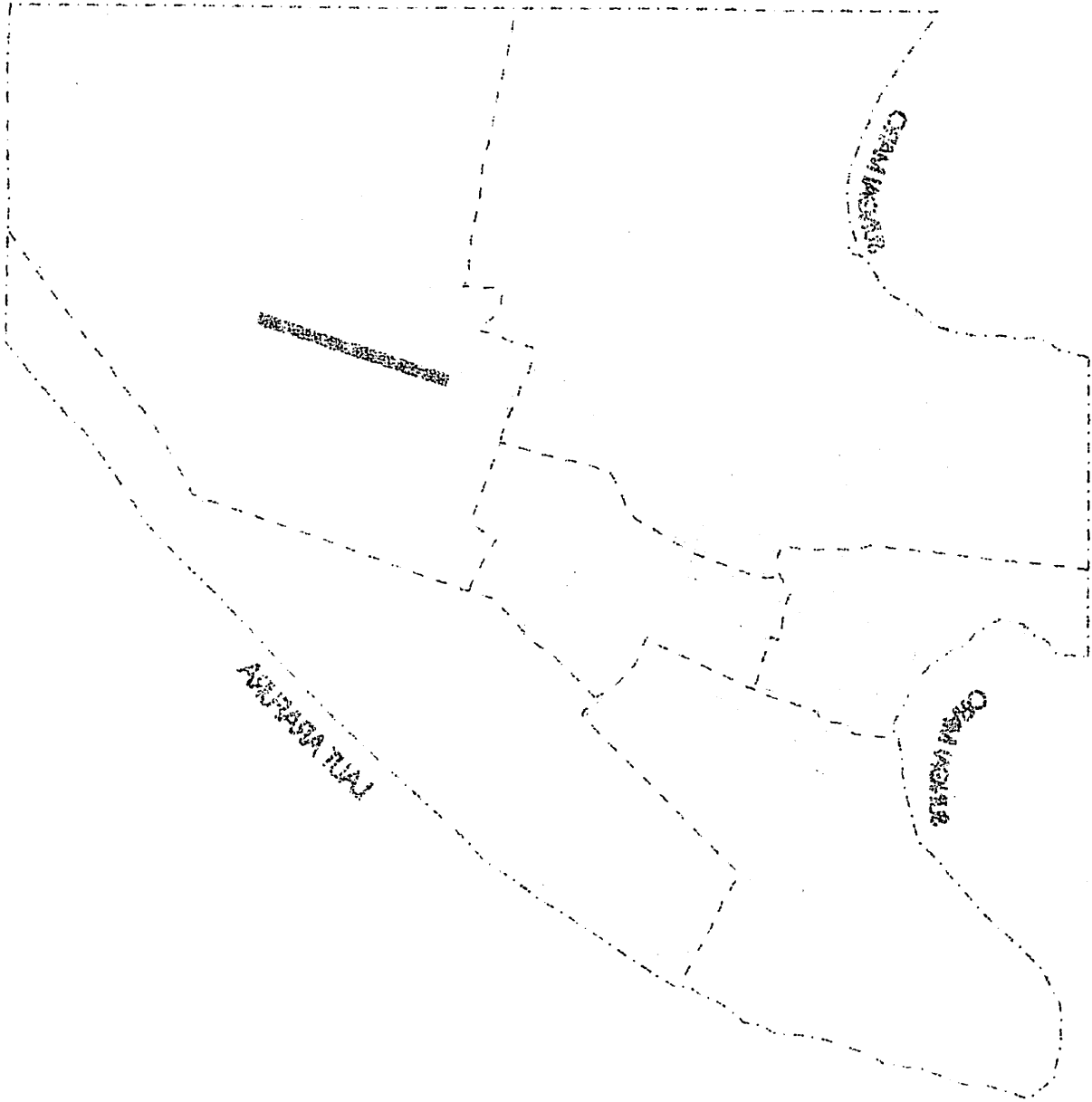
000000



ALAKA

PT. BDIK MESAŦE

TAMAN NASIONAL WASIR



Peraturan Lant
tuan nasional

Rawa

Swadaya

Alakaka

Uluat

Batas Kesenjangan

LEGENDA

ibu pejabat isipinico : dte9

2005

SHALVA

LANDSKAPLOGIKALIT

MAKAMALANER MAD JIR KIRAT 2A10000

agregat yang besar maupun agregat kecil, seperti kerikil, tidak ditemui di sana. Hal ini berpengaruh pada model bangunan di kota Merauke, di mana rata-rata konstruksi hanya layak untuk bangunan dua lantai. Bangunan tiga lantai masih dapat ditoleransi namun sangat jarang ditemui di sana. Iklim di sana termasuk kategori iklim muson tropis dengan curah hujan rata – rata berkisar antara 1500-4491mm per tahun. Curah hujan tertinggi terjadi di wilayah pedalaman, sedangkan curah hujan terendah terjadi di pesisir pantai selatan. Tingkat kelembaban udara cukup tinggi karena di pengaruhi oleh iklim tropis basah, kelembaban rata–rata berkisar 78-81%.

2.5.3. Sejarah Terbentuknya Kota Merauke

Sampai pada akhir abad ke 18, pantai selatan dari Nieuw Guinea (nama Belanda untuk Papua) tidak banyak terekspos oleh pihak luar. Walaupun Papua saat itu sebenarnya termasuk dalam Kesultanan Tidore, wilayah pantai selatan ini dianggap tidak termasuk dalam daerah yang patut diperhitungkan. Dengan demikian wilayah ini terisolir dari dunia luar. Pribumi asli dari wilayah ini sebagian besar adalah suku Marind yang bermukim di sepanjang pesisir pantai, mulai dari Kondo hingga ke Digul dan daerah pedalaman di hulu Sungai Bian, hulu Sungai Kumbe maupun daerah pedalaman Okaba. Suku ini terkenal sebagai suku pengayau yang mengayau mulai dari wilayah Papua Barat (bagian Pulau Papua yang masuk dalam wilayah RI) hingga ke wilayah Inggris di Papua Timur (sekarang PNG). Hingga beberapa kali sempat bentrok dengan patroli Inggris, bahkan sempat mengalahkan Inggris di pos Pulau Buigu dan Saibai. Oleh karena pemerintah Inggris merasa terganggu dengan kegiatan pengayauan dari suku Marind ini, maka mereka mendesak pemerintah Belanda di Batavia untuk melakukan perundingan demi mengakhiri kegiatan mengayau yang tidak terkendali ini. Hingga pada 16 Mei 1895 di Den Haag, Belanda, diadakan perundingan antara pemerintah Inggris dan Belanda tentang penentuan perbatasan antara Papua Timur dan Papua Barat.

Melalui Konvensi Den Haag inilah, pemerintah Inggris mendesak pemerintah Belanda untuk bersama-sama menekan aksi suku Marind ini. Pemerintah Belanda kemudian menempatkan pos *politie-soldaten* (semacam kesatuan Brimob) pada

perbatasan antara Inggris dan Belanda. Pos pertama didirikan di Salira, suatu kampung di antara kampung Nasem dan Kambapi. Pos ini kemudian ditutup karena faktor keamanan yang tidak kondusif. Melalui beberapa observasi, maka Belanda memutuskan untuk membangun pos yang lebih permanen dan lebih besar di muara Sungai Maro. Melalui pendekatan kepada kesultanan Tidore, akhirnya diputuskan untuk membangun pemukiman baru di daerah pantai selatan Papua. Sultan Tidore akhirnya menyetujui lepasnya daerah ini dari keresidenan Ternate dan Gubernur Jendral Belanda di Batavia tanggal 18 Juni 1901 mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jendral No.25/*Staatblad* 1901 No.239 tentang pembagian wilayah Nieuw Guinea menjadi dua, yaitu *Zuid Nieuw Guinea* dan *West Nieuw Guinea*. Wilayah *Zuid Nieuw Guinea* (Papua Selatan) akan diperintah oleh seorang asisten residen. Secara rinci urutan proses pendirian kota Merauke adalah sebagai berikut:

1. Sampai tahun 1900, wilayah Merauke masih masuk dalam pemerintahan Karesidenan Ternate yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore.
2. Atas pertimbangan bahwa antara ibukota Ternate dengan pesisir pantai selatan Papua sangat berjauhan dan keluhan pemerintah Inggris yang merasa terusik dengan adanya kegiatan pengayauan oleh suku Marind, maka pada kurun waktu Oktober hingga Desember 1900 dilakukan observasi dalam rangka mencari lokasi yang tepat sebagai lokasi pemerintahan baru yang mampu mengakomodir masalah-masalah tersebut di atas. Hasil observasi merekomendasikan daerah tepi sungai Maro yang berada di dekat tapal batas kekuasaan Belanda (*West Nieuw Guinea*) dan Inggris (*Oost Nieuw Guinea*).
3. Gubernur Jendral Belanda di Batavia tanggal 18 Juni 1901 mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jendral No.25/*Staatblad* 1901 No. 239 tentang pembagian wilayah *West Nieuw Guinea* (Papua Barat) dan *Zuid Nieuw Guinea* (Papua Selatan).
4. Setelah bernegosiasi dengan Sultan Tidore pada 7 Oktober 1901, Belanda mendapat kontrak persetujuan untuk membuka pemerintahan otonom tersendiri yang terlepas dari Karesidenan Ternate.

5. Surat Keputusan Gubernur Jendral No. 55 tanggal 15 Nopember 1901, menyetujui serta menetapkan pengangkatan dan penempatan asisten residen baru yang akan bertugas di Merauke dengan dukungan dana dan militer.
6. Surat Keputusan Gubernur Jendral No. 26 tanggal 23 Nopember 1901 yang menetapkan bahwa wilayah *Zuid Nieuw Guinea* akan langsung berada di bawah pengawasannya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kontrak kerja sama antara Belanda dan Kesultanan Tidore, di mana wilayah *West Nieuw Guinea* tetap berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore.
7. Surat Keputusan Gubernur Jendral No. 26 tanggal 2 Januari 1902 memberikan wewenang untuk menempatkan sementara pihak militer menduduki Merauke.
8. Tanggal 20 Januari 1902 diterbitkan Undang-Undang *Staatblad* No. 63 yang mengesahkan *Zuid Nieuw Guinea* menjadi pemerintahan (*afdeeling*) tersendiri dan dipimpin oleh seorang asisten residen.
9. Tanggal 12 Pebruari 1902, pemerintah Belanda tiba di Merauke, dipimpin oleh asisten residen pertama, J.A. Kroesen.
10. Tanggal 13 Pebruari 1902, pelaksanaan pemerintahan sipil di Merauke resmi dimulai.

2.5.4. Asal Mula Nama “Merauke”

Pada tanggal 12 Pebruari 1902, J.A. Kroesen sebagai asisten residen pertama di Merauke, beserta dengan rombongannya masuk ke Sungai Maro dengan kapal uap “*Van Goens*”. Ketika kapal hendak merapat ke darat, masyarakat pribumi, yang kemudian dikenal sebagai suku Marind, mendekat ke kapal dengan memakai perahu-perahu. Mereka dilanda rasa takut bercampur rasa heran dan ingin tahu tentang sebuah ‘rumah’ aneh yang berasap dan berbunyi serta bergerak di sungai tanpa didayung. Mereka mengelilingi kapal sambil berteriak “*Kay-a, kay-a.....!*” Maksudnya dari pekikan ini adalah “...kita datang dalam damai, mempunyai tujuan baik, tidak memusuhi..” Berlawanan dengan pekikan perang yaitu “*..Kuy-a, kuy-a..!*”, yang artinya “kematian..kematian bagi

lawan..” Mendengar pekikan mereka, pihak Belanda menyangka mereka memperkenalkan diri mereka, oleh sebab itu semula Belanda menamakan mereka *Kaya-Kaya*. Setelah lama berkenalan, terutama dengan para missionaris, diketahui bahwa penduduk ini menamakan dirinya *Marind-Anim* dan merupakan suatu suku yang mendiami dataran rendah, dari pesisir pantai hingga ke pedalaman.

Cikal bakal Merauke adalah pos keamanan yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada Tahun 1902 yang berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke sekarang. Nama Merauke berasal dari ungkapan "*Maro ka ehe liki*" yang berarti "*sungai ini namanya Maro*" (Kota Merauke sendiri terletak di tepi muara sungai Maro). Karena sewaktu terjadi kontak pertama antara Belanda dengan penduduk pribumi, terjadi miskomunikasi di antara keduanya. Pihak Belanda bermaksud menanyakan nama daerah yang hendak didarati oleh mereka, tetapi penduduk pribumi menyangka mereka menanyakan nama sungai tempat kapal Belanda tersebut berada. Mereka menjawab dengan "*Maro ka ehe liki*". Pihak Belanda yang kesulitan dengan bunyi frase tersebut, mengucapkannya *Maro-ke* atau *Meroke* yang kemudian terpublikasi menjadi Merauke yang dikenal saat ini. Sesungguhnya nama tempat yang ditanyakan oleh pihak Belanda adalah *Yelmasu*, yang merupakan nama adat dari suku Marind untuk lokasi pos Belanda yang merupakan cikal bakal kota Merauke sekarang.

2.5.5. Karakteristik Suku Marind

2.5.5.1. Terminologi *Marind-Anim*

Suku Marind adalah merupakan suku asli penghuni daerah Papua bagian tenggara, tepat di bagian bawah dari wilayah pulau Papua yang masuk dalam NKRI dan berada di perbatasan antara Republik Indonesia dengan Papua New Guinea. Penyebutan Marind sebenarnya merupakan penyesuaian dari lafal aslinya yaitu *Marind* (bunyi "lind" diucapkan dengan benar-benar menekan lidah pada langit-langit).

Dari beberapa tulisan tentang Marind, seakan-akan muncul kesimpulan bahwa apa yang disebutkan dalam tulisan-tulisan tadi sebagai *Marindineezen*, *Marindinesen*, *Mariende-Anim*, *Marindi-neesch* atau Marind-Anim adalah suku atau orang-orang Marind seperti yang kita kenal saat ini. Yaitu penduduk asli

Papua bagian selatan yang menempati wilayah mulai dari Kondo di selatan hingga ke Sungai Bian di utara dan muara sungai Digul di barat laut.

Faktanya adalah telah terjadi salah pengertian tentang apa yang disebut sebagai Marind, karena ternyata orang-orang Marind sendiri tidak merasa bahwa mereka adalah satu-satunya yang disebut sebagai “*marind*”. Keadaan ini sudah terjadi begitu lama dan terpublikasi secara luas sehingga lambat laun masyarakat menerima dan menabiskan bahwa apa yang disebut sebagai “*marind*” adalah sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam falsafah suku Marind, yang disbut sebagai “*marind*” adalah semua orang yang berciri fisik “kulit hitam dan rambut keriting” tanpa membatasi dari mana dia berasal. Batasan sederhana ini masih tetap banyak dipegang oleh masyarakat Marind meski telah muncul identifikasi modern terhadap corak budaya dan wilayah. Dengan kata lain, masih banyak masyarakat Marind di Merauke yang masih berpegang pada definisi “*marind*” yang mengacu pada dua kriteria di atas. Contohnya adalah, suku Marind di Merauke jika mendapat tamu dari Papua New Guinea (yang nota bene berbeda etnis) akan tetap menyebut tamu tersebut dengan “*orang Marind dari seberang*” tanpa peduli dari etnis mana sebenarnya tamu tersebut berasal. Contoh kasus lainnya, adalah ketika FKMM (Forum Komunikasi Masyarakat Marind) menuntut Pemerintah Daerah agar tanah yang akan dijadikan Taman Nasional Wasur dikembalikan kepada masyarakat “*marind*”. Tanpa menyentuh substansi tuntutan hukumnya, yang menjadi fokus di sini adalah bahwa tuntutan itu bersifat eksepsional dan lemah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut hukum negara kita, yang bermukim di wilayah tersebut tidak hanya suku Marind saja tetapi juga suku *Marori men-gey*, *Kanum* dan *Yei*. Pendapat FKMM yang mengacu pada konsep dasar falsafah tentang “*marind*” dianggap tidak relevan dan lemah. Ditolaknya tuntutan itu dengan tidak memperhitungkan falsafah masyarakat pribumi bahwa definisi “*marind*” sangat luas. Definisi yang dipakai dalam tuntutan tersebut adalah bahwa arti “*marind*” sangat luas, yaitu meliputi seluruh ras Melanesia termasuk yang ada di pulau Papua, termasuk suku-suku yang bermukim di Taman Nasional Wasur (tanpa terkecuali dari suku mana). Rata-rata

ras Melanesia berciri yang sama dengan yang dimaksud dalam falsafah suku Marind mengenai apa dimaksud dengan “*marind*”, sehingga siapapun yang berciri fisik seperti itu, memenuhi syarat untuk disebut sebagai “*marind*”.



Gambar 2.5.5.1. Keluarga Marind

Ada yang berpendapat bahwa “*marind*” dalam arti umum (luas) adalah orang-orang Papua yang bermukim di dataran Papua (baik wilayah RI maupun PNG). Pendapat ini dapat pula diterima karena suku manapun di Papua adalah berciri *hitam-keriting* juga. Tetapi batasan inipun masih dipandang setengah-setengah karena seperti yang diketahui bahwa bukan hanya orang-orang Papua atau ras Melanesia saja yang berciri seperti itu, sebab masih ada ras lain di belahan bumi ini yang juga berciri *hitam-keriting*, seperti misalnya ras *negro* di Afrika dan Amerika dan ras campuran *mulato* di Amerika Selatan.

Hingga kini di kalangan masyarakat Marind masih ada yang memperlakukan petinju kulit hitam dari Amerika atau pesepak bola Afrika sebagai “*marind*”. Sekalipun tanpa tendensi apa-apa, jika atlet-atlet tadi tampil maka masyarakat Marind umumnya mendukung atlet berciri *hitam-keriting* tadi. Hal ini dilakukan karena merasa sama-sama sebagai “*marind*”. Mereka akan berkata, “Hajar terus, marind....” ketika si petinju negro memukuli lawannya, sebagai wujud dukungan sesama “*marind*”.

Dengan melihat fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai “*marind*” secara umum adalah orang-orang yang berciri fisik *hitam-*

keriting. Batasan ini lebih luas dari batasan pendapat lain yang hanya mengartikan istilah “*marind*” dengan membatasinya pada orang-orang Papua yang bermukim di daerah dengan batas-batas geografis tertentu.

Kalau “*marind*” diartikan dengan membatasinya pada orang-orang Papua saja atau ras Melanesia secara umum, rasanya tidak sempurna dan terkesan hanya menyederhanakan arti saja seolah-olah ciri *hitam-keriting* itu cuma ada di Papua saja. Secara logika jika pertanyaan tentang “*marind*” muncul sebelum pulau Papua diidentifikasi, maka sulit rasanya orang akan menjawab bahwa istilah “*marind*” dalam arti luas adalah sama dengan orang-orang Papua yang bermukim di pulau Papua.

Dengan demikian kalau kita menyebut “*marind*”, sejatinya kita belum mengacu kepada *siapa*, *apa* dan *di mana* kecuali bahwa kita berhadapan dengan orang-orang yang berciri fisik *hitam-keriting*. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apa yang membedakan antara *hitam-keriting* yang satu dengan *hitam-keriting* lainnya sehingga kita dapat mengidentifikasikan manakah yang disebut suku Marind atau “*marind*” dalam arti khusus. Di sinilah arti pentingnya untuk menonjolkan apa yang disebut dengan *animha*, suatu istilah yang memiliki arti dan makna yang dapat membedakan antara suku Marind yang kita kenal sekarang ini atau “*marind*” yang sesungguhnya, dengan “*marind*” dalam konsep umum (berciri *hitam-keriting*).

Istilah *animha* tidak dijumpai dalam kedudukannya sebagai kata penting dalam tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya. Bahkan ada beberapa yang sama sekali tidak mencantumkan kata ini di dalamnya. Padahal istilah ini sangat penting untuk mengidentifikasi mana yang benar-benar disebut suku Marind atau “*marind*” yang sesungguhnya. Oleh sebab itu jika berbicara tentang suku Marind yang menjadi obyek penelitian dalam tulisan ini, maka kurang sempurna jika tidak menyinggung tentang *animha*, suatu istilah yang bernilai falsafah yang dikenal dalam tradisi suku Marind.

Rata-rata jika kita meminta pendapat orang-orang Marind tentang definisi “*marind*”, maka istilah *animha* akan selalu dirangkaikan untuk menjawab

pertanyaan tersebut karena memang antara istilah *Marind* dan *animha* ada hubungannya dan tidak dapat terpisahkan.

Secara harfiah *animha* berarti *manusia sesungguhnya*. *Animha* terbentuk dari kata *anim* yang berarti *orang-orang* dan kata *ha* yang berarti *sesungguhnya*. Bentuk tunggal dari *anim* adalah *anem* yang artinya *orang*. Tetapi dalam penggunaannya, tidak ada yang menyebut *anemha* sekalipun yang dimaksud adalah *seorang manusia sejati*. Yang dikenal secara luas dan umum adalah *animha*, yang ditujukan pada komunitas yang luas.

Istilah *animha* yang bermakna *manusia sesungguhnya* atau sering pula disebut *manusia sejati*, bukan mengacu pada elemen fisik atau kondisi tubuh manusianya tetapi lebih kepada *jati diri* atau identitas orang-orang (*anim*) Marind.

“*Marind*” yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperti yang tertulis di atas yaitu yang mendiami daerah selatan Papua. Mereka inilah yang disebut sebagai *Marind-anim animha*, yaitu orang-orang (*anim*) yang memiliki *boan* (marga-marga tradisional) dan memiliki *makan* (tanah-tanah) yang terletak di antara Kondo di sebelah selatan hingga ke Sungai Bian di sebelah utara dan muara sungai Digul di barat laut, yang disebut sebagai daerah tradisional suku Marind.

Boan terdiri dari tujuh marga utama, yaitu *Gebze*, *Kaize*, *Ndikend*, *Samkakai*, *Balagaize*, *Mahuze* dan *Basik-Basik*. Di bawahnya masih terdapat sub marga dan sub sub-marga.

Dua unsur di atas, *boan* dan *makan*, sangat berperan penting dalam pengklasifikasian seseorang menjadi orang “*marind yang sesungguhnya*”. Jika seseorang memiliki kedua-duanya, baik *boan* maupun *makan*-jadi dia memiliki marga tradisional Marind dan berasal dari daerah tradisional Marind, maka dia dapat disebut sebagai *Marind-anim animha* atau orang Marind yang sesungguhnya. Tanpa adanya salah satu dari kedua hal tadi, makna *animha* menjadi berkurang. Sebagai contoh, seorang bermarga *Gebze*, tapi tidak mempunyai ikatan dengan tanah-tanah di daerah tradisional Marind. Maka kemungkinan besar orang itu berasal dari suku *Marori men-gey* yang secara *fisik*, *kultural* dan *identitas marga* hampir tidak ada bedanya dengan suku Marind. Sebaliknya jika seorang yang berciri *hitam-keriting* memiliki tanah di daerah

Marind tetapi tidak bermarga tradisional Marind, maka orang inipun tidak dapat disebut sebagai orang Marind yang sesungguhnya.

Kita kemudian dapat menarik kesimpulan bahwa dalam falsafah hidup Marind, *boan* dan *makan* merupakan dua hal penting dan saling terkait satu sama lain. Masing-masing memiliki nilai penting untuk menentukan *animha*-nya seseorang. Tiap-tiap marga mempunyai hubungan mitos atau sejarah dengan tanah Marind. Marga tanpa tanah atau tanah tanpa marga adalah sesuatu yang mustahil dalam kepercayaan tradisional Marind.

Dalam perkembangannya, ditemukan juga bahwa istilah *animha* juga mengalami perluasan, yaitu dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan *keperkasaan*, *kehebatan*, *kejantanan* dan *kemapanan* seseorang. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena ada kaitannya dengan sejarah masa lalu dari tiap individu Marind. Kemampuan seseorang untuk mempertahankan penguasaan tanah-tanahnya dari suku-suku lain, membuatnya mendapatkan pengakuan sebagai seorang yang perkasa. Karena tanah termasuk sesuatu yang sangat berharga, mulailah masyarakat menghubungkan kehebatan orang tersebut dengan *animha*. Termasuk kehebatan di sini meliputi pula hal-hal yang berhubungan dengan *keperkasaan*, *kejantanan* dan *kemapanan* seseorang. Jika seseorang telah mendapat kedudukan sosial-ekonomi yang mapan, berarti dia dapat digolongkan ke dalam kelompok *animha*. Dengan demikian, *animha* kini sudah bernilai *kualitas individual*. Tidak lagi sebatas pada hal-hal yang berhubungan dengan sejarah atau mitos yang bernilai *filosofi komunal* saja.

Makna *animha* tidak ditujukan kepada seseorang melainkan kepada komunitas orang. Itulah sebabnya tidak ditemukan seorang Marind yang diberi “gelar” *anemha* sekalipun orang itu memiliki kualitas “*ha*” seperti yang disebutkan sebelumnya. Orang tersebut akan tetap disebut sebagai *animha*, untuk menandakan bahwa dia telah masuk ke dalam *kelompok orang-orang sejati*.

2.5.5.2. Sejarah Suku Marind

Suku *Marind-anim* atau *Marind-anim* atau yang lebih dikenal dengan Marind, merupakan suku bangsa Papua yang bermukim di daerah pesisir Papua

bagian selatan. Mereka tergolong ke dalam ras Melanesia yang penyebarannya di sepanjang daerah Pasifik, termasuk pulau Papua. Ciri mereka adalah:

- a. Berkulit gelap sampai hitam dan berambut keriting.
- b. Bermuka bulat, hidung tinggi serta lebar kadang sering melengkung.
- c. Berpostur tegap dan tinggi besar. Hal ini menjadi ciri khas yang mirip dengan orang Negro, tetapi orang Papua memiliki mata orang Eropa dan pada umumnya berbadan berbulu dan janggut/kumis.

Bersama suku Aborigin di Australia dan Negritos di Phillippina, suku Marind terklasifikasi ke dalam tipe kelompok Negroid Timur. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mereka adalah Bangsa Proto-Melanesia yang masuk secara bergelombang ke wilayah itu. Sejarah penyebaran suku Marind dapat dibagi dalam kisah historis maupun mitos.

Menurut kisah penciptaan dalam *Mayo*, agama tradisional suku Marind, asal mula dari suku Marind adalah di *Kondomirav*, suatu tempat rahasia yang berada di daerah *Kondo*, sebuah desa yang masih termasuk dalam wilayah kabupaten Merauke. Tempat ini dikeramatkan dan terlarang untuk orang luar (kira-kira dapat dibandingkan dengan *sasaka Domas* pada suku Badui). Lokasi ini pun hanya dikunjungi pada saat-saat tertentu dan oleh orang-orang tertentu saja. *Kondomirav* merupakan tempat yang dipercayai sebagai tempat hidup dari *Geb* dan *Sami (Mehu)*, dua manusia pertama yang bertugas melestarikan kehidupan alam. Mereka diutus oleh *Wi Dema*, “Jiwa dari Dema”, yang dianggap sebagai pencipta dan pembawa adat. *Dinadin* (dewa langit sebagai perlambang laki-laki) dan *Nubag* (dewi bumi sebagai perlambang perempuan). Akar kata dari *dinadin* yaitu *dino dina* yang artinya siang/matahari dan akar kata dari *nubag* yaitu *nubog* yang berarti malam/gelap. Hasil dari *perkawinan* keduanya yang menghasilkan *Geb* dan *Sami (Mehu)*. Dari tempat inilah suku Marind kemudian menyebar ke seluruh bagian distrik Merauke dan menetap hingga sekarang.

Beberapa kisah sejarah menyebutkan bahwa suku Marind datang dari bagian timur pulau Papua, menyusuri wilayah yang sekarang kita kenal sebagai wilayah PNG. Nenek moyang mereka kemungkinan besar berasal dari Australia. Beberapa marga dari suku Marind memang identik dengan *Sandawi* (Australia). Ada

hikayat Marind yang menceritakan bahwa moyang suku Marind berasal dari *Sandawi*, tepatnya dari suatu tempat keramat atau mitologis di sana. Tempat tersebut bernama *Samakol* (dibayangkan sebagai suatu gunung batu tanpa tumbuhan, yang terletak di padang rumput) yang kalau ditelusuri akan merujuk kepada Ayers Rock (*Uluru* dalam bahasa Aborigin), sebuah gunung batu cadas di Australia yang merupakan tempat keramat bagi suku Aborigin.

Sejarah tertulis mengenai suku Marind dimulai dengan laporan pemerintah Inggris pada tahun 1884. Pada tahun 1770, James Cook mencatat bahwa sewaktu melintasi selat Torres, kapalnya dihadang oleh perahu-perahu bajak laut dalam jumlah yang besar. Postur bajak laut itu tinggi dan tegap, seperti perawakan orang eropa tetapi berkulit hitam. Mereka juga memahami strategi penyerangan. Cook tidak menyebutkan dari suku mana, tetapi berdasarkan ciri-ciri fisik dan laporan dari militer Inggris bahwa hanya suku marind yang sering menyerang penduduk pulau-pulau di selat Torres, maka yang dimaksud dalam laporan James Cook adalah suku Marind.

Suku Marind dikenal dengan berbagai nama, tergantung dengan siapa suku ini berhubungan. Oleh suku-suku di bagian barat, mereka dikenal dengan *Yagri* atau *Mahid-anim*. Suku-suku di timur mengenal mereka dengan nama *Tugri*. Dalam laporan tahunannya di tahun 1800-an, pemerintah Inggris mencatat tentang sebuah suku pengayau yang sering menyerang wilayah kekuasaan Inggris di Papua Timur, bahkan pernah menyerang dan mengalahkan pasukan Inggris di pos pemerintahan Pulau Buigu dan Saibai (sekarang termasuk dalam wilayah Australia). Pemerintah Inggris menyebut mereka dengan nama *Togeri*.

Sebelumnya memang ada tulisan-tulisan dari pelaut Belanda yaitu Carstenz, di antaranya menyebutkan bahwa Carstenz dengan kapal "*Duifke*" berlabuh di pulau Habe dan melakukan kontak dengan penduduk dari kampung Wambi. Carstenz membayar mereka dengan *vakr* (sekop besi khas Belanda) sebagai imbalan atas bantuan mereka memuat logistik ke kapal "*Duifke*". Catatan ini sebagian besar telah hilang, sehingga sekarang banyak yang menganggap sejarah tertulis suku Marind secara resmi dimulai pada tahun 1902, yaitu sejak pos Maro

didirikan oleh pihak Belanda. Pos militer ini yang kemudian menjadi cikal bakal dari kota Merauke sekarang.

2.5.6. Komposisi Penduduk

Jumlah penutur bahasa Marind kurang lebih 7.000 orang. Penganut agama Katolik dan Kristen 65%, sedangkan penganut agama tradisional 35%.

Berdasarkan registrasi penduduk tahun 2003 mempunyai jumlah penduduk sebesar 93.478 jiwa Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.6a
Jumlah Penduduk Kota Merauke
Tahun 2003

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Samkai	17.060
2.	Karang Indah	16.510
3.	Mandala	15.883
4.	Maro	15.095
5.	Kelapa Lima	14.746
6.	Rimba Jaya	14.184
<i>Jumlah</i>		93.478

Sumber : BPS Kota Merauke

Sedangkan kepadatan penduduk kota Merauke pada tahun 2001 sebesar 175 jiwa/Ha dengan kepadatan tertinggi berada di Kelurahan Mandala 83 jiwa/Ha dan kepadatan terendah berada di Kelurahan Samkai dengan kepadatan sebesar 9 jiwa/ Ha. Untuk lebih jelas lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.6b
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kota Merauke
Tahun 2003

No	Kelurahan	Luas	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Samkai	638	5858	9
2	Karang Indah	601	14643	24
3	Mandala	252	21054	83
4	Maro	540	17785	33
5	Kelapa Lima	1429	17055	12
6	Rimba Jaya	1300	16898	13
Jumlah		4760	93478	175

Sumber : BPS Kota Merauke

2.6. Pola Pemanfaatan Ruang

2.6.1. Model Perkampungan Marind Tradisional

Perkampungan tradisional atau perkampungan adat suku Marind sudah tentu didirikan sesuai dengan kaidah-kaidah/filosofi adat yang berlaku. Istilah kampung sebenarnya tidak dikenal dalam suku Marind. Yang ada adalah, setiap marga telah mendapatkan tanah warisannya yang telah ditentukan dalam hikayat yang terkait dengan *totem* tiap marga dan mereka berkewajiban untuk menjaga tanah ulayat tersebut. Secara otomatis, mereka akan tinggal di dalam lingkup tanah ulayat yang mereka punyai. Ada istilah *mirav*, yang mirip dengan istilah kampung, hanya saja ini merupakan kampung homogen di mana yang mendiami *mirav* adalah dari satu marga/*boan* saja. Misalnya, *mirav* di *Imbuti* yang merupakan daerah ulayat marga *Ndikend*, akan terdiri dari marga, sub marga atau sub sub-marga yang ada di dalam *Ndikend*. Tidak akan ada dari marga lain yang tinggal di situ. Karena aturan adat yang menabukan orang yang bukan semarga untuk tinggal dalam satu *mirav*. Hal ini terkait dengan kerahasiaan *totem* dan *dema* dari tiap marga dan hukum yang melarang keras bagi orang lain untuk tahu akan hal ini.

Konsep *mirav* adalah posisi rumah saling berhadap-hadapan, bersifat linier yang hanya bersumbu pada satu jalan saja. Rumah terbagi dua, *otiv* untuk laki-laki dewasa dan *sa-ha* bagi para perempuan dan anak-anak. Balai adat berada di ujung *mirav* diikuti dengan *igotad*, asrama untuk remaja. Posisinya agak jauh dari perumahan. *Mirav* umumnya berbentuk mengelompok padat, letaknya di pantai, lembah-lembah tepi sungai dan dekat rawa-rawa.



Gambar 2.6.1a. Pemukiman Tradisional Marind di dekat rawa-rawa



Gambar 2.6.1b. Pemukiman Tradisional Marind di pesisir pantai

Pola *mirav* asli sudah tidak ditemui sekarang ini, terutama dari model rumah. Sekarang model rumah telah mengikuti model rumah masa kini. *Otiv* dan *sa-ha* sudah tidak ada lagi, demikian pula *igotad*. Balai adat tempat *kuahaman* (musyawarah adat), melebur ke dalam balai pertemuan desa. Terjadi pemaksaan konsep yang bersifat universal terhadap konsep Marind, yang berakibat pada perubahan-perubahan mendasar yang sangat mencolok perbedaannya dan budaya *mato hale* membuat mereka terpaksa untuk mengikuti arus dinamika perkembangan. Yang tersisa dalam konsep pemukiman tradisional Marind adalah pola pemukiman yang masih linier dan saling berhadapan serta masih cenderung berada dekat sungai dan pesisir pantai.

Satu hal yang membuat mengapa pola pemukiman ini bisa begitu berubah, tak lepas dari fakta sejarah pada kurun waktu tahun 1908-1918, terjadi wabah penyakit di Merauke, khususnya di kalangan suku Marind. Wabah ini mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi di kalangan suku Marind yang seandainya tidak segera ditangani akan berujung kepada kepunahan. Untuk mencegah hal ini, para misionaris Katolik mengambil keputusan yang penting dengan mengevakuasi para pemuda-pemudi Marind yang masih sehat keluar dari *mirav-mirav* yang diserang wabah. Mereka kemudian ditaruh di suatu tempat evakuasi yang dinamakan “Kampung Teladan”. Keputusan yang pada dasarnya humanis ini ternyata juga memiliki akibat yang fatal. Para generasi penerus marind telah tercabut dari akar kebudayaannya. “Kampung Teladan” tidak mencerminkan khasanah budaya Marind tetapi berdasarkan kepada sistem modern

yang bertolak belakang dengan tradisi suku Marind. Konsep *mirav* mulai tergeser, hilang perlahan-lahan, seiring dengan hilangnya generasi Marind tua pasca wabah penyakit.

2.6.2. Fasilitas Peribadatan

Walaupun di wilayah studi sebagian besar masih memegang kepercayaan terhadap *dema*, namun sarana peribadatan bagi 5 agama yang diakui pemerintah cukup tersedia, ini dapat dilihat dari data yang ada menunjukkan adanya tempat peribadatan warga masyarakat berupa Gereja (Protestan/Katolik) sebanyak 34 unit, Masjid sebanyak 18 unit, Vihara 1 unit dan Pura 2 unit. Untuk lebih jelasnya fasilitas peribadatan dapat dilihat pada tabel 2.6.2. di bawah ini.

Tabel 2.6.2.
Fasilitas Peribadatan Kota Merauke
Tahun 2004

No	Desa/Kelurahan	Gereja (Unit)	Masjid (Unit)	Vihara (Unit)	Pura (Unit)
1	Samkai	2	2		-
2	Karang Indah	4	2		-
3	Mandala	9	4		1
4	Maro	5	5		-
5	Kelapa Lima	8	4		-
6	Rimba Jaya	6	1	1	

Sumber : BPS Kabupaten Merauke

2.6.3. Fasilitas Kesehatan

Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai merupakan modal utama yang dapat mempersiapkan manusia yang sehat sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Pada tahun 2003, fasilitas kesehatan yang ada di Kota Merauke berupa rumah sakit umum milik pemerintah sebanyak 1 unit, rumah sakit milik swasta sebanyak 1 unit, puskesmas sebanyak 5 unit, Dokter praktek sebanyak 20 orang, Apotik sebanyak 7 unit, Posyandu sebanyak 33 unit dan Perawat sebanyak 91 orang. Untuk lebih lengkap fasilitas kesehatan yang ada di Kota Merauke dapat dilihat pada tabel 2.6.3.

Tabel 2.6.3
Fasilitas Kesehatan Kota Merauke
Tahun 2004

No	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit (Unit)	Puskesmas (Unit)	Posyandu (Unit)	Dokter Praktek (Unit)	Apotik (Unit)
1	Samkai	1	-	4	4	1
2	Karang Indah	-	1	4	3	1
3	Mandala	-	2	8	2	1
4	Maro	-	1	7	3	1
5	Kelapa Lima	1	-	4	2	2
6	Rimba Jaya	-	1	6	5	1

Sumber : BPS Kabupaten Merauke

2.6.4. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan dan meningkatkan generasi muda bangsa yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat dibutuhkan keberadaannya. Di wilayah study fasilitas pendidikan masih terdapat beberapa kelurahan yang dekat dengan pusat kota dan penyebarannya kurang merata. Sampai dengan tahun 2005 fasilitas pendidikan yang ada berupa pendidikan formal yaitu TK sebanyak 14 unit, SD sebanyak 22 unit, SLTP sebanyak 11 unit, SMU sebanyak 9, SMK sebanyak 1 unit, Akademi/Perguruan tinggi 2 unit. Untuk lebih jelas fasilitas pendidikan di Kota Merauke dapat dilihat pada tabel 2.6.4.

Tabel 2.6.4
Fasilitas Pendidikan Kota Merauke
Tahun 2003

No	Desa/Kelurahan	TK	SD	SMP	SMU/SMK	Akademi/PT
1	Samkai	2	2	1	1	1
2	Karang Indah	2	3	1	1	-
3	Mandala	3	6	4	3	-
4	Maro	3	5	3	3	-
5	Kelapa Lima	2	3	1	1	-
6	Rimba Jaya	2	3	1	1	1

Sumber : BPS Kabupaten Merauke

2.6.5. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Untuk fasilitas pelayanan dan jasa yang tersedia di wilayah studi sebagai penunjang kegiatan yang lain sangat terbatas jumlahnya yaitu berupa Toko/kios sebanyak 137 unit, Pasar sebanyak 2 unit, Tempat Pelelangan Ikan 2 unit, Bank sebanyak 6 unit. Fasilitas ini juga tersebar mengikuti jaringan jalan yang ada terutama disepanjang jalur utama pusat kota dan untuk lebih lengkapnya fasilitas pelayanan dan jasa di wilayah studi dapat dilihat pada tabel 2.6.5.

Tabel 2.6.5
Fasilitas Perdagangan Dan Jasa (unit)
Kota Merauke
Tahun 2004

No	Desa/Kelurahan	Toko/kios Unit	Pasar Unit	Bank Unit	TPI Unit
1	Samkai	15	1	1	1
2	Karang Indah	35	1	1	1
3	Mandala	21	-	2	-
4	Maro	12	-	1	-
5	Kelapa Lima	9	-	-	-
6	Rimba Jaya	23	-	1	-

Sumber : BPS Kabupaten Merauke

2.6.6. Fasilitas Perkantoran

Fasilitas perkantoran yang terdapat di wilayah studi yakni terpusat di kelurahan Mandala yang adalah Kantor Bupati, walaupun tidak semua instansi berada satu kompleks dengan kantor tersebut tetapi beberapa instansi vital seperti, DPRD kota, BAPEKAB, serta badan pengawas dan instansi lainnya masih berada di lokasi yang sama. Penyebaran beberapa instansi yang tidak merata tersebut karena disesuaikan dengan perkembangan kota Merauke itu sendiri yang melebar ke arah utara dan selatan. Untuk tiap-tiap desa terdapat fasilitas perkantoran berupa kantor desa/kelurahan yang terdapat di kelurahan/desa masing-masing yang semuanya berjumlah 11 desa dan satu unit kantor kecamatan kota yang terletak di kelurahan Mandala. Sedangkan kantor swasta sebagian besar berupa bank swasta, koperasi, konsultan, kontraktor dan lainnya tersebar di seluruh kota Merauke bercampur dengan permukiman penduduk.

2.7. Nilai-Nilai Kebudayaan Suku Marind

2.7.1. Sistem Religi

Kepercayaan/agama asli suku Marind disebut “Mayo”. *Mayo* mengajarkan bahwa

“seluruh alam semesta ini (Unam) berhubungan, berkerabat dengan satu sama lain, tumbuhan dengan manusia, tumbuhan dengan hewan, manusia dengan hewan, tumbuhan dengan tumbuhan, hewan dengan hewan, manusia dengan manusia, manusia dengan gejala alam dan sebagainya. Jika hubungan ini diputuskan maka akan mengakibatkan malapetaka.”

Mayo yang mengatur tidak saja sistem religi suku Marind, tetapi juga mengajarkan tentang tatanan kehidupan yang harus dipatuhi oleh masyarakat suku Marind. Ada berbagai aliran kepercayaan dalam *Mayo*, tergantung kepada wilayah adat dan marga, antara lain *Mayo Bodol*, *Mayo Ndamand*, *Mayo Walamol*, *Imo*, *Sosom*, *Ezam* dan *Arapa*. Pada dasarnya inti ajaran adalah sama, yaitu *Mayo*. Hanya saja dialek dan marga yang sedikit membedakannya. Seperti penyebutan-penyebutan istilah dan nama tata cara ritual. Tetapi konsep dan pemahamannya tetap sama. Misalnya dalam *Imo*, roh purba/setan disebut *Gewol*, dalam *Ezam* dan *Mayo Ndamand* disebut *Guul*.

Alam semesta yang diciptakan oleh *Alawih* (wujud Allah/Tuhan). *Alawih* tidak berbicara, melainkan hanya berkomunikasi melalui *haod* (kehendak). Dengan kehendaknya, dia berbicara melalui wakilnya, *Ala-atawi*. Menurut versi kepercayaan suku Marind dalam ajaran “*Mayo*“, bahwa pada mulanya alam semesta ini diliputi oleh “*moyu*” atau kabut yang luas menyelimuti bumi, dan pada waktu itu Bumi masih merupakan suatu cairan lumpur hidup yang bergoyang.

Ketika *Alawih* itu melayang–layang di udara di antara kabut itu, Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu. Pada leher *Alawih* dikalungi sebuah “*wad*” (kantong) yang berisikan “bongkahan tanah” (pasir). Penciptaan itu dilakukan, mula–mula bongkahan tanah dari dalam *wad* itu diambilnya untuk pertama kalinya kemudian dilemparkan ke atas lumpur yang hidup itu, maka jadilah “*pohon perdu*“, begitu seterusnya alam semesta ini diciptakannya, sampai kepada kejadian Manusia Pertama (*Dema*). Menurut kejadiannya, bahwa ketika

bongkahan tanah didalam *wad* yang tersisa itu tinggal sedikit, dari langit turunlah sebuah sinar yang disebut sebagai “klona” (*sinar air sperma*) masuk kedalam *wad* itu, maka terjadilah *manusia pertama* yang disebut “*Geb*”.

Setelah karya penciptaan Alam Semesta sudah terjadi, maka terjadilah keturunan–keturunan. Yang kehadirannya tidak melalui hubungan sex, maka dia adalah “*dema*”, sosok dewa yang disebut lahir tanpa dosa. *Dema* pertama adalah *Geb*, dari bagian tubuhnya kemudian dihasilkan *dema* kedua yaitu *Sami*. Dikisahkan bahwa keturunan *dema* kemudian tercipta dari bagian-bagian tubuh *dema*. Bukan melalui hasil hubungan sex. Dua *dema* pertama, yaitu *Geb* dan *Sami*, menghasilkan keturunan mereka melalui cairan yang keluar dari puting susu mereka. Dari merekalah keluar dua kelompok besar *vam* (marga) yaitu:

1. *Geb* menurunkan *vam Gebze, Kaize, Ndikend dan Samkakai*.
2. *Sami* menurunkan *vam Mahuze, Balagaise dan Basik-Basik*.

Namun, ada satu makhluk lain, yang disebut dengan “*Gewol*” artinya setan. Suatu ketika dia berkhianat menipu para *dema* (dewa) untuk melakukan dosa, dengan berkata, “lakukanlah itu melalui *itu* (*Gewol* menunjuk *alat kelamin*) maka kamu akan mendapatnya”. Maka disinilah terjadi perbuatan dosa dan dikutuk untuk menderita selama hidup dan manusia yang lahir melalui alat kelamin itu akan mengalami kematian, dan untuk hidup harus bekerja keras dan banyak mengalami penderitaan, sakit penyakit dan lainnya.

Para *dema* hidup dari makan makanan tumbuh-tumbuhan pohon dan rerumputan. Karena mereka telah berbuat dosa, *Alawih* murka dengan perbuatan dosa mereka, maka turunlah bencana alam di mana seluruh dedaunan tumbuhan dimakan oleh ulat, semua tumbuhan dan binatang terserang penyakit Oleh karena dengan adanya kutukan itu, para *dema*, demi hidup keturunannya, mereka berubah wujud, hingga kelangsungan hidup keturunannya terjaga. Masing–masing *dema* merubah wujud menurut marga, seperti:

3. *Dema Gebze* berubah wujud menjadi kelapa. Keturunan *dema* menjadi: kelelawar, burung *pombo* putih, elang coklat kecil, dan sebagainya.
4. *Dema Mahu*, berupa menjadi “*sagu*“, perahu, burung mambruk, dan sebagainya.

5. Dema Kaize menjadi kasuari.
6. Dema Basik–Basik menjadi babi.
7. Dema Ndiken menjadi burung ndik.
8. Dema Samkakai berubah wujud menjadi kangguru (*saham*).

Perubahan wujud *dema* ini terjadi demi kelanjutan hidup keturunannya, mereka boleh makan tubuh dan darah dari wujud–wujud itu. Oleh karena itu, marga–marga dalam suku Marind Anim ini, sangat menjunjung tinggi dan melindunginya wujud–wujud *dema* mereka sebagai lumbung sumber–sumber kehidupan, yang tidak boleh diperlakukan sembarang oleh siapapun dan di manapun mereka berada.

Suku Marind mempercayai adanya *asabisb mirav* (dunia sementara) atau *amamun mirav* (dunia orang hidup) yaitu dunia sekarang ini dan *haindun mirav* (dunia abadi) atau *heis mirav* (dunia roh). Dalam *asabisb mirav*, manusia memerlukan *roh pelindung*, yang biasanya diambil dari musuh yang dibunuh dalam peperangan (*kuy*). Dalam *kuy*, sebelum musuh dipenggal dan masih berada dalam keadaan sekarat, maka ditanyakan *igiz*-nya (nama). *Igiz* yang diberitahukan si musuh yang sekarat itulah yang dianggap sebagai nama roh pelindung. Jika musuh terlanjur tewas dan tidak dapat menjawab, maka roh itu dianggap tidak bernama dan diberi nama *Igiz-nei* (tidak mempunyai nama). Nama-nama itu akan diberikan kepada anak-anak mereka di kampung, termasuk yang nama *Igiz-nei* tadi.

Dalam *Mayo* juga diajarkan konsep *unam-ehe kawa mawak-la*, yang artinya alam berada dalam keadaan yang *mawak*. Arti *mawak* di sini adalah hubungan yang erat, saling kontrakdiktif namun saling mengisi. Suatu pasangan mutlak yang harus ada. Sebagai contoh yang dimaksud *mawak* adalah tinggi–rendah, baik–buruk, gelap–terang, atas–bawah dan sebagainya. *Misalaw*, yang artinya *kebiruan langit*, merupakan perpadanan kata *unam*. Maksud *misalaw* adalah *kebiruan langit dan segala yang ada di dalamnya*. Dalam beberapa konteks, istilah ini juga mengacu kepada eksistensi dari *Alawih* itu sendiri. Karena pada dasarnya *Alawih* adalah *misalaw* itu sendiri. *Mayo* mengajarkan bahwa Tuhan dapat dilihat dalam bentuk *misalaw*, birunya langit. Pada kejauhan kita

dapat melihatnya, tetapi kita tidak dapat dekat kepadanya kecuali dengan menghirupnya dengan nafas kita dan merasakannya ada dalam hidup kita. Dia meliputi seluruh *unam*, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan. Dia ada di dalam kita dan kita di dalam dia. Inilah yang dimaksud dengan falsafah *wi-anem* dalam *Mayo*. *Wi-anem* adalah inti yang hidup dalam setiap benda mati maupun yang hidup. *Wi* (jiwa) akan berbeda dalam benda mati, benda hidup yang tidak dapat berpindah sendiri atau benda hidup yang dapat berpindah sendiri.

Untuk menjaga keharmonisan dengan alam maka masyarakat Marind melakukan ritual-ritual yang berhubungan dengan keseimbangan alam. Upacara pemulihan dilakukan untuk mempertahankan pemulihan tersebut, seperti apabila panen gagal, buruan sedikit dan hasil tangkapan ikan atau hewan buruan sedikit, maka diadakan upacara pemulihan yang dipimpin oleh *pakas-anem* dari marga yang bersangkutan. Seperti misalnya jika pohon kelapa kurang menghasilkan buah, maka akan dilakukan upacara permohonan kepada *dema* agar dapat memberikan hasil yang melimpah dan yang berhak untuk melaksanakan upacara tersebut adalah marga *Gebze*, karena marga ini yang memiliki totem kelapa (*dema* dari marga ini yang berubah menjadi pohon kelapa ketika para *dema* berubah wujud demi keberlangsungan hidup keturunannya).

Upacara adat pada dasarnya adalah *egog*, yaitu pementasan kembali kisah penciptaan disertai *gaga* (doa) untuk *memein* (kehidupan), yang maksudnya adalah demi kelangsungan hidup dari alam semesta. Termasuk di dalamnya menginisiasi anak-anak yang telah dianggap dewasa untuk diterima menjadi anggota penuh suku.

2.7.2. Sistem Kekerabatan

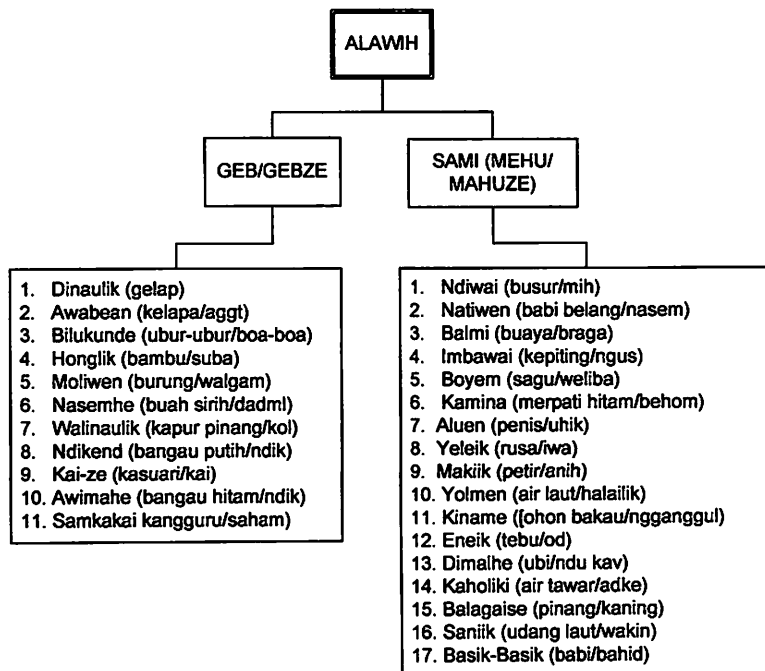
Sistem kekerabatan Marind berbasis pada pertalian darah menurut garis keturunan dari ayah (*patrilineal*). Tiap anak yang lahir akan mengikuti marga yang disandang oleh ayah, baik anak laki-laki maupun perempuan. Pengambilan keputusan dalam musyawarah adat juga akan diambil oleh pihak laki-laki. Ahli waris juga didasarkan pada anak laki-laki tertua, kecuali jika suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki barulah ahli waris jatuh ke tangan anak perempuan.

Hal ini juga terlihat dengan adanya pemisahan rumah laki-laki dan perempuan, di mana para laki-laki dewasa hidup di *otiv*, para remaja laki-laki di *igotad*, sedangkan perempuan dan anak-anak tinggal di *sa-ha*. Perempuan dianggap lemah posisinya di masyarakat, karena dipandang sebagai pihak yang akan “keluar” untuk tinggal bersama dengan suaminya. Pada kondisi sekarang, pemisahan rumah sudah tidak ada lagi, tetapi budaya patrilineal yang lain tetap melekat pada tradisi Marind.



Gambar 2.7.2. Budaya Marind banyak didominasi maskulinitas

Pada dasarnya orang Marind mengenal dua kelompok besar marga, sesuai dengan kisah penciptaan dalam *Mayo*, yaitu *Geb* (*Gebze*) dan *Sami* (*Mehu/Mahuze*). Kedua kelompok besar marga ini diibaratkan sebagai dua perahu (*ndiwa*) yang memuat beberapa marga, sub marga dan sub sub-marga, yang dikenal dengan istilah *boan*. Tiap *boan* memiliki totem masing-masing.



Gambar 2.7.2. Struktur marga/*boan* suku Marind

Pada gambar 2.7.2. terlihat bahwa kelompok *Gebze* memiliki sebelas marga dan *Sami/Mehu/Mehuze* memiliki tujuh belas marga. Urut-urutan ini tidak dapat dirubah susunannya karena menentukan posisi dalam mengikuti upacara adat dan juga menentukan sistem perkawinan mereka, yaitu sistem eksogami, serta juga dalam menentukan pemimpin adat mereka. Dalam kelompok marga *Gebze*, marga yang dianggap paling tua adalah *Awabean*, walaupun *Gebze-Dinaulik* menempati urutan paling atas. Hal ini dikarenakan menurut kepercayaan Marind, *Gebze-Dinaulik* merupakan marga yang hidup dalam dunia yang masih gelap ketika awal mula manusia diciptakan, sedangkan *Gebze-Awabean* adalah marga pertama yang hidup dalam dunia yang terang. Itulah sebabnya maka marga ini dianggap sebagai marga yang tertua. Marga termuda adalah *Samkakai* (kangguru/*saham*). Dalam kelompok marga *Sami/Mehu/Mahuze*, yang dianggap sebagai marga tertua adalah *Mahuze-Ndiwai*, sedangkan yang paling muda adalah marga *Basik-Basik*.

Karena tradisi Marind lekat dengan *totem*, di mana *totem* sangat terkait dengan tanah ulayat, maka kekerabatan antar individu dalam satu wilayah pemukiman (*mirav*) sangat erat. Hal ini disebabkan arena pada umumnya hanya ada satu marga, baik marga utama, sub marga maupun sub sub-marga, yang

berada dalam satu *mirav*. *Mirav* akan dipimpin oleh seorang *pakas-anem* (ketua adat). Dalam kedudukannya, *pakas-anem* lebih dari sekedar pemimpin adat, tetapi juga sebagai pembina, pemutus dan pelaksana hukuman. Dia dapat memberikan pengaruh tradisional yang kuat, bahkan lebih dari pejabat pemerintahan biasa. Ini karena *pakas-anem* adalah orang yang sangat berpengaruh dan memiliki pengakuan akan kelebihanannya dari masyarakat *mirav*.

Dalam tradisi Marind tidak dikenal kasta ataupun golongan bangsawan. Yang ada hanyalah bentuk penghargaan kepada marga *Gebze* karena mereka yang dianggap sebagai asal usul suku Marind. Bentuk ini tidak terhitung sebagai pengistimewaan marga, posisi mereka tetap sama dengan marga-marga lain.

2.7.3. Sistem Mata Pencaharian

Suku Marind adalah suku yang merupakan masyarakat *settled community* (suku yang sudah menetap). Selain kepandaian mereka dalam menangkap ikan dan meramu, mereka juga telah mengembangkan suatu sistem pertanian, yaitu pembudidayaan sagu, kelapa dan ubi-ubian. Sumber-sumber daya yang ada di tanah ulayat yang diwariskan kepada mereka sudah cukup untuk membuat mereka berswasembada dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Masyarakat Marind akan memelihara pohon-pohon sagu yang ada di *dusun-dusun* yang diwariskan kepada mereka, demikian pula dengan kelapa dan *wati* (sejenis tanaman yang memberikan efek anestesik). Mereka akan membuat tanggul-tanggul besar dan panjang di hutan untuk menanam dan meremajakan tanaman-tanaman yang menjadi kebutuhan pokok mereka. Suku Marind juga menciptakan sistem drainase dan bendungan untuk menanam sagu-sagu mereka serta tanaman umbi-umbian lainnya.

Sistem drainase ini disebut *apata*. *Apata* terdiri dari:

1. *Topa*, yang mempunyai berbagai bentuk, ada yang memanjang biasa dengan ukuran bervariasi 3x 8 m sampai 3 x 10 m dengan tinggi 40-150 cm, tergantung pada dalamnya rawa. Ada juga yang berbentuk “L” dan “U”, tergantung pada kondisi morfologis lahan.

2. *Adka kay*, saluran air (*adka*: air; *kay*: jalan, saluran)
3. *Kwevekra*, bendungan yang berfungsi juga sebagai jalan pintas dan batas pemilikan lahan dari marga tertentu.

Topa yang berbentuk memanjang biasanya dipersiapkan khusus untuk menanam wati, *topa* ini kadang disebut sebagai *yahun* karena pada waktu musim hujan ketika air penuh, terlihat seperti perahu di atas air (*yahun*: mengapung).

2.8. Hukum Adat Istiadat Suku Marind

2.8.1. Hukum Tentang Anak

2.8.1.1. Standar Kedewasaan

A. Falsafah Tentang Kedewasaan

Ukuran kedewasaan dalam tradisi Marind ditentukan secara berhati-hati karena berkaitan dengan kelangsungan hidup suku Marind. Di masa lalu, diyakini suku Marind hidup dalam ancaman suasana atau terjadinya perang suku (dalam istilah Marind disebut *kui*). Keadaan ini menempatkan suku Marind dalam tingkat kewaspadaan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kesungguhan orang-orang Marind dalam menyiapkan generasi-generasi yang dapat membela sukunya. Asrama pembinaan para remaja Marind yang disebut dengan *otiv* atau *igotad* sangat dikenal pada jaman itu. Asrama ini bertujuan untuk melatih para generasi muda Marind supaya tumbuh sehat, kuat dan terampil, terutama dalam hal berperang.

Seorang dipandang berprestasi bila mencapai tingkat *Kuianem* atau Kepala Perang. Sebelum mencapai tingkat itu, para remaja Marind dipantau pertumbuhannya dan kemudian melalui proses seleksi maka mereka yang telah dewasa kemudian dipisahkan. Mereka yang telah dewasa inilah yang boleh bergabung ke dalam barisan *kuianem* sebagai prajurit perang. Kelak mereka ini diseleksi melalui suatu sistem latih tanding dengan sesamanya (*sok-anim*) untuk mencari yang terbaik yang akan terpilih menjadi *Kuianem*.

Terdapat cerita-cerita mengerikan mengerikan di sekitar perang antar suku. Kematian seseorang musuh belum dianggap sempurna dalam perang antar suku jika kepalanya belum terpisah dengan badan. Dua bilah bambu ditancapkan

menyilang ke batang leher lawan kemudian bambu-bambu tersebut diputar hingga kepala terpisah dengan badan. Tekanan psikologis yang sangat besar tentunya jika berhadapan dengan hal seperti ini. Hanya pria dewasa dan pemberani saja yang mampu untuk melakukan tersebut. Inilah salah satu sebab betapa berharganya nilai kedewasaan seseorang dalam suku marind sehingga harus ditentukan secara berhati-hati.

B. Tanda-Tanda Kedewasaan

Marind pu-anem adalah istilah khusus yang ditujukan kepada orang-orang yang telah memiliki tanda-tanda kedewasaan. Jika seseorang memiliki tanda-tanda kedewasaan itu, berarti dia boleh menggunakan atribut-atribut kedewasaan, seperti misalnya *mayub-ro* atau rambut yang dianyam dengan rotan dan *bossa* atau semacam gelang-gelang yang dipasang Pada lengan dan kaki.

Bila telah tumbuh bulu-bulu dan otot-otot bisep, berarti sudah ada tanda-tanda kedewasaan bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan, membesarnya payudara juga dijadikan tolok ukur kedewasaan. Namun datang bulan pertama kali untuk wanita atau keluarnya sperma pertama kali untuk laki-laki, belum dianggap dewasa. Singkatnya, tanda-tanda awal berfungsinya alat-alat reproduksi biologis belum menjadi ukuran untuk disebut dewasa dalam tradisi suku Marind.

Pada masa kini, hal-hal tersebut di atas mulai terkikis oleh paradigma peradaban modern yang dipandang lebih santun. Atribut-atribut kedewasaan kini tidak lagi dikenal. Begitu pula dengan *otiv* atau *igotad* sebagai asrama tempat pembinaan para remaja Marind yang kini sudah tidak lagi ada. Demikian juga halnya dengan memantau besarnya payudara perempuan untuk memastikan kedewasaannya, yang saat ini dipandang sebagai tindakan yang tidak senonoh/asusila. Di sisi lain, yang menarik untuk direnungkan adalah, apakah kita dapat memaksakan suatu standar etika kepada semua makhluk hidup dengan tidak memberikan kesempatan untuk adanya pengakajian lebih dalam tentang budaya yang ada di seitar mereka. Karena meski dari sudut pandang kita itu hal yang tidak senonoh atau asusila, tapi jika kita dapat memandang dari sudut pandang mereka, maka akan kita temukan suatu cara pandang baru yang dapat memperkaya cara pandang kita juga.

Di masa lalu, memantau aspek-aspek fisik seseorang barangkali belum merupakan masalah, karena secara alamiah, perubahan-perubahan yang terjadi pada orang tertentu dapat dipantau secara kasat mata. Di masa sekarang, bagaimanakah ciri-diri yang dapat dijadikan ukuran dalam menentukan secara mudah bahwa seseorang tersebut sudah dewasa?

Seiring dengan perkembangan jaman, orang-orang Marind berpakaian lebih tertutup, perang antar suku seperti yang terjadi pada masa lalu tidak ada lagi, otot-otot bisep seseorang tidak akan tumbuh lagi tanpa adanya latihan sendiri mengingat asrama pembinaan sudah tidak ada lagi. Sekalipun demikian, kenyataan tersebut tidak membawa akibat yang sulit untuk menentukan kedewasaan seseorang karena umur atau usia dipandang sebagai ukuran yang praktis dan bernilai hukum untuk menentukan apakah seseorang itu telah dewasa.

Persoalannya adalah tidak banyak orang Marind yang mengetahui umurnya sendiri atau tanggal kelahirannya dengan pasti. Jika saja berpatokan pada batas “kedewasaan” di masa lampau, sebagian tolok ukurnya sudah tidak dikenal lagi. Tapi persoalan tersebut dapat dipecahkan dengan melihat tanda-tanda “kedewasaan” seseorang dalam konteks perkembangan jaman sekarang ini.

Laki-laki Marind yang sudah pintar mencari nafkah, berburu atau bertukang dan perempuan Marind yang sudah pandai memasak dan memangkur sagu, dapat dikategorikan ke dalam kategori *dewasa* menurut tradisi Marind. Berdasarkan kemampuan rata-rata untuk memperoleh tingkat ketrampilan seperti itu dan ciri-ciri umum dari tanda-tanda dan keadaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata orang-orang Marind disebut dewasa pada usia rata-rata di atas 17 tahun. Berikut adalah tabel fase-fase pertumbuhan dan status kedewasaan yang dikenal dalam masyarakat Marind. Dari fase ini terlihat pada tingkat mana seseorang untuk disebut dewasa.

Tabel 2.8.1.1.
Fase Pertumbuhan Manusia dan Statusnya
Menurut Jenis Kelamin

Laki-laki		Perempuan
Honohanon Patur	Bayi baru lahir sampai dengan umur 2 tahun.	Honahon kivasom
Musnakim honahon	Lepas bayi sampai usia pra	Musnakaun honahon

	sekolah (umur 2-5 tahun).	
Musnakim	Anak usia sekolah pertama (umumnya berumur 5-10 tahun).	Musnakaun
Patur	Anak-anak, dalam arti umum kelompok orang yang belum dewasa. Termasuk pula kelompok <i>musnakim/musnakaun</i> .	Kivasom
Aroi Patur	Menjelang dewasa. Biasanya setelah ada tanda-tanda berfungsinya alat reproduksi biologis, misalnya keluar sperma dan menstruasi. Usia bervariasi antara 9-15 tahun.	Wahuku
Waogroved	Menjelang dewasa. Umumnya 15-16 tahun	Waogroved
Ewati	Dewasa, yaitu memiliki tanda-tanda kedewasaan.	Kivasom Iwag
Miakim	Status laki-laki/perempuan yang sudah sangat dewasa. Boleh juga diistilahkan pada laki-laki/perempuan yang sudah kawin.	Iwag
Amnanggib	Laki-laki/perempuan yang sudah kawin.	Sav
Mes-miakim	Laki-laki/perempuan yang sudah tua	Mes-iwag



Gambar 2.8.1.1. Laki-laki Marind yang telah memasuki fase *ewati*

2.8.1.2. Status Anak

A. Anak Kandung

Anak kandung disebut dengan *onanggib-ha*, yaitu anak yang dihasilkan dari perpaduan biologis kedua orang tua kandungnya. *Anak kandung* dan *orang tua kandung* adalah dua istilah yang sebenarnya lebih banyak dipergunakan dalam

wacana biologis dibanding dalam wacana hukum. Untuk itu pula kedua istilah ini sering dimunculkan dalam bentuk lain. Seperti misalnya, *anak biologis* dan *orang tua biologis* yang artinya sama dengan *anak kandung* dan *orang tua kandung*.

Anak kandung dengan sendirinya adalah anak yang sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau yang disahkan. Berarti sah tidaknya anak ini ditentukan dari status perkawinan orang tuanya.

Dalam perkawinan adat, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila melalui upacara perkawinan adat atau *lanik*. Belakangan berkembang syarat lain, yaitu harus pula melalui hukum agamanya masing-masing (sesuai dengan agama-agama dan aliran kepercayaan yang diakui oleh hukum RI) yang disahkan melalui petugas catatan sipil atau petugas KUA.

B. Anak Angkat

Seorang anak yang telah berumah tangga dan tidak mempunyai keturunan atau menginginkan anak berjenis kelamin tertentu, diperbolehkan untuk mencari seorang anak untuk diangkat sebagai anak angkat. Pengangkatan anak ini harus melalui upacara adat. Sesederhana apapun bentuknya, upacara pengangkatan anak harus dilakukan. Tuntutan ini ada kaitannya dengan akibat-akibat hukum pengangkatan anak, tidak saja terhadap harta benda tetapi juga terhadap marga asal anak (terutama jika terjadi di antara 7 marga besar Marind) yang akan luruh digantikan dengan marga orang tua angkatnya.

Tiap-tiap marga memiliki mitos tentang perlindungan dan keberuntungan yang berhubungan dengan flora, fauna atau benda tertentu (*totem*). Marga yang satu sangat tabu untuk bercerita tentang totem marga lain dan kepercayaan yang mengikutinya., termasuk mengaku diri sebagai anggota dalam satu marga. Ini konsekuensi yang tidak ringan bagi setiap orang Marind yang melanggarnya.

Atas dasar itu, maka perpindahan marga seseorang harus diketahui masyarakat sehingga kelak jika orang tersebut bercerita tentang hal-hal yang berhubungan dengan marga barunya atau menyatakan diri sebagai pemilik marga tertentu, tidak menimbulkan masalah.

Karena perpindahan marga hanya mungkin terjadi dalam hal pengangkatan anak, maka upacara pengangkatan anak harus melalui upacara yang diketahui masyarakat adat.

Hal yang harus dipegang oleh orang tua angkat maupun masyarakat adalah menyimpan rahasia asal usul si anak. Tidak jelas maksudnya apakah untuk menjaga kehidupan pribadi si anak sampai tumbuh dewasa atau ada alasan lain. Yang jelas rahasia itu jangan sampai diketahui oleh si anak. Ironisnya, upacara pengangkatan anak justru tidak menjamin amannya kerahasiaan yang harus dipegang tersebut. Tetapi karena ini adalah aturan adat, mau tidak mau harus dipenuhi juga. Jika kemudian anak itu mengetahui asal usul siapa dirinya, hal itu tidak akan mengurangi nilai pengangkatan anak dari segi hukum.

Kalau pengangkatan anak terjadi tanpa upacara, maka kedudukan si anak sebagai anak angkat sangat lemah. Dapat saja terjadi tuntutan-tuntutan di kemudian hari sementara si anak angkat tidak dapat membela diri. Juga pembela-pembela adat tidak dapat bersaksi karena tidak ada hal yang diketahuinya.

Lain halnya jika terjadi pengangkatan anak di kalangan keluarga dalam satu marga. Pengangkatan anak di kalangan keluarga sekalipun terjadi secara diam-diam (tanpa upacara pengangkatan anak), tetapi jika si anak angkat dan orang tua angkat sudah hidup dan berhubungan layaknya sebagai anak-orang tua kandung, maka ini dipandang sebagai hubungan yang sah sebagai anak angkat. Ini kenyataan yang sering terjadi dan hingga kini tidak ditemukan adanya masalah dengan hal tersebut. Hal ini dapat ditoleransi karena anak dan bapak angkat berada dalam satu garis marga yang sama, yang berarti memiliki *totem* yang sama.

C. Alimentasi (Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak)

Dalam tradisi Marind, tanggung jawab pemeliharaan anak dikenal dengan istilah *yagozab*, yang berarti tanggung jawab terhadap anak dipikul bersama oleh kedua orang tuanya. *Yagozab* merupakan bentuk-bentuk tanggung jawab dalam merawat anak, sekalipun dalam bentuk-bentuk yang paling sederhana. Seperti ibu menyusui anak, menjaga dan merawat anaknya, ayah yang mengajari anaknya mengenal alam sekitar dan menyiapkan hal-hal yang berkenaan dengan upacara-upacara yang diperlukan oleh si anak.

D. *Kisih Onangga*

Yang bukan anak kandung dan anak angkat dikelompokkan sebagai *kisih onangga*, yaitu yang tergolong ke dalam anak piara, anak pungut dan anak tiri. Anak-anak ini hanya mempunyai hak pemeliharaan dari orang tua yang mengadopsi mereka. Istilah *kisih* dalam arti luas dapat meliputi anak piara, anak pungut dan anak tiri, tetapi dalam arti hukum istilah ini hanya dipergunakan dalam membedakan antara anak sah atau yang disahkan dengan yang bukan anak sah atau disahkan.

2.8.2. Hukum Perkawinan

2.8.2.1. Falsafah Dalam Perkawinan

Salah satu hubungan ikatan antar manusia yang dikenal dalam sistem sosial masyarakat Marind adalah perkawinan. Sistem sosial ini dibangun dari falsafah tradisional *nameg-ti* atau persaudaraan.

Nameg-ti adalah suatu falsafah yang memberi dasar bagaimana manusia itu hidup bersama manusia lainnya, termasuk di dalam hal ini adalah perkawinan. Falsafah ini akan dapat lebih dipahami-khusus dalam kaitannya dengan perkawinan-jika dilihat dan dikaitkannya dengan sistem perkawinan antar marga.

Suku Marind mengenal dua struktur kelompok marga, yaitu:

1. Kelompok *vam* (marga) pertama, terdiri dari *vam Gebze, Kaize, Ndikend* dan *Samkakai*.
2. Kelompok *vam* kedua, terdiri dari *vam Mahuze, Balagaise* dan *Basik-Basik*.

Ada yang menyebut kelompok pertama dengan kelompok marga *pa-anem* yang umumnya menduduki jabatan-jabatan penting dalam adat dan kelompok marga kedua sebagai kelompok marga *kayau-anem* yang umumnya memegang jabatan-jabatan “pembela adat”. Tapi pada kenyataannya, istilah *kayau-anem* tidak begitu dikenal. Jadi, kedudukan “pembela adat” tidak begitu dibatasi hanya kepada satu kelompok marga saja.

Sangat dipercaya oleh masyarakat Marind, bahwa *Gebze* adalah *marga asal, marga kepala* atau *marga utama*. Boleh dikatakan bahwa marga inilah marga *bangsawan* dari suku Marind. Disebut *bangsawan* bukan berarti kepemimpinan dalam tradisi Marind berbentuk kerajaan atau terbagi dalam kasta-

kasta, melainkan sebuah istilah yang diperuntukkan sebagai penghargaan terhadap leluhur suku Marind yang diyakini berasal dari marga *Gebze*. Tidak ada *elitisme* atau mengistimewakan marga ini. Pada kenyataannya, jika dilihat dari hal perkawinan, marga *Gebze* umumnya berpasangan dengan kelompok marga kedua.

2.8.2.2. Sistem Eksogami

Selain ketujuh marga di atas, masih ada lagi sub marga dan sub sub-marga yang berasal dari ketujuh marga besar tadi. Tidak ada istilah khusus untuk membedakan marga, sub marga dan sub sub-marga. Ketiga bagian marga itu hanya dikenal dengan istilah *boan* saja.

Aturan dalam tiap-tiap marga tetap mengikat terhadap sub marga dan sub sub-marga di bawahnya. Termasuk dalam aturan-aturan perkawinan antar marga yang berlaku secara eksogami. Misalnya marga *Walinaulik* pada dasarnya tidak boleh kawin dengan marga *Ndikend*, *Kaize* atau *Samkakai* karena *Walinaulik* adalah submarga dari *Gebze* dan dianggap sebagai marga *Gebze*.

Perbedaan kelompok marga antara kelompok marga pertama dengan kelompok marga kedua tidak otomatis boleh berpasangan kawin. Jika kedua pasangan bersaudara sepupu, maka ini termasuk halangan untuk kawin. Bahkan yang masih ada hubungan *cucu bersaudara* (istilah lain menyebutnya *sepupu dua kali* atau *saudara satu kakek nenek*) atau yang memiliki hubungan keluarga berderajat empat pun, tidak bisanya berpasangan kawin.

Tidak ditemui falsafah yang melahirkan kaidah ini. Tetapi kebiasaan untuk tidak kawin sesama *saudara sepupu* masih dipatuhi. Bahkan sejauh hubungan keluarga masih dapat diketahui, halangan kawin bukan mustahil tidak hanya terhenti pada hubungan keluarga berderajat empat, mungkin saja lebih karena dalam tradisi Marind dilarang mengawini sesama saudara yang berhubungan darah yang dekat. Persoalan batasan dekat tidaknya *hubungan darah* dapat bermacam-macam. Ada yang mengakui sampai derajat *lima* atau *enam*. Hanya saja tidak ditemukan kasus-kasus pembanding berkaitan dengan pencegahan perkawinan karena hubungan darah yang terlalu dekat lebih dari derajat empat.

Kedudukan laki-laki memiliki arti khusus dalam keluarga karena dipandang sebagai pembawa marga, artinya anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan akan mengikuti garis keturunan dari marga laki-laki. Sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan laki-laki (patrilineal) adalah sistem yang diakui dalam tradisi masyarakat Marind.

2.8.2.3. Perkawinan Adat

Idealnya tiap-tiap perkawinan adat harus melalui acara perkawinan adat yang disebut *lanik anggai*. Ketua dan tokoh-tokoh adat hadir dalam acara ini beserta kedua mempelai dan keluarganya. Mempelai perempuan duduk, sementara para tamu datang membawa bekal buat pasangan kawin. Bekal itu ditempatkan di sekitar tempat mempelai perempuan duduk dan disusun sehingga nampak seolah-olah mau menimbun mempelai tersebut.

2.8.2.4. Tradisi-Tradisi Yang Telah Ditinggalkan

Perkawinan tidak saja menjadi urusan pribadi mempelai atau keluarga yang berhajat, tetapi juga menjadi urusan masyarakat. Masyarakat adat ikut mengontrol dan melindungi pasangan kawin dari segala gangguan. Gangguan di sini dapat berupa gangguan fisik maupun non-fisik. Misalnya gangguan-gangguan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau gangguan dalam bentuk lain, seperti teluh/tenung/santet yang dilakukan oleh *yav-mesav*/dukun untuk mencelakakan pasangan kawin. Termasuk dalam hal ini adalah segala macam karma, bencana yang dalam tradisi Marind disebut sebagai *kambara* yang dilakukan oleh penyantet.

Dahulu pernah berlaku tradisi *otiv-bombari*, yaitu suatu tradisi di mana seorang pengantin wanita di malam pertama perkawinannya tidak langsung bersama suaminya tetapi 'dihaki' bersama oleh masyarakat. Pengertian "*dihaki*" bersama di sini adalah berupa penikmatan secara seksual si penganten wanita. Sedangkan pengertian *masyarakat* di sini adalah tokoh-tokoh adat atau orang-orang tertentu yang memiliki kesaktian saja. Dengan begitu maka dipercaya bahwa pasangan kawin akan terhindar dari berbagai gangguan dan para penikmat ikut dalam *otiv-bombary* akan merasa terikat untuk membuat perlindungan tersebut.

Tradisi malam pertama memang dimaksudkan supaya ada keterikatan bagi masyarakat untuk memberi perlindungan bagi pasangan kawin dari semua gangguan sehingga pasangan kawin dapat berumah tangga dengan aman. Tradisi ini telah ditinggalkan seiring telah diterimanya kaidah-kaidah agama dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, dinamika perlindungan masyarakat yang berpendapat bahwa untuk memberi perlindungan kepada pasangan kawin dapat dilakukan dengan berbagai cara tanpa harus mengorbankan perempuan seperti itu, telah juga ikut mempercepat berakhirnya tradisi ini.

Tradisi *otiv-bombary* bukanlah satu-satunya tradisi yang telah ditinggalkan. Dahulu dikenal adanya *wad-bakev*, yaitu penyerahan seorang perempuan atau isteri kepada pembela adat/*kayau anem*. Penyerahan ini sebagai bentuk kompensasi atas jasa-jasa pembelaan dari si pembela adat. Penyebab ditinggalkannya tradisi ini sama dengan yang dialami oleh *otiv-bombary*. Hanya saja masih terdapat laporan kasus *wad-bakev*, khususnya di daerah pedalaman tertentu. Jika laporan ini benar berarti walaupun *wad-bakev* telah ditinggalkan tetapi belum benar-benar berakhir.

Salah satu sebab tradisi *wad-bakev* tidak mudah dihilangkan adalah karena pelakunya hanya terbatas pada kelompok yang lebih kecil, sedangkan pada *otiv-bombary* biasanya melibatkan kelompok masyarakat dan selalu dirangkaikan dengan acara-acara tertentu yang melibatkan masyarakat umum yang lebih menyolok kalau dilakukan dibanding dengan *wad-bakev*. Kasus *wad-bakev* dapat pula terjadi dalam kaitannya dengan santet melalui kemaluan perempuan atau murni untuk kepuasan seksual, misalnya tradisi menjamu tamu dengan bertukar pasangan suami istri.

2.8.2.5. Upacara-Upacara Yang Berhubungan Dengan Perkawinan

A. Upacara Kedewasaan

Upacara kedewasaan bertujuan supaya semua orang dapat melihat dan mengenali para pemuda (*mbitau*) dan pemudi (*wahuki*) untuk dipilih dan ditetapkan oleh orang-orang tua mereka bersama tokoh-tokoh adat, mana di antara mereka yang benar-benar dewasa. Upacara ini sebenarnya bukan bagian yang berhubungan langsung dengan perkawinan, akan tetapi ada syarat dalam adat

Marind, bahwa yang benar-benar dewasalah yang boleh kawin sehingga upacara ini dianggap penting sebagai penyeleksian awal bagi mereka yang akan kawin.

Ada asumsi bahwa kawin bagi mereka yang belum dewasa akan mengurangi makna *anim-ha* (manusia sejati), yang tidak dikehendaki oleh masyarakat Marind. Ini salah satu sebab mengapa upacara kedewasaan menjadi hal penting sekalipun tidak berkaitan langsung dengan upacara perkawinan.

B. Peresmian Minum *Wati*

Acara peresmian minum wati bertujuan untuk memastikan dengan jelas pemuda-pemuda mana sajakah yang sudah tiba masanya untuk dapat berumah tangga. Acara ini biasanya dilaksanakan di tepi pantai yang mudah dijangkau dan dilihat orang. Dalam acara ini para pemuda dan pemudi dikumpulkan ke suatu tempat. Setelah itu para pemuda kemudian dipisahkan dan dibawa ke suatu tempat yang berjarak ratusan meter dari tempat di mana pemudi-pemudi berkumpul. Sementara itu para pemudi akan diajarkan cara mengunyah *wati*. Tempat di mana para pemudi berkumpul dijadikan sebagai tempat *finish* dari perlombaan lari yang diikuti para pemuda tersebut.

Di tempat *finish*, berkumpul para orang tua para pemudi untuk menanti lewatnya para pemuda peserta lomba. Selama para pemuda itu berlari, mereka dilempari dengan abu panas oleh orang-orang tua dan nenek-nenek mereka yang sudah siap di sepanjang lintasan jalan yang dilalui para pemuda tersebut. Abu panas ini diperoleh dari abu atau pasir sisa-sisa pembakaran api unggun yang dinyalakan pada acara ini. Setelah pemuda-pemuda itu masuk finish, mereka diberi tanda pilihan atau *akahev* dari orang tua para pemudi yang kemudian akan bertanya, “itu anak siapa? Di mana rumahnya? Dia akan menjadi calon menantu saya”

Dengan pemberian tanda ini, orang tua si pemudi berarti telah mempercayakan anaknya pada *sang laki-laki pilihan*. Selanjutnya si pemuda akan diajak minum *wati* yang telah disiapkan oleh si pemudi.

Upacara ini sangat ramai, apalagi dilaksanakan pada malam hari. Jika dari kejauhan nampak cahaya api unggun yang besar di daerah pantai, itu pertanda ada

tanda acara minum *wati*. Orang-orang kampung akan berbondong-bondong untuk pergi melihat acara tersebut.

Puncak dari acara ini adalah musyawarah atau *kuahaman* antara orang tua dari pihak pemuda dan pemudi. Musyawarah ini untuk membicarakan waktu dan acara pernikahan bagi anak-anaknya. Tapi semenjak era 70-an, acara ini tidak begitu dikenal lagi. Generasi muda Marind sudah tidak begitu akrab dengan salah satu budaya bernilai hiburan yang ada kaitannya dengan upacara perkawinan ini.

C. Pemberian Tanda Akahev

Awal dari pertunangan adalah pemberian tanda pilihan menantu atau *akahev*. Istilah *akahev* bermakna luas tidak saja pada sasaran pilihan menantu terhadap orang dewasa, tetapi juga dapat diartikan *perjodohan* yang dilakukan oleh orang-orang tua terhadap anak-anak mereka sedari mereka kecil. Sebagai tanda perjodohan, *akahev* itulah yang diberikan.

Pemberian tanda *akahev* tidak selamanya didahului dengan acara khusus seperti pada acara peresmian minum *wati*, tetapi juga dapat terjadi pada bentuk yang paling sederhana tanpa upacara tertentu. Misalnya, apabila melihat tanda-tanda istimewa pada seorang pemuda karena pintar berburu dan mencari nafkah atau perempuan yang pintar memasak dan memangkur sagu, maka orang tua dapat menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memilihnya sebagai menantu. Lalu diberilah tanda *akahev*, sebagai bentuk pemberian tanda pilihan yang paling sederhana.

D. *Sulam man-ahi*

Untuk mengukuhkan pertunangan, orang tua laki-laki dan perempuan mengadakan acara peminangan sebagai persiapan perkawinan anak-anaknya. Acara ini dikenal dengan istilah "*sulam man-ahi*".

Prinsip dalam acara ini adalah "*yavun karal tika hata*" atau "perahu yang dahulunya hanyut dibawa arus dan dapat diambil orang, sekarang sudah dipasangi tali tambatan dan diikat di tempat yang aman". Proses peminang bertujuan untuk mengikat lebih erat dan meneguhkan tanda *akahev* yang telah diberikan sebelumnya. Acaranya ini telah bernilai hukum dan sah di mata hukum adat.

Antara berlangsungnya acara peminangan sampai ke acara perkawinan biasanya tidak seberapa lama. Bila peminangan telah terjadi lalu kemudian dibatalkan, maka pihak yang membatalkan harus membayar denda adat sebagai “*tutup malu*” kepada pihak keluarga yang dibatalkan. Denda ini dapat berupa babi atau benda lainnya, sesuai dengan kesepakatan bersama dalam musyawarah keluarga.

Acara *sulam man-ahi* dapat disamakan dengan acara meminang seperti yang kita kenal. Pada acara ini sudah ikut bersama masyarakat adat, sehingga masyarakat pun mengetahuinya. Dibedakan dengan *akahev* yang biasanya hanya sampai pada tingkat antar keluarga saja dan bersifat simbolis. Jika bermaksud untuk meningkatkan ikatan yang lebih kuat sebelum perkawinan, maka acara ini merupakan satu-satunya tuntutan.

E. *Lanik Anggai*

Pada hari perkawinan, pihak mempelai laki-laki melakukan acara penjemputan kepada mempelai perempuan ke rumahnya. Salah seorang anggota keluarga mempelai laki-laki, umumnya yang dituakan, menuju ke mempelai perempuan dan menuntunnya sampai ke tempat *lanik anggai* atau tempat pesta kawin.



Gambar 2.8.2.5. Barang-barang “antaran” di *Lanik Anggai*

Anggota keluarga kedua belah pihak ikut mengantar sampai ke acara tersebut. *Wati*, *kumbili* dan buah pinang yang masih bertangkai digantung pada bahu mempelai perempuan dan yang lainnya dipangku dengan tangan. Kedua mempelai duduk dan diapit oleh kedua orang tua mereka. Selanjutnya orang-orang tua

mereka memberi nasihat-nasihat yang berhubungan dengan perihal hidup berumah tangga. Keluarga laki-laki membawa barang-barang hasil kebun berupa pisang, keladi, sagu, kumbili dan lain sebagainya. Barang-barang itu diletakkan mengelilingi tempat mempelai perempuan duduk, sehingga nampak seolah olah mau menimbunnya. Barang-barang tersebut adalah merupakan mas kawin yang hanya boleh dinikmati oleh keluarga si wanita.

2.8.2.6. Perceraian dan Akibat Perceraian

Tidak ada data maupun pengakuan yang berkenaan dengan kasus-kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat Marind di masa lalu. Itulah sebabnya ada pendapat yang mengatakan bahwa *perceraian* sebenarnya tidak dikenal dalam tradisi suku Marind. Perceraian dipandang sebagai pengingkaran terhadap falsafah *nameg-ti*. Juga pengingkaran terhadap orang-orang tua yang menjodohkan dan mengawinkan anak-anaknya. Karena peran orang tua sangat besar dalam menjodohkan dan mengawinkan anak-anaknya.

Keadaan di mana suami-istri saling meninggalkan dan masing-masing mencari jalannya sendiri disebut dengan "*etam hadanau*". Ada yang menamakan hadeun yang berarti "dibuang" atau "dilepas". Istilah tersebut boleh diartikan "perceraian" dalam bahasa hukum.

Perceraian kini telah diterima sebagai sesuatu yang dapat terjadi karena telah terjadi pengingkaran terhadap tradisi dalam suku Marind di mana orang tua sudah tidak begitu berperan besar lagi dalam memilih menantu. Pemberian tanda *akahev* yang semula ditentukan oleh orang tua, kini tidak begitu sering digunakan. Anak-anak yang menentukan "pilihan" itu. Akibatnya adalah pasangan kawin begitu mudahnya saling meninggalkan dan orang tua pun merasa terbatas kepeduliannya untuk mencegah perceraian itu karena merasa sejak awal tidak dilibatkan dalam perkawinan mereka. Beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu: tidak bertanggung jawab kepada keluarga, penganiayaan, zinah dan kemandulan (*samtamad-anum*).

Jika alasan-alasan perceraian tersebut di atas, suami atau istri tersebut tidak langsung meninggalkan begitu saja, tetapi harus melalui majelis *kuahaman* yang akan menengahi persoalan-persoalan rumah tangga mereka. Awalnya si

pelanggar akan ditegur dan dinasehati, jika masih melanggar maka akan ditegur dan dinasehati lagi. Apabila sampai tiga kali teguran masih tetap melanggar, maka si pelanggar akan dikenakan sangsi badan. Jika masih melanggar lagi maka ikatan perkawina boleh dilepaskan.

Majelis *kuahaman* tidak dapat memutuskan masalah perceraian, selain dari pada melakukan tindakan-tindakan teguran dan sangsi seperti di atas. Keputusan bercerai diserahkan ke dalam tangan kedua belah pihak yang bermasalah.

Bagi yang melanggar/memicu perceraian, maka dia dapat dituntut untuk mengembalikan barang-barang/harta kawin. Kecuali yang diperolehnya sendiri atau warisan dari orang tuanya. Jika masalah itu timbul berkenaan dengan zinah, maka yang berzinah maupun pasangan zinahnya dapat dituntut denda “*tutup malu*”. Jika masalah berkenaan dengan penganiayaan maka dapat saja dituntut denda untuk “membayar darah” (*bloedgeld*). Pemberian denda “tutup malu” atau “bayar darah” tidak menghapuskan tuntutan cerai. Besar “denda” ditentukan melalui musyawarah bersama.

Tentang alimentasi anak, akan dipikul bersama-sama. Pengasuhan anak akan dimusyawarahkan bersama untuk menentukan akan tinggal bersama siapa anak tersebut.

2.8.3. Hukum Tentang Warisan

2.8.3.1. Golongan Ahli Waris

Jika seseorang meninggal dunia maka adalah kewajiban dari ahli waris untuk mengurus urusan-urusan yang belum diselesaikan si pewaris. Termasuk di dalamnya adalah urusan hutang-piutang. Dalam tradisi Marind dikenal acara *yatud*, yaitu malam memperingati meninggalnya *si pewaris*. Biasanya dilaksanakan pada hari ke 3-40 setelah kematian *si pewaris*. Dalam acara ini, berkumpul keluarga atau para kerabat *si pewaris*. Berkumpulnya keluarga atau kerabat *si pewaris* dimanfaatkan untuk melakukan musyawarah keluarga, termasuk di antaranya musyawarah soal urusan-urusan yang berkenaan dengan *si pewaris*.

Yang tergolong ahli waris adalah anak-anak laki-laki saja. Anak perempuan dapat berkedudukan sebagai ahli waris jika dia tidak mempunyai

saudara laki-laki. Yang dimaksud dengan *saudara laki-laki* di sini adalah *saudara laki-laki kandung* dan *saudara laki-laki angkat yang sah*.

2.8.3.2. Kehilangan Hak Mewaris

Ahli waris dapat kehilangan haknya karena melakukan kejahatan berat kepada si pewaris, seperti melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Alasan lain, yaitu menelantarkan atau berbuat durhaka kepada orang tua.

Dalam falsafah marind, durhaka adalah sesuatu perbuatan yang sangat dicela. Jika wasiat dari orang tua untuk mencabut hak waris dari ahli waris yang durhaka, maka wasiat ini umumnya akan dipatuhi. Musyawarah adat akan memberikan kesaksian-kesaksian yang obyektif untuk menentukan durhaka tidaknya seseorang.

Kehilangan hak waris juga dapat berbentuk lain, seperti anak yang telah diadopsi oleh orang lain atau orang yang *kawin keluar* lingkungan tempat dia berada. Orang yang kawin keluar tidak mendapatkan harta warisan karena bertrok dengan kaidah Marind tentang teritori. Falsafah Marind mengatur bahwa orang-orang yang bermukim di daerah teritori tertentu akan dituntut untuk mematuhi ikatan-ikatan yang berlaku di lingkungan teritori di mana dia berada. Dengan pindahnya seseorang ke teritori yang lain maka otomatis dia melepaskan ikatan-ikatan termasuk hak-haknya di teritori sebelumnya dan membuat yang baru di teritori yang dia masuki.

2.8.3.3. Penggantian Kedudukan Ahli Waris

Jika harta warisan belum dibagi dan ternyata ahli waris meninggal, maka anak-anak dari ahli waris yang meninggal tersebut dapat menggantikan kedudukan si ahli waris tersebut sebagai ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*). Penggantian kedudukan ahli waris dalam garis lurus ke bawah, yaitu dari ayah ke anak ke cucu, tetapi tetap harus melewati musyawarah adat. Termasuk jika tidak meninggalkan ahli waris maka siapa yang berhak mendapatkannya juga ditentukan dalam musyawarah adat.

2.8.4. Hukum Jual-Beli

2.8.4.1. Bentuk Perdagangan Tradisional

Jual beli adalah bentuk transaksi yang baru dikenal masyarakat Marind. Meskipun demikian, tidak berarti ada kesulitan dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di masa lalu ada falsafah *yah-a-yah*, yang berarti sama rata, seimbang, sama rasa. *Yah-a-yah* meliputi semua perbuatan yang ada kaitannya dengan tukar-menukar atau balas-membalas, misalnya *nyawa balas nyawa* dalam peperangan. Yang menjadi obyek dalam *yah-a-yah* masih sangat terbatas, umumnya barang-barang bergerak yang ada di sekitar masyarakat. Rata-rata adalah barang bergerak yang ada di sekitar masyarakat. Seperti hasil kebun, tangkapan dan buruan. Sebagian besar *yah-a-yah* dilakukan dengan maksud untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan kata lain, tidak ada maksud untuk mencari keuntungan.

2.8.4.2. Perilaku Dalam Jual Beli

Dalam transaksi *yah-a-yah*, dapat terjadi perselisihan nilai barang. Kedua pihak akan bermusyawarah untuk mencari titik temu. Perselisihan akan nilai barang disebut *kalaunan*.

Falsafah Marind tidak mengenalkan *tawar-menawar* yang terkait dengan sistem perdagangan modern. Dalam tradisi Marind, hal yang bersifat komersial seperti itu tidak dikenal. Pada dasarnya barter dilakukan hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dengan tidak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan.

Ada suatu perilaku yang sangat membebani masyarakat untuk menerima prinsip komersial tersebut. Begitu mereka mengenal jual-beli, mereka sudah diperhadapkan pada perilaku pasar yang penuh persaingan. Tidak jarang prinsip ekonomi diterapkan secara ekstrem oleh pemodal. Tidak jarang pula mereka merasa dieksploitasi melalui cara jual-beli. Bahkan banyak yang merasa dibodohi dengan transaksi model ini. Hal ini juga terkait dengan tingkat pendidikan/intelegensi masyarakat yang masih rendah, di samping mereka baru mengenal sistem seperti ini.

Hal penting lainnya adalah bahwa obyek jual-beli sudah meliputi bermacam-macam barang, di antaranya barang yang sudah tidak diproduksi atau disediakan alam di sekitar masyarakat. Termasuk di dalamnya tanah. Hal ini yang

membuat masyarakat Marind merasa kesulitan dalam membaca kewajaran nilai barang tersebut. Terutama sekali dengan masalah jual beli tanah, di mana tanah bagi suku Marind adalah bagian penting dari kehidupan suku. Falsafah Marind memposisikan tanah dan marga sebagai suatu integrasi yang tidak terpisahkan, yang saling dukung antara satu dengan lain.

Kelemahan lain yang dialami masyarakat suku Marind dalam berjual-beli adalah soal membandingkan nilai uang dan barang. Mereka sering tidak mematok standar harga antar penjual barang yang sama. Padahal semestinya mereka mengetahui harga barang di pasaran umum. Sebagai contoh, seorang pedagang daging rusa yang hendak membeli sekop, tentunya akan menjual dulu daging dagangannya kemudian uang hasil penjualan tersebut itu akan digunakan untuk membeli sekop. Pedagang tersebut harus paham akan harga daging rusa dan harga sekop di pasaran sehingga dia bisa memperhitungkan berapa jumlah daging yang harus dijual agar bisa membeli sekop tersebut. Pada kenyataannya, bagian ini jarang diperhitungkan oleh pedagang yang akhirnya mematok harga terkesan sekehendaknya saja dan tidak mengenal kompromi. Berbeda dengan pedagang pendatang yang bisa lebih paham situasi pasar. Itulah sebabnya harga barang yang hendak dipasarkan oleh si pedagang dapat jauh berbeda, sekalipun jarak tempat usaha mereka berdekatan. Jika kita, sebagai pembeli, menemukan keadaan demikian dan bermaksud menawar barang, maka bukan mustahil kita akan dicemooh sebagai pernyataan sikap untuk tidak menerima tawar-menawar yang dilakukan. Sekalipun barang tersebut mudah rusak (sayur atau daging) tetapi mereka tetap memilih untuk tidak mengabulkan tawar menawar sebagaimana hal biasanya dilakukan di tempat-tempat yang lebih modern (misalnya penjual kue basah di Pasar Besar Malang akan menurunkan harga jualannya seiring dengan makin sorenya hari). Hal ini karena kurangnya pemahamn akan nilai barang dalam uang dan tidak adanya keseragaman dalam pematokan harga. Yang lain dalam sistem jual beli yang dianggap tidak lazim oleh msayarakat Marind adalah membeli separuh barang. Jika barang yang ditawarkan, misalnya satu ikat atau satu tusuk, sedangkan kita bermaksud membeli setengah ikat atau setengah tusuk, maka hal ini tidak akan dikabulkan.

Pada dasarnya masyarakat dapat menerima konsep jual beli modern hanya saja dilakukan dengan berhati-hati. Penyebabnya adalah masalah intelektual, modal dan sifat tertutupan. Walaupun telah ada kelompok-kelompok yang lebih moderat, yang lebih mudah untuk menerima secara utuh transaksi-transaksi semacam ini, hanya saja jumlahnya belum banyak. Pada kampung-kampung yang masih homogen, hal ini cenderung belum sering dilakukan.

Masyarakat Marind tidak mengenal sistem panjar ataupun utang-piutang. Segala bentuk kesepakatan dilakukan dengan tunai. Maksudnya mereka akan menyerahkan barang-barang yang dimaksud dalam kesepakatan barter, pada saat itu juga, tidak dalam rentang waktu yang lama.

2.8.5. Hukum mengenai Tanah

2.8.5.1. Tanah Dalam Filosofi Suku Marind

Yang sering menjadi masalah antara pihak pribumi, dalam hal ini masyarakat Marind, dengan pemerintah adalah masalah pengakuan/klaim atas tanah. Pemerintah yang berpatokan pada hukum negara dan pembuktian atas klaim secara modern, terkesan kurang memahami falsafah tradisonal Marind yang mengatur tentang tanah. Memang tidak ada salahnya untuk menuntut pembuktian hak dengan mengujinya berdasarkan alat-alat bukti yang formal, tetapi alat-alat bukti seperti itu tidak dapat diharapkan pada masyarakat yang menganut sistem penguasaan tanah-tanah secara tradisional, seperti pada masyarakat Marind. Dalam hal ini, perlu dipelajari dahulu tentang falsafah tanah dalam kebudayaan Marind.

Falsafah tentang tanah dalam kebudayaan Marind tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan tradisional yang ada pada tiap-tiap marga. Falsafah ini lahir dari berbagai mitos yang ada kaitannya dengan *totem* pada tiap-tiap marga. Mitos ini akhirnya menjadi legenda sejarah, di antaranya mengenai penguasaan tanah-tanah tradisional Marind. Misalnya cerita tentang burung *Ndik* yang terbang dari selatan menuju ke barat laut. Tempat di mana burung itu mendarat diberi nama, misalna *Wal-ip masituka*, *Wal-anukap*, *Wal-atin*, *Ma-loti*, *Imbuti*, *Malez*, *Kem-baha-sep* dan sebagainya. Oleh karena burung *Ndik* merupakan berhubungan dengan marga

Ndikend, yaitu sebagai *totem* marga, maka tempat-tempat di mana burung itu mendarat menjadi milik marga Ndikend.

Sekalipun kepercayaan-kepercayaan tradisional atau *mitos* dalam tradisi Marind sudah mulai ditinggalkan dan tinggal dikenang sebagai bagian sejarah saja, tetapi di dalam pembelaan terhadap tanah-tanah adat, “kepercayaan” terhadap berbagai mitos ini justru menjadi rujukan yang paling berharga. Hal itu terjadi karena di dalam mitos tersebut terdapat cerita yang banyak sangkut pautnya dengan tanah.

Persoalan yang muncul adalah bahwa masyarakat Marind bersifat tertutup dalam hal-hal tertentu, termasuk di dalamnya menabukan kepercayaan-kepercayaan tradisional mereka untuk diketahui orang lain. Kenyataan ini sangat melemahkan dalam mencari dan menemukan filosofi tentang tanah-tanah tradisional Marind. Belum lagi diperhadapkan pada persoalan lain, yaitu pengujian pada keadaan fisik dari berbagai mitos di atas.

Sebagai contoh, kalau marga Ndikend mengklaim bahwa tanah-tanah adat seperti di atas adalah miliknya, tentu orang akan memaklumi tanpa perlu membuktikan lagi kebenaran tentang mitos yang terkait dengan marga Ndikend. Yang menjadi masalah adalah *letak* dan *ukuran/luas* dari tanah-tanah yang dimaksud dalam mitos tersebut. Kedua unsur ini adalah yang paling rawan dalam kasus-kasus tanah Marind. *Letak* dan *luas* tanah memang tidak dapat hanya sebatas “dimaklumi” begitu saja sebagaimana orang memaklumi berbagai mitos atau sejarah yang ada dalam masyarakat. Sebab kedua hal tersebut telah berbicara tentang keadaan fisik yang memerlukan alat-alat bukti fisik sehingga tidak terhenti pada konsep “memaklumi” saja tetapi juga dituntut hingga pada tingkat meyakini.

WWF (*World Wide Fund for Nature*) *bio-Region Sahul* pernah melakukan survey untuk mengidentifikasi tanah-tanah yang terletak di selatan Merauke. Identifikasi itu meliputi di antaranya pemetaan tanah-tanah yang dikuasai oleh suku tertentu (*Kanum, Marind, Marori men-gey* dan *Yei*) serta tanah-tanah yang berhubungan dengan *totem* tertentu. Hasilnya adalah bahwa terjadi banyak perubahan dalam penguasaan tanah di daerah tersebut, yang artinya tidak sesuai

dengan *tatik mayan*, yaitu cerita sejarah atau mitos yang ada. Misalnya tanah sepanjang pesisir pantai tidak lagi secara utuh dikuasai oleh suku Marind sebagaimana yang ada dalam berbagai mitos atau cerita sejarah yang ada dalam “kepercayaan” Marind. Identifikasi ini memang kemudian tidak diperlakukan sebagai alat bukti yuridis, tetapi telah membeberkan kenyataan bahwa saat ini terdapat perbedaan antara *kondisi fisik* tanah-tanah tradisional suku tertentu dengan “kepercayaan” yang ada dalam *tatik mayan*.

Hal ini juga yang mendasari mengapa klaim berdasar mitos atau cerita sejarah akan lemah posisinya ketika berhadapan dengan pembuktian fisik. Tapi perubahan-perubahan kenyataan seperti di atas juga memberikan peringatan bagi pihak-pihak yang mengambil keputusan agar berhati-hati dalam mengambil sikap atas tanah-tanah tradisional karena bagian ini sering menjadi pemicu sengketa, di aman suku yang satu mengklaim berdasarkan mitos atau cerita sejarah, sedangkan yang lain berpegang pada kenyataan bahwa secara fisik mereka yang menguasai/hidup di tanah itu sekarang. Tidak hanya itu saja, mereka juga menyertakan mitos atau cerita sejarah tandingan terhadap tanah yang sama.

Dalam falsafah Marind, penyelesaian dilakukan dalam musyawarah adat, dengan melakukan penelusuran atas klaim dari pihak-pihak yang bertikai. Dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti: *dari mana dia memperoleh tanah yang sekarang dikuasai atau yang hendak diklaim tersebut, bagaimana sampai dia memperoleh atau menguasai tanah itu, kapan peristiwa-peristiwa yang diterangkan dalam kesaksian itu terjadi, dari mana dia mengetahui tentang peristiwa-peristiwa tersebut*. Pada akhirnya suatu klaim dapat dimenangkan jika pihak tersebut dapat merunut silsilah dirinya (terkait dengan masalah klaim) hingga sampai kepada *Dema*-nya. Jika pihak tersebut tidak mampu menceritakan sejarah atau mitos tanah itu hingga sampai kepada *Dema*-nya, maka klaim itu dianggap lemah. *Dema* merupakan figur leluhur dari suku Marind, yang akan berbeda-beda pada setiap marga.

Contoh kasus adalah sebagai berikut:

“A dan B saling klaim atas suatu tanah. A boleh jadi adalah pemilik sah tanah tersebut dan B cuma sebagai penggarap. Tapi karena saksi-saksi tidak mampu menjelaskan

dengan sempurna tentang keabsahan A sebagai pemilik lahan, seperti misalnya para saksi pun hanya mengetahuinya dari orang lain (*testimonium de auditu*). Hingga akhirnya B, yang secara fisik sedang menggarap tanah yang menjadi sengketa dan juga mengklaim sebagai pemilik tanah yang sah, tidak terbantah lagi untuk ditetapkan sebagai pemilik tanah.”

Hal ini yang sering menjadikan kesalahpahaman di masyarakat, di mana mereka mengira bahwa hukum yang diterapkan adalah memberikan hak kepada si penggarap/peminjam tanah untuk memiliki tanah tersebut. Sesungguhnya tidak demikian. Sebab jika dapat ditelusuri lebih jauh siapa pemilik tanah yang sebenarnya, maka akan ditetapkan orang tersebutlah yang memiliki tanah itu.

Berbagai persoalan di atas adalah akibat dari kaidah-kaidah tradisional yang tidak mengantisipasi dinamika yang terjadi. Salah satu cirinya adalah bahwa suku Marind tidak mengenal istilah “*kadaluarsa*” untuk *meminjamkan* atau *memakaikan* tanah itu kepada orang lain. Yang sering terjadi adalah ketika tanah yang telah dipinjamkan itu telah melewati kurun waktu yang lama dan kemudian hendak diminta kembali. Ketika terjadi konflik antara pemilik dan peminjam, terutama dari generasi selanjutnya, pihak-pihak yang dapat memberikan kesaksian telah tidak ada lagi. Selain itu tanda-tanda fisik dari tanah itu yang dapat membantu pembuktian mungkin telah berubah. Hal ini yang menimbulkan opini bahwa siapa yang menguasai tanah secara fisik atas tanah tersebut dalam sistem penguasaan tanah-tanah tradisional *dianggap* sebagai yang berhak sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat-alat bukti yang sah.

2.8.5.2. Hak-Hak Atas Tanah Adat

Penguasaan dan pemilikan tanah-tanah adat marind ada kaitannya dengan sejarah terbentuknya dan berkembangnya marga-marga tradisional suku Marind. Setiap marga memiliki *totem* yang berhubungan dengan flora dan fauna tertentu. Sedangkan *makan* (tanah) adalah alam yang memberikan kehidupan, baik kepada manusia maupun kepada *totem* itu.

Tiap-tiap *totem* dalam marga pasti mempunyai cerita-cerita yang ada hubungannya dengan tanah. Jika cerita dalam *totem* itu ada hubungannya dengan tanah tertentu, maka marga yang berhubungan dengan cerita dalam *totem* itulah yang berhak atas tanah tersebut. Seperti yang telah disebut di atas, sebagai contoh

adalah mitos burung *Ndik* yang merupakan *totem* dari marga *Ndikend*, yang mana tanah tempat di mana burung itu mendarat dalam kisah mitos Marind, adalah milik dari marga *Ndikend*.

Hak milik perseorangan tidak ada dalam budaya suku Marind. Setiap tanah yang ada adalah milik dari marga. Setiap individu dalam marga hanya dapat menggunakan tanah tersebut dan kemudian mewariskan kepada generasi berikut. Oleh sebab tanah adalah milik marga, maka jika kemudian terjadi bahwa ada individu yang menjual tanah yang sekarang dikuasainya, pihak-pihak lain dalam marga yang sama berhak untuk menggugatinya. Namun dalam kenyataannya terjadi penyusutan kekuatan *kebudayaan* dan *kepercayaan* dalam masalah ini, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Seiring dengan dinamika yang ada, mulai terjadi pergeseran di mana semula tanah adat yang dapat dimiliki oleh marga, tapi sekarang individu dalam marga sudah melakukan klaim individu atas tanah adat.

2.8.5.3. Jual-Beli Tanah

Perihal jual-beli tidak dikenal dalam budaya masyarakat marind. Hal tersebut merupakan hal baru bagi mereka. Suku Marind memiliki falsafah yang disebut *yah-a-yah*, secara harfiah berarti keseimbangan atau sama rata. Falsafah ini sebenarnya tidak khusus dalam satu segi saja, tetapi mencakup ke semua aspek. Dalam perang juga dikenal falsafah ini, hanya saja *yah-a-yah* dalam konteks perang berarti keseimbangan dalam jumlah korban agar perang dapat dihentikan. Dalam aspek ekonomi, *yah-a-yah* berarti sistem tukar/barter dan telah dilakukan sejak dahulu. Hanya saja lingkupnya terbatas pada barang-barang bergerak saja.

Dalam kepercayaan suku Marind, tanah tidak dapat dipindahtangankan karena di situ terdapat nilai religius yang dipandang sakral. Memindahtangankan tanah sama dengan menodai kepercayaan-kepercayaan tradisional mereka. Tetapi ketika kepercayaan-kepercayaan tradisional mulai ditinggalkan, memindah tangankan tidak lagi dihubungkan dengan “kepercayaan” tetapi dengan nilai-nilai hukum dan keadilan, ekonomi, sosial budaya maupun politik.

Tetapi sekalipun kepercayaan-kepercayaan tradisional mulai ditinggalkan, masih ada tanah-tanah tertentu yang tetap dipertahankan kesakralannya hingga sekarang. Seperti misalnya di beberapa tempat di daerah Kondo, yang diyakini sebagai tempat awal munculnya nenek moyang suku Marind. Tempat-tempat tersebut ditabukan untuk diperjualbelikan.

Dalam masyarakat Marind sendiri ada pula istilah *kumus*, yang adalah melakukan proses pengalihan hak atas tanah. *Kumus* lebih tepat didefinisikan sebagai *ganti tukar*. Misalnya individu dari marga *Mahuze* memerlukan tanah yang dimiliki oleh marga *Gebze*, maka untuk itu kedua belah pihak melakukan musyawarah adat yang kemudian diikuti dengan suatu perjanjian rahasia yang disegel dengan penumpahan darah babi di atas tanah yang dimaksud. Sebagai konsekuensi dari tanah tersebut, pihak dari marga *Mahuze* memberikan seorang anak kepada marga *Gebze*, biasanya masih berupa bayi yang kemudian akan menjadi seorang *Gebze* tanpa pernah tahu bahkan dia merupakan bagian dari suatu kesepakatan rahasia kedua marga tersebut. *Kumus* lebih banyak terjadi sebagai solusi kebutuhan lahan lintas marga.

Di tahun 1980-an sudah mulai banyak terjadi transaksi jual-beli tanah sekalipun belum sepenuhnya transaksi dengan objek jenis ini diterima. Lembaga adat atau tokoh-tokoh adat ikut menjadi saksi dalam transaksi ini dan ini yang kemudian memicu adanya legitimasi terhadap lahirnya transaksi jual-beli tanah dalam tradisi Marind, walaupun awalnya hal ini dilarang.

Dalam prakteknya setiap proses jual-beli tanah harus memiliki keterangan dari lembaga adat mengenai status tanah, pemegang hak, bentuk hak, ukuran dan (*idealnya*) nama adat. Tetapi pada prakteknya, nama adat dari suatu tanah jarang dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanah. Barangkali, karena sudah dianggap tanah adat dengan *hak perorangan* dan bukan lagi tanah *hak marga*, maka nama tanah adat itu diabaikan. Jika diberi *nama adat*, berarti nama itu ada kaitannya dengan salah satu marga. Secara otomatis jika terjadi proses jual-beli, maka anggota-anggota dalam persekutuan marga tersebut kelak akan menuntut individu yang bersangkutan karena mereka merasa ikut berhak atas tanah tersebut.

Tidak dicantulkannya *nama adat* memang tidak mengurangi segi yuridis dari surat tersebut. Ruginya, hal ini tidak akan membantu untuk mengidentifikasi *letak* dan *luas* dari tanah adat tertentu, termasuk asal-usulnya. Hal ini tidak lepas dari terlambat terakomodirnya aspirasi suku marind dalam kebijakan pemerintah RI dalam masalah tanah dan segala persoalan yang terkait di dalamnya. Kebijakan pemerintah mengenai tanah diterbitkan tahun 1960, yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Sedangkan UNTEA menyerahkan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan RI pada tanggal 1 Mei 1963. Asumsi yang diambil adalah bahwa pembuatan UU No. 5 tahun 1960 tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan aspirasi kebudayaan Papua karena saat itu Papua belum masuk dalam bagian teritori RI. Budaya Papua adalah budaya yang '*peculiar*', budaya yang unik, yang sangat berbeda dengan kebudayaan wilayah lain di Indonesia. Hal yang paling dapat menjelaskan hal itu adalah bahwa orang Papua merupakan keturunan rumpun bangsa Melanesia yang sangat berbeda dari rumpun Mongoloid yang adalah nenek moyang dari hampir semua suku di Indonesia. UU tersebut sebenarnya juga mencantumkan tentang masalah hak ulayat serta tanah adat. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah telah diadakan riset total ke seluruh wilayah RI tentang hak tersebut? Baik jawaban 'ya' atau 'tidak', tetap berujung pada kesimpulan yang sama. Pada saat itu Papua belum menjadi wilayah teritori RI dan sebagai wilayah non-RI pada saat UU itu dibuat, secara otomatis UU tersebut tidak mempertimbangkan keanekaragaman falsafah hidup suku-suku di Papua, dalam hal ini yang terkait dengan tanah dan permasalahannya. Jadi dapat dikatakan bahwa UU tersebut sama sekali tidak mengakomodir aspirasi suku-suku di Papua, termasuk suku Marind. Kemudian pada tahun 1999, diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Tetapi efek UU No. 5 tahun 1960 tersebut telah membawa kerugian bagi kebudayaan Papua selama kurun waktu yang tidak sebentar, 36 tahun. Selama kurun waktu itu, terjadi banyak pergeseran budaya, hilangnya kampung-kampung adat, perubahan paradigma suku dalam falsafah mereka mengenai tanah, yang berakibat pada berangsur-angsur hilangnya

kekhasan budaya Papua karena dianggap tidak mampu melawan dinamika perkembangan.

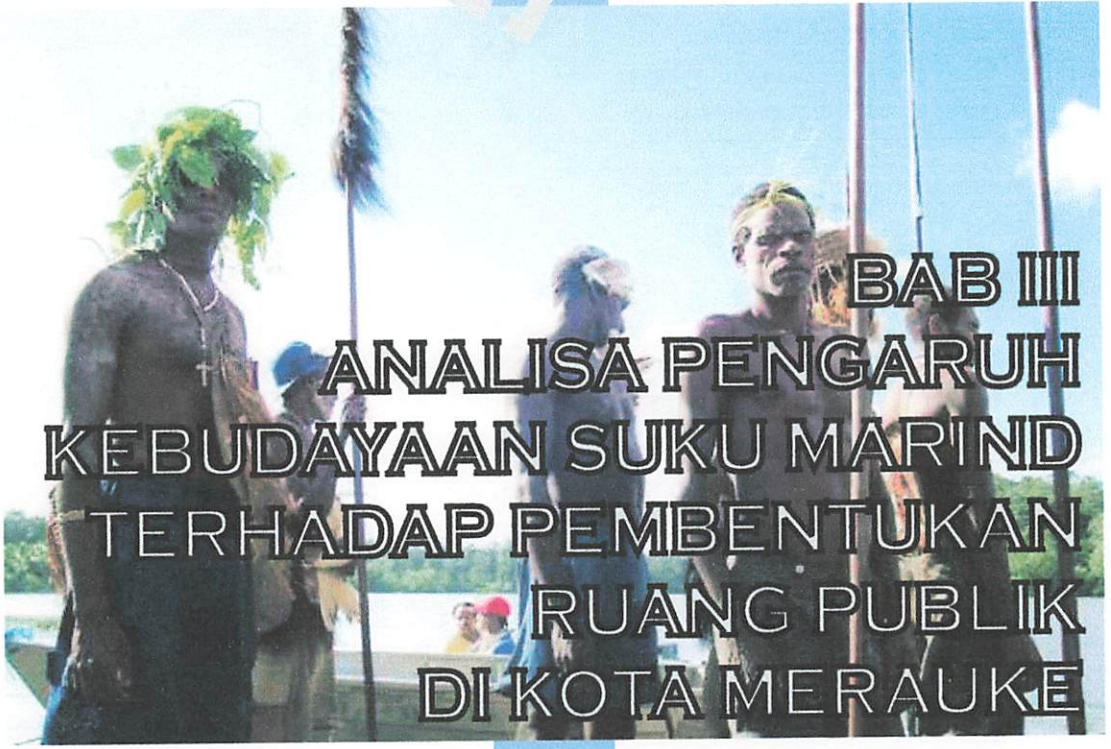
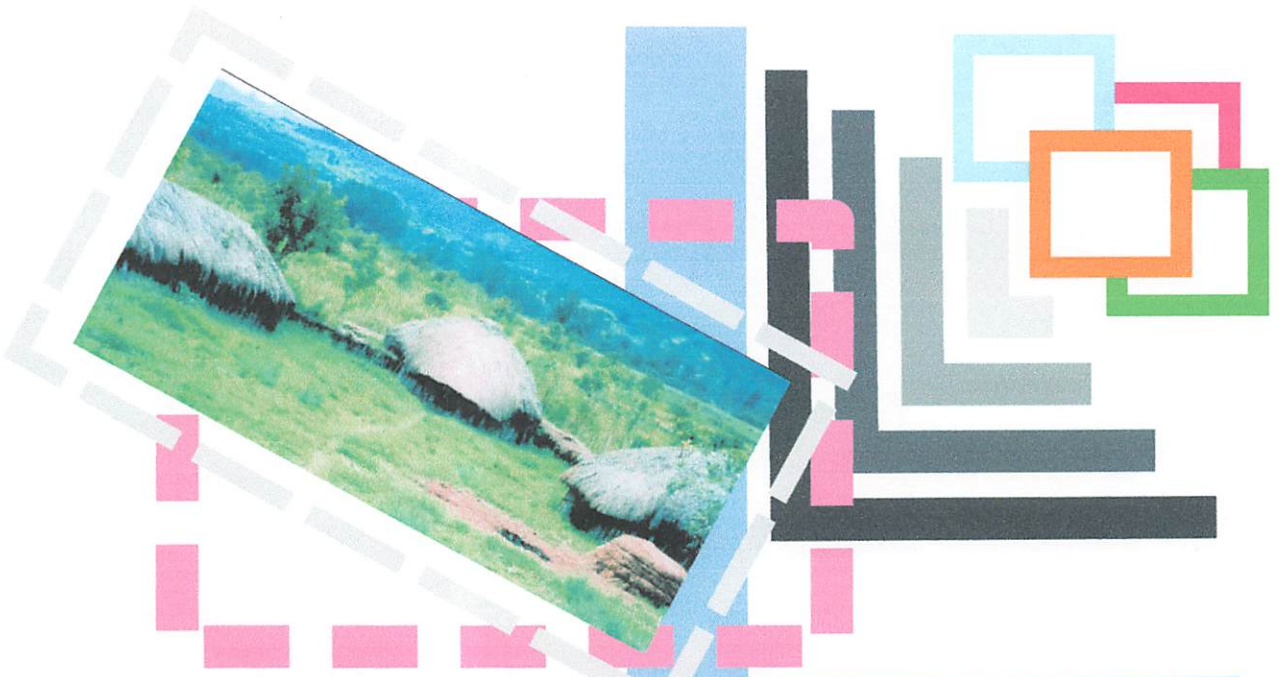
2.8.5.4. *Kakih-Anem*

Seperti telah dibahas di atas, terdapat budaya *kumus* yang lebih kepada proses lintas marga. Bagaimana dengan proses intern marga itu sendiri? Sekalipun suku Marind tidak mengenal pemindahan status kepemilikan tanah secara permanen per individu, tapi mereka mengenal sistem peminjaman tanah secara temporer.

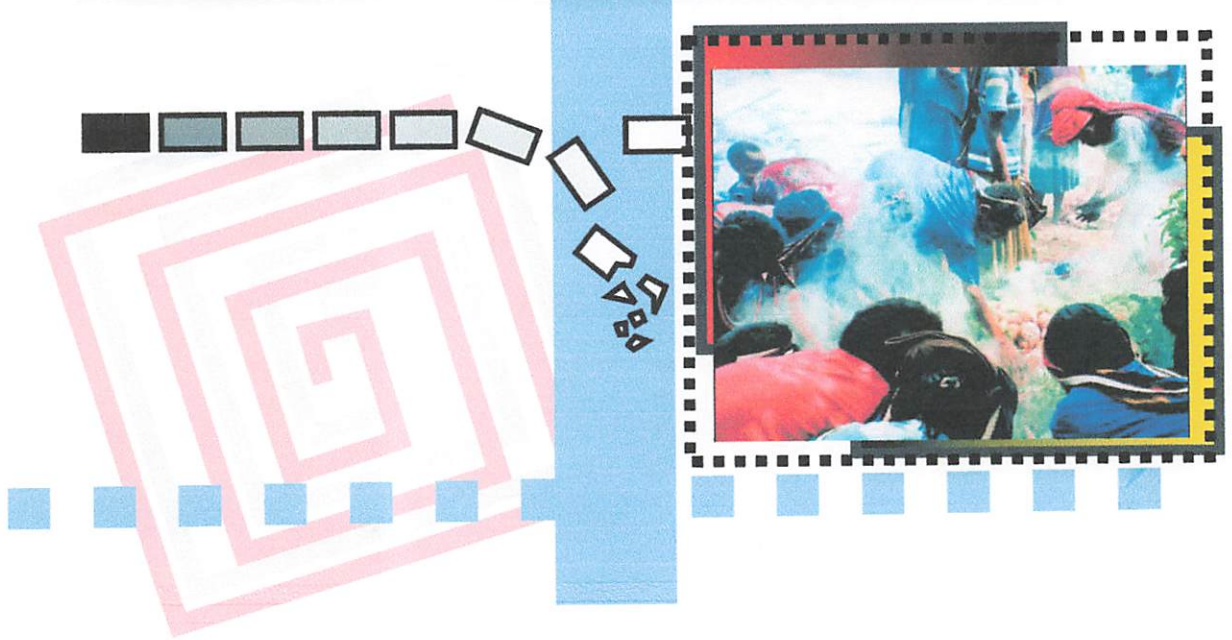
Tanah boleh dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap atau dititipkan kepada orang lain. Jika pemilik tanah meminjamkan tanahnya kepada orang lain, maka hasil bumi di tanah tersebut boleh dinikmati oleh pemilik tanah, tentunya dengan musyawarah bersama.

Jika tanah dititipkan kepada orang lain untuk dijaga, maka si penjaga tanah boleh menikmati hasil kebun dari tanah tersebut. Dalam tradisi Marind tidak dikenal istilah yang membedakan antara si peminjam, pemakai dan penerima titipan tanah. Semua status subyek tersebut hanya dikenal dengan istilah "*kakih-anem*".

Bila kemudian si pemilik tanah menginginkan tanah itu kembali, maka sewaktu-waktu dia akan dapat memintanya kembali kepada si "*kakih-anem*" kapanpun dia inginkan, tanpa mengenal batas waktu. Dalam tradisi Marind tidak dikenal istilah *lampau waktu/kadaluarsa*. Boleh jadi sudah berpuluh-puluh tahun tanah tersebut dipakai dan dinikmati oleh *kakih-anem*, bahkan mungkin telah berpindah ke generasi berikut, tapi ketika si pemilik tanah atau ahli warisnya menuntut dikembalikannya tanah tersebut maka hal itu sah dalam tradisi Marind. Konflik yang muncul adalah ketika pihak-pihak yang terlibat dalam proses peminjaman itu atau pihak-pihak yang dapat memberikan kesaksian secara langsung (*eye-witnessing*), telah tidak ada lagi dan pihak-pihak yang bersengketa adalah generasi penerus yang mungkin saja pemahaman akan adat tidak sebanyak pendahulu mereka.



BAB III
ANALISA PENGARUH
KEBUDAYAAN SUKU MARIND
TERHADAP PEMBENTUKAN
RUANG PUBLIK
DI KOTA MERAUKE



BAB III

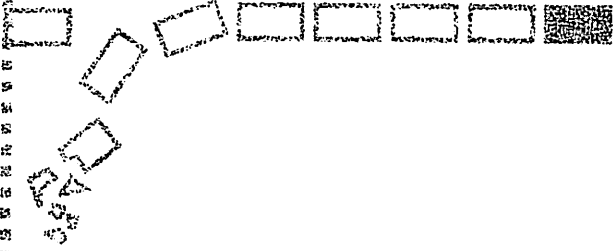
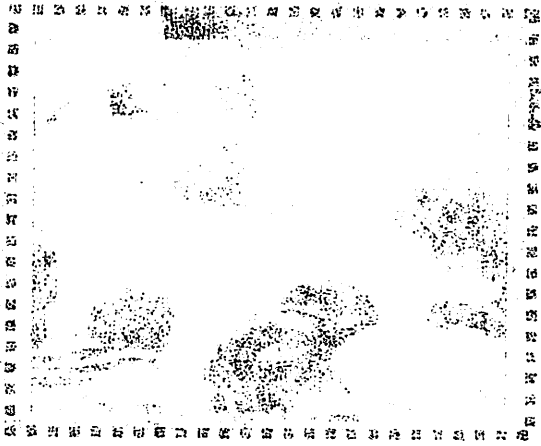
ANALISA PENGARUH

KEBUDAYAAN BUKU MAMIND

TERHADAP PEMBENTUKAN

RUANG PUBLIK

DI KOTA MERAUKE



BAB III

ANALISA PENGARUH KEBUDAYAAN SUKU MARIND TERHADAP PEMBENTUKAN RUANG PUBLIK DI KOTA MERAUKE

Analisa pembentukan ruang publik yang dimaksudkan disini adalah analisa terhadap ruang-ruang komunal yang terbentuk karena digunakan secara bersama oleh masyarakat suku Marind sebagai bagian dari kegiatan kebudayaan yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Ruang publik yang dimaksudkan dalam analisa ini juga memiliki pengertian ruang komunal atau ruang yang biasa digunakan oleh suku Marind tetapi juga dapat dikunjungi oleh orang luar, baik domestik maupun orang asing.

Analisa ruang publik yang akan dilakukan pada wilayah studi didasarkan atas beberapa tipologi ruang publik yang ada di dalam maupun luar negeri, yang terbentuk atas beberapa karakter, yaitu:

A. Pasar (*Markets*)

Pasar Hasil Bumi (*Farmers' Markets*), ruang terbuka atau ruas jalan yang digunakan untuk pasar hasil pertanian atau pasar loak. Biasanya bersifat temporer atau hari tertentu dan berlokasi diruang yang tersedia, jalan, plaza atau lapangan parkir.

Pada wilayah studi juga terdapat pasar umum yang berfungsi untuk melayani masyarakat perkotaan Merauke. Pasar tersebut terletak di daerah pusat kota dan bersifat permanen karena terjadi transaksi setiap hari dan tersedia bangunan fisik yang dapat menampung kegiatan perdagangan.

B. Jalan (Streets)

Pedestrian Sisi Jalan (*Pedestrian Sidewalk*), bagian ruang publik kota yang banyak dilalui orang yang sedang berjalan kaki menyusuri jalan yang satu yang berhubungan dengan jalan yang lain.

Pada wilayah studi juga tersedia jalur di sisi jalan yang juga banyak dilalui banyak orang menyusurnya dan jalan tersebut, terutama pada jalan-jalan protokol. Namun pada permukiman suku Marind tidak terdapat sisi jalan khusus untuk pejalan kaki sehingga terjadi pemanfaatan jalan secara bersama antara manusia maupun hewan. Hal ini juga

dipengaruhi oleh kondisi tertentu di mana jalan-jalan ini kadangkala terbentuk secara temporer karena kegiatan masyarakat suku Marind.

C. Ruang Di Lingkungan Rumah (*Found/Neighborhood Spaces*)

Ruang terbuka yang mudah dicapai dari rumah, seperti sisa kapling di sudut jalan atau tanah kosong yang belum dimanfaatkan dapat dipakai sebagai tempat bermain bagi anak-anak atau tempat komunikasi orang dewasa atau orang tua.

Masyarakat Marind tidak mengenal konsep seperti di atas. Bagi mereka seluruh tanah di *mirav* adalah milik marga, bukan perseorangan. Sehingga tidak ada kapling tanah seperti di masyarakat modern. Dalam gambaran mezo, *mirav* adalah *suatu rumah marga yang besar* di mana rumah yang sesungguhnya adalah *kamar-kamar* dari tiap keluarga.

Namun karena fokus penelitian ini hanya pada pembentukan ruang publik pada masyarakat suku Marind maka ruang publik yang dikaji hanya yang dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan dan adat-istiadat.

Analisa ini dilakukan dengan cara menguraikan tiga unsur budaya dari tujuh unsur budaya dalam *cultural universal* seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Ketiga unsur kebudayaan tersebut akan diuraikan ke dalam tiga jenis ruang tradisional yang akan muncul sebagai akibat pembentukan ruang-ruang komunal (*public space*) dalam masyarakat suku Marind.

Secara umum ruang publik yang ada di Indonesia berbeda dengan batasan ruang publik yang terdapat pada masyarakat barat. Berdasarkan pengamatan awal di wilayah studi tidak dapat diketahui secara jelas batasan antara ruang privat, semi publik dan ruang publik. Sistem sosial yang sangat komunal serta keterbatasan fisik yang ada membuat hampir seluruh wilayah kampung menjadi ruang publik atau semi publik. Namun untuk memudahkan proses analisis dalam bab ini maka konsep ruang publik pada masyarakat suku Marind akan dibagi dalam tiga tingkatan/skala yang akan saling berhubungan antara ruang yang satu dengan yang lainnya. Adapun pembagiannya yaitu :

1. Ruang publik skala mikro yang akan dibatasi pada ruang dalam rumah tradisional suku Marind.
2. Ruang publik skala *mezo* yang akan dibatasi pada ruang umum/komunal, dalam hal ini dalam skala *mirav*.

3. Ruang publik skala makro yang meliputi rute perjalanan, padang rumput, ladang/sawah, kebun, kawasan hutan, muara sungai dan lpeisir pantai.

Selanjutnya ketiga ruang publik tersebut akan dianalisis berdasarkan ketiga unsur budaya dan adat istiadat. Ketiga unsur tersebut meliputi sistem religi, sistem kemasyarakatan, dan adat-istiadat.

Kebudayaan suku Marind tidak lepas dari kepercayaan mereka yang berlandaskan kepada *totem*. Mulai dari sistem religi, sistem kekerabatan hingga kepada sistem mata pencaharian, tidak lepas dari konsep-konsep yang diatur dengan berdasar pada *totem*.

Di setiap tindakan yang dilakukan oleh suku Marind, semuanya mengikuti aturan-aturan yang diterapkan sebagai bentuk penjabaran akan *totem* yang menguasai mereka. Kisah *totem* suatu marga melahirkan aturan-aturan mulai dari yang bersifat mikro hingga yang bersifat makro.

Peran adat masih penting dalam mengarahkan kehidupan masyarakat, mulai dari pikiran, sampai tempat di mana mereka tinggal, hubungannya satu sama lain serta hubungannya dengan alam sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih menerapkan budaya Marind terutama saat acara kematian, perkawinan, angkat anak, tusuk telinga dan inisiasi yang ditandai dengan acara bunuh babi. Di mana bila ada anggota keluarga meninggal dunia maka keluarga yang ditinggalkan harus berpuasa selama 40 hari berpantang makanan yang bernafas, tidak boleh berburu atau memancing dan juga dilakukan acara "*misar*" /tanam tongkat pemali yang menandai dimulainya budaya *sasi*, yaitu tidak boleh mengambil hasil selama satu tahun, dapat dilakukan pada kebun kelapa, kali atau dusun sagu. Tujuan *sasi* sebenarnya adalah untuk membatasi eksploitasi dan meningkatkan hasil kebun kelapa, jumlah ikan di kali dan jumlah tanaman sagu. Jika para tetua adat melihat salah satu wilayah sudah berkurang hasilnya maka akan diadakan rapat adat untuk memutuskan waktu *sasi* tanpa menunggu sampai ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Setelah satu tahun keluarga yang berduka melakukan acara "bunuh babi" untuk mencabut kayu pemali, di mana pada acara ini dapat dilakukan juga acara tusuk telinga bagi anak-anak perempuan atau acara angkat anak bagi keluarga yang mempunyai kewajiban bayar harta atau tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris. Juga acara inisiasi bagi orang dari suku lain yang ingin masuk dalam keluarga besar Marind yang akan ditandai dengan pemberian marga. Dalam tradisi perkawinan

sebagai mas kawin pihak keluarga laki-laki harus menyerahkan tanaman *wati* (sejenis tanaman perdu yang biasa digunakan pada setiap acara adat sebagai symbol pengukuhan dan juga digunakan sebagai minuman khas laki-laki Marind) kepada keluarga perempuan sebagai tanda pengesahan secara adat. Di samping itu pasangan yang akan menikah harus sudah tahu kerja, laki-laki harus sudah bisa kerja kebun dan berburu sedangkan perempuan sudah tahu cara pangkur sagu. Pasangan yang menikah juga diharuskan menanam sagu pada saat dinikahkan. Bilamana sagu yang ditanam sudah waktunya dipanen maka akan dilakukan acara “bunuh babi” untuk memperingati acara sagu baru dengan harapan pasangan ini akan langgeng dan diberi banyak rezeki. Kebiasaan adat dalam kehidupan sehari-hari yang masih dipertahankan adalah keharusan saling menghargai marga lain misalnya, marga *Mahuze* mempunyai *totem* sagu, artinya marga ini diharapkan dapat memberikan contoh yang baik tentang pengelolaan sagu mulai dari penanaman sampai dengan pemungutan hasil, demikian halnya dengan marga *Gebze* yang bertotem tanaman kelapa maka orang Marind bila akan makan kelapa tidak boleh dibelah/dipotong tetapi harus dikupas kulitnya terlebih dahulu. Jika kelapa langsung dibelah dianggap tidak menghargai marga *Gebze* yang berarti terjadi pelanggaran adat. Jika terjadi pelanggaran seperti ini maka segera dilakukan pertemuan antar kedua marga untuk menentukan sangsi. Dahulu kala sangsi adatnya adalah nyawa/langsung bunuh karena dianggap menghina, namun sejak tahun 1980 telah terjadi perubahan sangsi adat yaitu dengan korban babi.

Analisa terhadap nilai-nilai budaya dan adat-istiadat yang terkandung dalam suatu kehidupan masyarakat memiliki makna yang dalam sehingga diperlukan pemahaman tentang keberadaan dan arti dari suatu tempat atau ruang sebagai akibat kebudayaan yang melekat pada masyarakat tersebut. Jika dikaji secara cermat maka akan diketahui hubungan keterkaitan yang erat dalam konteks keruangan. Untuk mendapatkan konsep dasar keruangan tersebut, maka dilakukan analisa dasar tentang pengaruh kebudayaan terhadap interaksi sosial penduduk, dalam hal ini antara suku Marind dengan pihak pendatang dan analisa dasar tentang pengaruh kegiatan budaya terhadap pembentukan ruang publik.

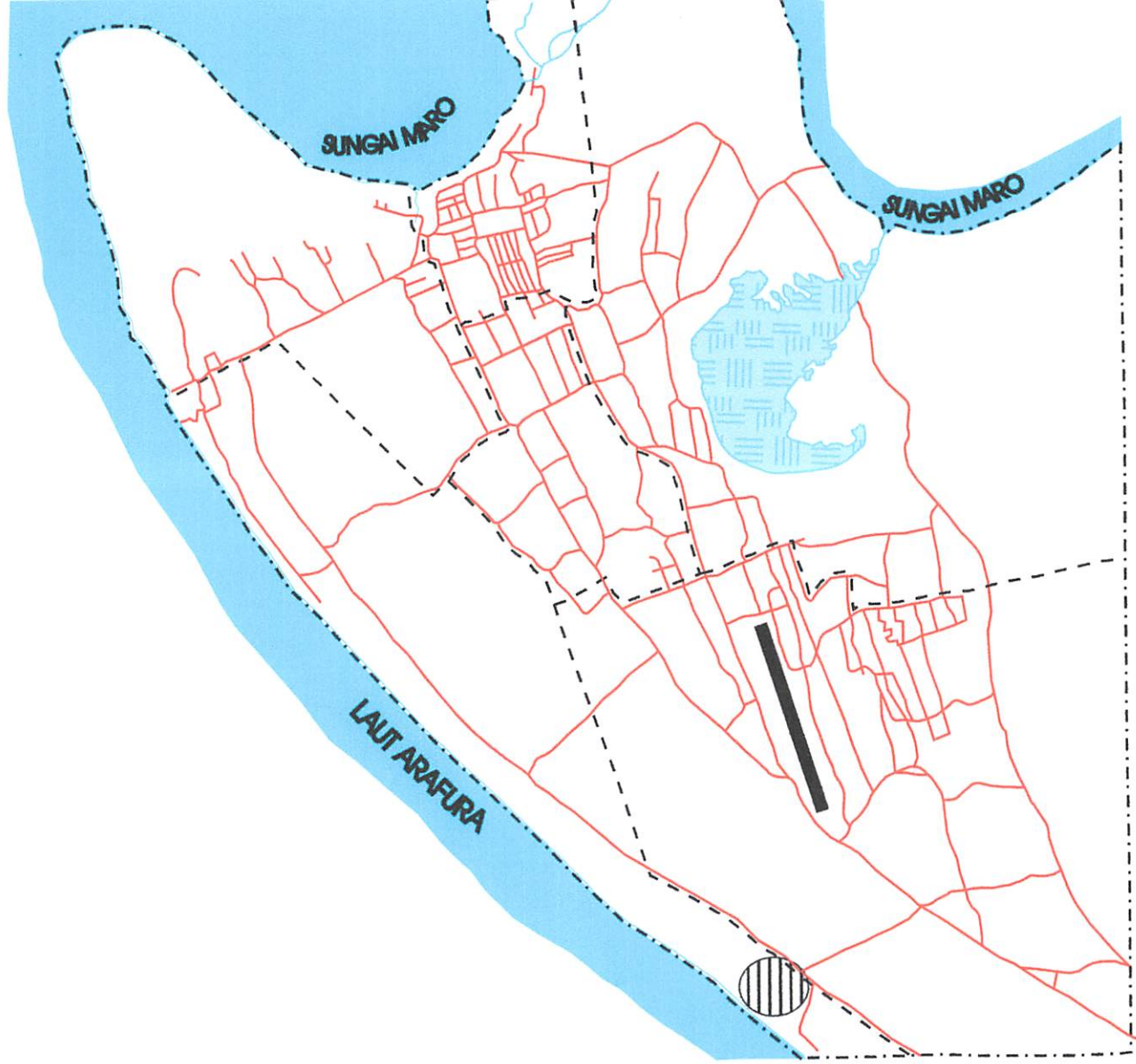
3.1. Profil Sampel Penelitian (Kampung Onggaya)

Sebagai fokus penelitian diambil sampel kasus di kampung Onggaya, yang terletak di pinggir laut Arafura. Kampung ini masih memiliki nilai-nilai adat suku Marind dibanding wilayah-wilayah lainnya di kota Merauke. *Kampung Onggaya* terletak di pinggiran kota Merauke, merupakan kampung yang homogen baik secara etnis maupun ekonomi. Homogen secara etnis, karena merupakan kampung/*mirav* dari marga *Gebze*. Orang luar yang ada di sana, jumlahnya sangat kecil dan pada umumnya mereka ada di sana karena perkawinan dengan penduduk lokal. Selain itu biasanya orang luar yang ada di sana adalah mereka yang bekerja sebagai pedagang (membuka kios) atau sebagai pelayan masyarakat, baik di instansi pemerintah (puskesmas, pos polisi, sekolah) maupun di gereja.

Kampung Onggaya mengalami kontak dengan dunia luar mulai tahun 1960, ketika *zending* masuk ke sana melalui guru-guru Injil dari Maluku. Adapun batas wilayah Onggaya disebelah timur adalah kampung Tomer, sebelah barat kampung Kuler, sebelah utara kampung Pou dan di sebelah selatan laut Arafura. Jumlah penduduknya 296 jiwa, 82 KK yang terdiri dari 150 laki-laki dan 146 wanita dengan jumlah tenaga potensial sebanyak 209 jiwa. Secara geografis kampung ini bertanah datar 50% dan gelombang 50%. Jalan dalam kampung terbuat dari tanah sepanjang 2 km dengan beberapa jembatan yaitu jembatan beton 4 buah dan jembatan kayu 1 buah. Perumahan masyarakat terbuat dari papan yang merupakan bantuan dari pemerintah daerah dan ada beberapa rumah pribadi yang terbuat dari batu. Masyarakat memperoleh sumber air bersih dari sumur yang terdapat di beberapa rumah digunakan secara bersama sama, namun ketersediaan air bila musim kemarau cukup sulit sehingga masyarakat biasanya memanfaatkan sumber air di dusun sagu yang letaknya cukup jauh dari kampung. Prasarana umum yang tersedia di kampung antara lain satu gedung SD YPK dengan jumlah guru sebanyak 5 orang; satu gedung puskesmas pembantu dengan 2 orang tenaga medis yaitu 1 orang bidan dan 1 orang mantri; satu gedung gereja Protestan dengan 1 pendeta dan 1 vicaris; kios milik pendatang 2 buah. Kampung ini dipimpin oleh seorang *pakas-anem*, *Yulianus Bole Gebze*, yang juga ditunjuk pemerintah sebagai kepala kampung Onggaya. Dengan demikian, tidak ada *dualisme* kepemimpinan di kampung tersebut, karena pemimpin spiritual dan administratif menjadi satu.

Peta : Orientasi Lokasi
Sampel Penelitian

- LEGENDA
-  Batas Kecamatan
 -  Batas Kelurahan
 -  Jalan
 -  Airport
 -  Sungai/Laut
 -  Rawa
 -  Lokasi sampel penelitian (kampung Onggaya)



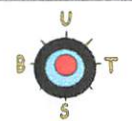
TAMAN NASIONAL WASUR

KOTA MERAUKE

Sumber : RDTRK MERAUKE

SKALA

1 : 40.000



KOTA MERSANKE



RUGAW LANONISAN NAMA

1 : 40.000

SKATA

Sumber : BDTJK MERSANKE



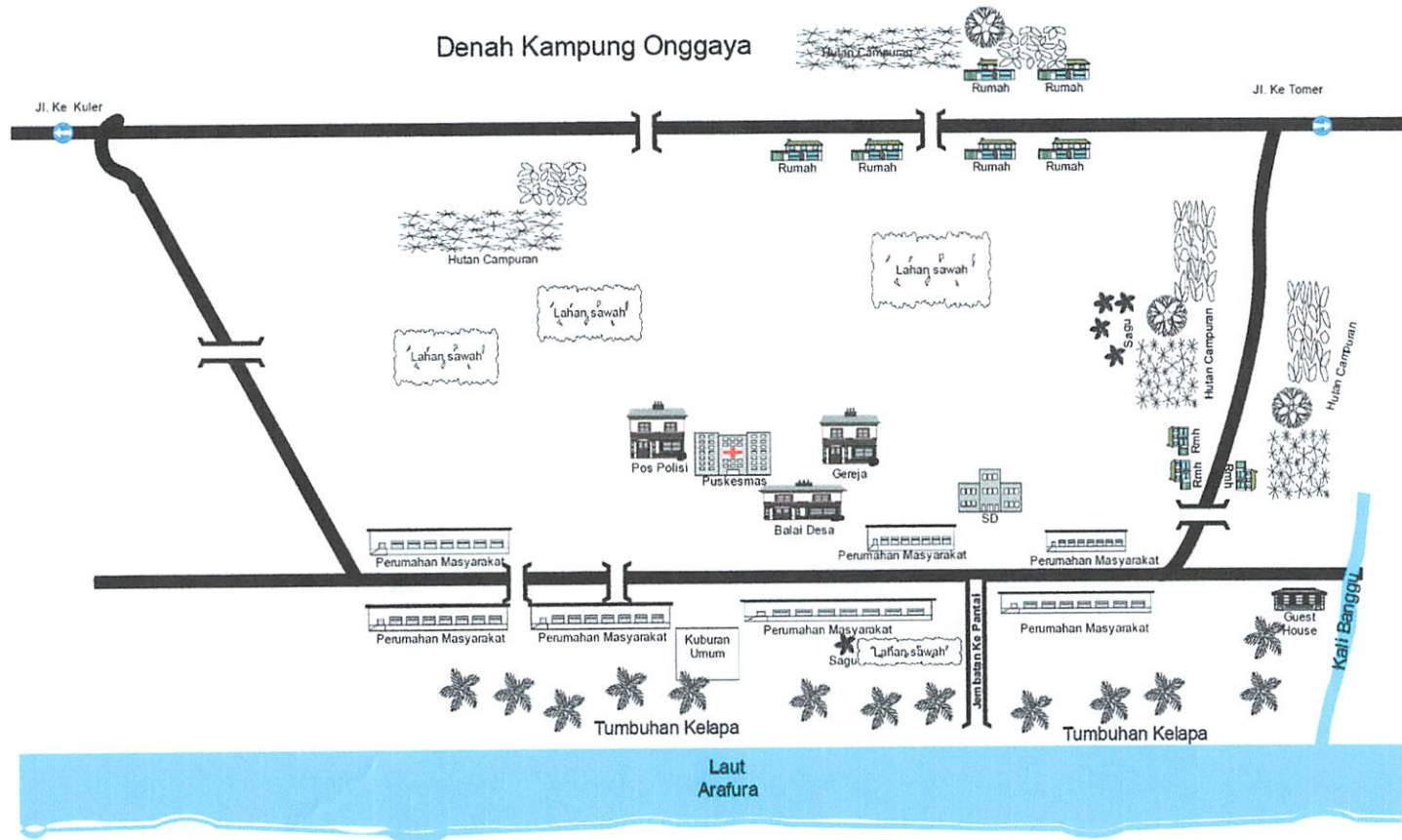
- (komponen Ortodokso)
 bevelifitan
 Lokasi sumber
 Rawo
 Sungsai/pant
 Airport
 Jalan
 Batas Kelurahan
 Batas Kecamatan
- LEGENDA

Sumber pemelitian
 Foto : Ortodoksi Lokasi
 2009

MARTANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

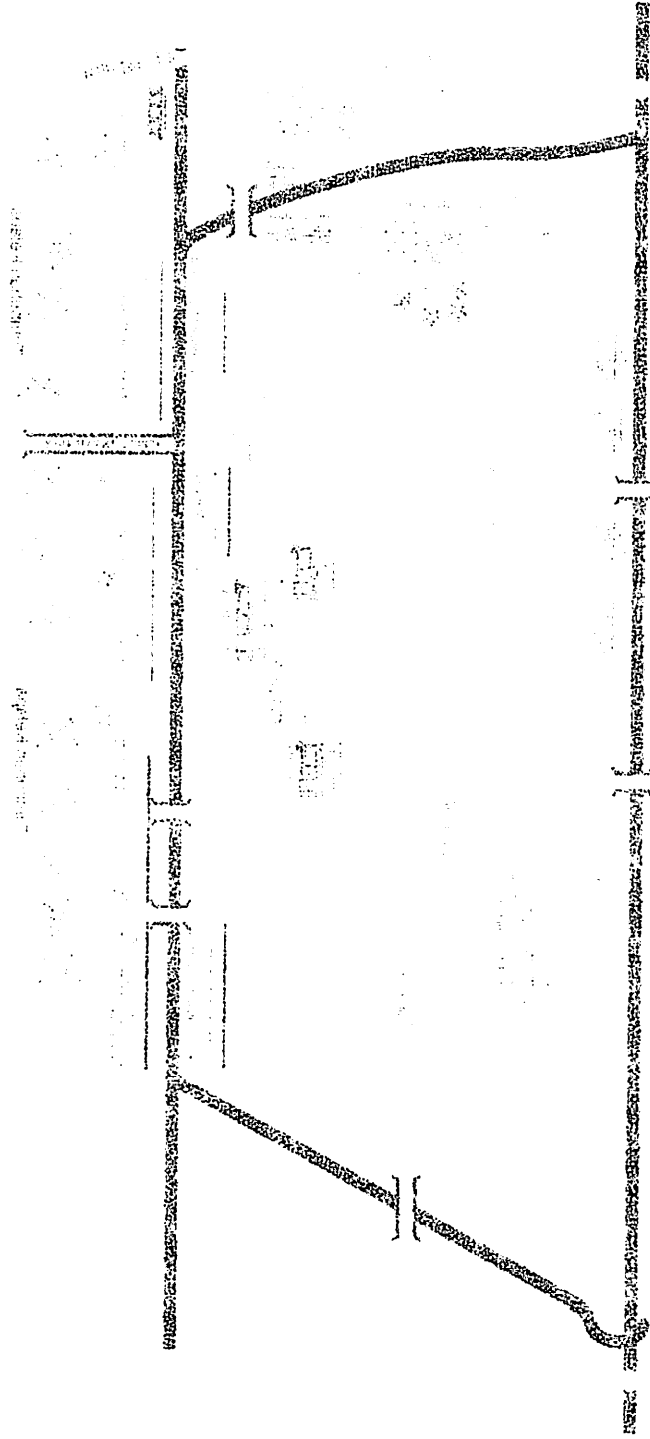
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN



Gambar 3.1. Denah Lokasi Sampel Penelitian

Сампел 3.1. Девушк Лейбел Замбал (Сампел)

1998
1999



Девушк Ксубриг Оудбис

Kehidupan kampung Onggaya seperti tipikal kampung homogen di Papua pada umumnya. Di mana mereka cenderung bertahan hidup secara subsisten, yang sangat mengandalkan lingkungan sekitarnya untuk dapat bertahan hidup. ‘*Kehidupan subsisten*’ mereka tidak berarti bahwa penduduk kampung tidak mempunyai pengalaman atau berkepentingan pada ekonomi uang. Karena pada dasarnya mereka juga telah tersentuh dengan hal itu. Hanya saja mereka tidak menggunakan uang untuk memenuhi sebagian besar keperluan dasar mereka. Pemenuhan kebutuhan pokok rata-rata melalui hasil tanah mereka sendiri atau dengan barter antara penduduk kampung.

Tabel 3.1.
Profil Kampung Onggaya

No	Identitas Kampung	Deskripsi
1	Nama kampung	Onggaya
2	Nama suku	Marind
3	Nama marga pertama	Gebze
4	Nama marga-marga lain yang ada di sana (masih dalam lingkup marga Gebze)	Walinaulik, Dinaulik, Honglik, Moliwen, Kai-ze
5	Matapencarian	Berkebun, meramu, nelayan
6	Bentuk pola kepemimpinan adat	<i>Pakas-anem</i> , pemimpin spiritual dan adat Marind
7	Bentuk kelembagaan adat	Kelembagaan berdasarkan Musyawarah (<i>kuahaman</i>)
8	Sistim perkawinan	Kelompok ini cukup terbuka untuk kawin lintas etnis dan kawin masuk
9	Sistim pembayaran mas kawin	Dimusyawarahkan dalam <i>sulam man-ahi</i>
10	Sistim pemilikan tanah	Dimiliki oleh marga, diatur melalui aturan-aturan marga
15	Sistim kekerabatan	Melalui pola hubungan darah, patrilineal
16	Sistim kepercayaan	Kristen Protestan, namun masih berpegang kepada ajaran-ajaran leluhur (<i>Mayo</i>), terutama dalam tatanan adat istiadat
17	Pola hubungan dengan pihak luar	Dahulu melalui perkawinan, perang dan perebutan wilayah. Namun sekarang kontak dilakukan dalam hal perdagangan dan kegiatan sosial-budaya dan keagamaan
18	Sistim pemberdayaan sumber daya alam tradisional	Pemahaman yang kuat terhadap alam senantiasa menyiapkan sumber daya di hutan untuk dikelola.

3.1.1. Unsur-Unsur Kebudayaan Suku Marind di Kampung Onggaya

A. Sistem Religi

Masyarakat kampung Onggaya hampir semuanya memeluk agama Kristen Protestan. Dapat dikatakan bahwa semua penduduk kampung Onggaya yang bersuku Marind beragama Kristen Protestan. Walaupun demikian dalam kehidupan sehari-hari mereka, kepercayaan tradisional masih tetap melekat di dalam diri mereka. Kepercayaan akan *dema* telah mengakar dalam diri mereka, bukan saja dalam perihal religi tapi karena hal tersebut adalah bagian dari falsafah hidup suku Marind.. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan sehari-hari masyarakat di sana, seperti melakukan upacara-upacara adat, bercocok tanam, membangun rumah, perkawinan, perang maupun perdamaian.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh suku Marind, berlandaskan kepada ketaatan mereka akan ajaran-ajaran kepercayaan untuk menghormati *dema*. Mulai dari upacara besar hingga kepada hal-hal yang berskala mikro, tidak lepas dari keterkaitan *dema*. Penyebab utama adalah karena agama tradisional suku Marind, yaitu *Mayo* adalah merupakan agama yang *totemistik*. Sehingga keseharian dari suku Marind tidak lepas dari totem-totem yang nota bene adalah *dema* yang mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup keturunannya (dalam hal ini suku Marind).



Gambar 3.1.1a. Tarian totem babi hutan (*dema* marga Basik-basik)

Hal ini terkadang menjadi konflik dengan agama baru yang dianut (*Kristen*), di mana ada bagian-bagian ajaran tradisi yang yang bentrok dengan ajaran agama Kristen. Secara umum ada tradisi-tradisi yang bersifat ekstrim yang memang hilang, seperti tradisi-tradisi yang bersifat hubungan seks bertukar-tukar pasangan. Akan tetapi dalam

kehidupan sehari-hari, mereka tidak lepas dari kepercayaan adat yang memang masih kental di kampung Onggaya. Karena dalam *Mayo* (agama awal Marind), telah diatur mengenai tatanan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan sehari-hari suku Marind, tidak lepas dari konsep-konsep yang diberitahukan dalam *Mayo*.

Salah satu upacara yang paling penting dalam masyarakat Marind, termasuk di kampung Onggaya adalah upacara inisiasi, yaitu pengakuan akan kedewasaan seseorang, yang menandakan bahwa dia berhak untuk mendengar seluruh kisah-kisah tentang marganya, totem dan *dema* yang menaunginya dan memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya. Seluruh ajaran *Mayo* diberitahukan dalam upacara ini. Ada tiga urutan upacara inisiasi, yaitu *mbulalo*, *mitawal* dan *kunam*. Upacara ini dimulai dengan ritual dalam balai adat (*mean-sai*), dilanjutkan dengan iring-iringan ke tempat pembaptisan di rawa di sekitar *mirav* kemudian dilanjutkan dengan pesta adat di pesisir pantai atau tepi sungai.

Mbulalo, sebagai proses inisiasi pertama, berisikan perkenalan akan kebudayaan Marind yang selama ini belum boleh didengar dan diketahui oleh orang yang belum dewasa. Para peserta upacara, yaitu pemuda-pemudi yang hendak mendapatkan pengakuan kedewasaan dikumpulkan dalam tempat yang ditetapkan sebagai tempat upacara, biasanya adalah balai adat atau di tempat terbuka yang dibatasi oleh pagar manusia dan daun sagu. Kemudian diadakan ritual yang berisikan peraturan-peraturan tentang marga dan sangsi jika melanggar. *Pakas-anem* memimpin upacara ini, dengan dihadiri oleh para orang tua peserta upacara, para pembela adat dan seluruh orang dewasa di *mirav*. Proses ini dilanjutkan dengan membawa para peserta upacara ke rawa dekat *mirav* (yang merupakan bagian dari tanah ulayat marga *Gebze* di Onggaya), kemudian satu per satu peserta upacara mengikuti bagian ritual yaitu "*heis-anem*" (hampir sama dengan sakramen 'baptis' di ajaran agama Kristen, yaitu ditenggelamkan ke dalam rawa tersebut). Hal ini merupakan perlambang dari kehidupan sebelum kedewasaan (sebelum masuk ke dalam rawa) dan kehidupan yang mengalami pencerahan (setelah keluar dari rawa). Dengan demikian para peserta upacara dianggap telah suci, diakui sebagai anggota penuh suku dan layak untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya.

Tahap selanjutnya adalah *mitawal*, yang hanya khusus untuk para laki-laki saja. Dalam tahap ini, para pemuda diceritakan lebih detil lagi mulai dari kisah penciptaan,

dema dan segala falsafah-falsafah yang terkait dengannya. *Pakas-anem* dan para pembela adat secara bergiliran menceritakan kisah-kisah yang terkait dengan *totem* dari marga mereka. Mulai dari sistem religi, pengagungan akan *dema*, sistem kekerabatan, kecintaan akan alam yang merupakan wujud dari *dema* yang berkorban demi kelangsungan hidup keturunannya, konservasi sumber daya alam, adat istiadat dan tabu-tabu yang ada. Juga diberitahukan tentang konsekuensi jika mereka melanggar, mulai dari sangsi kematian hingga pengucilan. Pada tahap ini, anak kecil dilarang untuk berada dekat dengan tempat upacara karena apa yang disampaikan dalam *mitawal* tabu untuk didengarkan oleh orang yang belum dewasa.

Tahap ketiga dari inisiasi adalah *kunam*, tahap ini juga hanya boleh diikuti oleh para laki-laki. Di sini diajarkan tentang cara-cara mempergunakan kekuatan *totem* dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang paling penting dalam proses ini adalah pengajaran pemahaman tentang *nawaya*, yaitu kekuatan yang meliputi manusia, yang selama ini tersembunyi di dalam tubuh manusia. Yang adalah warisan dari *dema* yang tertinggal dalam tubuh manusia. Di sini para peserta upacara diperkenalkan dengan unsur-unsur supranatural, seperti mantra-mantra dan cara mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh adalah pemanggilan halilintar dalam perang untuk menghambat laju pergerakan musuh, karena *anih* (halilintar) adalah juga *totem* dari marga *Gebze*. *Anih* juga dipanggil dalam upacara meminta hujan. Dalam *nggamo* (mantra-mantra), *dema* yang menjadi *anih* diminta untuk membantu keturunannya aygn sekarang sedang meminta bantuan dengan cara menurunkan hujan. Ada kesan kecenderungan penggunaan *nawaya* sebagai media untuk *doti* (santet, teluh), namun dalam masyarakat Marind, *yav-mesav* adalah pelaksana/eksekutor dari hukuman yang dijatuhkan oleh *kuahaman* (musyawarah adat). *Kambara* atau kutukan melalui *doti* yang membuat orang Marind patuh pada tradisinya. Orang Marind tidak mencuri lebih karena takut akan *kambara* dibanding karena ketakutan akan aturan-aturan hukum formal.

Proses inisiasi ditutup dengan pesta adat dan upacara minum *wati*. Pada awalnya proses ini sering disertai dengan proses perjodohan, yaitu pemberian tanda *akahev* dari orang tua pemuda Marind kepada para pemuda Marind yang akan melakukan acara lomba lari di pesisir pantai tempat pesta adat dilaksanakan. Namun seiring dengan perkembangan jaman, pemberian tanda *akahev* tidak lagi dilakukan bersamaan dengan

selesaiya proses inisiasi tetapi lebih banyak diberikan pada perjodohan pada waktu kecil.

Acara dipusatkan di pesisir pantai di pinggir Laut Arafura. Seluruh *mirav* berkumpul di sana (tetapi hanya para laki-laki dewasa yang boleh berada dalam lokasi acara; wanita dan anak-anak melihat dari jauh). Para pemuda yang telah dikukuhkan menjadi laki-laki dewasa, kemudian disuguhi *wati*, minuman tradisional yang hanya khusus disajikan di upacara-upacara adat penting dan tidak semua boleh meminumnya. *Yosim* dan *Pancar* ditarikan pertama-tama oleh para pemuda mengelilingi api unggun disaksikan oleh *pakas-anem* dan para pembela adat.

B. Sistem Kekerabatan

Suku Marind di kampung Onggaya, adalah suku Marind dari marga *Gebze*. Selain marga *Gebze* sebagai marga utama, juga ada marga-marga yang berada di bawah marga utama. Di kampung Onggaya, terdapat sub marga *Walinaulik*, *Dinaulik*, *Youmend*, *Zohe* dan *Tanase*. Kesemuanya berada di bawah marga *Gebze* dan mereka juga berhak untuk ikut andil dalam *kuahaman* (musyarawah adat). *Pakas-anem* sekarang adalah *Yulianus Bole Gebze* dan menurut keterangan beliau, selama ini yang menjadi *pakas-anem* di kampung Onggaya adalah selalu dari marga *Gebze*. Bukan berarti marga lain tidak dapat menjadi *pakas-anem*, karena pemilihan *pakas-anem* bukan berdasar pada keturunan tetapi pada penilaian akan kecakapan dan kemampuan dalam hal adat-istiadat serta hal spiritual.



Gambar 3.1.1b. *Pakas-anem* ketika memimpin ritual adat

Sistem kekerabatan di kampung Onggaya adalah mengikuti prinsip garis keturunan patrilineer atau garis keturunan ayah, sebagaimana anak akan mewarisi marga

dari ayah. Pihak keluarga dari sang ayah, sangat berperan besar dalam menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masa depan keluarga. Jika dahulu penamaan anak diambil dari nama roh orang yang dipenggal kepalanya dalam pertempuran, maka sekarang nama anak diambil dari nama-nama leluhur mereka terdahulu sebagai bukti ikatan yang kuat antara mereka dan leluhur mereka.. Kuatnya prinsip patrilineal dan ikatan dalam marga, mengakibatkan semakin kuatnya persatuan antara masyarakat suku Marind yang berada di kampung Onggaya. Struktur dan komposisi kampung yang homogen juga turut mendukung terciptanya keadaan tersebut. Tidak adanya sistem kasta ataupun kelas-kelas masyarakat dalam tradisi Marind membuat tidak adanya sekat antar golongan maupun kelompok masyarakat. Jikalau ada individu yang menonjol, adalah lebih kepada hal kemampuan memimpin adat dan kemampuan siritual.

Di kampung Onggaya, juga di kampung Marind pada umumnya, masih terdapat falsafah *yah-a-yah*. Falsafah tentang "*sama rasa dan sama rata*" ini sangat mempengaruhi kekerabatan di sana. Sudah menjadi tradisi sejak dahulu bahwa setiap individu dalam marga akan saling menolong satu sama lain. Jadi, pada dasarnya tiap individu yang berlebih akan menghidupi yang kurang, itulah *yah-a-yah* dalam kekerabatan. Jika ada seseorang dalam marga yang sedang panen sagu, pulang menangkap ikan atau sedang mempunyai persediaan bahan makanan lain yang lebih dari cukup untuk dia dan keluarganya, maka anggota marga yang lain akan datang untuk meminta kepadanya. Si "*pemberi makan*" disebut "*ah-man*" sedangkan si "*peminta-minta*" disebut sebagai "*abat-man*". Mereka akan terus datang kepada orang tersebut hingga orang tersebut sudah tidak berkelimpahan lagi. Siklus ini akan terus berlanjut, bilamana ada yang berkelebihan maka sudah menjadi kewajiban dia untuk "*menghidupi*" anggota marga yang lain yang datang kepadanya. Sehingga di kampung ini tidak ada individu yang kaya atau benar-benar miskin. Semua akan berakhir pada kondisi *yah-a-yah*, sama rata dan sama rasa. Jika ada individu yang melanggar tradisi ini, maka dapat berakibat dikucilkannya dia bahkan dapat berakibat hingga kepada kematian orang tersebut melalui *doti* (santet) sebagai hukuman adat. Lain halnya dengan mereka yang telah meninggalkan kampung, maka aturan seperti itu sudah tidak berpengaruh lagi. Akan tetapi jika mereka kemudian pulang ke sana, baik tinggal permanen maupun sementara, aturan ini tetap berlaku untuk mereka.

Tradisi lain yang berfungsi sebagai *pengendali* bagi tradisi *yah-a-yah* dalam kekerabatan suku Marind adalah “*emer-anem*”, yang artinya sebenarnya adalah “*orang lapar*”. Setiap individu yang datang ke saudaranya yang berlebih akan disebut “*emer-anem*”, jika dia datang berulang kali tanpa berupaya untuk menghidupi dirinya sendiri. Sebutan ini halus bermakna “*orang lapar yang mencari sesuatu untuk mengisi perutnya*” dan secara halus memiliki makna “*pencuri*”. Istilah “*emer-anem*” sangat merendahkan dalam masyarakat Marind, konteksnya sama dengan memaki orang yang datang meminta-minta berulang-ulang.

Jika ada anggota marga yang datang meminta kepada saudaranya yang kebetulan sedang berkecukupan, maka awalnya akan diberi secara baik-baik. Sebagai contoh:

“Salah seorang dari marga *Dinaulik* sedang berkelimpahan setelah masa panen sagu dan berburu. Secara otomatis anggota marga yang lain akan datang untuk ‘*meminta*’ kepadanya dan sudah kewajiban dia untuk ‘*menghidupi*’ sesama anggota marganya. Pada saat dia memberi, ada pesan moral yang disampaikan, yaitu agar anggota marga yang datang berusaha lebih keras agar tidak terus meminta-minta. Dia akan memberi ‘*modal*’ kepada saudaranya tersebut dengan harapan agar berusaha menghidupi dirinya sendiri. Andai kata hal itu tidak dipenuhi, dengan kata lain saudaranya itu tidak berupaya untuk menghidupi dirinya sendiri dan tetap datang meminta kepadanya, maka saudara tersebut dianggap bebal olehnya. Dia kemudian akan melakukan apa yang disebut tradisi “*mato hale*” kepada saudaranya. Dia tetap akan memberi kepada saudaranya itu sewaktu saudaranya datang untuk meminta-minta kepadanya, bahkan memberi lebih dari yang sebelumnya tapi sudah tidak memberi pesan moral, bahkan *diam sama sekali*. Menurut keterangan *pakas-anem*, orang yang bersangkutan akan selalu memberi bagian yang lebih besar dari yang sebelumnya diminta oleh saudara yang datang meminta-minta. Bahkan dapat saja dia akan memberikan semua miliknya kepada saudaranya yang datang meminta-minta itu. Tetapi hal ini belum pernah terjadi, karena jika sampai terjadi berarti saudara yang meminta itu sangat tidak menghargai adat. Pemberian bagian yang terus lebih besar dari sebelumnya adalah merupakan wujud “*mempermalukan*” dari si pemberi kepada si penerima. Dia akan melakukan aksi tutup mulut, yaitu *mato hale* karena dia telah memandang rendah saudaranya yang bebal itu, telah menganggapnya sama seperti *binatang* yang tidak tahu malu dan tidak berakal. *Mato hale*, sebenarnya berarti tingkat kesadaran *animha* (manusia sejati) yang tinggi. Jadi, karena dia sadar bahwa dia manusia dan saudaranya (yang dalam

hal ini telah dianggap sebagai orang bebal) adalah *binatang*, maka dia tidak sepatutnya dia berbicara dengan *binatang*.”

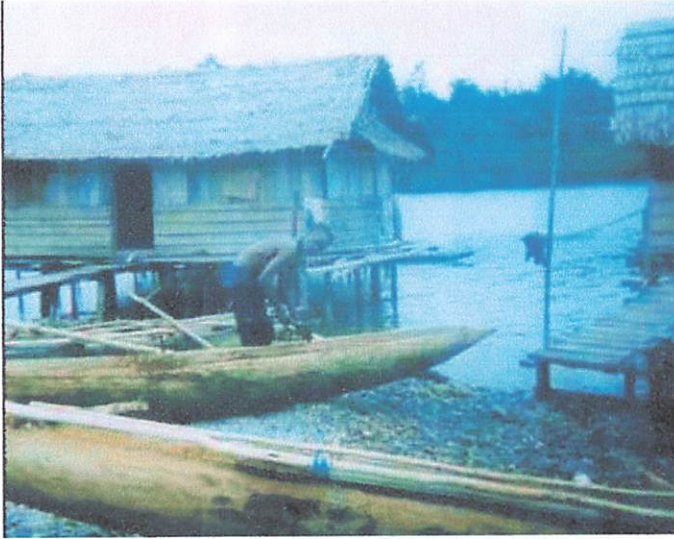
Dengan demikian akan ada keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Marind, sesuai dengan falsafah yang diajarkan dalam *Mayo*, “*unam-ehe kawa mawak-la*”. Selalu akan ada pasangan mutlak tetapi berbeda jauh satu sama lain. Yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam.

Pada dasarnya tradisi ini tetap akan berlaku di kampung Onggaya, sekalipun telah ada individu-individu yang telah meningkat pola pikirnya. Hal ini disebabkan oleh telah mengakarnya budaya Marind dalam kampung ini, adanya ikatan kuat antar marga dan kehomogenan masyarakat kampung. Ada individu-individu yang mencoba meninggalkan budaya ini, akan tetapi pilihannya adalah meninggalkan kampung ke daerah yang lebih modern. Namun tetap saja ketika mereka pulang ke kampung, mereka otomatis akan diikat kembali dalam aturan marga tersebut.

Hubungan kekerabatan pun berlangsung antar kampung yang berada dalam satu marga. Kampung Kuler dan Tomer adalah dua kampung yang juga berada dalam marga *Gebze*. Para penduduk antara tiga kampung itu sering berinteraksi baik dalam musyawarah adat dalam persekutuan adat marga *Gebze* maupun dalam perdagangan/barter. Dalam upacara-upacara besar, seperti upacara kedewasaan (inisiasi), para penduduk dari tiga kampung tersebut saling mengundang satu sama lain untuk menghadiri upacara penutupan, yang dilakukan di pantai.

C. Sistem Mata Pencarian

Sebagai wilayah yang kaya dengan potensi sumber daya alam, kampung Onggaya telah menghidupi masyarakat yang bermukim di dalamnya. Sebagai suku yang sangat memegang tinggi peranan tanah dalam kebudayaannya, suku Marind memiliki keterikatan dengan tanah yang telah diwariskan kepada marga mereka. Mereka hidup dari tanah tersebut, sesuai dengan wasiat yang diberikan oleh para *dema* sebelum berubah wujud menjadi tumbuhan, binatang dan benda-benda alam lain yang bertujuan untuk membantu keturunannya bertahan hidup. Mereka tetap berpatokan pada inti ajaran *Mayo*, yaitu menjaga stabilitas antara manusia-hewan-tumbuhan-faktor/faktor alam lain sehingga tercipta kesinambungan siklus dan tidak putusya hubungan antara satu elemen dengan yang lain.



Gambar 3.1.1c. Bivak nelayan kampung Onggaya di pinggir Laut Arafura

Terkait dengan hal tersebut, mayoritas masyarakat kampung Onggaya adalah peramu, petani dan nelayan. Pada umumnya mereka dapat beralih profesi antara tiga profesi tadi, tergantung pada musim yang dihadapi.

Pada saat meramu dan berburu, masyarakat akan mendirikan bivak-bivak di *dusun-dusun* tempat mereka meramu. Pengertian *dusun* bagi orang Marind berbeda dalam bahasa Indonesia. *Dusun* adalah sumber orang Marind dalam mencari makan. Jadi ada istilah *dusun* sagu, *dusun* kelapa, *dusun* ikan *keloso* dan sebagainya. Selama masa meramu dan berburu, masyarakat akan tinggal di bivak-bivak tersebut.



Gambar 3.1.1d. Bivak-bivak di pinggiran dusun sagu

Sebagai suku yang inti falsafahnya adalah berpusat kepada kepercayaan terhadap *dema*, suku Marind tidak lepas dari hal-hal yang bersifat ritual keagamaan, termasuk dalam hal pemeliharaan sumber-sumber daya alam sebagai tempat mata pencaharian mereka. Sebagai bentuk konservasi yang sebenarnya telah dikenal oleh suku Marind jauh sebelum adanya konservasi modern, maka setelah masa meramu, biasanya individu yang mewarisi *dusun* tersebut akan melakukan upacara *yamu* atau upacara pasang *sasi* (tanda larangan) di *dusun* tersebut, yang menandakan bahwa semua orang dilarang melintasi tempat di mana *sasi* tersebut ditanam sampai kurun waktu satu tahun. Jika melanggar maka akan ada musyawarah adat untuk menindak si pelanggar. Tujuan dari pemasangan *sasi* adalah untuk meremajakan sumber daya yang ada dan untuk menghindari pengeksploitasian satu sumber daya secara terus menerus. Sehingga keberlanjutan sumber daya akan terus ada dan tidak akan habis. Upacara ini bersifat tertutup, dihadiri oleh *pakas-anem* dan pembela adat sebagai saksi. *Pakas-anem* akan mengumumkan kepada para warga yang lain bahwa tanda *sasi* telah dipasang di tempat tersebut.

Setelah lewat satu tahun, maka *pakas-anem* akan memimpin upacara untuk mencabut tanda *sasi* tersebut. Upacara itu disebut *Sal Tapa*. Tanda *sasi* dicabut sebagai pertanda bahwa tempat tersebut boleh dimanfaatkan lagi.

3.1.2. Pola Perilaku Suku Marind Terhadap Pemakaian Ruang Di Kampung Onggaya

Dari perilaku budaya masyarakat suku Marind, timbul pola-pola penggunaan ruang di kampung Onggaya. Ruang-ruang publik yang terbentuk dalam hal ini adalah yang terkait dengan tiga unsur kebudayaan yaitu sistem religi, sistem kekerabatan dan sistem mata pencaharian. Temuan-temuan yang timbul terkait dengan hubungan perilaku suku Marind terhadap pola pemakaian ruang di kota Merauke antara lain, sebagai berikut:

1. Penggunaan ruang yang linier, sistem pemukiman bersumbu pada jalan. Pola pemukiman homogen, rumah saling berhadap-hadapan. Tidak ada pagar/batasan yang jelas antar kapling tanah, batas yang ada terbentuk dari kesepakatan dan aturan adat yang sama-sama dipahami oleh pihak yang berbatasan kapling. Kepatuhan akan aturan adat membuat masyarakat tidak melakukan pelanggaran akan kaidah-kaidah tentang ruang di kampung Onggaya.

2. Penggunaan ruang di kampung Onggaya masih berdasarkan pada aturan-aturan adat yang kuat. Hal ini ditunjang dengan komposisi penduduk kampung Onggaya yang homogen sehingga aturan-aturan adat tetap dipatuhi.
3. *Pakas-anem* merupakan tokoh yang banyak mempengaruhi timbulnya ruang-ruang di kampung Onggaya. Ketokohan *pakas-anem* dalam hal adat istiadat dan spiritual di masyarakat Marind di kampung Onggaya membuat *pakas-anem* selalu terlibat dalam upacara/ritual adat.
4. Penggunaan ruang dalam sistem religi di kampung Onggaya terutama sekali terkait dengan upacara-upacara adat, seperti upacara inisiasi (kedewasaan). Adapun ruang-ruang yang tercipta dalam upacara inisiasi (kedewasaan) adalah sebagai berikut:
 - Tahap pertama (*mbulalo*) dimulai dari balai adat atau di tempat terbuka yang dikelilingi oleh pagar manusia (para laki-laki dewasa) dan pembatas dari daun sagu, yang dalam upacara ini merupakan bentukan publik (karena disaksikan oleh semua laki-laki dewasa) serta bersifat permanen (untuk balai adat) dan temporer (untuk tempat terbuka yang dikelilingi pagar manusia). Tahap ini kemudian berlanjut ke rawa-rawa sebagai proses *penyucian* melalui *pembaptisan*, yang menghasilkan ruang berupa rute perjalanan dari dan ke balai adat. Ruang ini merupakan ruang publik (disaksikan oleh semua laki-laki dewasa) dan bersifat temporer.
 - Tahap *mitawal*, dilaksanakan di balai adat, yang adalah bentukan ruang publik (disaksikan oleh semua laki-laki dewasa) dan bersifat permanen atau dilaksanakan di tempat terbuka yang dikelilingi oleh pagar manusia (para laki-laki dewasa) dan pembatas dari daun sagu, yang merupakan ruang publik (disaksikan oleh semua lelaki dewasa) dan bersifat temporer.
 - Tahap *kunam*, dilaksanakan di balai adat, merupakan bentukan ruang publik (disaksikan oleh semua laki-laki dewasa) dan bersifat permanen atau dilaksanakan di tempat terbuka yang dikelilingi oleh pagar manusia (para lelaki dewasa) dan pembatas daun sagu, yang adalah juga bentukan ruang publik (disaksikan oleh semua laki-laki dewasa) dan bersifat temporer.



Gambar 3.1.2. Persiapan penutupan upacara inisiasi

- Upacara ini ditutup dengan pesta adat di pesisir pantai, bentukan ruang publik (disaksikan oleh seluruh *mirav*) dan bersifat temporer.
5. Dalam sistem kekerabatan, penggunaan ruang di kampung Onggaya berupa ruang-ruang yang terbentuk dari interaksi masyarakat, hubungan antar individu dalam marga baik dalam kampug Onggaya maupun yang dari luar ataupun dengan orang di luar marga, baik dalam kampung maupun dari luar kampung. Ruang-ruang yang terbentuk terkait dengan sistem kekerabatan suku Marind di kampung Onggaya adalah:
- Ruang yang terbentuk akibat adanya hubungan antara individu dalam satu marga dalam lingkup kampung Onggaya, dalam konteks *yah-a-yah*, yaitu rumah sebagai tempat “*meminta-minta*” dan “*memberi makan*”, membentuk ruang semi publik (tidak semua orang diperbolehkan datang) dan bersifat permanen. Kemudian juga balai adat, sebagai tempat *kuahaman* (musyawarah kampung) untuk menjatuhkan hukuman bagi yang menolak “*memberi makan*” saudaranya dan “*emer-anem*” (pelanggar adat akibat terus menerus datang meminta-minta). Selain itu, rute perjalanan *abat-man* ke rumah *ah-man*, berbentuk ruang semi publik dan temporer.
 - Ruang yang terbentuk dari hubungan kekerabatan individu antar kampung dalam satu marga, yaitu rute perjalanan lintas kampung, berbentuk ruang publik (terbuka untuk umum) dan bersifat temporer. Juga terbentuk ruang

akibat adanya proses jual-beli antar kampung, berupa rumah yang merupakan ruang semi publik (tidak semua orang ikut) dan bersifat permanen. Ruang publik juga terbentuk dari kehadiran kerabat dari kampung Kuler dan Tomer ke penutupan pesta adat kedewasaan (inisiasi), yang diselenggarakan di tepi pantai. Ruang yang terbentuk adalah ruang publik (semua dapat hadir) dan bersifat temporer.

6. Dalam sistem mata pencaharian, ruang yang terbentuk adalah dari pergerakan individu-individu dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Mulai dari bertani, meramu maupun sebagai nelayan. Ruang-ruang yang terbentuk dari sistem mata pencaharian di kampung Onggaya ini adalah:
 - Ruang yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat untuk meramu, yaitu bivak-bivak di *dusun-dusun* yang didirikan pada masa-masa meramu, bersifat semi publik (tidak semua orang boleh datang) dan temporer. Juga bivak-bivak yang dibuat di tepi pantai, tempat menangkap ikan dan udang, bersifat semi publik dan temporer. Rute perjalanan ke tempat meramu juga membentuk ruang semi publik (tidak semua orang boleh ikut) dan bersifat temporer.
 - Ruang yang terbentuk dari upaya konservasi lingkungan tradisional masyarakat Marind dengan budaya tanam *sasi*, berupa *dusun* atau tempat sumber daya yang lain, yang membentuk ruang semi publik (tidak semua orang boleh datang) dan bersifat temporer.



Gambar 3.1.2. Pembersihan lokasi penanaman *sasi*

3.1.3. Ruang-Ruang Publik Secara Umum Yang Terbentuk Di Kampung Onggaya

Ruang-ruang publik secara umum yang terbentuk di kampung Onggaya, antara lain:

1. Jalan, baik jalan kampung maupun jalan temporer yang terbentuk ketika musim meramu atau berburu.
2. Ruang publik kondisional/temporer, yang hanya bersifat publik pada saat-saat tertentu, seperti lapangan upacara dan lapangan sepak bola di sekolah pada jam-jam sekolah, gedung gereja pada jam-jam beribadah, puskesmas pada jam-jam kerja, balai adat pada saat pertemuan warga dan penyuluhan dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah.
3. Pesisir pantai, tempat mencari makan dan rekreasi.
4. Ruang-ruang di lingkungan rumah (*found/neighbourhood spaces*); batas antara kapling rumah di kampung Onggaya tidak begitu jelas. Hal ini disebabkan karena masih mengakarnya pemahaman bahwa tanah adalah sesuatu yang harus diwariskan turun temurun dan bukannya barang yang bisa diperjualbelikan. Hal ini membuat ruang-ruang di sekitar lingkungan rumah sangat banyak.

3.1.4. Ruang-Ruang Publik Yang Terbentuk Secara Kultural Di Kampung Onggaya

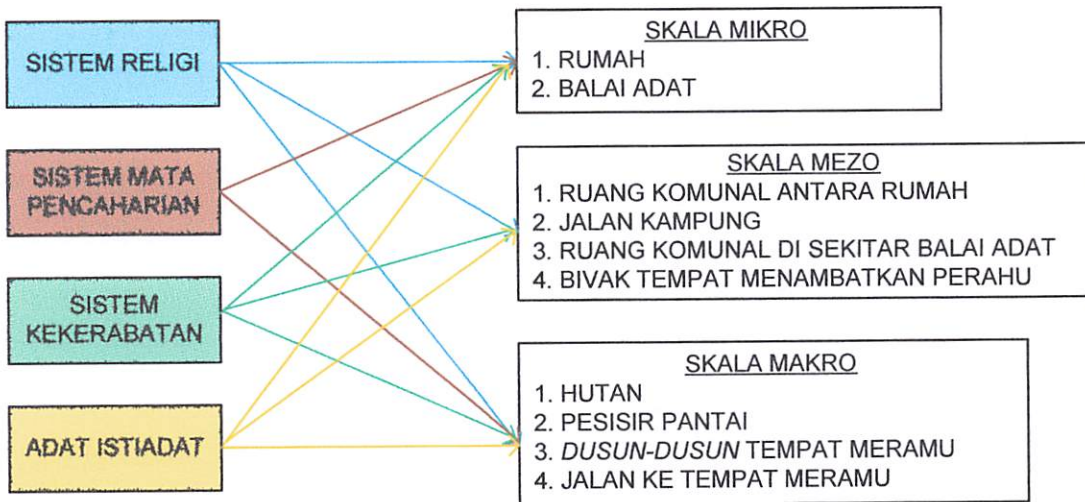
Ruang-ruang publik yang terbentuk secara kultural di kampung Onggaya adalah sebagai berikut:

1. Balai adat, tempat suku Marind di kampung Onggaya melakukan *kuahaman*, atau musyawarah adat maupun upacara-upacara adat seperti upacara kedewasaan (inisiasi)
2. Ruang komunal yang terbentuk dari ruang di sekitar rumah adat, jalan dan ruang dari rumah-rumah di sekitar balai adat sebagai akibat dari adanya upacara-upacara adat.
3. Ruang yang terbentuk dari rute-rute perjalanan, baik ritual adat maupun dalam sistem mata pencaharian.
4. *Dusun* atau hutan serta kebun, tempat-tempat masyarakat suku Marind mencari pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

3.2. Analisa Keterkaitan Antara Budaya Suku Marind Dengan Penggunaan Ruang Publik Di Kampung Onggaya

Selain bentukan-bentukan ruang publik yang modern, di kampung Onggaya juga terdapat bentukan-bentukan ruang publik yang berasal dari aktivitas suku Marind yang berdasarkan kepada faktor sosial-budaya. Hal ini tidak lepas dari masih eratnya ikatan antara suku Marind dengan ajaran *Mayo*, terkait dengan sistem religi, sistem kekerabatan dan sistem mata pencaharian.

Secara garis besar, keterkaitan antara kebudayaan suku Marind dan penggunaan ruang di kampung Onggaya dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.2. Keterkaitan antara kebudayaan Marind dan ruang

3.2.1. Analisa Pengaruh Sistem Religi Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Onggaya

Masyarakat suku Marind, sebagian besar memeluk agama Katolik, di samping ada sebagian kecil yang memeluk agama Kristen Protestan. Walaupun demikian dalam kehidupan sehari-hari mereka, kepercayaan tradisional masih tetap melekat di dalam diri mereka. Kepercayaan akan *dema* telah mengakar dalam diri mereka, bukan saja dalam perihal religi tapi karena hal tersebut adalah bagian dari falsafah hidup suku Marind.. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan sehari-hari masyarakat suku Marind seperti melakukan upacara-upacara adat, bercocok tanam, membangun rumah, perkawinan, perang maupun perdamaian.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh suku Marind, berlandaskan kepada ketaatan mereka akan ajaran-ajaran kepercayaan untuk menghormati *dema*. Mulai dari upacara besar hingga kepada hal-hal yang berskala mikro, tidak lepas dari keterkaitan *dema*. Penyebab utama adalah karena agama tradisonal suku Marind, yaitu *Mayo* adalah merupakan agama yang *totemistik*. Sehingga keseharian dari suku Marind tidak lepas dari totem-totem yang nota bene adalah *dema* yang mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup keturunannya (dalam hal ini suku Marind).

3.2.1.1. Analisa Pengaruh Sistem Religi Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Dalam Skala Mikro

Salah satu upacara yang paling penting dalam masyarakat Marind adalah upacara inisiasi, yaitu pengakuan akan kedewasaan seseorang, yang menandakan bahwa dia berhak untuk mendengar seluruh kisah-kisah tentang marganya, totem dan *dema* yang menaunginya dan memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya. Ada tiga urutan upacara inisiasi, yaitu *mbulalo*, *mitawal* dan *kunam*. Upacara ini dimulai dengan ritual dalam balai adat (*mean-sai*), dilanjutkan dengan iring-iringan ke tempat pembaptisan di rawa di sekitar *mirav* kemudian dilanjutkan dengan pesta adat di pesisir pantai atau tepi sungai.

Mbulalo, sebagai proses inisiasi pertama, berisikan perkenalan akan kebudayaan Marind yang selama ini belum boleh didengar dan diketahui oleh orang yang belum dewasa. Para peserta upacara, yaitu pemuda-pemudi yang hendak mendapatkan pengakuan kedewasaan dikumpulkan dalam tempat yang ditetapkan sebagai tempat upacara, biasanya adalah balai adat atau di tempat terbuka yang dibatasi oleh pagar manusia dan daun sagu. Kemudian diadakan ritual yang berisikan peraturan-peraturan tentang marga dan sangsi jika melanggar. *Pakas-anem* memimpin upacara ini, dengan dihadiri oleh para orang tua peserta upacara, para pembela adat dan seluruh orang dewasa di *mirav*. Proses ini dilanjutkan dengan membawa para peserta upacara ke rawa dekat *mirav* (yang merupakan bagian dari tanah ulayat marga *Gebze* di Onggaya), kemudian satu per satu peserta upacara mengikuti bagian ritual yaitu "*heis-anem*" (hampir sama dengan sakramen 'baptis' di ajaran agama Kristen, yaitu ditenggelamkan ke dalam rawa tersebut). Hal ini merupakan perlambang dari kehidupan sebelum kedewasaan (sebelum masuk ke dalam rawa) dan kehidupan yang mengalami pencerahan (setelah keluar dari

rawa). Dengan demikian para peserta upacara dianggap telah suci, diakui sebagai anggota penuh suku dan layak untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya.

Tahap selanjutnya adalah *mitawal*, yang hanya khusus untuk para laki-laki saja. Dalam tahap ini, para pemuda diceritakan lebih detil lagi mulai dari kisah penciptaan, *dema* dan segala falsafah-falsafah yang terkait dengannya. *Pakas-anem* dan para pembela adat secara bergiliran menceritakan kisah-kisah yang terkait dengan *totem* dari marga mereka. Mulai dari sistem religi, pengagungan akan *dema*, sistem kekerabatan, kecintaan akan alam yang merupakan wujud dari *dema* yang berkorban demi kelangsungan hidup keturunannya, konservasi sumber daya alam, adat istiadat dan tabu-tabu yang ada. Juga diberitahukan tentang konsekuensi jika mereka melanggar, mulai dari sangsi kematian hingga pengucilan. Pada tahap ini, anak kecil dilarang untuk berada dekat dengan tempat upacara karena apa yang disampaikan dalam *mitawal* tabu untuk didengarkan oleh orang yang belum dewasa.

Tahap ketiga dari inisiasi adalah *kunam*, tahap ini juga hanya boleh diikuti oleh para laki-laki. Di sini diajarkan tentang cara-cara mempergunakan kekuatan *totem* dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang paling penting dalam proses ini adalah pengajaran pemahaman tentang *nawaya*, yaitu kekuatan yang meliputi manusia, yang selama ini tersembunyi di dalam tubuh manusia. Yang adalah warisan dari *dema* yang tertinggal dalam tubuh manusia. Di sini para peserta upacara diperkenalkan dengan unsur-unsur supranatural, seperti mantra-mantra dan cara mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh adalah pemanggilan halilintar dalam perang untuk menghambat laju pergerakan musuh, karena *anih* (halilintar) adalah juga *totem* dari marga *Gebze*. *Anih* juga dipanggil dalam upacara meminta hujan. Dalam *nggamo* (mantra-mantra), *dema* yang menjadi *anih* diminta untuk membantu keturunannya aygn sekarang sedang meminta bantuan dengan cara menurunkan hujan. Ada kesan kecenderungan penggunaan *nawaya* sebagai media untuk *doti* (santet, teluh), namun dalam masyarakat Marind, *yav-mesav* adalah pelaksana/eksekutor dari hukuman yang dijatuhkan oleh *kuahaman* (musyawarah adat). *Kambara* atau kutukan melalui *doti* yang membuat orang Marind patuh pada tradisinya. Orang Marind tidak mencuri lebih karena takut akan *kambara* dibanding karena ketakutan akan aturan-aturan hukum formal.

Proses inisiasi ditutup dengan pesta adat dan upacara minum *wati*. Pada awalnya proses ini sering disertai dengan proses perjodohan, yaitu pemberian tanda *akahev* dari orang tua pemudi Marind kepada para pemuda Marind yang akan melakukan acara lomba lari di pesisir pantai tempat pesta adat dilaksanakan. Namun seiring dengan perkembangan jaman, pemberian tanda *akahev* tidak lagi dilakukan bersamaan dengan selesainya proses inisiasi tetapi lebih banyak diberikan pada perjodohan pada waktu kecil.

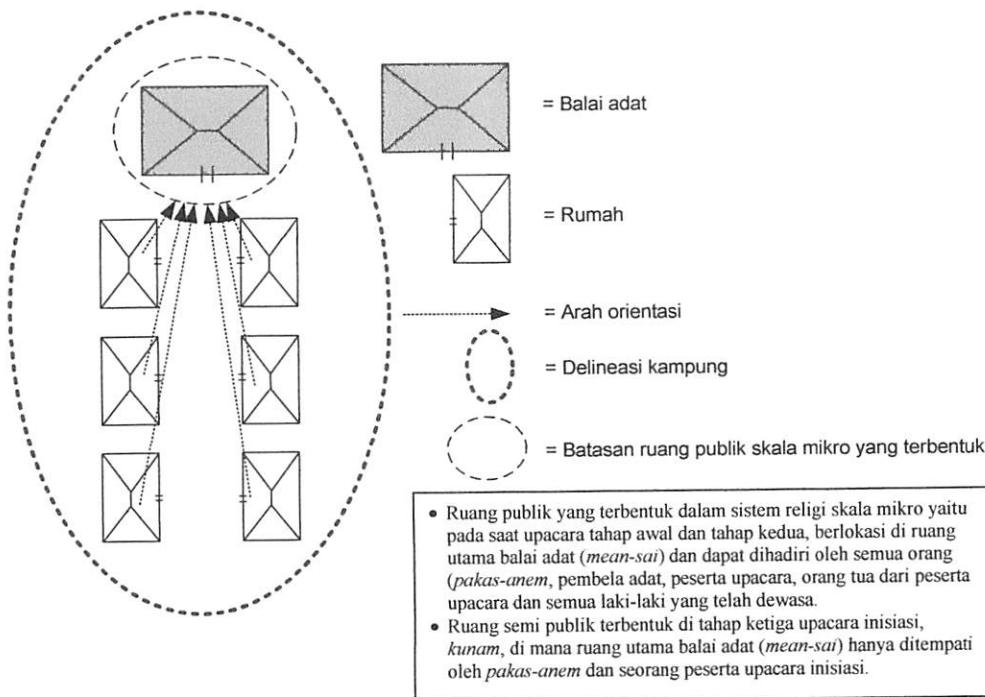
Para pemuda yang telah dikukuhkan menjadi laki-laki dewasa, kemudian disuguhi *wati*, minuman tradisional yang hanya khusus disajikan di upacara-upacara adat penting dan tidak semua boleh meminumnya. *Yosim* dan *Pancar* ditarikan pertama-tama oleh para pemuda mengelilingi api unggun disaksikan oleh *pakas-anem* dan para pembela adat. Selanjutnya seluruh *mirav* ikut memeriahkan pesta adat tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2.1.1.

Tabel 3.2.1.1.
Analisa Pengaruh Sistem Religi Suku Marind
Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Dalam Skala Mikro

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Aktor Yang Terlibat	Ruang Yang Terbentuk	Batasan ruang	Sifat Ruang
1	<i>Mbulalo</i> (upacara inisiasi tahap pertama)	• Ruang utama balai adat (<i>mean-sai</i>)	• <i>Pakas-anem</i> • Pembela adat • Peserta upacara (pemuda-pemudi yang akan diakui kedewasaannya) • Orang tua peserta upacara • Para laki-laki dewasa	Publik (karena semua orang boleh mengikuti)	• Dinding gaba-gaba	Permanen
2	<i>Mitawal</i> (upacara inisiasi tahap kedua)	• Ruang utama balai adat (<i>mean-sai</i>)	• <i>Pakas-anem</i> • Pembela adat • Peserta upacara (hanya pemuda saja yang boleh mengikuti) • Orang tua peserta upacara • Para laki-laki dewasa	Publik (karena semua orang boleh mengikuti)	• Dinding gaba-gaba	Permanen

3.	<i>Kunam</i> (upacara inisiasi tahap ketiga)	<ul style="list-style-type: none"> Ruang utama balai adat (<i>mean-sai</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Pakas-anem</i> Peserta upacara (perorangan) 	Semi publik (karena hanya diikuti oleh <i>pakas-anem</i> dan peserta upacara secara perorangan)	<ul style="list-style-type: none"> Dinding gaba-gaba 	Permanen
----	--	--	---	---	---	----------

Sumber: Hasil Analisa



Gambar 3.2.1.1. Konsep Ruang Publik Skala Mikro Oleh Sistem Religi

3.2.1.2. Analisa Pengaruh Sistem Religi Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Dalam Skala Mezo

Upacara kedewasaan ini juga bertempat dalam skala yang lebih besar, yaitu akan melibatkan ruang-ruang yang lebih banyak dan lebih besar. Jika peserta upacara kedewasaan banyak jumlahnya atau balai adat tidak memadai sebagai tempat untuk diselenggarakannya upacara, maka lokasi upacara akan dipindahkan ke sebuah tempat terbuka di *mirav*, biasanya tetap berdekatan dengan balai adat. Sebagai pembatas lokasi upacara, para laki-laki dewasa akan membentuk pagar manusia, selain juga ada pembatas yang dibuat dari jalinan daun sagu (*uta*). Karena dilakukan di tempat terbuka, seperti

halaman dari balai adat, ruang yang dipakai pun jadi lebih luas, meski tetap ada batas yang membatasi ruang menjadi ruang semi publik. Prosesi upacara inisiasi tahap awal (*mbulalo*) dan *mitawal* akan langsung dilaksanakan di dalam lingkup pembatas *uta*, sedangkan *kunam* tetap dilaksanakan di ruang utama balai adat (*mean-sai*).

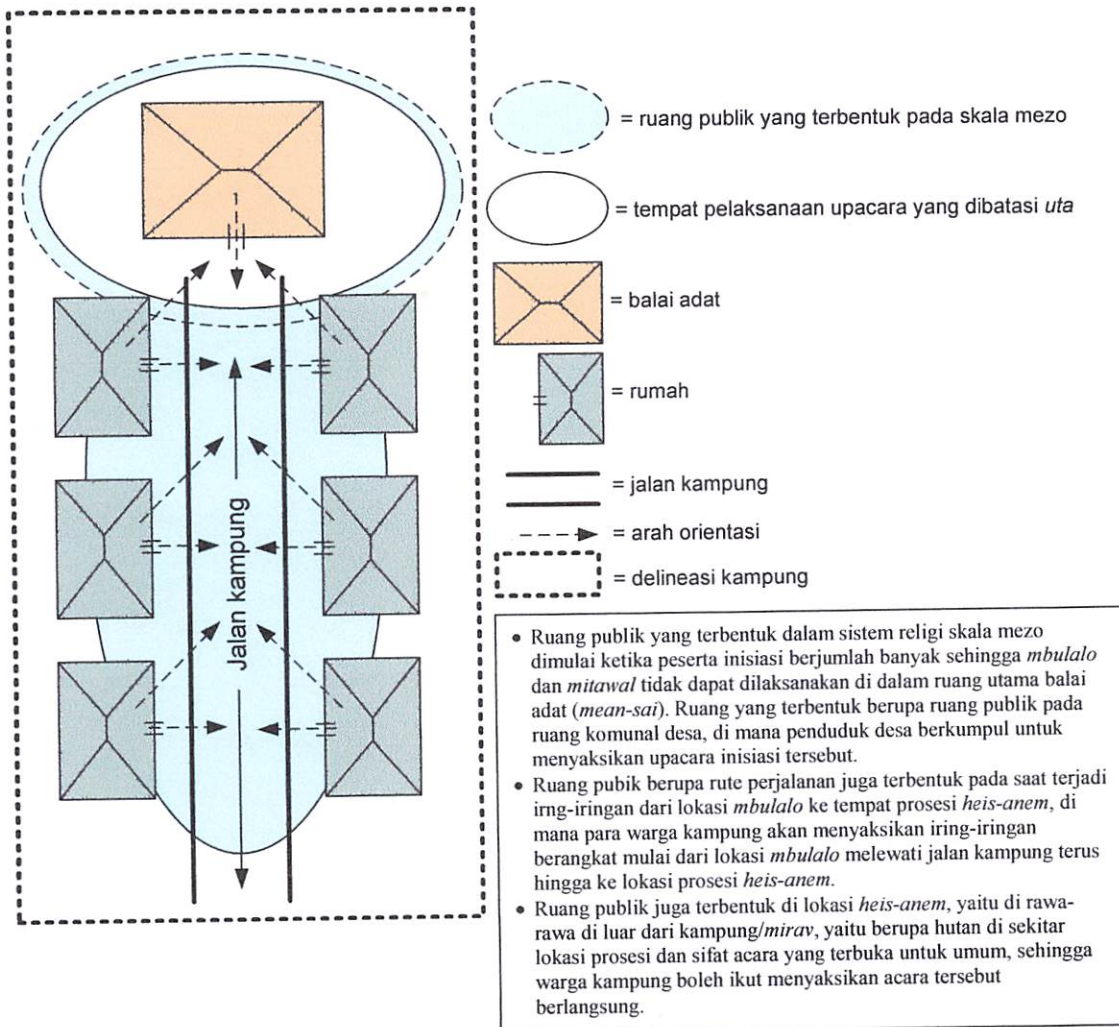
Prosesi *penyucian* melalui *pembaptisan* atau *heis anem* juga menggunakan ruang *mirav*, di mana proses ini dilakukan di rawa-rawa dekat *mirav* yang merupakan tanah ulayat dari marga *Gebze* di kampung Onggaya. Proses dimulai dari balai adat atau tempat yang ditunjuk untuk menjadi lokasi upacara di kampung, dilanjutkan dengan iring-iringan dipimpin oleh *pakas-anem* ke rawa-rawa di mana prosesi *heis-anem* akan dilakukan, kemudian setelah prosesi *heis-anem* selesai, dilanjutkan lagi kembali ke balai adat atau lokasi yang telah ditetapkan menjadi lokasi upacara. Rute yang dilewati berupa jalan kampung dan hutan di sekitar daerah rawa-rawa yang ditentukan sebagai lokasi *heis-anem*. Analisa skala mezo dapat dilihat pada tabel 3.2.1.2.

Tabel 3.2.1.2.

**Analisa Pengaruh Sistem Religi Suku Marind
Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Dalam Skala Mezo**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Aktor Yang Terlibat	Ruang Yang Terbentuk	Batasan ruang	Sifat Ruang
1	<i>Mbulalo</i> (upacara inisiasi tahap pertama)	<ul style="list-style-type: none"> • Di tempat terbuka yang ditunjuk, dibatasi pagar manusia dan daun sagu • Rute perjalanan iring-iringan dari lokasi awal <i>mbulalo</i> ke tempat prosesi <i>heis-anem</i>. • Rawa-rawa tempat dilaksanakannya <i>heis-anem</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pakas-anem</i> • Pembela adat • Peserta upacara (pemuda-pemudi yang akan diakui kedewasaannya) • Orang tua peserta upacara • Para laki-laki dewasa 	Publik (karena semua orang boleh mengikuti)	<ul style="list-style-type: none"> • Pagar manusia • Jalinan daun sagu 	Temporer
2	<i>Mitawal</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Di tempat terbuka yang ditunjuk, dibatasi pagar manusia dan daun sagu 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pakas-anem</i> • Pembela adat • Peserta upacara (hanya pemuda saja yang boleh mengikuti) • Orang tua peserta upacara • Para laki-laki dewasa 	Publik (karena semua orang boleh mengikuti)	<ul style="list-style-type: none"> • Pagar manusia • Jalinan daun sagu 	Temporer

Sumber: Hasil Analisa



Gambar 3.2.1.2. Konsep Ruang Publik Skala Mezo Oleh Sistem Religi

3.2.1.3. Analisa Pengaruh Sistem Religi Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Dalam Skala Makro

Sebagai wujud dari penghargaan kepada *dema* yang telah menyatu dengan *unam*, upacara kedewasaan mengenalkan para peserta inisiasi akan makna dari alam dan bagaimana untuk bersinergi dengannya. Upacara inisiasi dilakukan di sekitar *mirav* dengan maksud memperkenalkan para peserta upacara kepada seluruh bagian warisan tanah di kampung Onggaya. Pemujaan terhadap *Alawih* dilakukan di sini melalui perenungan akan *misalaw*, berusaha untuk menyatu dengan alam dengan langsung berada di dekatnya dan menghirup untuk merasakannya dalam kehidupan tiap individu suku Marind.

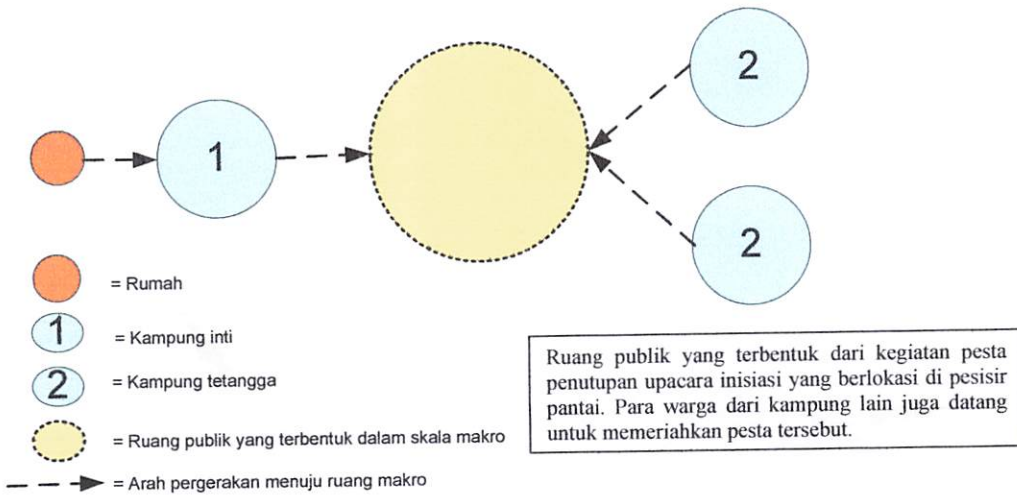
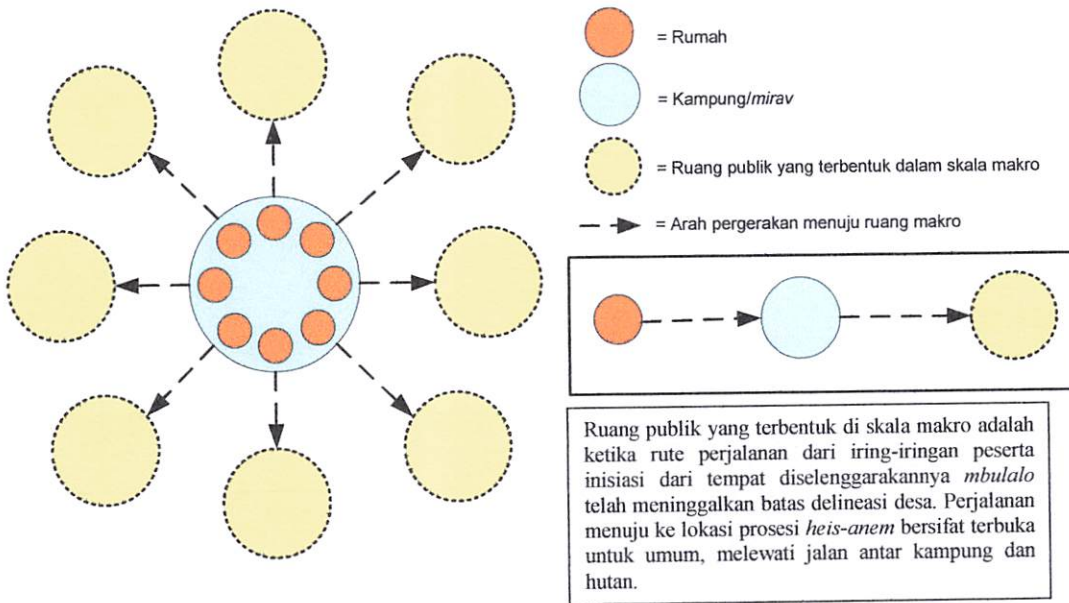
Wujud penggunaan ruang makro juga terjadi pada saat upacara penutupan inisiasi. Pesta adat akan menarik perhatian para warga kampung. Seluruh *mirav* akan berkumpul untuk ikut merayakan diakuinya kedewasaan para generasi muda Marind. Selain itu juga datang para tamu dari kampung tetangga yang masih dalam satu rumpun marga yang diundang untuk menikmati pesta adat tersebut. Keterangan selanjutnya ada di tabel 3.2.1.3.

Tabel 3.2.1.3.

**Analisa Pengaruh Sistem Religi Suku Marind
Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Dalam Skala Makro**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Aktor Yang Terlibat	Ruang Yang Terbentuk	Batasan ruang	Sifat Ruang
1	<i>Mbulalo</i> (upacara inisiasi tahap pertama)	<ul style="list-style-type: none"> Rute perjalanan menuju rawa, lokasi <i>heis-anem</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Pakas-anem</i> Pembela adat Peserta upacara (pemuda-pemudi yang akan diakui kedewasaannya) Orang tua peserta upacara Para laki-laki dewasa 	Publik (karena semua orang boleh mengikuti)	<ul style="list-style-type: none"> Manusia Hutan 	Temporer
2	Pesta adat penutupan upacara inisiasi	<ul style="list-style-type: none"> Pesisir pantai 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Pakas-anem</i> Pembela adat Peserta upacara (hanya pemuda saja yang boleh mengikuti) Orang tua peserta upacara Para laki-laki dewasa Tamu dari kampung lain. 	Publik (karena semua orang boleh mengikuti)	<ul style="list-style-type: none"> Manusia Laut 	Temporer

Sumber: Hasil Analisa



Gambar 3.2.1.3. Konsep Ruang Publik Skala Makro Oleh Sistem Religi

3.2.2. Analisa Pengaruh Sistem Kekeabatan Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Onggaya

Sistem kekeabatan di kampung Onggaya adalah mengikuti prinsip garis keturunan patrilineer atau garis keturunan ayah, sebagaimana anak akan mewarisi marga dari ayah. Pihak keluarga dari sang ayah, sangat berperan besar dalam menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masa depan keluarga. Jika dahulu penamaan anak diambil dari nama roh orang yang dipenggal kepalanya dalam pertempuran, maka sekarang nama anak diambil dari nama-nama leluhur mereka terdahulu sebagai bukti ikatan yang kuat antara mereka dan leluhur mereka.. Kuatnya prinsip patrilineal dan ikatan dalam marga, mengakibatkan semakin kuatnya persatuan antara masyarakat suku Marind yang berada di kampung Onggaya. Struktur dan komposisi kampung yang homogen juga turut mendukung terciptanya keadaan tersebut. Tidak adanya sistem kasta ataupun kelas-kelas masyarakat dalam tradisi Marind membuat tidak adanya sekat antar golongan maupun kelompok masyarakat. Jikalau ada individu yang menonjol, adalah lebih kepada hal kemampuan memimpin adat dan kemampuan siritual.

3.2.2.1. Analisa Pengaruh Sistem Kekeabatan Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Onggaya Dalam Skala Mikro

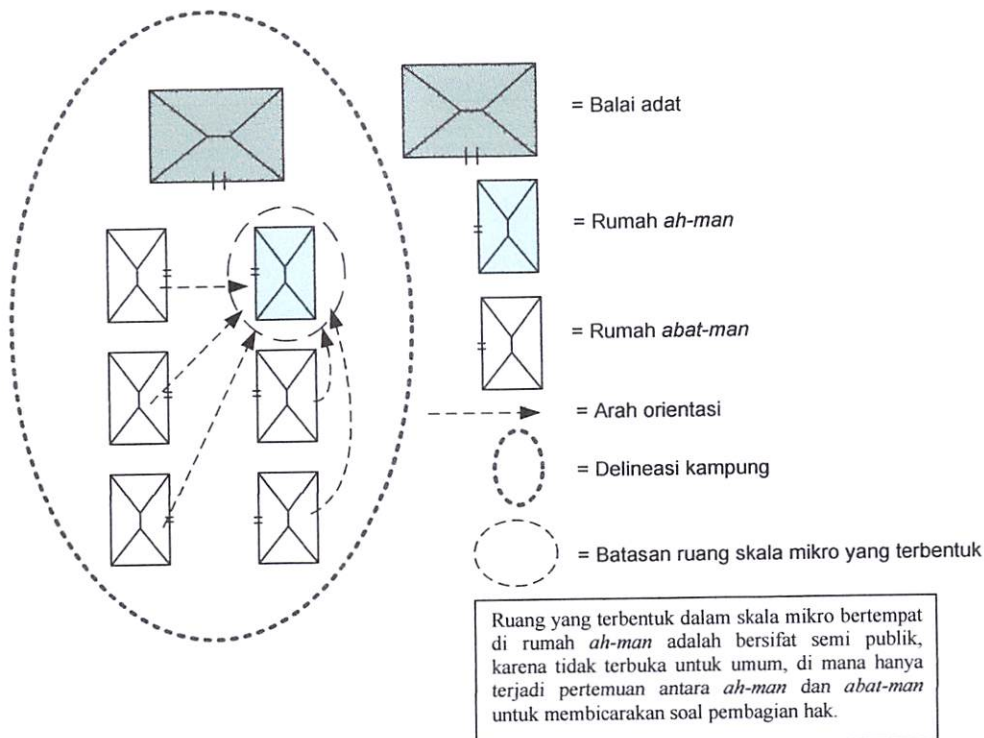
Dalam skala mikro, ruang yang terjadi melalui prinsip *yah-a-yah* adalah dalam hubungan antar individu dalam satu marga di kampung Onggaya. *Abat-man* datang menemui *ah-man* untuk meminta bagian dari milik *ah-man*, berada dalam konteks ruang yang mikro, yaitu rumah *ah-man*. Tempat proses transaksi juga digolongkan ke dalam skala mikro, di mana tempat terjadinya transaksi dapat berlangsung di rumah, bivak di *dusun* atau bivak di pantai. Lihat tabel 3.2.2.1.

Tabel 3.2.2.1.

**Analisa Pengaruh Sistem Kekerabatan Suku Marind
Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Dalam Skala Mikro**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Aktor Yang Terlibat	Ruang Yang Terbentuk	Batasan ruang	Sifat Ruang
1	<i>Abat-man</i> datang mencari <i>ah-man</i> sebagai upaya untuk meminta bagian miliknya	<ul style="list-style-type: none"> Rumah <i>ah-man</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Abat-man</i> (orang yang datang meminta) <i>Ah-man</i> (orang yang 'memberi makan') 	Semi publik (karena tidak semua orang boleh mengikuti)	<ul style="list-style-type: none"> Dinding gaba-gaba 	Permanen
2	Proses transaksi dagang (<i>kumus</i>) antara individu dari kampung seberang	<ul style="list-style-type: none"> Rumah Bivak di <i>dusun</i> atau bivak pantai. 	<ul style="list-style-type: none"> Kedua belah pihak yang akan bertransaksi 	Semi publik (karena tidak semua orang boleh mengikuti)	<ul style="list-style-type: none"> Dinding gaba-gaba Dinding daun sagu 	Permanen Temporer

Sumber: Hasil Analisa



Gambar 3.2.2.1. Konsep Ruang Publik Skala Mikro Oleh Sistem Kekerabatan

3.2.2.2. Analisa Pengaruh Sistem Kekeabatan Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Onggaya Dalam Skala Mezo

Dalam skala mezo, sistem kekeabatan menggunakan ruang balai adat dan ruang komunal di sekitarnya, di mana terjadi *kuahaman* (musyawarah adat) demi menentukan hukuman bagi “*emer-anem*”, maupun bagi orang yang tidak mau untuk “memberi makan” saudara-saudara semarganya.

Demikian juga halnya dengan proses pemilihan *pakas-anem* juga dilakukan di balai adat, melalui *kuahaman* dan disaksikan oleh banyak orang, akan tetapi yang mempunyai hak untuk berbicara adalah pembela-pembela adat dan *pakas-anem* itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel 3.2.2.2



Gambar 3.2.2.2a. Kuahaman (musyawarah adat)

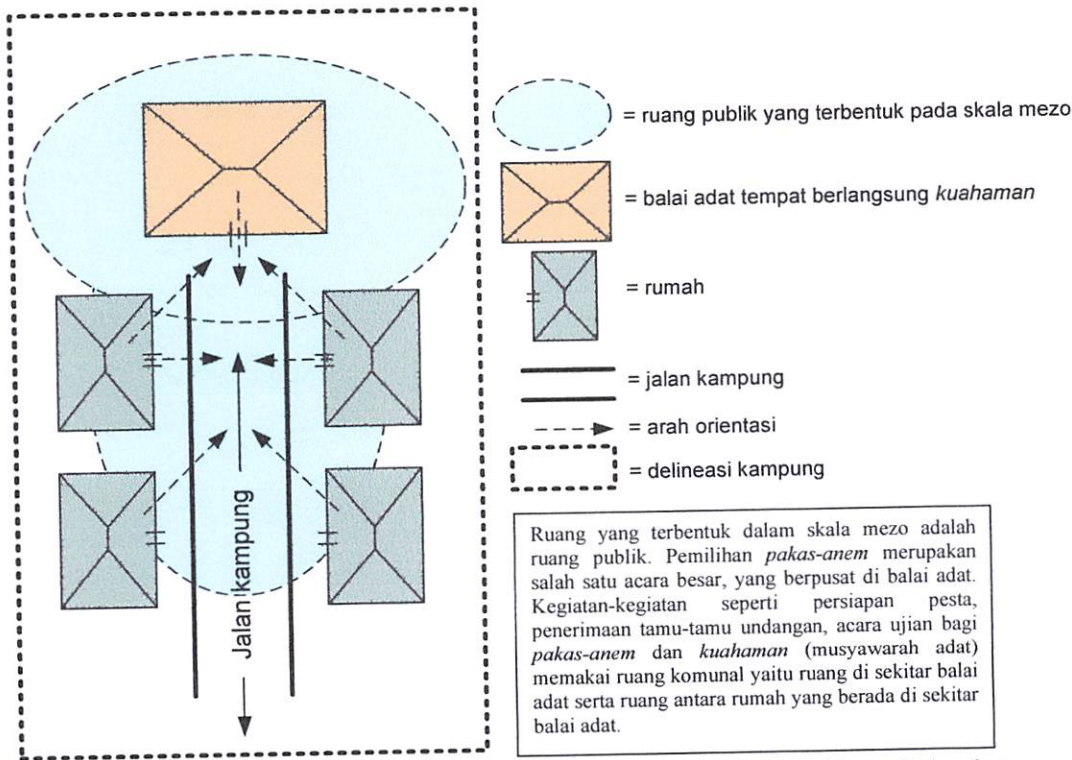
Tabel 3.2.2.2.

Analisa Pengaruh Sistem Kekeabatan Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Dalam Skala Mezo

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Aktor Yang Terlibat	Ruang Yang Terbentuk	Batasan ruang	Sifat Ruang
1	Musyawarah adat (<i>kuahaman</i>) untuk penanganan masalah ‘ <i>emer-anem</i> ’ dan <i>ah-man</i> yang menolak berbagi dengan saudara—saudara sekarang	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang utama balai adat (<i>mean-sai</i>) • Ruang komunal di sekitar balai adat 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pakas-anem</i> • Pembela adat • Penduduk kampung 	Publik (karena semua orang boleh mengikuti)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinding gaba-gaba 	Permanen

2	Musyawarah adat (<i>kuahaman</i>) menggantikan <i>pakas-anem</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang utama balai adat (<i>mean-sai</i>) • Ruang komunal di sekitar balai adat 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pakas-anem</i> • Pembela adat • Penduduk kampung • Tamu undangan 	Publik (karena semua orang boleh mengikuti)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinding gaba-gaba 	Permanen
---	--	---	--	---	---	----------

Sumber: Hasil Analisa



Gambar 3.2.2.2b. Konsep Ruang Publik Skala Mezo Oleh Sistem Kekerabatan

3.2.2.3. Analisa Pengaruh Sistem Kekerabatan Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Onggaya Dalam Skala Makro

Rute-rute perjalanan baik *abat-man* maupun warga kampung luar yang hendak melakukan transaksi tergolong ke dalam skala makro. Bentuk ruangnya publik dan bersifat temporer karena tidak memiliki sekat-sekat yang riil untuk membatasi kawasan tersebut.

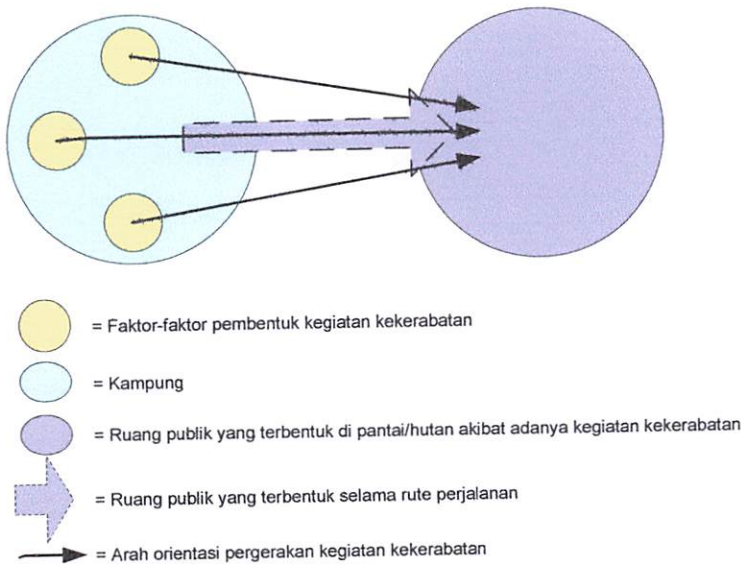
Selain itu juga, dalam hal pesta adat seperti penutupan upacara inisiasi, yang diselenggarakan di pantai. Para penduduk kampung tetangga yang masih dalam satu rumpun diundang juga datang untuk memeriahkan pesta tersebut. Ruang yang timbul

adalah bersifat publik dan temporer, karena juga berupa rute-rute perjalanan dari kampung tetangga ke kampung Onggaya. Lihat tabel 3.2.2.3.

Tabel 3.2.2.3.
Analisa Pengaruh Sistem Kekerabatan Suku Marind
Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Dalam Skala Makro

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Aktor Yang Terlibat	Ruang Yang Terbentuk	Batasan ruang	Sifat Ruang
1	Upacara pemilihan <i>pakas-anem</i> (ujian spiritual)	<ul style="list-style-type: none"> Hutan Rute perjalanan menuju lokasi ujian 	<ul style="list-style-type: none"> Calon <i>pakas-anem</i> Pembela adat Warga kampung Tamu undangan 	Semi publik (ujian spritiual hanya bisa dihadiri calon <i>pakas-anem</i> dan para pembela adat) Publik (prosesi pengantaran rombongan ke hutan membentuk ruang-ruang publik seperti jalan dan daerah hutan sekitar lokasi pengujian)	<ul style="list-style-type: none"> Manusia 	Temporeer
2	Upacara penutupan acara inisiasi	<ul style="list-style-type: none"> Pesisir pantai 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Pakas-anem</i> Pembela adat Penduduk kampung Tamu/penduduk kampung seberang yang menjadi tamu. 	Publik (karena tidak semua orang boleh mengikuti)	<ul style="list-style-type: none"> Manusia 	Temporer

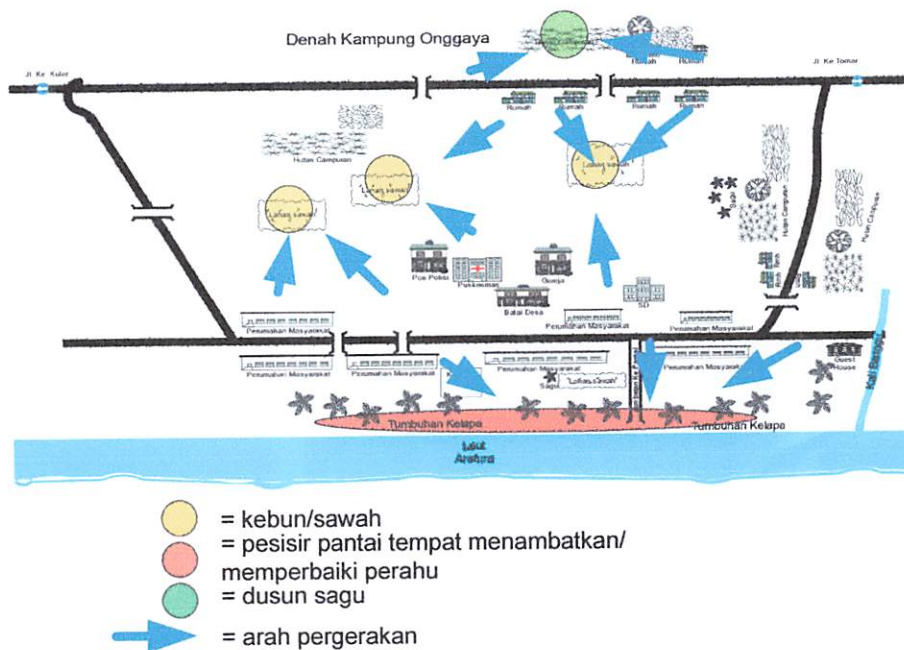
Sumber: Hasil Analisa



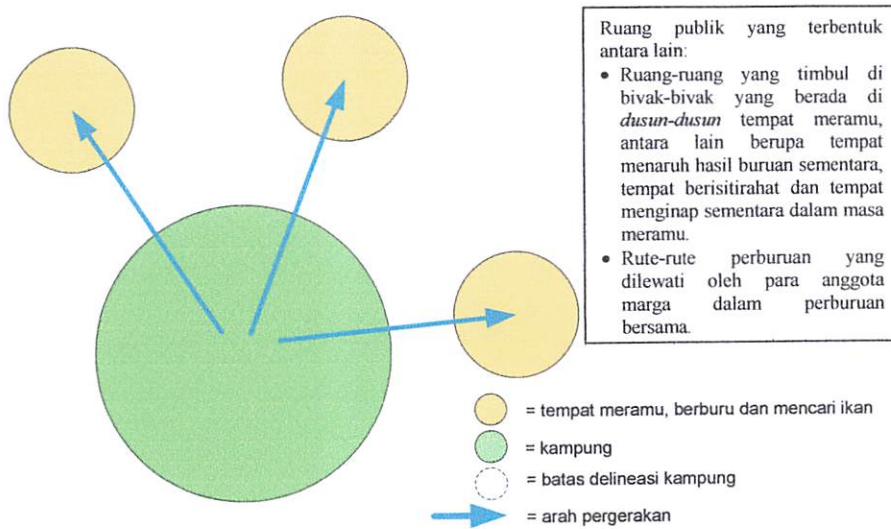
Gambar 3.2.2.3. Konsep Ruang Publik Skala Makro Oleh Sistem Kekerabatan

3.2.3. Analisa Pengaruh Sistem Mata Pencaharian Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Onggaya

Ruang-ruang yang terbentuk terkait dengan pengaruh sistem mata pencaharian masyarakat Marind di kampung Onggaya berskala mezo dan makro. Mulai dari tempat-tempat yang dituju hingga kepada rute perjalanan yang diambil. Ruang yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat untuk meramu, yaitu bivak-bivak di dusun-dusun yang didirikan pada masa-masa meramu, bersifat semi publik (tidak semua orang boleh datang) dan temporer. Juga bivak-bivak yang dibuat di tepi pantai, tempat menangkap ikan dan udang, bersifat semi publik dan temporer. Rute perjalanan ke tempat meramu juga membentuk ruang semi publik (tidak semua orang boleh ikut) dan bersifat temporer. Ruang yang terbentuk dari upaya konservasi lingkungan tradisional masyarakat Marind dengan budaya tanam *sasi*, berupa dusun atau tempat sumber daya yang lain, yang membentuk ruang semi publik (tidak semua orang boleh datang) dan bersifat temporer.



Gambar 3.2.3a. Konsep Ruang Publik Skala Mezo Oleh Sistem Mata Pencaharian



Gambar 3.2.3b. Konsep Ruang Publik Skala Makro Oleh Sistem Mata Pencapaian

3.2.4. Analisa Pengaruh Adat Istiadat Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Onggaya

3.2.4.1. Analisa Pengaruh Adat Istiadat Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Onggaya Dalam Skala Mikro

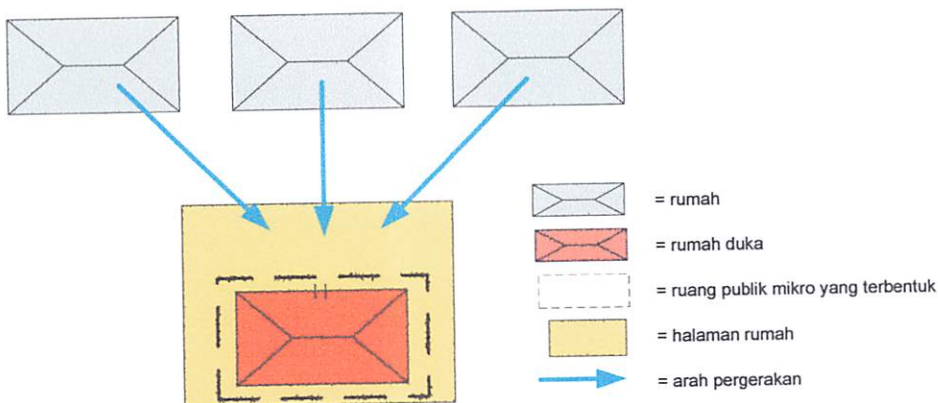
Pengaruh adat istiadat masyarakat Marind di kampung Onggaya masih sangat kental. Beberapa tatanan dalam adat istiadat masih tetap dipelihara dengan kuat, sekalipun mereka telah beragama Kristen. Upacara-upacara yang masih dilaksanakan antara lain upacara-upacara yang berkenaan dengan perkawinan, kematian dan le;ahiran dan pengangkatan anak. Upacara yang dilakukan dilaksanakan dalam ruang mikro berupa rumah di kampung Onggaya. Selanjutnya analisa secara mikro akan diterangkan ke dalam tabel 3.2.4.1.

Tabel 3.2.4.1.
Analisa Pembentukan Ruang Publik Skala Mikro
Karena Kegiatan Adat-Istiadat Pada Masyarakat Suku Marind
di Kampung Onggaya

No	Jenis Kegiatan	Orang-orang yang terlibat	Lokasi	Ruang Yang Terbentuk	Batasan Ruang	Sifat Ruang
1	<i>Pemberian tanda akahev dalam perjodohan masa kecil</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga inti • Saksi-saksi (<i>pakas-anem, pembela</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang tamu • Halaman rumah 	Semi publik (tidak semua orang di undang)	Dinding <i>gaba-gaba</i>	Permanen

		<i>adat, kerabat, kenalan)</i>				
2	<i>Sulam man-ahi</i> (peminangan)	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga inti • Saksi-saksi (<i>pakas-anem, pembela adat, kerabat, kenalan)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang tamu • Halaman rumah 	Semi publik (tidak semua orang diundang)	Dinding <i>gaba-gaba</i>	Permanen
3	<i>Perceraian</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Suami-istri • Saksi-saksi (<i>pembela adat, kerabat dekat)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Balai adat 	Semi publik (tidak semua orang diundang)	Dinding <i>gaba-gaba</i>	Permanen
4	<i>Yalud</i> (upacara peringatan 3-40 hari seseorang yang meninggal)	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga inti • <i>Pakas-anem</i> • Pembela adat • Kerabat • Warga kampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh ruang di rumah 	Publik (semua datang tanpa harus diundang)	Dinding <i>gaba-gaba</i>	Permanen
5	<i>Pengangkatan anak</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga inti • Saksi-saksi (<i>pakas-anem, pembela adat, kerabat)</i> • Keluarga anak yang akan diadopsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang tamu 	Semi publik (tidak semua orang diperbolehkan hadir)	Dinding <i>gaba-gaba</i>	Permanen

Sumber: Hasil Analisa



Gambar 3.2.4.1. Konsep Ruang Publik Skala Mikro Oleh Adat Istiadat (upacara *Yalud*)

3.2.4.2. Analisa Pengaruh Adat Istiadat Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Onggaya Dalam Skala Mezo

Pada skala mezo, upacara-upacara dilaksanakan di ruang-ruang komunal dalam *mirav* (kampung). Seperti dalam acara peminangan, pihak-pihak yang hendak membicarakan tentang mas kawin serta perihal perkawinan yang lainnya, akan berkumpul dalam rumah. Yang berhak untuk duduk dalam rumah dan membicarakan masalah ini adalah kedua belah pihak mempelai dan saksi-saksi seperti *pakas-anem* dan para pembela adat. Sedangkan para kerabat yang lain akan menempati ruang-ruang di luar rumah sambil menunggu kesepakatan yang tercipta. Lebih lanjut dipaparkan dalam tabel 3.2.4.2.

Tabel 3.2.4.2.
Analisa Pembentukan Ruang Publik Skala Mezo
Karena Kegiatan Adat-Istiadat Pada Masyarakat Suku Marind
di Kampung Onggaya

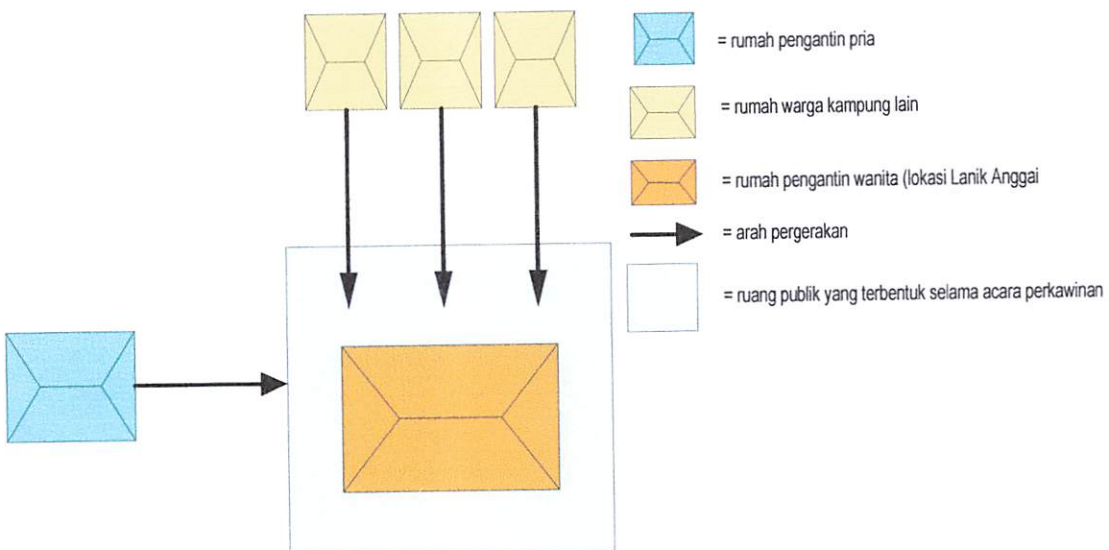
No	Jenis Kegiatan	Orang-orang yang terlibat	Lokasi	Ruang Yang Terbentuk	Batasan Ruang	Sifat Ruang
1	<i>Sulam man-ahi</i> (peminangan)	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga inti • Saksi-saksi (<i>pembela adat, kerabat, kenalan</i>) • Tetangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang komunal • Ruang di antara rumah 	Semi publik (tidak semua orang di undang)	Pagar tumbuhan	Permanen
2	<i>Yalud</i> (upacara peringatan 3-40 hari seseorang yang meninggal)	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga inti • Saksi-saksi (<i>pembela adat, kerabat, kenalan</i>) • Warga kampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang komunal • Ruang di antara rumah 	Publik (tidak semua orang diundang)	Pagar tumbuhan	Permanen
3	Pengangkatan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga inti • Saksi-saksi (<i>pembela adat, kerabat</i>) • Keluarga anak yang akan diadopsi • Kenalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang komunal • Ruang di antara rumah 	Semi publik (tidak semua orang diperbolehkan hadir)	Pagar tumbuhan	Permanen
4	<i>Lanik Anggai</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga inti 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang komunal 	Publik (semua diperbolehkan)	Pagar tumbuhan	Permanen

	<ul style="list-style-type: none"> • Pembela adat • Kerabat • Kenalan • Warga kampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang antar rumah 	datang tanpa harus diundang)	<i>Para-para yang didirikan selama acara berlangsung</i>	Temporer
--	---	---	------------------------------	--	----------

Sumber: Hasil Analisa



Gambar 3.2.4.2a. Kegiatan memasak makanan untuk upacara perkawinan



Gambar 3.2.4.2b. Konsep Ruang Publik Skala Mezo Oleh Adat Istiadat

3.2.4.3. Analisa Pengaruh Adat Istiadat Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Kampung Onggaya Dalam Skala Makro

Sedangkan pembentukan ruang publik skala makro karena kegiatan adat-istiadat biasanya membentuk ruang publik yang bersifat temporer karena hanya bersifat musiman yakni seperti ritual pasang “*sasi*” yang dilakuka setelah masa meramu dan berburu selesai. Selain itu juga rute perjalanan dari beberapa upacara lain, seperti prosesi perkawinan ke *lanik anggai* dan tradisi minum *wati*, juga membentuk ruang publik skala makro karena rute yang dilewati juga merupakan jalan umum yang bisa dilewati semua orang. Selanjutnya dijelaskan dalam tabel 3.2.4.3.



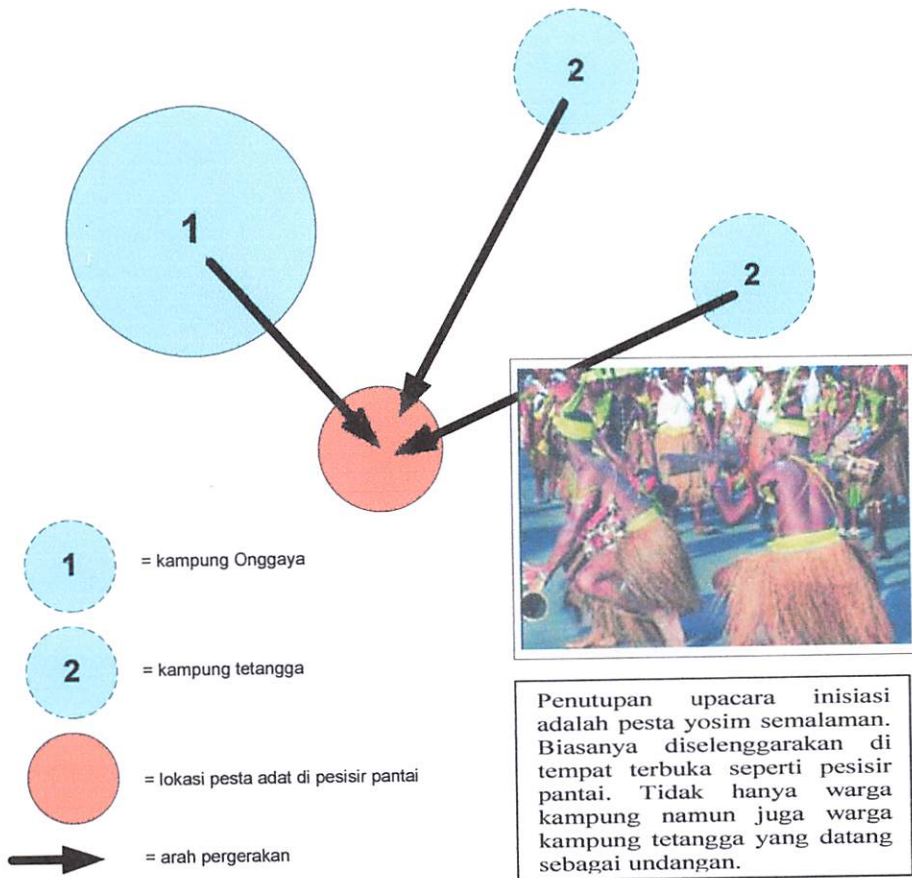
Gambar 3.2.4.3a. Pemuda Marind yang telah memasuki masa *ewati* bersiap-siap dalam mengikuti upacara kedewasaan

Tabel 3.2.4.3.
Analisa Pembentukan Ruang Publik Skala Makro
Karena Adat-Istiadat Pada Masyarakat Suku Marind
di Kampung Onggaya

No	Jenis Kegiatan	Orang-orang yang terlibat	Lokasi	Ruang Yang Terbentuk	Batasan Ruang	Sifat Ruang
1	Upacara Kedewasaan (Inisiasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemuda-pemudi yang terpilih (<i>mbitau</i> dan <i>wahuki</i>) • Orang tua dari pemuda-pemudi yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka/lapangan desa • Rute perjalanan 	Publik (karena semua orang boleh menonton)	Manusia	Temporer

		<ul style="list-style-type: none"> terpilih • Pembela adat • Warga kampung sekitar 				
2	Peresmian minum <i>wati</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemuda-pemudi yang terpilih dalam upacara inisiasi • Orang tua dari pemuda-pemudi yang terpilih • Pembela adat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pesisir pantai • Rute perjalanan 	Publik (karena siapa saja boleh menonton)	Manusia	Temporer
3	Pemberian tanda <i>akahev</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemuda-pemudi yang terpilih dalam upacara inisiasi • Orang tua dari pemuda-pemudi yang terpilih • Pembela adat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pesisir pantai 	publik (karena semua orang boleh menonton)	Manusia	Temporer
4	<i>Lanik Anggai</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga inti • Pembela adat • Kerabat • Kenalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rute perjalanan 	Publik (karena siapa saja boleh datang tanpa diundang)	Manusia	Temporer
5	<i>Sal Tapa</i> (upacara buka <i>sasi</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pakas-anem</i> (Ketua adat) • Warga daerah pemasangan <i>sasi</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Hutan/padang/<i>dusun</i> 	Publik (karena siapa saja boleh datang tanpa diundang)	Manusia	Temporer

Sumber: Hasil Analisa



Gambar 3.2.4.3b. Konsep Ruang Publik Skala Makro Oleh Adat Istiadat



Gambar 3.2.4.3c. Lokasi pesta adat penutupan upacara inisiasi

3.3. Analisa Pengaruh Kebudayaan Suku Marind Terhadap Interaksi Sosial Penduduk Di Kampung Onggaya

Lambat atau cepat, suatu kebudayaan akan mengalami masa-masa interaksi dengan pengaruh dari luar, baik itu bernilai positif maupun negatif bagi kebudayaan tersebut. Pada akhirnya dapat terjadi akulturasi, asimilasi maupun dominasi terhadap kebudayaan itu dengan pengaruh dari luar.

Suku Marind, telah melakukan interaksi dengan orang luar melalui pergerakan mereka dalam melakukan praktek pengayauan/pemenggalan kepala, yang dalam tradisi mereka disebut *kuy*. *Kuy* sebenarnya merupakan suatu *religious act* (tindakan religius) untuk memperoleh roh pelindung, yang diambil dari orang-orang yang tidak dikenal dan yang tidak memiliki masalah dengan mereka. Mereka mengayau mulai dari pedalaman Sungai Digul hingga ke daerah Papua New Guinea yang waktu itu dikuasai Inggris. Tapi interaksi ini hanya sebatas dalam perang dan belum ke hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan perang, seperti hubungan dagang.

Kontak paling penting dalam perjalanan kebudayaan suku Marind adalah kontak dengan pihak Belanda yang masuk ke wilayah tersebut sebagai wujud dari perjanjian dengan Inggris di Den Haag, yaitu untuk membendung pergerakan suku Marind ke wilayah Papua New Guinea. Hal ini merupakan awal interaksi suku Marind dengan pengaruh luar, terlepas dari praktek pengayauan. Sejak saat itulah mulai terjadi interaksi sosial antara suku Marind dengan pengaruh-pengaruh dari luar, ada yang positif maupun yang negatif.

3.3.1. Wujud Kerja Sama (Asosiatif)

Suku Marind, terlepas dari kebiasaan mereka mengayau dan berperang, adalah suku yang sangat kooperatif dan bertangan terbuka. Ada budaya *takah*, yang berarti kebanggaan, yang membuat suku Marind akan menyambut setiap tamu yang datang ke tempat mereka dengan tangan terbuka dan memberikan keramahan tuan rumah yang luar biasa kepada tamu tersebut. Di dalam falsafah Marind, *takah* berarti bahwa *mereka bangga untuk memberi kepada orang lain dan bukan menerima*. Mereka akan berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada tamu mereka. Terlebih lagi jika tamu tersebut telah mereka anggap sebagai 'saudara' (*nameg*) karena suku Marind sangat

menjunjung tinggi akan persaudaraan sebagaimana diajarkan pada *nameg-ti*. *Nameg-ti* mengajarkan bagaimana manusia itu seharusnya hidup bersama dengan manusia lainnya.

Marga *Gebze* di kampung Onggaya, menerima masuk pengaruh luar pertama kali pada saat misi *zending* Protestan masuk melalui guru-guru Injil dari Maluku. Setelah itu mulai masuk pedagang Cina yang datang mencari *burung kuning* (cenderawasih). Sikap curiga ditunjukkan ketika misi *zending* datang, namun lama kelamaan masyarakat mulai menerima, terutama sekali karena misi ini melakukan pelayanan sosial dan kesehatan serta melibatkan suku Marind dalam pembangunan-pembangunan fisik di kampung Onggaya. Semenjak itu suku Marind di kampung Onggaya mulai melakukan interaksi-interaksi sosial, tidak hanya dengan pihak misi *zending*, tetapi juga dengan pendatang baik asing maupun domestik.

Wujud-wujud kerja sama antara suku Marind dengan pihak luar, antara lain dalam wujud falsafah *nameg-ti*, yaitu dengan leluasa membuka pintu bagi setiap tamu yang datang dan dengan senang hati “*memberi makan*” kepada para tamu tersebut. Istilah “*memberi makan*” memiliki arti bahwa suku Marind memiliki kebanggaan dengan kekayaan tanah mereka. Sebenarnya mereka mempersilakan orang masuk dan menikmati tanah mereka, dengan tujuan agar sang tamu akan menjadi kagum dan kemudian merasa “*malu*”. Rasa malu karena tidak bisa menyaingi keramahan yang ditunjukkan maupun rasa malu karena hanya berada di posisi “*yang menerima*”. Rasa malu inilah yang dinikmati oleh suku Marind sebagai “*kebanggaan*” mereka. Dalam kebudayaan Marind, tradisi *membuat malu* ini telah menjadi bagian dalam menunjukkan ke-*animha-an* mereka. Dengan *membuat malu* tamu mereka, mereka sebenarnya ingin menunjukkan bahwa mereka adalah laki-laki sejati yang mampu dalam segala hal serta memiliki banyak barang yang dapat memnuhi kebutuhan sang tamu, termasuk kebutuhan seksual. Dalam tradisi pesta *yosim*, yaitu acara tarian adat untuk memperingati masa-masa tertentu (seperti awal masa pangkur sagu atau perkawinan), tiap tuan rumah akan menjamu tamu sebaik-baiknya, dengan maksud-maksud seperti di atas. Salah satunya adalah dengan memberikan salah satu dari istri-istrinya kepada sang tamu untuk mengadakan hubungan seksual pada malam itu. Tuan rumah bahkan akan memberikan rumahnya malam itu kepada sang tamu untuk digunakan sebagai tempat berhubungan seksual. Dengan begitu dia akan *menaruh rasa malu yang sangat besar* kepada sang tamu. Jika sang tamu

kemudian mempunyai hajatan dan tidak mengundang, bahkan jika mengundang pun tetapi tidak dapat membalas “*keramahan*” yang dulu diterimanya, maka derajat sosial dan terutama *ke-animha-an* (kesejatian) sang tamu akan turun serta dipandang rendah di mata masyarakat. Tradisi ini sudah ditinggalkan seiring masuknya agama Kristen Protestan dan Katolik di sana. Akan tetapi konsep *kebanggaan* dan *membuat malu* tetap ada dalam bentuk-bentuk lain.

Suku Marind pada dasarnya tidak mengenal sistem perdagangan/jual-beli. Yang bagi mereka adalah sistem barter. Keuntungan/*profit* sama sekali tidak dikenal. Bagi mereka, penggunaan sumber daya hanya terbatas saja pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tidak untuk mencari keuntungan sama sekali. Sistem barter pun dilakukan hanya karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan akan barang tersebut pada saat itu. Falsafah *yah-a-yah* dipergunakan dalam hal ini. *Yah-a-yah* berarti *sama rata* dan *sama rasa*. Dalam konteks sistem barter, *yah-a-yah* berarti kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan bersama untuk mendapatkan nilai barter yang seimbang. Dalam hal ini sebenarnya suku Marind telah mengenal *tawar-menawar* dalam tradisi mereka, hanya saja proses ini tidak dilakukan dalam ruang lingkup penerapan “*prinsip ekonomi*” karena prinsip seperti ini memang tidak dikenal dalam tradisi Marind. Yang ada hanyalah tawar-menawar dalam barter demi mendapatkan nilai yang seimbang, tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan. Tingkat intelektual pihak-pihak yang sering melakukan kegiatan ini juga turut berpengaruh. Rata-rata yang melakukan adalah peramu, petani dan nelayan. Kelompok masyarakat inilah yang berpotensi terlibat dalam kegiatan jual-beli.

Pada awal kontak dengan pedagang Cina yang datang mencari *burung kuning* (cenderawasih), mereka juga menggunakan sistem barter, di mana *burung kuning* ditukarkan dengan barang-barang modern seperti perkakas logam (parang, kapak, sekop), korek api dan jala/jaring ikan. Kerja sama ini membuka wacana baru tentang barang-barang lain di luar apa yang selama ini mereka temui di lingkungan mereka. Hanya saja sebenarnya sistem barter inipun tidak menguntungkan mereka, jika dilihat dari sudut pandang yang berdasar pada prinsip ekonomi. Di mana pihak yang satu melakukan barter dengan prinsip tradisional yang tidak mencari keuntungan, sementara pihak yang lain melakukannya dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Dalam kondisi terkini, masyarakat Marind mulai mengenal jual-beli modern, namun tetap saja ada kaidah-kaidah dalam tradisi yang tetap dipertahankan. Seperti mereka tetap memilih untuk tidak menurunkan harga walaupun pasar sudah semakin sore, meskipun menghadapi resiko barang dagangan mereka tidak akan laku dan akan rusak, karena rata-rata mereka menjual sayur-mayur dan daging.

Ketidakmampuan suku Marind bersaing dalam masalah perdagangan mengakibatkan adanya ketergantungan terhadap para pendatang yang lebih menguasai ilmu berdagang, seperti suku Bugis-Makassar maupun Jawa. Meski ada kecemburuan sosial terhadap para pendatang, tetap saja dalam hal pemenuhan kebutuhan, masyarakat suku Marind tetap membutuhkan mereka.

Interaksi dengan kaum pendatang juga menimbulkan toleransi antar suku. Pada dasarnya suku Marind, seperti halnya suku-suku tradisional lain di Merauke, memiliki ciri tertutup. Tidak mudah untuk menerima sesuatu, apalagi yang terasa asing. Tapi seiring dengan dinamika perkembangan, suku Marind mulai membuka diri kepada perkembangan. Namun tidak berarti mereka menerima mentah-mentah, adat dan tradisi tetap menjadi tolok ukur dalam menerima suatu pengaruh dari luar.

Di kampung Onggaya, dominasi suku Marind tetap kuat. Hal ini disebabkan karena hampir 100% penduduk adalah suku Marind, pendatang hanyalah beberapa pedagang dari suku Bugis serta para pegawai instansi pemerintah dan pelayan gereja. Tetapi toleransi terhadap pihak pendatang tetap ada, tidak ada intimidasi terhadap mereka. Toleransi yang dimaksud lebih kepada "*kami perlu, kami cari; kami tidak perlu, kami tidak cari*". Maksudnya, misalnya dalam kepemimpinan, mereka akan lebih patuh kepada *pakas-anem* dan pembela-pembela adat dibandingkan terhadap pihak pemerintah yang ada di sana. Jadi, mereka lebih memilih mengikuti petuah dan saran dari *pakas-anem* dan pembela adat dibanding dengan instruksi pemerintah. Tetapi jika mereka mempunyai persoalan masalah administrasi, seperti mengurus KTP, mereka akan datang ke kantor kampung untuk mengurus masalah tersebut. Selama mereka tidak memerlukan bantuan pemerintah, mereka tidak akan mencarinya.

3.3.2. Konflik-Konflik Sosial Yang Timbul

Tanah (*makan*) adalah salah satu problem paling kompleks dalam masyarakat Marind. Sebagaimana diketahui bahwa dalam falsafah Marind, tanah adalah bagian yang

tidak terpisahkan dari ke-*animha*-an (kesejatian) seseorang. Dua hal yang wajib dimiliki oleh seorang *Marind-Anim* (manusia Marind sejati) adalah marga dan tanah. Kedua hal tersebut saling mengisi satu sama lain, sesuai dengan inti ajaran *Mayo*, bahwa semua di alam saling berkaitan erat. Tanah dimuliakan suku Marind sebagai kaitannya dengan kisah-kisah *totemistik* yang dimiliki oleh tiap-tiap marga. Pada dasarnya tanah ditabukan untuk dijual, selain karena falsafah marind tidak mengenal sistem jual-beli, pemindahtanganan tanah juga tidak dibenarkan dalam tradisi Marind. Karena falsafah Marind juga tidak mengenal hak milik perseorangan, yang ada hanyalah bahwa tanah adalah milik marga, sedangkan individu dalam marga hanya mendapat hak pakai.

Dalam perkembangan jaman, terjadi bentrokan konsep antara pemerintah dikarenakan UU No. 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sama sekali belum mengakomodir aspirasi adat masyarakat Papua pada umumnya dan Marind pada khususnya. Yang berakibat pada cenderung diterapkannya aturan nasional yang lebih banyak mengadopsi kultur di Indonesia bagian barat. Sedangkan budaya Melanesoid yang menjadi akar dari rumpun bangsa di Papua sama sekali berbeda dengan budaya Melayu yang merupakan nenek moyang dari suku-suku di bagian Indonesia lainnya.

Di kampung Onggaya, konflik yang terjadi adalah akibat ketidakmengertian pihak pendatang akan budaya lokal tentang tanah. Sehingga perlakuan mereka terhadap tanah di kampung Onggaya, mereka samakan dengan di daerah lain. Sikap eksploitasi lahan yang berlebihan tanpa adanya konsep konservasi sangat bentrok dengan konsep mereka yang tidak mencari keuntungan dengan alam namun hanya sebatas pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Tradisi berbau kapitalis yang dibawa oleh pendatang ke dalam kampung Onggaya, mulai merusak tatanan budaya yang telah ada sejak dahulu.

Pada 1980an mulai ada pihak suku Marind yang melakukan penjualan tanah kepada pihak luar. Kemudian hal ini mulai menjadi sesuatu yang baru dalam kehidupan masyarakat Marind di kampung Onggaya. Telah terjadi beberapa pemindahantangan hak atas tanah ke tangan orang lain yang sama sekali bukan orang Marind. Hal ini kemudian menimbulkan konflik di kemudian hari, di mana pihak ahli waris dan kerabatnya akan menuntut agar tanah itu dikembalikan kepada mereka. Biasanya pihak pembeli yang dimenangkan dalam sengketa tanah ini karena dia telah mengantongi surat pelepasan hak

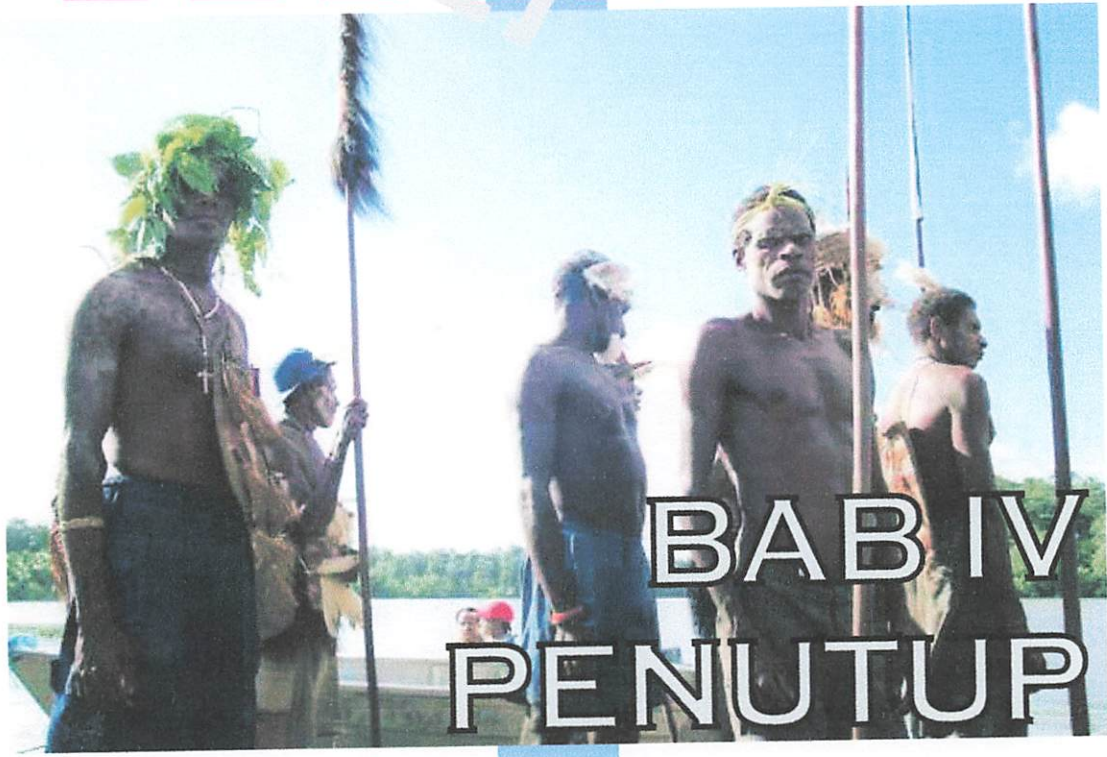
ulayat dan sertifikat dari pemerintah yang bernilai hukum. Jika hal ini terjadi maka akan ada sikap permusuhan yang dilakukan oleh ahli waris tanah dan keluarganya.

Konflik juga timbul karena pemberian stigma “*bodoh, kotor dan biadab*”, yang ironisnya stigma ini dikeluarkan di jaman yang telah maju di mana seharusnya setiap pikiran orang Indonesia yang berada di luar Papua sudah tidak sama lagi dengan pemikiran orang Indonesia di luar Papua pada tahun 1960an. Pandangan seperti itulah yang membuat ada rasa minder (*inferiority feelings*), tidak hanya suku Marind akan tetapi juga kepada semua suku di wilayah selatan.

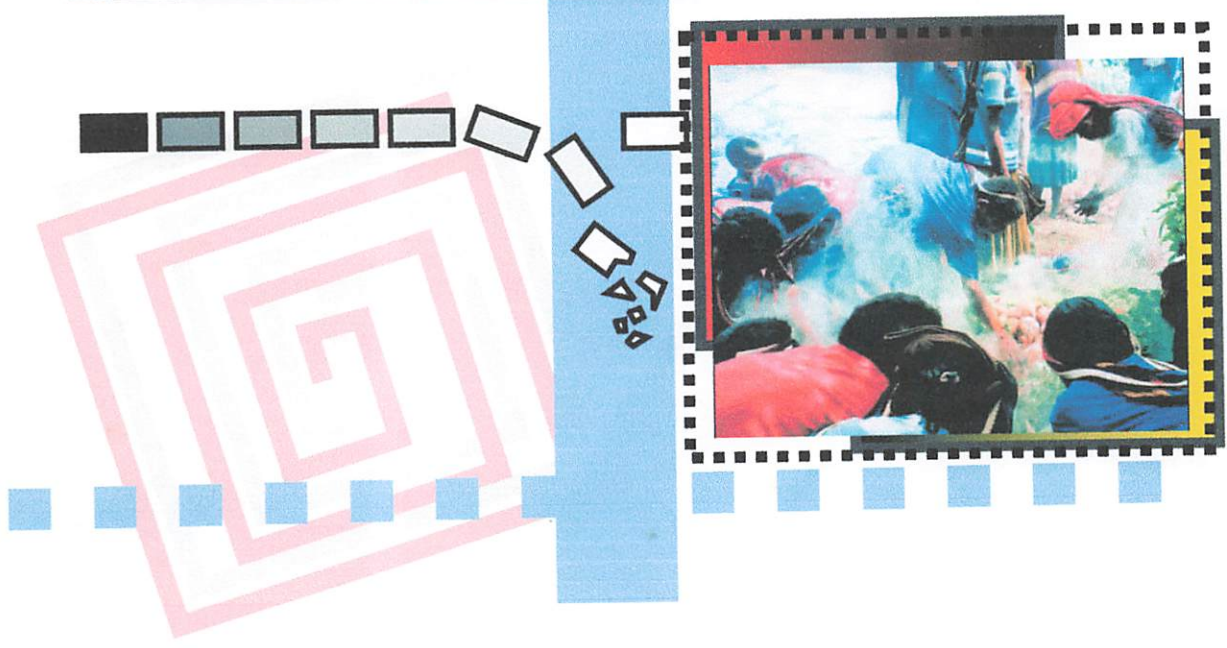
Masyarakat Marind di kampung Onggaya, seperti juga tipikal masyarakat Marind pada umumnya, adalah suku yang sangat memiliki kebanggaan akan tanah dan sumber daya alamnya yang melimpah. Konflik terjadi ketika mereka berbangga hati menyalahkan sumber daya alam yang ada diambil secara modern oleh para pendatang. Akibatnya adalah prinsip ekonomi yang berkuasa sehingga aturan-aturan suku tentang konservasi pun tidak dilakukan.

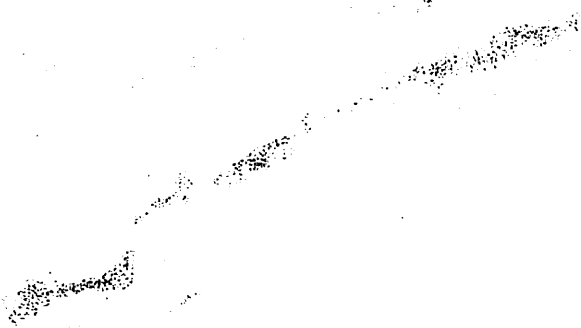
Di sisi lain budaya *yah-a-yah* tidak dimengerti oleh kaum pendatang. Sehingga pada saat masyarakat suku Marind melakukan budaya *mato hale*, untuk mempermalukan si pendatang, dia tidak akan merasa malu oleh sebab dia tidak memahami falsafah-falsafah yang ada dalam masyarakat Marind. Malah dapat timbul pemikiran di kalangan kaum pendatang bahwa suku Marind hanya diam dan merelakan tanahnya dieksploitasi. Padahal orang Marind diam karena menganggap si pendatang yang “inferior” yang rendah seperti binatang dan oleh sebab itu tidak patut untuk diajak berbicara.

Konflik-konflik semacam ini terjadi terutama sekali karena kurang pahamnya kaum pendatang akan budaya lokal, di sisi lain juga kurangnya informasi dari suku Marind tentang diri mereka, terutama dalam hal falsafah-falsafah yang banyak berkenaan dengan masalah-masalah yang vital seperti tanah dan eksploitasi sumber daya alam. Tentu saja yang menjadi kendala adalah ada hal-hal yang ditabukan untuk diperdengarkan ke orang lain. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga-lembaga adat untuk dapat merancang suatu konsep pembelajaran budaya Marind bagi orang-orang non-Papua dengan tidak mengurangi rasa hormat mereka pada aturan-aturan main dalam tradisi suku Marind.

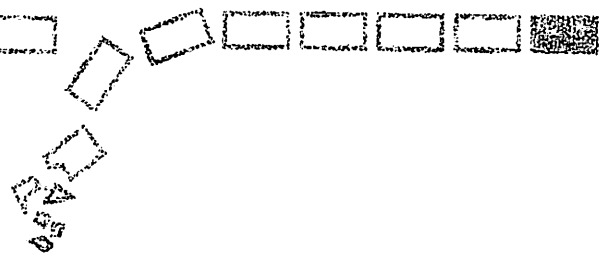
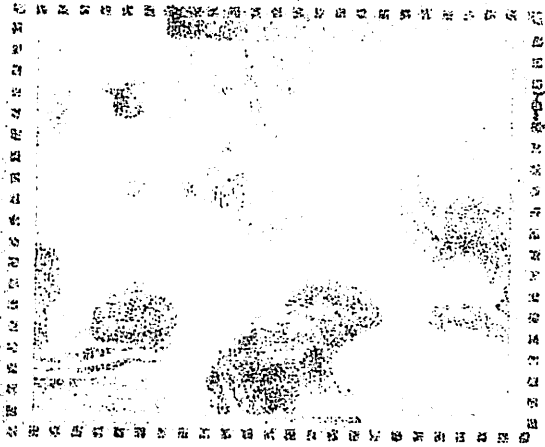


BAB IV PENUTUP





PENNINGTON
BARBARA



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam bab sebelumnya tentang pengaruh kebudayaan suku Marind dalam pembentukan ruang publik (*public space*) di ruang kota Merauke dengan sampel kasus di kampung Onggaya, maka dapat di simpulkan bahwa pengaruh budaya dan pola permukiman sangat substansial dalam kehidupan masyarakat suku Marind sejak jaman nenek-moyang sampai saat ini, meskipun tidak dapat dipungkiri telah terjadi pergeseran-pergeseran nilai budaya karena berbagai macam hal. Namun secara umum dalam sampel kampung yang masih homogen, nilai-nilai budaya asli masih dapat ditemui dilaksanakan dan dihayati oleh masyarakat suku Marind. Kesimpulan yang diambil, sehubungan dengan masalah pengaruh kebudayaan terhadap pembentukan ruang publik adalah sebagai berikut:

4.1.1. Pengaruh Kebudayaan Suku Marind Terhadap Pembentukan Ruang Publik Pada Kampung Onggaya

Hasil analisa pada bab sebelumnya menyimpulkan bahwa pengaruh tiga unsur budaya dan adat istiadat, sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat suku Marind. dari sini maka ditarik kesimpulan mengenai pengaruh unsur-unsur kebudayaan dalam konteks keruangan, yaitu:

1. Sistem Religi

Pola hidup dan tingkah laku masyarakat kampung Onggaya sangat dipengaruhi oleh agama asli suku Marind yaitu agama *Mayo*, yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat Marind, mulai dari masalah religi hingga ke konsep-konsep drainase. Suku Marind percaya akan kekuatan *dema* sebagai roh leluhur, yang telah banyak melakukan pengorbanan, termasuk dirinya sendiri, agar keturunan-keturunannya tidak mengalami sengsara di dunia ini. Kepercayaan terhadap *dema* inilah yang mendasari masyarakat suku Marind melakukan berbagai ritual-ritual dengan maksud pemujaan/penghormatan

terhadap *dema*. Dengan dilakukan ritual-ritual inilah maka terbentuk ruang publik (*public space*) yang dapat di nikmati oleh masyarakat suku Marind maupun masyarakat di luar suku Marind.

2. Sistem kekerabatan

Sistem kekerabatan juga memegang peranan penting dalam pembentukan ruang publik. Dengan model kampung yang homogen, di mana semua berada di bawah marga atau sub marga atau sub sub-marga yang sama, maka keterikatan dalam kampung Onggaya sangat erat. Keterikatan dalam budaya *yah-a-yah* membuat timbulnya prinsip *sama rasa* dan *sama rata* di antara anggota marga dalam kampung Onggaya. Ikatan kekerabatan dengan penduduk dari kampung Tomer dan Kuler juga menciptakan ruang publik.

3. Sistem mata pencarian

Bentukan ruang publik karena mata pencarian yang dimaksudkan di sini karena hampir sebagian besar masyarakat suku Marind bermata pencaharian sebagai petani dan peramu serta nelayan. Sebagai suku yang memiliki falsafah mendalam mengenai pemeliharaan dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam, suku Marind memiliki ritual-ritual yang dijalankan seiring dengan siklus-siklus berburu, meramu, bercocok tanam dan menangkap ikan. Ritual seperti “pasang *sasi*” adalah merupakan wujud konservasi dalam falsafah Marind, yang juga menciptakan bentukan ruang publik dalam ruang kampung Onggaya.

4. Adat-Istiadat

Adat-istiadat dalam masyarakat suku Marind juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan ruang publik karena hampir sebagian besar hidup dan kehidupan suku Marind diwarnai dengan berbagai kegiatan adat-istiadat yang berlandaskan kepercayaan terhadap *dema*. Upacara adat-istiadat dalam masyarakat suku Marind sangat kompleks dan mendarah-daging karena setiap fase kehidupan anggota suku Marind dilewati dengan upacara adat-istiadat seperti upacara kelahiran, pemberian nama, upacara kedewasaan (inisiasi), upacara perkawinan adat, upacara kematian dan upacara-upacara lain yang telah merupakan bagian dari rutinitas keseharian suku Marind. Upacara adat-istiadat ini akan di lakukan dengan berbagai ritual-ritual yang tentunya

melibatkan orang banyak sehingga akan membentuk ruang-ruang publik (*public space*) pada tempat-tempat dilakukan upacara-adat dengan sifat yang temporer maupun permanen.

4.1.2. Pengaruh Unsur-Unsur Kebudayaan Suku Marind Terhadap Proses Interaksi Sosial Budaya Di Kampung Onggaya

Lambat atau cepat, suatu kebudayaan akan mengalami masa-masa interaksi dengan pengaruh dari luar, baik itu bernilai positif maupun negatif bagi kebudayaan tersebut. Pada akhirnya dapat terjadi akulturasi, asimilasi maupun dominasi terhadap kebudayaan itu dengan pengaruh dari luar. Pengaruh unsur-unsur kebudayaan suku Marind terhadap interaksi sosial budaya di kampung Onggaya sangat besar, bahkan dapat dikatakan mendominasi. Hal ini disebabkan karena komposisi penduduk yang masih homogen, di mana jumlah pendatang di sana relatif kecil. Dalam interaksi sosial dengan pendatang, mereka cenderung untuk acuh tak acuh. Dalam konteks bahwa mereka hanya akan mencari si pendatang jika mereka memerlukan sesuatu darinya. Di luar itu mereka akan bersikap seadanya. Interaksi dengan instansi pemerintah pada dasarnya juga sama. Mereka lebih patuh kepada *pakas-anem* dibanding dengan petugas pemerintah.

Konflik-konflik yang timbul lebih banyak terjadi karena kurang pemahannya pendatang akan budaya Marind, sementara itu di sisi lain suku Marind pun lambat untuk merespon dinamika perkembangan jaman. Mereka cenderung berlindung di balik budaya *mato hale* yang seringkali malah menjadi bumerang bagi mereka.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil studi ini dan dengan melihat semakin pesatnya perkembangan arus informasi dan teknologi di tambah dengan semakin terbuka proses asimilasi dengan budaya lain maka ada beberapa saran atau masukan yang berkaitan dengan studi ini adalah :

4.2.1. Saran Atau Masukan Dalam Bentuk Tindakan :

1. Perlunya filterisasi suku Marind sehingga tidak terasimilasi dengan budaya lain atau budaya luar karena budaya Marind sebagai budaya asli tidak akan kehilangan identitasnya atau citra kotanya, pada konteks yang lebih luas

akan tetap memperkaya warna budaya di Indonesia. Terutama sekali karena daerah Papua adalah daerah yang “*peculiar*”, yang unik dan khas, merupakan daerah Indonesia yang berumpun Melanesoid jika dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang berumpun Melayu.

2. Perlu adanya pemahaman yang menyeluruh akan budaya suku Marind, terutama sekali budaya-budaya yang bentrok dengan budaya modern pada umumnya. Sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi memandang Papua sebagai suatu wilayah yang penduduknya adalah “*bodoh, biadab dan kotor*” namun telah memandangnya sebagai salah satu dari keanekaragaman budaya yang patut dilestarikan.
3. Memaksimalkan peranan lembaga adat dalam menjembatani hal-hal di atas, sehingga dapat tercipta suatu keselarasan antara pemerintah, pendatang dan suku Marind.
4. Adanya kerjasama yang holistik antara pemerintah, pihak swasta, ketua dewan adat, *pakas-anem* dan tokoh masyarakat untuk mempromosikan suku Marind di bidang pariwisata dengan memberdayakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan ekonomi kota maupun keluarga.

4.2.2. Rekomendasi Dalam Bentuk Studi Lanjutan

1. Studi lanjutan tentang perbandingan antara konsep tanah dalam tradisi Marind dengan konsep pemilikan tanah modern.
2. Studi lanjutan tentang konflik-konflik yang timbul akibat adanya interaksi sosial budaya maupun ekonomi antara suku Marind dengan pendatang dari luar Papua.
3. Studi lanjutan tentang arsitektur bangunan suku Marind
4. Studi lanjutan tentang etnologi suku Marind

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Arya Ronal, Ciri-Ciri Karya Budaya Dibalik Tabir Keagungan Rumah Jawa, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1990

Budihardjo Eko, Arsitektur Pembangunan dan Konservasi, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1997

Budihardjo Eko, Tata Ruang Kota, Penerbit Alumni Bandung 1997

Catanase Anthony. J, Pengantar Sejarah Perencanaan Perkotaan, Penerbit Erlangga Surabaya, 1984

Darmawan Edy, Teori dan Kajian Ruang Publik Kota, Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2003

Hakim Rustam dan Utomo Hardi, Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2004

Jayadinata Johara T, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan, Perkotaan dan Wilayah, Penerbit ITB Bandung, 1992

Kamus Besar Bahasa Indoneisia DEPDIKBUD, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990

Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan, PT Gramedia Jakarta, 1984

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Penerbit Rineke Cipta, Jakarta, 1994

Koentjaraningrat, Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional Dalam Presepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan Nasional, Penerbit PT Gramedia Jakarta 1986

Poerwanto Hari, Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Prespektif Antropologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000

Puspowardojo Soerjanto, Strategi Kebudayaan Suatu Pengantar Filosofis, Penerbit PT Gramedia Jakarta 1989

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta

R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Penerbit Ghalia Indonesia

Setiawan Haryadi, B, *Arsitektur Lingkungan Dan Perilaku*, Penerbit Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan Dirjen Pendidikan Tinggi DEPDIKBUD RI 1995

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982

Soemarjan, Selo dan Soemardi Soelaiman, *Serangkai Bunga Sosiologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990

Stephen, Leane g. Rivlin, Mark Francis, Andrew M. Stone, Bogor Cisarua, 27-30 Maret 2003 Carr, *Public Space, Environment And Behavior Series*, University Press, Victoria, 1992

Sumintardja Djauhari, *Kompedium Sejarah Arsitektur Jilid I*, Penerbit Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah, Jakarta, 1995

TUGAS AKHIR:

Anggraeni, Jelita Alit, *Skripsi, Teknik Planologi*, ITN Malang, 2001

MazidulKhoir, Ahmad, *Skripsi, Teknik Planologi*, ITN Malang, 2004

INTERNET:

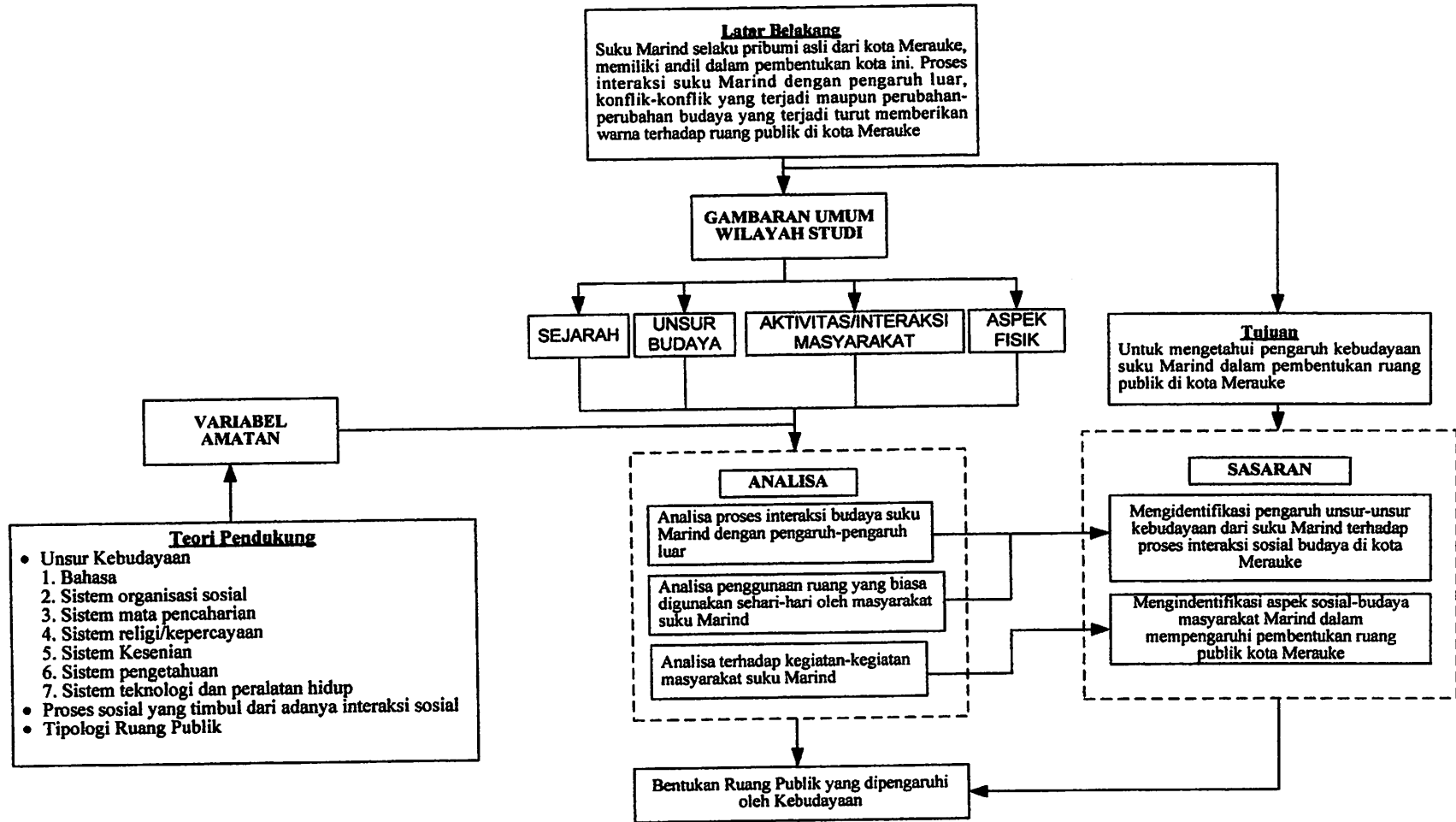
www.westpapua.net

www.ethnologue.com

www.sukupapua.info

www.undp.org

KERANGKA PEMIKIRAN



DESAIN SURVEY

SASARAN	TEORI PENDUKUNG	KELOMPOK VARIABEL	VARIABEL AMATAN	Jenis Data	Bentuk data	Metode Pengambilan Data
<p>Mengidentifikasi pengaruh unsur-unsur kebudayaan dari suku Marind terhadap proses interaksi sosial budaya di kota Merauke.</p>	<p>Menurut Gilin, terdapat dua proses sosial akibat adanya interaksi sosial, yaitu proses yang positif (asosiatif) dan proses yang negatif (disosiatif). Hubungan sosial atau interaksi sosial dua orang atau lebih dalam kaitannya dengan hubungan antar suku/etnis lebih cenderung dilihat sebagai perbuatan sosial yang berkaitan dengan identitas suku/etnis. Dalam hal ini ada dua faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktor nilai budaya yang menentukan identitas etnik, kelestarian, 	<p>Interaksi perilaku sosial budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kerjasama (asosiatif) ○ Hal-hal yang tidak sesuai (persaingan) ○ Konflik sosial (akibat adanya persaingan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat antar suku) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk kegiatan - Lokasi - Intensitas kegiatan <p>a. Bentuk kegiatan b. Lokasi c. Intensitas kegiatan</p> <p>a. Bentuk kegiatan b. Lokasi c. Intensitas kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tingkat pendidikan ◆ Jenis kepercayaan yang dianut ◆ Bentuk konflik yang timbul ◆ Penduduk menurut agama ◆ Persebaran penduduk 	<p>Uraian dan tabel Uraian dan tabel Uraian dan tabel Uraian dan tabel Uraian dan tabel Uraian dan tabel</p>	<p>Dilakukan survey sekunder yang kemudian dilengkapi dengan wawancara dengan tokoh adat, serta kuesioner kepada masyarakat</p>

	<p>kesukubangsaan, perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dan berbagai permasalahan sebagaimana terwujud dalam lingkungan masyarakat majemuk.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Faktor proses-proses sejarah yang memperlihatkan adanya kecenderungan kelompok etnik tertentu untuk mengaktifkan kembali identitas kesukubangsaan untuk kepentingan tertentu, serta pemaksaan untuk kembali menggunakan identitas etnik yang lama, menerima apa adanya atau malah mendasari					
--	---	--	--	--	--	--

atau malah mendasari
 meneliti apa adanya
 emik yang lama
 menggunakan identitas
 untuk kembali
 terentu serta pemaksaan
 untuk kepentingan
 identitas kesukubangsuan
 mengkritik kembali
 emik terentu untuk
 kesederhanaan kelompok
 menimbulkan adanya
 sejalan yang
 " Faktor proses-proses
 masyarakat mengemukakan
 dalam tingkatan
 sebagaimana terwujud
 permasalahan
 waktu dan berbagai
 yang terjadi dari waktu ke
 perubahan-perubahan
 kesukubangsuan.

--	--	--	--	--	--

	penerimaan identitas yang baru.					
Mengidentifikasi pengaruh unsur-unsur kebudayaan dari suku Marind dalam pembentukan ruang publik kota Merauke	Kehidupan sosial merupakan salah satu aspek dari kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut C.Kluckhohn dalam bukunya " <i>Universal Categories of Culture</i> " (1953) meliputi : Bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi dan kesenian.	Kegiatan sosial budaya Masyarakat berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Sistem religi • Sistem kemasyarakatan. • Sistem mata pencaharian. 	<p>a. Bentuk kegiatan</p> <p>b. Lokasi</p> <p>c. Intensitas kegiatan</p> <p>a. Bentuk kegiatan</p> <p>b. Lokasi</p> <p>c. Orang-orang yang terlibat</p> <p>a. Struktur pekerjaan</p> <p>b. Jarak/waktu tempuh</p> <p>c. Lokasi Pekerjaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tingkat pendidikan ◆ Jenis kepercayaan yang dianut ◆ Lembaga pemerintahan maupun adat yang ada ◆ Jenis mata pencaharian masyarakat ◆ Penduduk menurut agama ◆ Kegiatan keagamaan atau religi 	<p>Uraian dan tabel</p> <p>Uraian dan tabel</p> <p>Uraian dan tabel</p> <p>Uraian dan tabel</p> <p>Uraian dan tabel</p> <p>Uraian dan tabel</p> <p>Uraian dan tabel</p>	Dilakukan survey sekunder yang kemudian dilengkapi dengan wawancara dengan tokoh adat, serta kuesioner kepada masyarakat

- a. seluas mungkin
- b. hanya beberapa meter
- c. sesuai dengan jumlah orang
- d. lain-lain.....

9. Selain di permukiman dapatkah kegiatan ini dilaksanakan di tempat lain,?

- a. ya
- b. tidak

10. Kalau ya, dimana biasa di lakukan?

- a. di kebun/sawah
- b. jalan umum
- c. hutan
- d. lain-lain.....

11. dari jawaban no 10, Kapan kegiatan itu dapat dilakukan ?

- a. waktu tertentu
- b. ditentukan oleh tokoh adat
- b. kapan saja
- d. lain-lain.....

12. dari jawaban no 10, kegiatan apa yang dapat dilakukan?

- a. berkaitan dengan adat
- b. berkaitan dengan perkawinan
- c. berkaitan dengan religi
- d. lain-lain.....

11. Apakah disini masih erat hubungan kekerabatannya(ikatan kekeluargaan) ?

- a. ya
- b. tidak

12. kalau ya, bagaimana warga disini mempertahankan ikatan persaudaraannya

- a. adat-istiadat
- b. perkawinan
- c. gotong-royong
- d. lain-lain

13. Kalau ya, dimana sering diadakan pertemuan antara keluarga inti dan kerabat yang sudah keluar (pindah karena kawin-mawin)

- a. rumah
- b. pekarangan komunal
- c. kebun/sawah
- d. lain-lain

14. Seberapa sering anda mengunjung/dikunjungi keluarga?

- a. tidak menentu
- b.seringkali
- c. kadang-kadang
- c. lain-lain

15. Siapa saja yang terlibat dalam pertemuan antara keluarga

- a. anggota keluarga inti
- b. siapa saja
- c. tetangga sekitar
- d. lain-lain.....

16. Dimana anda bekerja ?

- a. sawah/ladang/kebun
- b. kantor swasta/pemerintahan
- c. rumah
- d. lain-lain.....

17. Kira-kira berapa jarak dari rumah ke tempat kerja?

- a. < 1 km
- b. 1-5 km
- c. 5-10 km
- d. > 10 km

18. Berapa lama anda menempuh perjalanan ketempat kerja ?

- a. < 1/2 jam
- b. 1 jam
- c. > 1 jam

19. Apa yang anda gunakan pada saat anda bekerja?

- a. jalan kaki
- b. kendaraan pribadi
- c. kendaraan umum
- d. lain-lain

20. Apakah disini sering dilakukan kegiatan kesenian

- a. ya
- b. tidak

21. Kalau ya, apa saja acara kesenian yang ada di wilayah anda ?

- a. seni tari
- b. seni suara
- c. seni ukir/pahat
- d. lain-lain.....

22. Kalau ya, kapan saja di adakan ?

- a. setiap minggu
- b. setiap bulan
- c. setiap tahun
- d. kadang-kadang

23. Dimana sering diadakan kegiatan kesenian

- a. di rumah
- b. di pekarangan komunal
- c. di kebun/sawah
- d. lain-lain

24. Pada saat apa acara kesenian ini di pertunjukkan?

- a. setelah panen
- b. ketika ada tamu
- c. acara adat
- d. lain-lain.....

25. Apakah masih ada lokasi lain yang dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan budaya selain tempat yang di sebutkan di atas ?

- a. ya, sebutkan
- b. Tidak.

26. Kalau ya, seberapa sering anda lakukan kegiatan tersebut?

- a. 1 x seminggu
- b. 1 x sebulan
- c. 1 x tahun
- d. lain-lain.....

27. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut ?

- a. semua anggota keluarga
- b. tetangga dan tokoh adat

ma d-1 d-
ma d-1 d-

20. Berapa jumlah semua faktor prima dari 2000?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

21. Berapa hasil dari $2^3 + 3^2 + 4^1$?

a. 15
b. 17
c. 19
d. 21

22. Berapa hasil dari $5^2 - 3 \times 4 + 2$?

a. 10
b. 11
c. 12
d. 13

23. Berapa hasil dari $10 \times 2^3 + 3^2$?

a. 80
b. 83
c. 86
d. 89

24. Berapa hasil dari $4^2 \times 3^2$?

a. 144
b. 120
c. 100
d. 96

25. Berapa hasil dari $2^5 + 3^3$?

a. 32
b. 35
c. 38
d. 41

26. Berapa hasil dari $10^2 + 2^3$?

a. 104
b. 105
c. 106
d. 107

27. Berapa hasil dari $5^3 + 2^4 + 3^2$?

a. 125
b. 130
c. 135
d. 140

28. Berapa hasil dari $2^6 + 3^4$?

a. 64
b. 67
c. 70
d. 73

29. Berapa hasil dari $4^3 + 2^5$?

a. 68
b. 70
c. 72
d. 74

30. Berapa hasil dari $3^5 + 2^6$?

a. 243
b. 245
c. 246
d. 247

c. tokoh masyarakat c. lain-lain.....

28. Seberapa luas lokasi yang di gunakan sebagai tempat kegiatan berlangsung ?

- a. disesuaikan dengan jumlah orang b. tidak menentu
c. dibatasi oleh tokoh adat d.lain-lain.....

29. Dimana lagi anda biasanya berinteraksi bersama keluarga?

- a. rumah b.teras
c. kebun d.pekarangan komunal

Kegiatan adat-istiadat

1. Apaka sering dilakukan upacara adat?

- a. ya b. tidak

2. Berapa lama biasanya acara kegiatan suku tersebut di laksanakan?

- a. 1-2 hari b. > 3 hari
c. 3-5 hari d. > 5 hari

3. Berapa kali acara tersebut di lakukan?

- a. 1 bulan sekali b. 3 bulan sekali
c. 6 bulan sekali d. 1 tahun sekali

e lain-lain

4. Di mana kegiatan upacara adat, di lakukan ?

- a. di rumah c. di kebun/sawah
b. pekarangan komunal d.

5. Apakah kegiatan gotong-royong masih sering di lakukan di daerah ini?

- a. ya b. tidak

6. Kegiatan gotong-royong apa saja yang sering di lakukan

- a. Berkebun b. Saat panen
c. bersih desa/kampung c.Membangun rumah

e.....

7. Kegiatan apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika pulang dari tempat kerjanya masing-masing

- a. Berolahraga b. tidur
c. bercerita/interkasi d. Lain-lain

8. Dimana kegiatan interkasi antara warga biasa dilakukan ?

- a. rumah
- b. teras
- c. pekarangan komunal
- d. lain-lain.....

9. Bagaimana tata cara dan kebiasaan di daerah ini?

- a. biasa saja
- b. ada tradisi sendiri
- c. lain-lain.....

C. Permukiman /Tempat tinggal

1. Mengapa anda bertempat tinggal di daerah ini:

- a. dekat keluarga
- b. dekat tempat kerja
- c. nyaman
- d. turun temurun

2. Sudah berapa lama anda tinggal di daerah ini:

- a. < 5 tahun
- b. 5-10 tahun
- c. 10-20 tahun
- d. >20 tahun

3. Status rumah saudara?

- a. milik sendiri
- b. warisan
- c. pemerintah
- d. lain-lain

4. Apakah anda bertempat tinggal di rumah tradisional ?

- a. ya
- b. tidak

5. Kalau ya, arah orientasi rumah anda menghadap kemana ?

- a. utara
- b. selatan
- c. barat
- d. timur

6. Jika ya, dari mana bahan bangunan rumah anda ?

- a. swadaya sendiri
- b. swadaya masyarakat sekitar
- c. bantuan pemerintah
- d.....

7. Siapakah yang terlibat dalam proses pembangunan rumah saudara ?

- a. keluarga
- b. warga sekitar/tetangga
- c. pemerintah
- d. lain-lain

8. Kalau ya, menurut anda mengapa lokasi permukiman berada di atas perbukitan

- a. warisan dari nenek moyang
- b. menghindari bencana alam
- c. menghindari serangan musuh
- d. lain-lain.....

9. Apakah dalam membangun rumah/bangunan, ada desain khusus/motif dan bentuk khusus yang menjadi ciri khas?

- a. ya
- b. tidak

10. Kira-kira berapa usia dari bangunan tempat tinggal saudara ?
- < 30 tahun
 - 30-60 tahun
 - 60-90 tahun
 - > 90 tahun
11. Siapa yang merancang bangunan tempat tinggal saudara
- warisan nenek moyang
 - arsitek
 - tokoh adat
 - lain-lain.....
12. Siapa saja yang berperan dalam pembangunan rumah ini ?
- semua anggota keluarga
 - anggota keluarga dewasa
 - warga sekitar
 - lain-lain.....
13. Bagaimana dengan alat kerja yang digunakan?
- masih primitive
 - menggunakan teknologi
 - campuran keduanya
 -
14. Pada rumah ini dimana ruang yang bisa di gunakan oleh orang lain/luar ?
- teras/beranda depan
 - ruang tamu
 - kamar tidur
 - dapur
15. Kegiatan apa saja yang dapat di lakukan?
- adat-istiadat /keagamaan
 - perkawinan
 - politik dan sosial
 - lain-lain.....
16. Kapan ruang itu bisa di pakai ?
- kapan saja
 - pada waktu tertentu
 - saat upacara adat
 - lain-lain.....
17. apakah anda tinggal di rumah modern ?
- ya
 - tidak
18. Jika ya, dari mana anda memperoleh bahan bangunan?
- toko bangunan
 - swadaya sendiri
 - bantuan warga sekitar
 - bantuan pemerintah
19. Apakah anda masih membutuhkan ruang terbuka/ruang public
- ya
 - tidak
20. Jenis ruang terbuka yang ada di tempat tinggal anda berupa apa ?
- lapangan
 - lahan kosong
 - taman
 - fasilitas sosial ekonomi
21. Apa jenis fasilitas umum yang ada di tempat anda?

- a. lapangan olahraga
- b. kantor pemerintahan
- c. MCK
- d.

22. Dimana anda memasarkan hasil pertanian anda?

- a. pasar
- b. tengkulak
- c. koperasi
- d. lain-lain

23. Dimana anda berbelanja kebutuhan sehari-hari

- a. Pasar
- b. Koperasi
- c. Kios/warung

24. Apakah penduduk di luar suku/permukiman anda boleh menggunakan ruang yang anda miliki/kuasai ?

- a. ya
- b. tidak

25. Apakah sawah/kebun dapat digunakan untuk kegiatan upacara yang berkaitan kepercayaan/adat

- a. ya
- b. tidak

26. Kalau ya, bagaimana ukuran ruang yang di butuhkan ?

- a. > 1 meter
- b. disesuaikan dengan jumlah orang
- c. tidak ada batasan fisik
- d. lain-lain.....



Lembar Asistensi TUGAS AKHIR

Nama : Samuel
Nim : 97.24.064

“PENGARUH KEBUDAYAAN SUKU MARIND TERHADAP PEMBENTUKAN RUANG PUBLIK DI KOTA MERAUKE”

Dosen Pembimbing : Endratno Budi S., ST

No	Har/Tanggal	Keterangan	Paraf
①	8/09/06	<ul style="list-style-type: none">✓ Aspek Lokasional dikentalkan! → Foto, peta, Gambar^x, krd^x gambar Merauke, or Wku Motin → Hampir[←]✓ <u>Methoden Analisa.</u> dibnyakikan ⊕ didetailkan !	
②	9/09/06	<ul style="list-style-type: none">✓ tambahkan lagi ⊕ cetk konstruksi✓ Kalar sudah, tidak majikan ke selanjutnya ⊕ Bar selanjutnya !	



Lembar Asistensi TUGAS AKHIR

Nama : Samuel
Nim : 97.24.064

"PENGARUH KEBUDAYAAN SUKU MARIND TERHADAP PEMBENTUKAN RUANG PUBLIK DI KOTA MERAUKE"

Dosen Pembimbing : Endratno Budi S., ST

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Paraf
①	5/09/06	<p>✓ Gambar & Diagram & menjelaskan</p> <ul style="list-style-type: none">□ Karakter / Unsur : budaya□ Pengaruh terhadap Ruang Publik yg terbentuk <p>✓ <u>Aspek Lokasional!</u></p> <ul style="list-style-type: none">□ Perhatikan sistemisasi unsur budaya terhadap pembentuk Ruang publik→ skala mikro → bebaskan rumah↳ mikro → antar rumah → sudah ada↳ makro → dem satu kampung & orangnya⊕ polanya di Kota Merauke <p>□ Kekuatan Marga & kampung orangnya → melalui Marga Gbize</p> <p>✓ <u>Buat bab IV</u></p> <p>✓ <u>Kalau sudah ; sipilihnya</u></p> <p>✓ <u>Bisa map kaminan hari</u></p> <p>✓ <u>Buat Daftar Istilah</u> (Fomrsistilah... (6 larsang))</p>	



Institut Teknologi Nasional Malang
Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan
Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Lembar Asistensi TUGAS AKHIR

Nama : Samuel
Nim : 97.24.064

**“PENGARUH KEBUDAYAAN SUKU MARIND TERHADAP
PEMBENTUKAN RUANG PUBLIK DI KOTA MERAUKE”**

Dosen Pembimbing : Ir. Hutomo Moestadjab

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Paraf

PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Dalam *Seminar Tugas Akhir* tingkat Sarjana Jurusan Planologi/Perencanaan Wilayah & Kota yang diadakan pada :

Hari : SENIN

Tanggal : 12 / 09 / 06

Perlu adanya perbaikan pada Tugas Akhir untuk :

Saudara : KAMU EL

NIM : 97-1-064

Perbaikan tersebut meliputi :

Tata cara pembaruan (new)
Pembaruan public - private - people.

Dosen Penguji

(Signature)

(bnu)

PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Dalam *Seminar Tugas Akhir* tingkat Sarjana Jurusan Planologi/Perencanaan Wilayah & Kota yang diadakan pada :

Hari : SENIN

Tanggal : 13/09/16

Perlu adanya perbaikan pada Tugas Akhir untuk :

Saudara : SIMUEL

NIM : 97-1664

Perbaikan tersebut meliputi :

1. Variabel (Proses)

2. Proses Analisa

3. Gbrn berkaitan Budaya & Space

4. Kerangka Pemikiran

Dosen Penguji

